

BEKELUMIT
BEJARAH
PENDIDIKAN
ISLAM
DI INDONESIA

Nahrianyah, dkk.

IAIN Antasari Press
2014

ISBN 978-979-3377-78-0

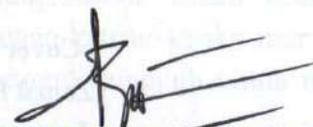


9 789793 377780

KATA PENGANTAR

DI MAJLIS MAHAKOMISI BARAU TIMUR
SAHRIANSYAH, DKK

**SEKELUMIT SEJARAH PENDIDIKAN
ISLAM DI INDONESIA**


SYAIFUL BAHRI DJAMARAH
NIP. 150 269 876

IAIN Antasari Press

2013

SEKELUMIT SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM DI
INDONESIA

Penulis

Sahriansyah, Mila Hasanah, ZainapHartati, Asikin Nor,

Hamdan HM, Hasni Nor, Hilmi Mizani, Raihanah,

Siti Aisyah, Syaiful Bahri Djamarah, danTarwilah

Cover

Zainal F

Layout

Saridatun R

Penerbit

IAIN Antasari Press

Jl. A.Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235 Banjarmasin,

telp (0511) 3256980

Cetakan I : September 2013

Pencetak

Aswaja Pressindo

vi + 250 halaman, 15.5 x 23 cm

ISBN: 978-979-3377-78-0

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Pujisyukur kami panjatkankehadirat Allah, atasrahmat, inayahdanhidayah yang diberikan-Nya, kami dapatmenyelesaikanbukuini.Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad , keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Buku ini berasal dari diskusi mata kuliah Pendidikan Islam Nusantara di Program S3 Pemikiran Pendidikan Islam Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin. Karena buku ini merupakan hasil dari makalah-makalah yang kami tulis masing-masing sehingga pemikiran masih belum utuh dan kadang belum menyambung menjadi benang merah. Itulah kekurangan dari buku ini. Namun begitu, kawan-kawan ketika menulis makalah ini telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk menghasilkan tulisan yang terbaik.

Sudah barang tentu, kami tidak dapat menyelesaikan buku ini tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala hormat, kami mengucapkan terima kasih kepada bapak Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag., selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Islam Nusantara yang selalu memberikan bimbingan dan arahan, baik secara teoritis dan praktis selama tulisanbuku ini. Di samping itu, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Penerbit IAIN Antasari Press yang telah bersedia menerbitkan buku ini dan Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag. Selaku Direktur Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin dan seluruh staf Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin.

Atas segala bantuan yang diberikan, kami merasa tidak mampu membalas apa-apa kecuali hanya berharap semoga amal baik mereka mendapat balasan pahala di sisi Allah. Amien.

Banjarmasin, September 2013

An. Penulis,

Sahriansyah, dkk.,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ► ii

DAFTAR ISI ► iii

BAB I Pendidikan Islam Masa Kesultanan Banten ► 1
ZainapHartati

BAB II Pendidikan Islam Masa Kerajaan Banjar ► 13
Mila Hasanah

BAB III Pendidikan di Bawah Organisasi Muhammadiyah ► 35
Sahriansyah

BAB IV Pendidikan Pesantren (Kebijakan dan Sistem Pesantren) ► 51
Raihanah

BAB V Pendidikan Madrasah (Kebijakandan Sistem Madrasah di Indonesia) ► 77
HilmiMizani

BAB VI Pendidikan Islam pada Masa Penjajahan (Penjajahan Belanda dan Jepang) ► 95
H. Hamdan

BAB VII Pendidikan Islam di Masa Orde Lama (Sebuah Refleksi Historis tentang Dinamika, Kebijakan, dan Tokoh) ► 119
Syaiful Bahri Djamarah

BAB VIII Pendidikan Islam di Masa Orde Baru (1966-1998) ► 135
Tarwilah

- BAB IX** Pendidikan Islam di Masa Reformasi ► 157
Siti Aisyah
- BAB X** Pendidikan Islam Di bawah Organisasi al-Washliyah dan Jami'atul Khair ► 205
Hasni Noor
- BAB XI** Pendidikan Sekolah (Kebijakan dan Sistem Persekolahan) ► 229
Asikin Nor
- RIWAYAT PENULIS ► 248**

BAB I

Pendidikan Islam masa Kesultanan Banten

Oleh: Zainap Hartati

A. Pendahuluan

Banten merupakan wilayah Jawa Barat, dikisahkan bahwa proses perluasan Islam di Jawa melalui gerbang Jawa Barat, melalui jalur pelayaran atau perniagaan, pedagang Islam merangkap sebagai Da'i¹. Masa awal, masyarakat Banten dipengaruhi oleh beberapa kerajaan yang membawa keyakinan Hindu-Budha (yakni kerajaan Tarumanegara, Sriwijaya dan Kerajaan Sunda).

Sebelum kedatangan Islam, Banten sudah menjadi kota yang berarti, seperti pusat perdagangan (lada) maju pesat, secara geografis Banten merupakan kota pelabuhan yang penting dan perekonomian yang strategis dalam penguasaan Selat Sunda. Urat nadi perdagangan dan pelayaran melalui lautan Indonesia bagian Selatan dan Barat Sumatera. Banten maju pesat semenjak Malaka (kerajaan yang menguasainya) di kuasai Portugis.²

Terbentuknya kerajaan Banten merupakan proses klimaks penyebaran Islam secara politis, sebagai bagian dari penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itu, sudah bisa diduga bahwa berdirinya kerajaan Banten adalah berdirinya kerajaan Islam, perkembangan selanjutnya merupakan suatu kesultanan.³ Sebagai kerajaan Islam, tatanan politik dan kemasyarakatan tentu dibangun atas landasan ajaran Islam, tetapi karena baru pada tahapan penyebaran

¹Ahmad Mansur Suryanegara, *Menemukan Sejarah, Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, (Bandung, Mizan, 1998), h. 97.

²Sartono Kartodirjo, *Pemberontakan di Banten 1888*, (Jakarta, Pustaka Jaya, 1984), h. 54.

³Hal ini diawali dengan kedatangan pasukan kerajaan Demak yang bertujuan untuk memperluas wilayah juga sekaligus penyebaran dakwah Islam. Banten merupakan kerajaan Islam yang mulai berkembang pada abad ke-16, Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia III*, edisi ke 4, (Jakarta, Balai Pustaka, 1993), h. 64.

Islam; apalagi corak penyebarannya dominan mistis, tentu identifikasi kerajaan Islam penuh adalah belum dapat dilaksanakan.

Kesultanan Banten, merupakan kerajaan Islam di ujung Jawa Barat, pendirinya adalah Sunan Gunung Jati,⁴ setelah berhasil merebut kota pelabuhan dari tangan Bupati Sunda yang menjadi penguasa kota itu dengan bantuan laskar Demak (1524).⁵ Sunan Gunung Jati⁶ dari Cirebon, meletakkan dasar bagi pengembangan agama Islam dan kerajaan Islam serta bagi perdagangan orang-orang Islam di sana.

Penyebaran agama Islam di wilayah Jawa Barat, Sunan Gunung Jati menduduki pelabuhan Sunda yang sudah tua, kira-kira tahun 1527, ia memperluas kekuasaan atas kota-kota di pelabuhan Jawa Barat termasuk Pajajaran, sekembali ke Cirebon, kekuasaan atas

⁴ Bergelar juga Syarif Hidayatullah, salah seorang wali sanga, dimana penyebaran Islam di wilayah Jawa Barat hanya ditanganinya seorang saja. Penentuan tugas hanya oleh seorang wali untuk Jawa Barat, tentu berdasarkan pertimbangan yang rasional pula. Adapun pemilihan kota Cirebon sebagai pusat aktivitas dakwah Sunan Gunung Jati, tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan jalan perdagangan rempah-rempah sebagai komoditi yang berasal dari Indonesia Timur, dan Cirebon merupakan pintu perdagangan yang mengarah ke Jawa Tengah dan Indonesia Timur, atau pun ke Indonesia barat, oleh karena itu, pemilihan Cirebon dengan pertimbangan sosial politik dan ekonomi saat itu, mempunyai nilai geostategis, geopolitik dan geoekonomi yang menentukan keberhasilan penyebaran Islam selanjutnya. Lih. Ahmad Mansyur Suryananta, *Menemukan Sejarah, Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, (Bandung, Mizan, 18998), h. 106. Lihat juga Khozin, *Jejak-jejak Pendidikan Islam di Indonesia, Rekonstruksi Sejarah Untuk Aksi*, (Malang, UMM Press, 2006), h. 53.

⁵ Penjelasan Islam masuk di Banten sekitar 1524-1525 dan pengambil alih kekuasaan pertama adalah Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah, tetapi sebagai raja awal adalah Maulana Hasanuddin. Ayu Sutarto, dkk, *Sejarah Kebudayaan Indonesia, Sistem Sosial*, (Jakarta, Rajawali Press, 2009), h. 140.

⁶ Sunan Gunung Jati merupakan ulama dari pasai, melaksanakan ibadah haji tahun 1522-1523, suatu pengalaman yang masih langka dikalangan Muslim nusantara, sekembali dari Mekkah 1524 dia tinggal Demak. Nor Huda, *Islam Nusantara, Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, (Jogjakarta, Ar-Ruzz Media Group, 2007), h.71. Nurullah juga dianggap sebagai pendiri kerajaan Banten sekitar tahun 1525, Sartono Kartodirjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru : Dari Emporium Sampai Imperium, jilid 1* (Jakarta, PT. Gramedia, 1993), h. 33

Banten di serahkan kepada putranya, Hasanuddin tahun 1552.⁷ Tahun 1552, Banten dibawah kekuasaan Maulana Hasanuddin menjadi raja pertama yang berdaulat di Banten, dia bergelar Panembahan Surosoan,⁸ konon kekuasaannya meliputi daerah Banten, Jakarta sampai Kerawang, Lampung, Indrapura sampai Solebar.⁹

Kerajaan Banten (1552-1813) telah diperintah oleh beberapa orang raja/sultan yaitu :

1. Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sabakingking (1552-1570)
2. Maulana Yusuf atau Pangeran Pasarean (1570-1580)
3. Maulana Muhammad atau Pangeran Sedangrana (1580-1596)
4. Sultan Abu al-Mafakih Mahmud Abdulkadir atau Pangeran Ratu Ing Banten (1596 – 1647).
5. Sultan Abu al- Ma'ali Ahmad (1645-1651)
6. Sultan Ageng Tirtayasa atau Sultan Abu al-Fath Abdul Fattah (1651-1672)
7. Sultan Haji atau Sultan Abu Nashar Abdul Qahar (1683 - 1687)
8. Sultan Abu Fadhl Muhammad Yahya (1687 - 1690)
9. Sultan Abul Mahasin Muhammad Zainul Abidin (1690 - 1733)
10. Sultan Abul Fathi Muhammad Syifa Zainul Arifin (1733 - 1750)
11. Sultan Syarifuddin Artu Wakil (1750 - 1752)
12. Sultan Muhammad Wasi' Zainul 'Alimin (1752-1753)
13. Sultan Arif Zainul Asyiqin al-Qadiri (1753 - 1773)
14. Sultan Abul Mafakhir Muhammad Aliuddin I (1773 - 1799)
15. Sultan Abul Fath Muhammad Muhyiddin Zainussalihin (1799 - 1801)

⁷ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002) h. 218.

⁸ Banten yang ibukotanya dinamai Surosoan tumbuh menjadi pusat kerajaan Muslim sejak tahun 1526 Masehi, di kota ini didirikan keraton, masjid agung, pasar, pelabuhan, perkampungan-perkampungan orang-orang asing seperti Pakojan. Lih. Uka Tjandrasamita, *Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-Kota Muslim di Indonesia, dari abad XIII samapi XVIII Masehi*, (Jakarta Pusat, Menara Kudus, 2000), h. 39

⁹⁹ Ayu Sutarto, dkk, *Sejarah...* h. 142.

16. Sultan Muhammad Ishaq Zainul Muttaqin (1801-1802)
17. Sultan wakil Pangeran Natawijaya (1801-1803)
18. Sultan Aqiluddin / Sultan Aliuddin II (1803 - 1808)
19. Sultan Wakil Pangeran Suramanggala (1808-1809)
20. Sultan Muhammad Syarifuddin (1809 - 1813)
21. Sutan Muhammad Rafiuddin (1813-1820).

Kemajuan Banten selama dalam pemerintahan para raja/sultan tersebut, berbagai kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat di berbagai bidang, di bidang politik, ekonomi, sosial maupun bidang pendidikan Islam. Masa Kesultanan Banten merupakan pusat pendidikan dan penyebaran Islam yang penting di Nusantara pada abad ke-15 sampai abad ke-17.

C. Pendidikan Islam Masa Kesultanan Banten

Pelaksanaan dan perkembangan Pendidikan Islam pada masa kekuasaan kesultanan Banten sebagai berikut.

C.1. Tujuan Pendidikan Islam

Pendidikan Islam dimasa Kesultanan adalah mencetak muballiq/ulama yang kelak dapat menyebarkan atau mengajarkan ajaran Islam ke seluruh pelosok Nusantara terutama daerah yang dikuasai kesultanan Banten. Selain itu juga sebagai upaya menciptakan situasi masyarakat marhamah¹⁰.

Upaya mencetak muballiq/Ulama, hal ini nampak pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa yang memajukan kehidupan keagamaan, tidak sedikit ulama-ulama dari dunia Islam, baik dari Arab Saudi maupun dari India diterima baik oleh Sultan Ageng. Ulama membuka pengajian atas restu dan jaminan dari sultan, seperti Syekh Yusuf membuka pengajian kepada penduduk untuk menjadikan muballiq untuk menyebarkan ajaran-ajarannya.¹¹

¹⁰ TB. Ismetullah Al-Abbas, *Sejarah dan Obyek Spiritual Kota Banten*, (Jakarta, Sumber makmur, 1990), h. 15.

¹¹ Abdul Hamid, Syekh Yusuf, *Seorang Ulama Sufi dan Pejuang*, (Jakarta, Jaya Obor Indonesia, 1994), h. 97.

C.2. Tenaga pengajar / Pendidik

Pelaksana pendidikan Islam di masa kerajaan/kesultanan Banten adalah antara lain Syekh Yusuf al-Maqassari dan Syekh Nawawi al-Bantani (ulama sufi), Ki Ageng Karang (guru keturunan Arab), Kyai Dukuh bergelar Pangeran Kasunyatan, Syekh Faqih Nazmuddin, juga guru-guru yang berasal dari Aceh, Arab dan daerah lainnya,¹² demikian juga sultan berperan sebagai guru bagi masyarakatnya/rakyatnya.

Syekh Yusuf al-Makassari mendapat penghargaan yang tinggi dari kesultanan Banten dan menjadi "pendeta tinggi (hoofdpriest) yang paling berpengaruh di kesultanan Banten."¹³ Syekh Yusuf al-Makassari juga merupakan guru tarekat yang pertama yang aktif di Banten, ia dianggap sebagai mujaddid dan banyak menyusun buku-buku dalam bahasa Arab. Syekh Yusuf juga diangkat sebagai mufti (penasehat spiritual) Sultan Ageng Tirtayasa. Syekh Yusuf, sebagai ulama dalam sufi Indonesia yang pertama sekali menyebut tarekat dalam tulisannya.¹⁴ Al-Maqassari, gelar kehormatan "al-Taj al-Khalwati", "Mahkota Tarekat Khalwatiyah".¹⁵

Raja Banten cinta ilmu, dibuktikan dengan gelar yang diberikan kepada penguasa-penguasa awal seperti : Sunan Gunung

¹² Pada masa kesultanan Sultan Ageng Tirtayasa, untuk membina menal para prajurit, didatangkan guru dari luar Banten. Lih. Hasan Muarif Ambary, *Kesultanan Banten 1525-1813 Masehi, dalam Prosiding Seminar Antar Bangsa, Kesultanan Melayu Nusantara, Sejarah dan Warisan, Memupuk Warisan dan Tradisi Bangsa Beraja*, (Bangi, Lembaga Muzium Negeri Pahang dan Inst. Alam & Tamadun Melayu, UKM, 2005), h. 505.

¹³ Syekh Yusuf al-makassari juga memainkan peranan utama dalam perjuangan masyarakat Banteng terhadap penetrasi kekuasaan Belanda ke banten. Lih. Azyumardi Azra, *Islam Nusantara : Jaringan Global dan Lokal*, (Bandung, Mizan, 2002, terj. Historical Islam : Indonesian Islam in Global and Local Perspectives), h. 103-104.

¹⁴ Sri Mulyani, *Tasawuf Nusantara*...h. 127.

¹⁵ Nor Huda, *Islam Nusantara, Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, (Jogjakarta, ar-Ruz Media, 2007), h. 294

Jati,¹⁶ Hasanuddin, Yusuf dan Muhammad bergelar Maulana, maulana biasanya digunakan untuk ulama yang memiliki pengetahuan yang luas walau khusus bagi ilmu Tasawuf, ini menunjukkan bahwa mereka melegitimasi diri sebagai kekuatan ilmu batin (ngelmu).¹⁷

Penguasa Banten memberi perhatian besar kepada keilmuan; menjalin hubungan dengan para ulama setempat/asing untuk memberikan pengajaran di Banten.¹⁸ Kondisi ini menjadikan Banten untuk pelaksanaan Pendidikan Islam cukup menonjol pada masa tersebut.

Sultan sebagai pemimpin negara juga menjadi imam shalat sebagaimana seperti shalat jum'at di Masjid Agung Banten.

C.3. Peserta didik

Pada masa kesultanan Banten yang menjadi peserta didik bukan hanya masyarakat yang berada di Banten, para kalangan istana/kesultanan, anak-anak raja/sultan tetapi juga masyarakat yang berada di luar wilayah Banten. Putra-putra raja sejak kecil mendapat pengajaran khusus di Istana dibawah bimbingan ulama.¹⁹

Pembelajaran dilingkungan istana/terbatas dilingkungan istana yaitu tarekat seperti kalangan prajurit dan putra mahkota.²⁰ Murid-

¹⁶ Sunan Gunung Jati merupakan salah satu wali sanga, aktivitas para wali dalam proses penyebaran Islam di Nusantara, antara lain karakteristiknya adalah: mengembangkan wilayah dan membuat lembaga kerajaan serta sekaligus mengembangkan Islam baik di Cirebon maupun Banten, Sunan Gunung Jati juga sebagai pemimpin agama sekaligus sebagai seorang pemimpin politik (raja). Lih. Adeng Mukhtar Gazali, *Jurnal Lektur, Peranan Sunan Gunung Jati dalam Penyebaran Islam di Jawa Barat*, (Jakarta, Puslitbang Kemenang RI, 2009), h. 138.

¹⁷ Soekama Karya, dkk, *Ensiklopedi Mini, Sejarah dan Kebudayaan Islam*, edisi pertama, (Jakarta, Logos, 1998), h. 172.

¹⁸ Soekama Karya, dkk, *Ensiklopedi Mini...h. 173*

¹⁹ Soekama Karya, dkk, *Ensiklopedi Mini...h. 174*.

²⁰ Sri Mulyati, *Tasawuf Nusantara, Rangkaian Mutiara Sufi terkenal*, (Jakarta, Kencana, 2006), h. 127. Pelaksanaan pembelajaran ini pada masa pemerintahan Sultan Haji, yang diajarkan oleh Syekh Yusuf al-Makassari.

murid yang datang dari luar wilayah Jawa berguru ke Banten antara lain karena adanya ulama yang berpengaruh besar, yaitu Syekh Yusuf al-Makassari. Banten juga memunculkan ulama-ulama yang cukup disegani.

C. 4.Materi Pembelajaran

Sultan Maulana Muhammad adalah seorang sultan yang amat shaleh, dimana untuk kepentingan penyebaran agama Islam, ia banyak menulis/menyusun kitab-kitab agama/keagamaan.²¹

Materi pembelajaran yang diberikan antara lain adalah Fikih, tauhid, Tasawuf dan Nahwu Syaraf.

Kyai Dukuh adalah ulama yang terkenal mengajarkan ilmu-ilmunya dan pendidikan yang diajarkan adalah pendidikan ilmu fikih dan tasawuf, dan santri yang paling cerdas pada waktu itu adalah Faqih Nazamuddin, beliau ini yang akan menggantikan Kyai Dukuh, kyai Dukuh juga dibantu oleh ulama dari Madinah yang bernama Syekh Muhammad Madani Sah.²²

C.5. Metode Pembelajaran

Sistem pengajaran dengan menghafal matan-matan, meskipun murid-murid tidak mengerti maksudnya, seperti menghafal Matan al Jurumiyah, matan Tahrib, Matan Al-fiyah, dan sebagainya, setelah murid-murid menghafal matan-matan itu barulah mereka mempelajari syariat, serta khasiyahnya. Anak-anak yang berkumpul dilanggar maju satu persatu menghadap guru, sedangkan yang lain menunggu gilirannya.²³

Metode diskusi juga diterapkan pada masa kesultanan Banten, hal ini dari kegiatan diskusi-diskusi keagamaan yang dilakukan oleh

²¹ Hasan Muarif Ambary, *Kesultanan Banten...h. 505*.

²² Harun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam, Cet. ke 2*, (Jakarta, Logos, 2001), h. 56

²³ Depdikbud, *Sejarah Daerah Jawa Barat*, (Jakarta, CV. Dwi Jaya Karya, 1994), h. 118.

para ulama, maupun ulama dengan sultan, seperti di gedung Tiaman.

C.6. Lembaga Pembelajaran (prasarana)

Pendidikan Islam dilaksanakan di dalam istana, masjid maupun gedung yang berdekatan dengan masjid (disebut juga dengan pesantren). Di lingkungan istana terbatas hanya pada putra para raja, juga kalangan prajurit. Pembelajaran untuk para putra raja dapat juga dilaksanakan di luar istana.

Masjid pada masa kesultana Banten selain sebagai tempat ibadah shalat juga sebagai aktivitas pendidikan, adalah Masjid Agung Banten dan Masjid Kasunyatan, juga Masjid Pecinan Tinggi. Awal mula pengkajian ajaran-ajaran Islam di Banten pada saat itu para ulama mengambil masjid sebagai pusat lembaga yang representatif, perkembangan selanjutnya masjid dikembalikan sebagaimana fungsinya, yaitu tempat shalat dan pesantren sebagai tempat berlangsungnya belajar-mengajar.

Masjid Agung Banten dibangun pada masa Sultan Maulana Yusuf, disamping masjid ada gedung yang dibangun oleh seorang muslim Belanda : Hendrick Lucas Cardeel yang kemudian bergelar Pangeran Wiraguna, gedung ini tempat berdiskusi memperbincangkan masalah-masalah agama Islam pada waktu itu dinamai "Tiaman",²⁴ masa sekarang teklah dijadikan museum sebagai tempat menyimpan benda-benda purbakala.

Wilayah Kesunyatan/desa Kesunyatan terdapat Masjid Kasunyatan, yang mengajarkan adalah Kyai Dukuh bergelar Pangeran Kasunyatan, guru Sultan Maulana Muhammad (sultan Banten ke-2). Selain itu disamping masjid Kasunyatan terdapat bangunan khusus tempat berkumpul alim ulama dari seluruh pelosok tanah air untuk bertukar pikiran dari saling menimba ilmu pengetahuan, hingga boleh dikatakan Perguruan Tinggi Islam pertama di Indonesia²⁵.

Pendidikan Islam pada masa kesultanan Banten berkembang maju pesat, hal ini dibuktikan dengan banyaknya peserta didik yang belajar ke Banten, bukan hanya dari warga setempat namun juga dari wilayah di luar Banten, demikian juga tenaga pengajar yang didatangkan juga dari luar Indonesia seperti dari Arab/Madinah. Kondisi ini menunjukkan akan kecintaan sultan Banten terhadap ilmu pengetahuan Islam baik bagi para putra mahkota, kalangan prajurit juga bagi masyarakat Indonesia.

Masyarakat dan budaya pada masa kesultanan Banten yang agamis mencapai puncak perkembangannya pada abad ke 16-17 Masehi, dimana sosialisasi Islam mencapai puncak pertumbuhannya namun pada abad ke 18-19 Masehi mulai diguncang oleh peperangan, bencana, wabah, pemberontakan dan penindasan berkepanjangan.

Abad ke 17 Banten adalah kerajaan Islam di Nusantara yang paling ketat melaksanakan hukum Islam sebagai hukum negara, seperti: hukuman terhadap pencuri dengan memotong tangan kanan, kaki kiri dan seterusnya, berturut-turut bagi pencurian senilai 1 gram emas (pada masa pemerintahan sultan Ageng Tirtayasa).²⁶

Abad ke-17, mulailah kerajaan Islam mendapat gangguan dari pedagang asing yang ingin memonopoli perdagangan dan seterusnya ingin menguasai kerajaan-kerajaan tersebut, termasuk kesultanan Banten, hal ini dialami oleh Sultan Ageng Tirtayasa,²⁷ politik Sultan Ageng Tirtayasa berkecenderungan anti-kompeni.²⁸

Pada awal abad ke 19 kesultanan Banten telah dihapuskan dan digantikan dengan kerisidenan Serang, wilayah Banten menjadi kawasan tanpa adikuasa pribumi. Kemunduran kesultanan Banten sebagai salah satu kerajaan Islam di wilayah Jawa, tak terlepas dari campur tangan Belanda dengan politik adu domba, sehingga terjadi

²⁶ Helmiati, *Dinamika Islam Asia Tenggara*, (Pekan Baru-Riau, Suska Press, 2008), h.60.

²⁷ Najamuddin, *Perjalanan Pendidikan di Tanah Air (tahun 1800-1945)*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2005), h. 27.

²⁸ Sartono Kartodirjo, *Pengantar Sejarah...* h. 205.

²⁴ Abdul Bagir Zein, *Masjid-masjid Bersejarah di Indonesia*, (Jakarta, Gema Insani, 1999), h. 165.

²⁵ Abdul Bagir Zein, *Masjid-masjid...* h. 165-166.

perang saudara. Pada tahun 1813 kesultanan Banten dihapus oleh Belanda dan wilayah Banten dipecah menjadi kabupaten-kabupaten kecil.

D. Penutup

Pendidikan Islam pada masa kesultanan Banten mengalami kemajuan yang cukup pesat, peserta didik dan tenaga pengajar bukan hanya dari wilayah Banten tetapi juga berasal dari luar Banten, bahkan tenaga pengajar ada yang berasal dari Arab/Madinah, hal ini menunjukkan pada masa tersebut hubungan internasional bukan hanya dalam bidang perdagangan namun juga dalam bidang pendidikan Islam. Kesultanan Banten merupakan kesultanan yang Islami.

Sultan bukan hanya sebatas pemimpin politik, juga berperan sebagai pemimpin agama, dari beberapa sultan ada yang mengarang buku-buku agama dan mengajarkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrohah, Harun. *Sejarah Pendidikan Islam, Cet. ke 2*. Jakarta: Logos, 2001.
- Al-Abbas, TB. Ismetullah. *Sejarah dan Obyek Spiritual Kota Banten*. Jakarta: Sumber makmur, 1990.
- Azra, Azyumardi. *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*, terj. Historical Islam : Indonesian Islam in Global and Local Perspectives. Bandung: Mizan, 2002.
- Ambary, Hasan Muarif. *Kesultanan Banten 1525-1813 Masehi, dalam Prosiding Seminar Antar Bangsa, Kesultanan Melayu Nusantara, Sejarah dan Warisan, Memupuk Warisan dan Tradisi Bangsa Beraja*. Bangi: Lembaga Muzium Negeri Pahang dan Inst. Alam & Tamadun Melayu, UKM, 2005.
- Djoened, Marwati Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia III, edisi ke 4*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Gazali, Adeng Mukhtari. *Jurnal Lektur, Peranan Sunan Gunung Jati dalam Penyebaran Islam di Jawa Barat*. Jakarta: Puslitbang Kemenang RI, 2009.

Huda, Nor. *Islam Nusantara, Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2007.

Hamid, Abdul. *Syekh Yusuf, Seorang Ulama Sufi dan Pejuang*. Jakarta: Jaya Obor Indonesia, 1994.

Helmiati. *Dinamika Islam Asia Tenggara*. Pekanbaru-Riau: Suska Press, 2008.

Kartodirjo, Sartono. *Pemberontakan di Banten 1888*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.

_____, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Dari Emporium Sampai Imperium, jilid 1*, Jakarta: PT. Gramedia, 1993.

Khazin. *Jejak-jejak Pendidikan Islam di Indonesia, Rekonstruksi Sejarah Untuk Aksi*. Malang: UMM Press, 2006.

Karya, Soekama, dkk, *Ensiklopedi Mini, Sejarah dan Kebudayaan Islam, edisi pertama*. Jakarta: Logos, 1998.

Mulyati, Sri. *Tasawuf Nusantara, Rangkaian Mutiara Sufi Terkenal*. Jakarta: Kencana, 2006.

Najamuddin. *Perjalanan Pendidikan di Tanah Air (tahun 1800-1945)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Suryananta, Ahmad Mansyur. *Menemukan Sejarah Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1988.

Sutarto, Ayu. dkk, *Sejarah Kebudayaan Indonesia, Sistem Sosial*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Tjandrasasmitha, Uka. *Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-Kota Muslim di Indonesia Dari abad XIII sampai XVIII Masehi*. Jakarta Pusat: Menara Kudus, 2000.

Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.

Zein, Abdul Bagir, *Masjid-masjid Bersejarah di Indonesia*, Jakarta, Gema Insani, 1999.

BAB II

PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KERAJAAN BANJAR

(Abad ke-18)

Oleh: Mila Hasanah

I. PENDAHULUAN

Sejarah pendidikan Islam pada abad ke-18 relatif masih sangat sedikit dikaji, kebanyakan catatan sejarah memberikan perhatian kepada sejarah sosial-politik di wilayah kerajaan Banjar. Ada beberapa sejarawan yang menyatakan abad ke-18 masih dalam abad kemunduran peradaban Islam sebagai imbas yang berkelanjutan dari kemunduran abad Islam ke-13, tatkala Baghdad (pusat peradaban paling megah pada waktu itu) luluh-lantak diserang tentara Mongol pimpinan Hulago Khan. Tapi Azyumardi Azra membantah keras pendapat di atas, dan sebaliknya berpendapat bahwa abad ke-18 justru termasuk sebagai salah satu masa paling dinamis dalam sejarah religio-intelektual umat Islam.¹

Terlepas dari pro dan kontra tentang pengaruh perkembangan Islam di dunia internasional terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia dan pendidikan Islam di Kalimantan Selatan khususnya, ada satu pendapat yang menarik yaitu sejarah pendidikan Islam di Kalimantan Selatan bisa digambarkan dalam dua gelombang perkembangan. Gelombang pertama yang terjadi dalam kurun waktu abad ke-17-18 yang masih bersifat sederhana, menandai awal perkembangan pendidikan Islam, sementara gelombang kedua menandai perkembangan berikutnya pendidikan Islam yang terjadi dalam kurun waktu abad ke-19-20 yang sudah mengenal sistem madrasah.²

¹ Azyumardi Azra, *Interaksi dan Akomodasi Islam dengan Budaya Melayu Kalimantan*, dalam Aswab Mahasin (dkk), "Ruh Islam dalam Budaya Bangsa; Aneka Budaya Nusantara, (Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1996), hlm.188.

² Emroni, *Potret Perkembangan Pendidikan Islam di Kalsel*, *Jurnal Kebudayaan Kandil*, Edisi 3 tahun I, Desember 2003, (Banjarmasin:LK-3, 2003), hlm.80.

Tetapi, berbicara tentang penyelenggaraan pendidikan Islam di wilayah kerajaan Banjar tidak bisa dilepaskan masuknya agama Islam ke daerah ini. Pengidentifikasi geneologi penyelenggaraan pendidikan Islam di wilayah kerajaan Banjar ini didasarkan atas asumsi yang menunjukkan bahwa masyarakat di daerah ini secara kultural bersifat Islami, disamping belum ada bukti-bukti historis yang bisa menjelaskan bahwa pendidikan Islam telah ada jauh sebelum Islam masuk ke daerah ini.³

Ada beberapa asumsi tentang kapan Islam masuk ke Kalimantan Selatan, *pertama*; Islam telah masuk ke daerah ini jauh sebelum berdirinya kerajaan Banjar, *kedua*; sebagaimana yang diakui oleh banyak para ahli, momentum intensitas penyebaran Islam di daerah ini terjadi pada abad ke-16 ketika Sultan Demak membantu Pangeran Samudera melawan Pangeran Tumenggung, dalam perebutan kekuasaan. Oleh karena itu penulis menganggap sangat penting dalam makalah ini menelaah kembali kondisi sosial politik kerajaan Banjar (1526-1905), berupa sejarah berdirinya kerajaan Banjar dan sekilas kondisi sosial politik dan budaya kerajaan Banjar pada abad ke-18, kemudian baru ditelusuri pendidikan Islam di kerajaan Banjar terutama pada abad ke-18, yaitu antara tahun 1700-1800 M.

II PEMBAHASAN

A. Kondisi Sosial Politik Kerajaan Banjar (1526-1905 M)

1. Sejarah Berdirinya Kerajaan Banjar

Kerajaan Banjar merupakan kelanjutan dari kerajaan Daha yang beragama Hindu.⁴ Peristiwanya mulai ketika terjadi pertentangan

³ Irfan Noor, *Developmentalisme dan Redupnya Orientasi Pendidikan Lokal*, Jurnal Kebudayaan Kandil, Edisi 3 tahun I, Desember 2003, (Banjarmasin:LK-3, 2003), hlm. 4.

⁴ Menurut Kulke, Abad ke-14-ke-16, telah berdiri tiga kerajaan, pertama; Negara Suko disebut juga Kerajaan Negara Nan Sarunai, yang didirikan oleh orang Dayak Maanyan, sekitar aliran sungai Tabalong, kemudian pada abad ke-16 diserang Majapahit. Kedua; negara awal yaitu Kerajaan Dipa, yang berada di desa Ngaju, Amuntai dan Kerajaan Daha di Nagara. Ketiga; Negara kerajaan, yaitu Kerajaan

dalam keluarga istana, antara pangeran Samudera sebagai pewaris sah kerajaan Daha, dengan pamannya Pangeran Tumenggung. Seperti dikisahkan dalam Hikayat Banjar, ketika Raja Sukarama merasa sudah hampir tiba ajalnya, ia berwasiat, agar yang menggantikannya nanti adalah cucunya Raden Samudera.⁵ Tentu saja keempat orang putranya tidak menerima sikap ayahnya itu, lebih-lebih Pangeran Tumenggung yang sangat berambisi. Setelah Sukarama wafat, jabatan raja dipegang oleh anak tertua, Pangeran Mangkubumi. Waktu itu, Pangeran Samudera baru berumur 7 tahun. Pangeran Mangkubumi tidak terlalu lama berkuasa. Ia terbunuh oleh seorang pegawai istana yang berhasil dihasut Pangeran Tumenggung. Dengan meninggalnya Pangeran Mangkubumi, maka Pangeran Tumenggunglah yang tampil menjadi raja Daha.

Pada saat itu, Pangeran Samudera berkelana ke wilayah Muara. Ia kemudian diasuh oleh seorang Patih, bernama Patih Masih. Atas bantuannya, Pangeran Samudera dapat menghimpun kekuatan perlawanan. Dalam serangan pertamanya, Pangeran Samudera berhasil menguasai Muara Bahan, sebuah pelabuhan strategis yang sering dikunjungi para pedagang luar, seperti dari pesisir utara Jawa, Gujarat, dan Malaka.⁶

Peperangan terus berlangsung secara seimbang. Patih Masih mengusulkan kepada Pangeran Samudera untuk meminta bantuan kepada kerajaan Demak. Sultan Demak bersedia membantu asal Pangeran Samudera nanti masuk Islam.⁷ Sultan Demak kemudian

Banjar. Lihat: Marwati Djoened Poesponegoro, *Sejarah Nasional Indonesia III*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 23.

⁵ J. J. Ras, *Hikayat Banjar: A Study in Malay Historiography*, (The Hague Martinus Nijhoff-KTL V, 1968), hlm. 376-398.

⁶ M. Idwar Saleh, dkk., *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*, (Jakarta: Departemen P&K, 1978), hlm. 20-21.

⁷ Taufik Abdullah, (ed.), *Sejarah Ummat Islam Indonesia*, (Jakarta: MUI, 1991), hlm. 87.

mengirim bantuan seribu orang tentara beserta seorang penghulu bernama Khatib Dayan untuk mengislamkan orang Banjar.⁸

Dalam peperangan itu, Pangeran Samudera memperoleh kemenangan dan sesuai dengan janjinya, ia beserta seluruh kerabat keraton dan penduduk Banjar menyatakan diri masuk Islam. Pangeran Samudera sendiri, setelah masuk Islam, diberi nama Sultan Suryanullah atau Suriansyah, yang dinobatkan sebagai raja pertama dalam kerajaan Islam Banjar.

Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 1526 M dan yang menjadi Sultan Demak ketika itu adalah Trenggono, sultan ketiga yang berkuasa pada tahun 1521-1546 M. Ketika Suryanullah naik tahta, beberapa daerah sekitarnya sudah mengakui kekuasaannya, yakni daerah Sambas, Batanglawai, Sukadana, Kotawaringin, Sampit, Medawi, dan Sambangan.⁹ Sejak itulah Islam menjadi agama resmi Kerajaan dan masyarakat Banjar menggantikan agama Hindu.

Setelah itu, Sultan Suryanullah diganti oleh putra tertuanya yang bergelar Sultan Rahmatullah. Raja-raja Banjar berikutnya adalah Sultan Hidayatullah (putera Sultan Rahmatullah) dan Marhum Panambahan yang dikenal dengan Sultan Musta'inullah. Pada masa Marhum Panambahan, ibu kota kerajaan dipindahkan beberapa kali. Pertama ke Amuntai, kemudian ke Tambangan dan Batang Banju, dan akhirnya ke Amuntai kembali.¹⁰ Perpindahan ibu kota kerajaan itu terjadi akibat datangnya pihak Belanda ke Banjar dan menimbulkan huru-hara. Juga dipicu persoalan intern, seperti perebutan kekuasaan di kalangan pewaris kerajaan Banjar.

Kerajaan Banjar berdiri tanggal 24 September 1526. Dan raja di kerajaan Banjar sejak berdiri 1526-1905 M tercatat berjumlah sebanyak 19 orang raja, yaitu: [1] Pangeran Samudera/Sultan

Suriansyah (1526-1545), [2] Sultan Rahmatullah (1545-1570), [3] Sultan Hidayatullah (1570-1595), [4] Sultan Mustain Billah/Marhum Panambahan (1595-1620), [5] Ratu Agung bin Marhum/Sultan Inayatullah (1620-1637), [6] Ratu Anum/Sultan Saidullah (1637-1642), [7] Adipati Halid, wali Sultan Aminullah (1642-1660), [8] Sultan Aminullah Bagus Kesuma (1660-1663), [9] Pangeran Adipati Anum/Sultan Agung (1663-1667), [10] Amirullah Bagus Kesuma (1680-1700), [11] Sultan Hamidullah gelar Sultan Kuning (1700-1734), [12] Pangeran Tamjid bin Amirullah Kesuma bergelar Sultan Tamjidillah (1734-1759), [13] Pangeran Muhammad Aliuddin Aminullah bin Sultan Kuning (1759-1761), [14] Pangeran Nata Dilaga (1761-1801), [15] Sultan Suleman Almutamidullah bin Sultan Tahmidullah II (1801-1925), [16] Sultan Adam Al-Wasik billah bin Sultan Suleman (1825-1857), [17] Pangeran Tamjidillah (1857-1859), [18] Pangeran Antasari (14 Maret 1862), [19] Sultan Muhammad Seman (1862-1905).¹¹

Adapun kondisi sosial dan politik di kerajaan Banjar, dengan masuk Islamnya raja, perkembangan Islam selanjutnya tidak begitu sulit karena raja menunjangnya dengan fasilitas dan kemudahan-kemudahan lainnya yang hasilnya membawa kepada kehidupan masyarakat Banjar yang benar-benar bersendikan Islam. Sekalipun Islam yang masuk ke Banjar dipengaruhi oleh paham tasawuf dan telah tumbuh subur adat istiadat lama yang sifatnya animisme, tetapi kehidupan masyarakat Banjar baik berupa kebudayaan maupun adat istiadatnya telah banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Secara konkret, kehidupan keagamaan di kerajaan Banjar ini diwujudkan dengan adanya mufti dan qadhi atas jasa Muhammad Arsyad Al-Banjari yang ahli dalam bidang fiqh dan tasawuf.¹²

¹¹ Syarifuddin, dkk., *Sejarah Banjar*, (Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan, 2007), hlm. 162.

¹² Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam, Melacak Akar-Akar Sejarah, Sosial, Politik, dan Budaya Umat Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2004), h. 294

⁸ Mukhyar Sani, *Dakwah Islam dan Perkembangannya di Kalimantan Selatan*, Jurnal Alhadharah, Vol. 2, No. 3, Januari-Juni, 2003, hlm. 9.

⁹ Taufik Abdullah (ed.), *op cit*, hlm. 88.

¹⁰ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011), hlm. 221.

Di kerajaan ini, telah berhasil pengodifikasian hukum-hukum yang sepenuhnya berorientasi pada hukum Islam yang dinamakan Undang-Undang Sultan Adam. Dalam undang-undang ini timbul kesan bahwa kedudukan mufti mirip dengan Mahkamah Agung sekarang yang bertugas mengontrol dan kalau perlu berfungsi sebagai lembaga untuk naik banding dari mahkamah biasa. Tugas qadhi di samping menangani masalah hukum privat, juga menyelesaikan perkara-perkara pidana (*had*). Tercatat dalam sejarah Banjar, di berlakukannya hukum bunuh bagi orang *murtad*, hukum potong tangan untuk pencuri dan mendera bagi yang kedapatan berbuat zina. Jadi kedudukan sultan di Banjar bukan hanya sekedar pemegang kekuasaan dalam kerajaan, tetapi lebih jauh diakui sebagai *ulil amri* kaum Muslimin di seluruh kerajaan Banjar.

2. Sekilas Kerajaan Banjar Abad ke-18 (tahun 1700-1800 M)

Raja di kerajaan Banjar sejak berdiri tahun 1526-1905 M berjumlah sebanyak 19 orang, sedangkan yang memerintah pada abad ke-18, ada empat orang raja, yaitu:

Raja di Kerajaan Banjar pada Abad ke-18 (1700-1800)

No.	Masa Berkuasa	Nama Raja
1.	1700-1734 M	Sultan Hamidullah gelar Sultan Kuning
2.	1734-1759 M	Pangeran Tamjid bin Amirullah Bagus Kesuma bergelar Sultan Tamjidillah menggantikan Pangeran Muhammad Aminullah anak Sultan Kuning yang belum dewasa.
3.	1759-1761 M	Pangeran Muhammad Aliuddin Aminullah bin Sultan Kuning
4.	1761-1801 M	Pangeran Nata Dilaga sebagai wali putera Sultan Muhammad Aliuddin yang belum dewasa tetapi memegang pemerintahan dan bergelar Sultan Tahmidullah

Sumber: Buku *Sejarah Banjar*, oleh Syarifuddin, dkk.

Abad ke-18 dimulai dengan masa pemerintahan Sultan Hamidullah yang bergelar Sultan Kuning (1700-1734 M). Pemerintahan pada masa sultan tersebut dikenal dengan pemerintahan yang paling stabil, tidak ada pertentangan dan perebutan kekuasaan, tidak ada campur tangan bangsa asing baik politik maupun ekonomi, sehingga boleh dikatakan kesultanan Banjarmasin mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan ini. Rupanya, kepemimpinan Sultan Kuning yang cukup bijaksana, dan "*kepekaannya*" terhadap segala situasi yang dihadapinya, menyebabkan lawan-lawan politiknya tidak berani dan segan melakukan makar yang merusaknya jalannya stabilitas pemerintahan. Karena situasi ini telah mulai diciptakan oleh Amirullah Bagus Kesuma, ayah Sultan Kuning.¹³

Setelah Sultan Hamidullah wafat tahun 1734, karena putera mahkota masih kecil, sesuai tradisi wali dipegang paman atau adik Sultan Kuning yaitu pangeran Tamjidillah, sampai putera mahkota dewasa. Tetapi sampai waktunya tiba, Pangeran Tamjidillah tidak menyerahkan tahtanya pada putera mahkota, sehingga Pangeran Muhammad Aliuddin Aminullah melarikan diri untuk mengumpulkan kekuatan. Sementara itu Sultan Tamjidillah pada tahun 1747 membuat kontrak dagang dengan VOC yang menjadi dasar bagi VOC untuk berhubungan dagang dan politik dengan kesultanan Banjarmasin sampai tahun 1787.

Pangeran Muhammad Aliuddin Aminullah kembali dan bersiap menyerang istana di Martapura, tetapi peperangan saudara bisa dicegah, Pangeran Tamjidillah bersedia turun tahta dengan pertimbangan Pangeran Muhammad adalah keponakan dan menantunya sendiri. Pangeran Muhammad berkuasa dari tahun 1759-1761 M, hanya selama tiga tahun, kemudian dia wafat dan di duga karena diracun, dan meninggalkan putera mahkota yang masih kecil. Meski pemerintahan hanya tiga tahun dia mempunyai sikap politik yang sangat keras terhadap VOC. Kemudian Pangeran Nata Alam atau Nata Dilaga ditunjuk sebagai wali sultan yang kemudian terkenal

¹³ Syarifuddin, dkk., *Sejarah Banjar, ... Loc cit.*

sebagai Susuhunan Nata Alam, raja dari kesultanan Banjarmasin yang terbesar dalam abad ke-18.¹⁴

Abad ke-18 ditutup dengan meninggalnya Sultan Nata Alam, Sultan terbesar dalam kerajaan Banjar yang meninggal pada tahun 1801. Kepemimpinan tradisional memang diwarnai oleh faktor karismatik, profil seorang pemimpin tradisional, disamping memiliki darah bangsawan, tetapi juga memiliki "olah batin" yang memadai. Olah batin Sultan Banjar, dilandasi agama Islam, yang dapat terefleksi lewat kearifannya dalam memimpin pemerintahan. Sultan Hamidullah (Sultan Kuning) dan Nata Alam, profil pemimpin yang dapat menstabilkan pemerintahan, sehingga kerajaan Banjar pada waktu kedua pemerintahan ini, mengalami kemajuan yang pesat dibidang pendidikan, ekonomi, politik dan pihak-pihak asing tidak dapat merongrong kerajaan.

Sejarah mencatat abad ke-17 sampai abad ke-18 merupakan zaman keemasan Kerajaan Banjar,¹⁵ karena pada masa itu terjadi puncak perkembangan Islam di Kalimantan Selatan sebagaimana ditandai oleh lahirnya ulama-ulama *urang Banjar* bertaraf internasional seperti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan lainnya.

B. Pendidikan Islam pada Masa Kerajaan Banjar Abad ke-18 (1700-1800)

1. Kegiatan Pendidikan

Kegiatan pendidikan Islam berpusat di mesjid, langgar dan rumah dengan sistem pengajaran non klasikal. Dari proses pendidikan ini melahirkan para ulama generasi berikutnya yang dengan sendirinya melanjutkan pula pengembangan pengetahuan keagamaan di tempat masing-masing dengan sistem yang sama.¹⁶

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 170

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 3

¹⁶ Menurut Karel A. Steenbrink, orang pertama yang mendirikan langgar adalah Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari, yang didirikan di pinggiran ibukota kerajaan

Pengajaran biasanya diberikan pada waktu petang atau malam hari. Anak-anak di kampung atau di desa biasanya membantu orang tua mereka pada pagi hari, baik di sawah, kebun, atau ladang, sedangkan guru mengaji juga harus mencari nafkah sendiri baik pagi hari maupun siang hari, yaitu dengan mengerjakan pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh orang-orang kampung, termasuk di antaranya ke sawah.

Disamping itu, lewat kesempatan dalam melaksanakan ibadah haji seorang *alim* telah mendapat pengalaman-pengalaman yang berharga selama dalam perjalanan.¹⁷ Ia mendapat kesempatan bertukar pikiran tentang soal agama atau saling memberikan pengalaman masing-masing dalam cara pengajaran dan pengembangan agama, bagaimana kecilnya, jelas bahwa kontak dengan dunia luas menambah kuatnya dorongan untuk mengembangkan agama.

Lingkungan pendidikan diwarnai oleh adat Banjar, seperti diharapkan anak-anak mentaati perintah orang tuanya dan orang-orang yang satu generasi dengan orang tuanya (dan yang lebih tua). Demikian juga anak-anak harus taat kepada kakak-kakaknya, terutama yang sudah dewasa. Pergaulan antar jenis kelamin, kecuali antara anggota kerabat dekat yang masih satu rumah, tercela. Seorang anak hanya bermain dengan anak yang sejenisnya dan kurang lebih sebaya dengannya. Seorang anak laki-laki yang bermain dengan seorang anak perempuan dicela dengan mengatakan bahwa ia seperti perempuan, atau dianggap banci.¹⁸

yang kemudian dikenal dengan nama Kampung Dalam Pagar. Lihat: Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah*, (Jakarta:LP3ES, 1986), hlm. 94.

¹⁷ Emroni, *Pembaharuan Pendidikan Islam di Kalimantan Selatan Awal Abad XX (Studi tentang Gerakan Alumni Timur Tengah terhadap Pembaharuan Pendidikan Islam di Kalimantan Selatan tahun 1900-1950)*, (Banjarmasin:Puslit IAIN Antasari, 2000), hlm.25

¹⁸ Alfani Daud, *Islam&Masyarakat Banjar, Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*,(Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada, 1997), hlm. 102.

Kuat dugaan pada abad ini sudah ada beberapa pengajian kecil yang mengajarkan agama berdasarkan kitab terutama untuk kalangan keraton. Dugaan ini didasarkan pada adanya informasi bahwa beberapa pangeran dikenal sebagai ulama yang zuhud, seperti: Pangeran Sultan Inayatullah dan Pangeran Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari. Setidaknya ada tiga pusat pengajian agama Islam yang menjadi pusat kerajaan yaitu: Amuntai-Kerajaan Negara Dipa, di Negara-Kerajaan Negara Daha dan di Martapura-Kerajaan Banjar.¹⁹ Kelak ketiga pusat pengajian ini amat besar perannya dalam proses lahirnya lembaga pendidikan Islam.

2. Komponen Pendidikan

a. Dasar Pendidikan Islam

Dasar pendidikan Islam yang berkembang pada abad ke-18 di kerajaan Banjar, yaitu Al-Qur'an dan Hadits, *ijtihad* ulama lokal, dan *titah* sultan.

b. Tujuan Pendidikan Islam

Tujuan pendidikan Islam pada abad 18, mensosialisasikan ajaran Islam di masyarakat,²⁰ dan mencetak kader ulama yang ahli dalam berbagai bidang keagamaan,²¹ seperti Al-Quran, Hadits, bahasa Arab (*nahwu* dan *sharaf*), Fiqh, tauhid dan tasawuf.

c. Guru dan Murid

Untuk guru mengaji tidak diberikan upah tertentu. Murid-murid bersama-sama membeli minyak tanah untuk mengisi lampu penerangan ketika mereka mengaji, dan pada waktu panen (padi, buah-buahan dan sayur-sayuran) orang tua menyuruh anaknya membawakan sedikit hasil panen itu untuk gurunya sebagai buah tangan. Biasa pula orang tua menyuruh anaknya membantu gurunya mengerjakan

¹⁹ Analiansyah ,dkk., *Aspirasi Masyarakat Banjar*, (Banjarmasin:Antasari Press, 2007), hlm.14.

²⁰ Enung K Rukiati,dkk., *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), hlm.131.

²¹ Analiansyah ,dkk., *op cit.*,hlm.17.

pekerjaan sehari-hari di rumahnya atau disawahnya pada waktu-waktu tertentu. Zakat fitrah anak yang bersangkutan disuruh serahkan kepada guru mengaji selama ia mengaji kepadanya, dan kadang-kadang juga zakat fitrah tahun-tahun sesudahnya, dan guru memperoleh imbalan berupa *saji* ketika *batamat*.²² Selain mengajar mengaji, guru juga mengajarkan pokok-pokok ajaran Islam, termasuk aspek kepercayaan, yang mencakup dalam istilah rukun iman, cara-cara sembahyang dan berpuasa, berbagai doa yang perlu, dengan berpedoman pada *kitab parukunan*.

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (w.1812 M), sangat berpengaruh terhadap pendidikan Islam di Kerajaan Banjar, kitab *Fiqh Sabilal Muhtadin* dikarang atas permintaan Sultan Tahmidillah (1778-1808 M). Sultan menghadiahkan sebidang tanah perbatasan kira-kira lima kilometer dari Martapura (Dalam Pagar), tempat kedudukan keraton pada waktu itu, yang dibangun Syekh menjadi wilayah pemukiman baginya dan keluarganya, dan sebagai pengajian ilmu-ilmu keislaman. Selain pengajian bagi kaum pria, beliau juga membuka pengajian bagi perempuan, diantara murid perempuan yang paling cerdas adalah cucu beliau sendiri bernama Fatimah, yang dengan rapi mencatat pelajaran yang diterimanya, kemudian dicetak dengan nama Kitab Parukunan (ditulis pengarangnya Jamaluddin, anak Syekh dari isterinya yang bernama Ratu Aminah).²³ Dalam kegiatan pembelajaran Syekh Arsyad dibantu menantu yang juga sahabat beliau yaitu Syekh Abdul Wahab Bugis.

Proses Pendidikan Islam yang di pelopori oleh Syekh Arsyad yang membuka pengajian di Dalam Pagar, akhirnya menjadi orientasi pengajian bagi kampung-kampung di sekitarnya atau bahkan wilayah yang lebih luas lagi. Kampung-kampung tersebut memiliki seorang atau lebih ulama atau lainnya yang memberikan pengajaran agama bagi masyarakat awam di sekitarnya atau bagi calon-calon ulama yang

²² Alfani Daud, *op cit.*, hlm. 143

²³ *Ibid.*, hlm.54-55.

berdatangan dari kampung yang jauh. Dalam pagar, dan kota Martapura umumnya, terkenal sebagai tempat pengajian yang menghasilkan ulama dan tokoh-tokoh birokrasi keagamaan pada zaman dahulu, dan sampai sekarang masih berusaha meneruskan tradisi itu. Selain itu, belakangan terkenal juga pengajian-pengajian yang ada di Negara, Amuntai, Alabio dan Balimau. Secara langsung atau tidak pengajian-pengajian ini ikut membentuk perilaku religius masyarakat. Dan yang menarik bagi sudah mengikuti mengajian akan menyebarkan pelajaran agama ke kampung masing-masing, dapat dikatakan dakwah pengetahuan agama menyebar di kalangan rakyat awam.

Diakhir abad ke-17 awal abad ke-18 dikenal dua orang Datu yang giat melakukan pendidikan Islam. Yaitu Datu Kandang Haji dan Datu Muning alias Datu Sanggul. Datu Kandang Haji berdakwah di bagian utara Kerajaan Banjar dan Datu Muning di bagian Selatan. Datu Kandang Haji mengajar mengaji Al-Qur'an dan memakmurkan shalat jamaah Jum'at di Mesjid. Kitab Qur'an tulisan Datu Kandang Haji, sepasang terompah, tongkat yang digunakan ketika berkhotbah, masih di dapat di dekat Paringin Kabupaten Hulu Sungai Utara sekarang. Datu Muning, kegiatannya diantaranya mengusahakan dan memberi tiang kayu besi (ulin) untuk penduduk mendirikan mesjid. Pokok kayu ulin besar dan bekas tebangan Datu Muning di kampung Pungguh, Kabupaten Barito Kuala dan pancangan tiang ulin di pedalaman kampung Dayak Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta makam beliau di kampung Tatakan, Kabupaten Tapin, masih dikenal hingga sekarang.²⁴

Selain itu ada tokoh pendidik Islam yang dikenal dikalangan masyarakat seperti; Syekh Muhammad Thayyib bin Mas'ud al-Banjari, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, dan Syekh Abdul Hamid Abulung.

²⁴ Ahmad Basuni, *Nur Islam di Kalimantan Selatan*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986), hlm. 40.

d. Materi

1) Al-Qur'an

Sejak berumur sekitar 6 atau 7 tahun anak-anak sudah mulai belajar membaca huruf-huruf Al-Qur'an (*mangaji*, mengaji). Umumnya kitab yang diajarkan adalah kitab *Qa'ida Bagdadiya*,²⁵ dikenal sebagai *Muqaddam* (pendahuluan) Al-Qur'an, sebagai buku pegangan guru dan murid sebelum melangkah ke dalam kitab Al-Qur'an.

2) Aqidah/Tauhid

Rukun Iman, aspek kepercayaan yang pokok dari ajaran Islam, biasanya diajarkan tidak secara sistematis. Namun demikian, sebagai hasilnya anak-anak biasanya hapal berbagai sifat Tuhan, nama-nama kitab yang telah diturunkan kepada para Rasul, nama-nama Nabi yang terkemuka, meskipun tidak seluruh yang berjumlah 25 orang, tetapi selalu masuk nabi Haidir as., nama-nama malaikat, dan tentang suasana hari kiamat. Juga kepada anak ditekankan agar "*tawakkal*" kepada Allah, sebagai suatu aspek dari kepercayaan kepada takdir, meskipun dengan paham yang sangat kabur.

Karya Muhammad Arsyad Al-Banjari seperti *Tuhfat ar-Raqibin fi Bayan Haqiqat Iman al-Mu'minin wa Ma Yufsiduh min Riddat al-Murtaddini*, memuat antara lain, respon tauhid atas tradisi lokal seperti *manyanggar banua* dan *mambuang pasilih*, yaitu upacara yang dilakukan masyarakat dengan memberikan sesajen kepada makhluk halus.²⁶ Di sini "*ijtihad* lokal" dalam bidang aqidah dilakukan oleh Arsyad dengan mengkategorikan status upacara kepada: *kufr*, *bid'ah* dan *fasiq*, *bid'ah* yang tidak disertai *kufr*. Begitu juga, beberapa

²⁵ Alfani Daud, *op cit.*, hlm.143

²⁶ Memberi sesajen atau anak yang berisi bermacam wadai dan dipersembahkan untuk ruh-ruh ghaib, hantu-hantu, hal itu diyakini dapat memberikan pertolongan seperti penyembuhan penyakit, membuang sial dan mengabulkan segala macam permintaan mereka. Komunikasi dengan ruh-ruh itu dilakukan oleh seorang dukun/balian dengan cara kesurupan. Dimana jasadnya dimasuki ruh halus yang telah memakan sesajen. *Loc cit.*

karya-karya seperti *Parukunan Basar* oleh Arsyad dan *Rasam Parukunan* oleh Abd Al-Rahman Shiddiq tentang sepuluh hal yang merusak iman.

Dan Syekh Muhammad Thayyib bin Mas'ud Al-Banjari al-Khalidi al-Naqsyabandi,²⁷ diperkirakan hidup tahun 1714-1844, menulis kitab *Miftah al-Jannah* diselesaikan 19 Maret 1832 M.

3) Syariah/Fiqh

Materi syariah tergambar dalam pemikiran fiqh yang ditulis ulama pada abad ke-18, yaitu: Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari (1710-1812) menulis kitab *Sabilal Muhtadin*, sebuah kitab fiqh, dan kitab *Perukunan Melayu*,²⁸ dan kitab *Luqthatul 'Ajan*.²⁹ Surgi Mufti Kiyai Haji Jamaluddin (lahir 1780 M),³⁰ menulis kitab *Parukunan*.

4) Tasawuf

Kajian tasawuf mempunyai ciri khas mistisismenya yang begitu kental. Konsep-konsep seperti *wahdatul wujud*, dan *martabat tujuh* terartikulasi dalam literatur seperti kitab *al-Durr al-Nafis* karya Muhammad Nafis Al-Banjari, ditulis tahun 1782 M.³¹ Dari dimensi sosial keagamaan tersebar ajaran-ajaran tasawuf yang menjadi cikal bakal bentuk tarekat, seperti *thariqat As-Samaniyyah* di Martapura, *thariqat 'Alawiyah* di Barabai dan *thariqat at-Tijaniah* di Banjarmasin. Karena kentalnya tasawuf sebagai corak keberislaman masyarakat, pada bagian tengah stempel Kerajaan Banjar yang berbentuk segi empat ditulis angka-angka Arab seperti kebiasaan Persia. Di samping

bawah stempel tertulis "*La ilaha illa Huwa Allah Maujud Aku*". Kalimat ini mencerminkan ajaran *wahdat al-wujud*.³²

Tawasuf berkembang menjadi kekuatan yang mendorong munculnya aksi-aksi sosial masyarakat menentang kolonialisme, seperti gerakan *baratib baamal* (*baratib*:berzikir dengan membaca *ratib*, bacaan rutin tertentu, *baamal*: beramal) dalam perang Banjar.³³ Dengan demikian, tasawuf menjadi corak yang dominan keberislaman masyarakat Banjar. Dari khazanah intelektual Banjar, tasawuf menunjukkan wajah yang distingtif, yaitu tasawuf Syaikh Muhammad filsafat, seperti *wahdat al-wujud*, *al-insan al-kamil*, *isyraqiyah*, *wahdat al-muthlaq*, *wahdat al-syuhud*, dan *martabat tujuh*. Tasawuf reformatif Arsyad menekankan keseimbangan empat hal: *syari'at*, *thariqat*, *haqiqat* dan *ma'rifat*, sehingga lebih bercorak aktif dan dinamis.

Syekh Abdul Hamid Abulung, yang hidup di masa Sultan Tamhidullah II (1785-1808 M) menulis kitab *Risalah Tasawuf* sebanyak dua jilid. Beliau seorang tokoh tasawuf yang mengajar tasawuf *wujudiyah* atau *ilmu sabuku* yang dianggap menyesatkan masyarakat awam, sehingga dinyatakan bersalah oleh kesultanan Banjar dan berdasarkan fatwa Syekh Arsyad Al-Banjari dan ulama lainnya, Syekh Abdul Hamid di hukum mati, di makamkan di Ambulung Kampung Sungai Batang, beberapa kilometer ke hilir dari

²⁷ Bayani Dahlan (Ed.), *Ulama Banjar&Karya-Karyanya*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2009), hlm. 15.

²⁸ Badri Yatim, *op cit.*, hlm. 304.

²⁹ Bayani Dahlan (Ed.), *op cit.*, hlm. 128.

³⁰ *Loc cit.*

³¹ Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm.235.

³² Gt. Abd. Muis, *Masuk dan Tersebarnya Islam di Kalimantan Selatan*, hlm. 30, dalam *Jurnal Kebudayaan Kandil*, Edisi 3 tahun I, Desember 2003, (Banjarmasin:LK-3, 2003), hlm. 75.

³³ Tarekat yang mendasari gerakan tersebut kemungkinan besar *tharekat Naqsyabandiyah*, karena pada 3 Januari 1889, untuk pertama kali Belanda menyebut nama "*thariqat*". Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa dua orang haji, Muhammad Arsyad (Banjarmasin) dan Ahmad (Alabio) aktif dalam menyebarkan *thariqat Naqsyabandiyah* di Batang Alai dan Labuan Amas (Kabupaten HST) dan memperoleh 500 murid. Lihat:TIM Peneliti IAIN Antasari, *Unsur-unsur Islam dalam Sejarah Perang Banjar(1859-1905)*, 1994. hlm.19. dalam *Jurnal Kebudayaan Kandil*, Edisi 3 tahun I, Desember 2003, (Banjarmasin:LK-3, 2003), hlm. 75.

³⁴ Musyrifah Sunanto, *op cit.*, hlm.140.

Kampung Dalam Pagar Martapura.³⁵ Ini merupakan sejarah hitam keagamaan yang berulang kembali setelah pernah terjadi pada Syekh Siti Jenar di Jawa, Suhrawardi di Mesir dan Al-Hallaj di Baghdad, hanya karena berbeda dalam pemahaman keagamaan.

Selain itu, Syekh Arsyad Al-Banjari mengembangkan materi pembelajaran agama Islam, seperti membaca, menghafal dan melagukan Al-Qur'an, juga diiring dengan pemahaman bahasa Arab terutama *nahwu-sharaf*, baca tulis Arab Melayu tafsir, tajwid dan kaligrafi.³⁶ Secara umum materi yang beliau ajarkan meliputi akidah, ibadah, mu'amalah dan akhlak. Di samping itu beliau mengajari santri dan masyarakat sekitar untuk bekerja dengan baik.

e. Pendekatan dan Metode Pendidikan

Ketika menyampaikan ilmu agama kepada masyarakat biasanya guru menyesuaikan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat pada saat itu, bahkan berorientasi ke masa depan. Jadi Aktual dan Kontekstual menjadi pendekatan yang diterapkan guru pada umumnya pada masa abad ke-18.

Metode pembelajaran yang dipergunakan secara umum dengan cara: *bil hal*, yakni keteladanan yang direfleksikan dalam tingkah laku, gerak-gerik, dan tutur kata sehari-hari yang disaksikan langsung oleh murid. Kemudian metode *bil lisan*, yaitu dengan mengadakan pengajaran dengan mengajian yang bisa disaksikan dan diikuti siapa saja, baik keluarga, kerabat, sahabat, maupun handai taulan. Selain metode *bil kitabah* yaitu mengembangkan pembelajaran dalam bidang tulis menulis.³⁷

³⁵ Bayani Dahlan (Ed.), *op cit.*, hlm. 181-190.

³⁶ Humaidy, *Peran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam Pembaharuan Pendidikan Islam di Kalimantan Selatan Penghujung Abad XVIII*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm. 48.

³⁷ M. Bustani, *Pemikiran Pendidikan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari*, makalah tidak diterbitkan tahun 2011, hlm. 3.

Pembelajaran Al-Qur'an dan Baca tulis Arab Melayu dengan metode *Imla'*, begitu juga *Nahwu-Sharaf*, yang kemudian diteruskan dengan metode hapalan untuk tingkat mahir.³⁸ Anak-anak diajari satu persatu, dan anak-anak yang sudah lebih menguasai materi disuruh membantu temannya yang baru mulai. Dengan demikian suatu kelompok belajar mengaji disamping muridnya bervariasi juga jumlah pesertanya kecil, karena diperlukan banyak guru mengaji dalam sebuah kampung.³⁹

Untuk pendidikan agama Islam bagi anak-anak, guru biasanya mengajarkan pokok-pokok ajaran Islam tersebut sebagai selingan ketika belajar mengaji Al-Qur'an dan kemudian menyuruh anak didiknya menghafal bacaan tertentu. Saat-saat tertentu (menjelang puasa, hari Jum'at, hari-hari besar Islam, atau beberapa waktu sebelumnya) selalu dimanfaatkan untuk menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan hari atau saat tersebut, baik oleh guru mengaji dan demikian pula oleh orang tua si anak.

Tekanan untuk menghafal bacaan sembahyang sudah diberikan sejak anak berumur sekitar 4 sampai 5 tahun, yang dilakukan oleh orang tua atau kerabat dekatnya yang serumah dengannya. Hapalan anak-anak, baik yang diajarkan secara sambil lalu oleh orang tua, atau oleh guru mengaji, sering diperiksa, dan anak-anak yang baik hapalannya mendapat pujian, apabila anak-anak dipandang cukup langsung diajak mempraktekkan sembahyang, kalau sudah bisa mempraktekkan sembahyang anak-anak diajak kemesjid untuk sembahyang berjamaah.⁴⁰

Untuk membelajarkan keagamaan umumnya menggunakan metode *halaqah* yaitu murid duduk melingkar di sekeliling guru untuk menerima pelajaran. Metode pengajaran model ini, yang terus

³⁸ Sahriansyah dan Syafruddin, *Sejarah dan Pemikiran Ulama di Kalimantan Selatan Abad XVII-XX*, (Banjarmasin: Antarasari Press, 2011), hlm. 55.

³⁹ Alfani Daud, *Ibid.*, hlm.143.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 102.

berlanjut sampai masa penjajahan masa penjajahan Belanda, sesungguhnya mencerminkan orientasi transmisi keilmuan pada abad ke-18 yang berpusat ke *Haramain* (khususnya Mesjid Al-Haram di Mekkah) yang saat itu belum mengenal sistem madrasah.⁴¹ Posisi *Haramain* ini, bagi umat Islam Indonesia, sangat dominan sejak abad ke-17 hingga akhir abad ke-19. Adapun metode pembelajaran yang dominan di Mesjid Al-Haram cenderung menggunakan sistem *halaqah*.

Dan terakhir metode *sorogan* (mengaji *baduduk*) yaitu murid secara bergiliran menghadap gurunya dengan membaca kitab yang dipelajarinya. Metode *sorogan* (mengaji *baduduk*) bagian paling sulit dari keseluruhan sistem pendidikan abad ke-18, sebab menuntut kesabaran, kerajinan, ketaatan, dan disiplin pribadi dari murid, karena memungkinkan seorang guru mengawasi, menilai, membimbing secara maksimal kemampuan seorang murid dalam menguasai pelajarannya.

f. Media dan Sarana Pembelajaran

Media pembelajaran yang dipergunakan untuk mencatat penjelasan guru menggunakan *lein* (alat tulis semacam batu dan papan kecil berwarna hitam), dan hanya sebagian kecil sudah menggunakan kertas dan pensil. Sarana pendidikan Islam berpusat di mesjid, langgar dan rumah. Pada zaman Belanda terutama awal abad ke-18 sampai awal abad ke-19, selain daerah Martapura, di Negara telah berkembang subur tempat pengajian tradisional yang disebut *langgar batingkat*, tingkat atas sebagai tempat sembahyang dan sekaligus sebagai tempat pengajian para santri, sedangkan di tingkat bawah dijadikan tempat pemondokan mereka.⁴²

Langgar bertingkat yang cukup terkenal, antara lain:

Pertama, Langgar As-Syamsu Wal-Qamar (yang didirikan dikampung Pasungkan Negara). Tuan Guru yang memberikan

⁴¹ Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat; Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 21-25.

⁴² Analiansyah, dkk., *op cit.*, hlm.17

pengajian ialah Tuan Guru Haji Muhammad Thaher (Haji Matahir).

Kedua, Pengajian di langgar Baiturrahman, di Teluk Haur Rumbih (Negara), yang dipimpin oleh Tuan Guru Haji Abdurahman.

Ketiga, pengajian di langgar al-Falah di Desa Paramaian (Negara), dipimpin oleh Tuan Guru Haji Azhari.⁴³ Lahirnya langgar bertingkat ini mendapat tanggapan positif dari masyarakat, dan semasa pemerintahan Hindia Belanda mencapai 40 buah.

g. Evaluasi Pendidikan

Evaluasi tidak menggunakan sistem kenaikan kelas, tetapi di ukur dari selesai dan menguasai satu kitab, lalu setoran pada gurunya atau membaca di depan guru, kalau dianggap menguasai bisa melanjutkan kitab berikutnya yang lebih sulit dan mendalam.⁴⁴ Pemberian ijazah berupa pengakuan guru secara lisan yang menyatakan bahwa ia telah dapat dipercaya untuk mengajarkan ilmu.

Jadi, secara umum ciri khas pendidikan Islam pada kerajaan Banjar abad ke-18 adalah; pelajaran diberikan satu persatu, pelajaran bahasa Arab berupa ilmu *nahwu* dan *sharaf*, buku pelajaran dikarang oleh guru atau ulama dalam bahasa Arab Melayu, kitab yang digunakan umumnya ditulis tangan, pelajaran suatu ilmu hanya diajarkan satu kitab saja, toko buku belum ada, yang ada hanya menyalin buku dengan tulisan tangan, karena terbatasnya bacaan, pengembangan materi ilmu agama masih sangat sedikit, dan belum lahir aliran baru dalam Islam.

III SIMPULAN

Pendidikan Islam pada masa Kerajaan Banjar (abad ke-18), sangat erat kaitannya dengan masuknya Islam di Kalimantan Selatan dan kondisi sosial politik kerajaan Banjar pada waktu itu. Abad ke-18 merupakan zaman keemasan Kerajaan Banjar, karena pada masa itu terjadi puncak perkembangan Islam di Kalimantan Selatan.

⁴³ *Ibid.*, hlm.18.

⁴⁴ Emroni, 2000, *op cit.*, hlm.28

Kegiatan Pendidikan berpusat pada mesjid, langgar dan rumah dengan sistem non klasikal. Dasar pendidikan yaitu Al-Qur'an, Hadits, ijthad ulama lokal dan titah raja. Tujuan pendidikan, mensosialisasikan ajaran Islam di masyarakat dan mencetak kader ulama yang ahli dalam bidang keagamaan. Guru tidak diberikan upah tertentu. Murid-murid berswadaya memenuhi keperluan guru sesuai kemampuan. Tokoh pendidik yang terkenal pada ke-18, diantaranya: Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, Fatimah, Syekh Abdul Wahab Bugis, Datu Kandang Haji dan Datu Muning alias Datu Sanggul. Juga Syekh Muhammad Thayyib bin mas'ud al-Banjari, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, dan Syekh Abdul Hamid Abulung.

Materi yang diajarkan Al-Qur'an, tauhid, fiqh, tasawuf, membaca, menghafal dan melagukan Al-Qur'an, bahasa Arab terutama nahwu-sharaf, baca tulis Arab Melayu tafsir, tajwid dan kaligrafi. Menggunakan pendekatan Aktual dan Kontekstual dan metode pembelajaran yang dipergunakan: metode *bil hal, bil lisan, bil kitabah*, Imla', hapalan, praktek, *halaqah* dan *sorogan (mengaji baduduk)*. Sarana pendidikan Islam berpusat di mesjid, langgar dan rumah. Evaluasi di ukur dari selesai dan menguasai satu kitab, pemberian ijazah berupa pengakuan guru secara lisan yang menyatakan bahwa ia telah dapat dipercaya untuk mengajarkan ilmu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik, (ed.). *Sejarah Ummat Islam Indonesia*. Jakarta: MUI, 1991.
- Analiansyah ,dkk., *Aspirasi Masyarakat Banjar*. Banjarmasin: Antasari Press, 2007.
- Azra, Azyumardi. *Interaksi dan Akomodasi Islam dengan Budaya Melayu Kalimantan*, dalam Aswab Mahasin (dkk), "Ruh Islam dalam Budaya Bangsa; Aneka Budaya Nusantara, Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1996.

- Basuni, Ahmad. *Nur Islam di Kalimantan Selatan*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986.
- Bustani, M., *Pemikiran Pendidikan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari*. makalah tidak diterbitkan tahun 2011.
- Bondan, Amir Hasan Kiai. *Suluh Sejarah Kalimantan*. Banjarmasin: Fajar, 1953.
- Bruinessen, Martin Van. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat; Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1995.
- Dahlan, Bayani (Ed.). *Ulama Banjar & Karya-Karyanya*. Banjarmasin: Antasari Press, 2009.
- Daud, Alfani. *Islam & Masyarakat Banjar, Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*. Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada, 1997.
- Emroni. *Potret Perkembangan Pendidikan Islam di Kalsel*, Jurnal Kebudayaan Kandil, Edisi 3 tahun I. Desember 2003. Banjarmasin: LK-3, 2003.
- , *Pembaharuan Pendidikan Islam di Kalimantan Selatan Awal Abad XX (Studi tentang Gerakan Alumni Timur Tengah terhadap Pembaharuan Pendidikan Islam di Kalimantan Selatan tahun 1900-1950)*. Banjarmasin: Puslit IAIN Antasari, 2000.
- Haira, Bahran Noor. *Kitab Risalah 'Amal Ma'rifah (Sebuah Interpretasi Baru)*. Banjarmasin: Pusat Penelitian IAIN Antasari, 1996.
- Humaidy. *Peran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam Pembaharuan Pendidikan Islam di Kalimantan Selatan Penghujung Abad XVIII*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Leirissa, R.Z., (Ed.). *Sejarah Nasional Indonesia IV*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Muis, Gt. Abd. *Masuk dan Tersebaranya Islam di Kalimantan Selatan*, Jurnal Kebudayaan Kandil, Edisi 3 tahun I, Desember 2003, Banjarmasin: LK-3, 2003.

- Noor, Irfan. *Developmentalisme dan Redupnya Orientasi Pendidikan Lokal*, Jurnal Kebudayaan Kandil, Edisi 3 tahun I, Desember 2003, Banjarmasin: LK-3, 2003.
- Poesponegoro, Marwati Djoened. *Sejarah Nasional Indonesia III*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Ras, J. J., *Hikayat Banjar: A Study in Malay Historiography*, The Hague Martinus Nijhoff-KTL V, 1968.
- Rukiati, Enung K. dkk., *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006.
- Sahriansyah dan Syafruddin. *Sejarah dan Pemikiran Ulama di Kalimantan Selatan Abad XVII-XX*. Banjarmasin: Antarasari Press, 2011.
- Saleh, M. Idwar, dkk., *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*. Jakarta: Departemen P&K, 1978.
- Sani, Mukhyar, *Dakwah Islam dan Perkembangannya di Kalimantan Selatan*, Jurnal Alhadharah, Vol. 2, No. 3, Januari-Juni, 2003.
- Steenbrink, Karel A. *Pesantren, Madrasah, Sekolah*. Jakarta: LP3ES, 1986.
- Sunanto, Musyrifah. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syarifuddin, dkk., *Sejarah Banjar*, Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan, 2007.
- Thohir, Ajid, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam, Melacak Akar-Akar Sejarah, Sosial, Politik dan Budaya Umat Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- TIM Peneliti IAIN Antasari, *Unsur-unsur Islam dalam Sejarah Perang Banjar(1859-1905)*, 1994. Jurnal Kebudayaan Kandil, Edisi 3 tahun I, Desember 2003, Banjarmasin: LK-3, 2003.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011.

BAB III

PENDIDIKAN DI BAWAH ORGANISASI MUHAMMADIYAH

Oleh: Sahriansyah

A. Pendahuluan

Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H, bertepatan dengan 18 Nopember 1912 M, di Yogyakarta. Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi yang menghembuskan jiwa pembaruan pemikiran Islam di Indonesia dan bergerak di berbagai aspek kehidupan umat.¹

Muhammadiyah sejak lahir memfokuskan perjuangannya adalah: pertama, memurnikan ajaran Islam sesuai dengan tuntunan Alqur'an dan Hadis. Kedua, mengajak masyarakat untuk memeluk dan mempraktekkan cita ajaran Islam. Ketiga, menegakkan amar makruf nahi munkar. Keempat, mempraktekkan ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Kelima, mempergiat usaha di bidang pendidikan dan pengajaran dengan bernafaskan Islam.²

Sistem pendidikan Muhammadiyah merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. Lembaga pendidikan Muhammadiyah lahir jauh sebelum pendidikan nasional ada. Kehadiran lembaga pendidikan Muhammadiyah di Indonesia merupakan wujud nyata partisipasi aktif Muhammadiyah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa agar menjadi bangsa yang mandiri dan bermatabat. Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa pendidikan nasional merupakan tanggung jawab bersama yaitu pemerintah, orang tua dan masyarakat termasuk organisasi Muhammadiyah.

Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang perjalanannya identik dengan gerakan pendidikan, juga menjadi bagian dari masalah kualitas pendidikan

¹ M. Mukhsin Jamil, dkk., *Nalar Islam Nusantara : Studi Islam ala Muhammadiyah, al-Irsyad, Persis dan NU*, (Jakarta : DEPAGRI, 2007), h. 17.

² M. Rusli Karim (Ed.), *Muhammadiyah Dalam Kritik dan Komentor*, (Jakarta : Rajawali Press, 1986), h. 89.

Indonesia. Eratnya kaitan Muhammadiyah dengan problem pendidikan di Indonesia dapat secara nyata dilihat dari partisipasi lembaganya yang cukup signifikan. Muhammadiyah menyumbangkan sekitar 11 % dari seluruh institusi pendidikan yang ada dari level Pendidikan Usia Dini sampai pendidikan tinggi.³

Lembaga pendidikan yang dikelola Muhammadiyah dari tingkat Pendidikan Usia Dini (PAUD) sampai dengan Pendidikan tinggi sebanyak 11.488 buah. Rinciannya sebagai berikut: Kelompok Belajar sebanyak 442 buah, Taman Kanak-kanak sebanyak 5.106 buah, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 2.899 buah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah sebanyak 1.706 buah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/ Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 941 buah, Madrasah Diniyah 182 buah, Pondok Pesantren sebanyak 67 buah dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah sebanyak 145 buah.⁴

Secara kelembagaan pendidikan Muhammadiyah tersebut dikelola oleh tiga Majelis Pendidikan yaitu Majelis Pendidikan PP Aisyiah mengelola pendidikan anak usia dini (PAUD), Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah mengelola Pendidikan Dasar dan Menengah dan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah mengelola Pendidikan Tinggi Muhammadiyah. Di bawah ini akan dipaparkan secara sederhana tentang eksistensi lembaga pendidikan Muhammadiyah.

B. Pendidikan Muhammadiyah

Menurut K.H. Ahmad Dahlan, upaya strategis untuk menyelamatkan umat Islam dari pola berpikir yang statis menuju pada pemikiran yang dinamis adalah melalui pendidikan. Pendidikan hendaknya ditempatkan pada skala prioritas utama dalam proses

³ Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, *Direktori Perguruan Tinggi Muhammadiyah 2006*, h. v.

⁴ Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, *Panduan Pelatihan Kepemimpinan Sekolah Muhammadiyah*, 2008, h. 1.

pembangunan umat.⁵ Upaya mengaktualisasikan gagasan tersebut maka konsep pendidikan Muhammadiyah ini meliputi :

1. Tujuan Pendidikan

Menurut K.H. Ahmad Dahlan, pendidikan Islam hendaknya diarahkan pada usaha membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti luhur, alim dalam agama, luas pandangan dan paham masalah ilmu keduniaan, serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. Tujuan pendidikan tersebut merupakan pembaharuan dari tujuan pendidikan yang saling bertentangan pada saat itu yaitu pendidikan pesantren dan pendidikan sekolah model Belanda. Di satu sisi pendidikan pesantren hanya bertujuan untuk menciptakan individu yang salih dan mendalami ilmu agama. Sebaliknya, pendidikan sekolah model Belanda merupakan pendidikan sekuler yang didalamnya tidak diajarkan agama sama sekali. Akibat dualisme pendidikan tersebut lahirlah dua kutub intelegensia : lulusan pesantren yang menguasai agama tetapi tidak menguasai ilmu umum dan sekolah Belanda yang menguasai ilmu umum tetapi tidak menguasai ilmu agama.

Melihat ketimpangan tersebut K.H. Ahmad Dahlan berpendapat bahwa tujuan pendidikan yang sempurna adalah melahirkan individu yang utuh menguasai ilmu agama dan ilmu umum, material dan spritual serta dunia dan akhirat. Bagi K.H. Ahmad Dahlan kedua hal tersebut (agama-umum, material-spiritual dan dunia-akhirat) merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Inilah yang menjadi alasan mengapa K.H. Ahmad Dahlan mengajarkan pelajaran agama dan ilmu umum sekaligus di Madrasah Muhammadiyah.⁶

Secara singkat tujuan pendidikan Muhammadiyah adalah membentuk manusia muslim, berakhlak mulia, cakap, percaya kepada diri sendiri dan berguna bagi masyarakat.

⁵ Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam : Pendidikan Historis, Teoritis*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002) h. 107.

⁶ www.google.com, "Konsep Pendidikan Perspektif Ahmad Dahlan", diakses tanggal 15 Desember 2011.

2. Materi Pendidikan

Berangkat dari tujuan pendidikan tersebut K.H. Ahmad Dahlan berpendapat bahwa kurikulum atau materi pendidikan hendaknya meliputi:

- a. Pendidikan moral, akhlak yaitu sebagai usaha menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- b. Pendidikan individu dan ketrampilan, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh yang berkesinambungan antara perkembangan mental dan gagasan, antara keyakinan dan intelek serta antara dunia dengan akhirat. Di sisi lain, seorang muslim juga harus mempunyai skill atau ketrampilan yang mumpuni, agar ia dapat eksis dalam mengarungi kehidupan di dunia ini.
- c. Pendidikan sosial yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup bermasyarakat.⁷

Di bawah ini merupakan gambaran tentang kurikulum Meisjesvervolg School Muhammadiyah tahun 1918, yang terdiri :

No	Pelajaran	Kelas IV	Kelas V	Kelas VI
1.	Bahasa Jawa	6 + 3	4 + 1	2 + 3
2.	Berhitung	7	7	6
3.	Menulis	2	1 + 1	1
4.	Ilmu Bumi	2	2	1 + 1
5.	Menggambar	2	1	1
6.	Bahasa Melayu	2 + 3	3 + 1	1
7.	Ilmu Alam	-	3	4
8.	Nuttige Handwerken (pekerjaan tanganguna) dan Fraaie	2	2	3

⁷ Sudarno Shobron, (Ed.), *Studi Kemuhammadiyah : Kajian Historis, Ideologis dan Organisasi* (Surakarta : LPID UMS, 2006), h. 153.

Handwerken (pekerjaan tangan halus)

9.	Memasak/membatik	2	2	-
10.	Agama	-	2	2
11.	Menstrika/Mencuci	2	2	2
12.	Kesehatan	6	3 + 3	6
13.	Bahasa Belanda	-	2	2
14.		-	-	2
15.		3	4	4
Jumlah Jam Pelajaran		42	42	42

Muhammadiyah sejak masa awal berdirinya tidak hanya mengelola sekolah-sekolah agama saja, tetapi Muhammadiyah juga menyelenggarakan sekolah-sekolah umum. Sekolah yang dimaksud adalah HIS Muhammadiyah, MULO, HIK Muhammadiyah, dan Schakel Muhammadiyah. Dalam penyelenggaraan kurikulum, sekolah-sekolah tersebut diberikan mata pelajaran agama dengan perbandingan 10-15 % untuk pelajaran agama dari keseluruhan kurikulumnya. Sebagai contoh dapat ditunjukkan kurikulum pada Meisjesvervolg School Muhammadiyah di atas.⁸

Selain itu, di bawah ini akan ditampilkan materi pelajaran SD Muhammadiyah dan Pondok Pesantren Muhammadiyah tingkat tinggi, yaitu :

⁸ A. Jainuri, *Muhammadiyah Gerakan Reformasi Islam di Jawa pada Awal Abad ke 20*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1985), h. 72.

Tabel 1
3. Jadwal Mata Pelajaran SD Muhammadiyah⁹

No	Pelajaran	Kelas IV	Kelas V	Kelas VI
1.	Bahasa Indonesia	8	8	8
2.	Matematika	8	8	8
3.	PKN	2	2	2
4.	Qur'an Hadis	2	2	2
5.	Aqidah Akhlak	2	2	2
6.	Fiqih	2	2	2
7.	SKI	2	2	2
8.	Penjaskes	2	2	2
9.	IPA	6	6	6
10.	IPS	2	2	2
11.	Bahasa Arab	2	2	2
12.	Bahasa Inggris	2	2	2
13.	KTK/Khat	2	2	2
14.	Mulok/SBK	2	2	2
15.	Kemuhammadiyah	2	2	2
	Jumlah Jam Pelajaran	46	46	46

⁹ Diambil dari Jadwal Pelajaran SD Muhammadiyah 9 Banjarmasin.

Tabel 2
Mata Kuliah Pondok Muhammadiyah UMS¹⁰

No	Mata Kuliah	Bidang	SMS 1-8
1.	Ulumul Qur'an	Ilmu dan pengetahuan	
2.	Ulumul Hadis	Dasar Islam	
3.	Al-Adabul Nabawiyah		
4.	Bahasa Arab (Nahwu/Sharf)		
5.	Bahasa Inggris		
6.	Metode Tafsir Alqur'an	Ilmu dan pengetahuan	
7.	Metode Istimbat Hadis	Pengembangan	
8.	Sejarah Pemikiran	Ilmu dan penget	
9.	Sosiologi Agama	Penunjang utama	
10.	Filsafat Ilmu		
11.	Metode Penelitian Sejarah		
12.	Metpen Kualitatif		
13.	Metpen Survei		
14.	Penulisan ilmiah/Jurnalistik		
15.	Metode Content Analisis		
16.	Patalogi Sosial		
17.	Aplikasi Bahasa Inggris	Pengetahuan Penunjang	
18.	Aplikasi Bahasa Arab		
19.	AIK		
20.	Ketarjihan/Fiqih		

¹⁰ MT. Arifin, *Muhammadiyah Potret Yang Berubah*, (Surakarta: Institut Gelanggang Pemikiran Filsafat Sosial Budaya dan Kependidikan, 1990), h. 361; dan ditambah dengan kuliah secara reguler di Fakultas Ilmu Agama Islam (Tarbiyah, Ushuluddin dan Syari'ah).

Dari uraian kurikulum sekolah Muhammadiyah di atas, dapat dilihat bahwa muatan pelajaran agama cukup dominan dan kurikulum SD Muhammadiyah hampir sama dengan kurikulum Madrasah Ibtidaiyah.

3. Metode Pembelajaran

Ada dua sistem pendidikan yang berkembang di Indonesia, yaitu pendidikan pesantren dan pendidikan Barat. Pandangan Ahmad Dahlan, ada problem mendasar berkaitan dengan lembaga pendidikan di kalangan umat Islam, khususnya lembaga pendidikan pesantren. Problem itu berkaitan dengan proses belajar-mengajar, kurikulum, dan materi pendidikan.

Pertama, dalam proses belajar-mengajar, sistem yang dipakai masih menggunakan sorogan (khalaqah), ustadz/kiyai dianggap sebagai sumber kebenaran yang tidak boleh dikritisi. Kondisi ini membuat pengajaran nampak tidak demokratis. Fasilitas-fasilitas modern yang sebenarnya baik untuk digunakan dilarang untuk dipakai karena menyamai orang kafir.

Kedua, sedangkan materi dan kurikulum yang disajikan masih berkisar pada studi Islam klasik, misalnya, fikih, tasawuf, tauhid, dan sejenisnya. Ilmu-ilmu itu wajib syar'i untuk dipelajari. Sementara ilmu modern tidak diajarkan karena ilmu itu termasuk ilmu Barat yang haram hukumnya bagi orang Islam untuk mempelajarinya. Ilmu-ilmu selain studi Islam klasik tersebut dianggap bukan ilmu Islam. Padahal kalau diteliti, ilmu-ilmu yang berkembang di Barat itu merupakan pengembangan lebih lanjut dari ilmu yang sudah dikembangkan oleh umat Islam pada zaman keemasan Islam.

Ketiga, sementara itu, pendidikan yang disebut kedua hanya mengajarkan ilmu-ilmu yang diajarkan di dunia Barat. Metode pengajaran sudah menggunakan metode modern. Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda ini tidak diajarkan ilmu-ilmu keislaman. Kebanyakan siswa yang bisa masuk dalam

pendidikan ala Barat ini adalah orang-orang priyayi atau pegawai pemerintah Belanda. 11

Dari realitas pendidikan tersebut di atas, K.H. Ahmad Dahlan menawarkan sebuah metode sintesis antara metode pendidikan modern Barat dengan metode pendidikan pesantren. Dari sini tampak bahwa lembaga pendidikan yang didirikan K.H. Ahmad Dahlan berbeda dengan lembaga pendidikan yang dikelola oleh masyarakat pribumi saat ini. Sebagai contoh, K.H. Ahmad Dahlan mula-mula mendirikan SR di Kauman dan daerah lainnya di sekitar Yogyakarta, lalu sekolah menengah yang diberi nama *al-Qism al-Arqam* yang kelak menjadi bibit madrasah Mu'allimin dan Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta.¹²

Metode pembelajaran yang dikembangkan K.H. Ahmad Dahlan bercorak kontekstual melalui proses dialogis dan penyadaran. Contoh klasik adalah ketika beliau menjelaskan surat al-Ma'un kepada santri-santrinya secara berulang-ulang sampai santri itu menyadari bahwa surat itu menganjurkan supaya kita memperhatikan dan menolong fakir-miskin, dan harus mengamalkan isinya. Bahkan ada salah seorang santri yang protes terhadap Kyai Ahmad Dahlan, bahwa kami sudah bisa membaca dan memahami Surah Al-Ma'un tersebut. Namun, menjawab, apakah anda sudah mengamalkannya? Para santri secara serentak menjawab belum dan Kyai langsung menyuruh santri ke pasar Yogyakarta dan sekitar untuk menyantuni anak-anak yatim dan fakir miskin. Bahkan dari kajian surah Al-Ma'un ini melahirkan Panti Asuhan Anak Yatim dan Orang Jompo milik Persyarikatan Muhammadiyah.¹³

¹¹ Sudarno Shobron, (Ed.), *Studi Kemuhammadiyah* ..., h. 44-45.

¹² Amir Hamzah Wirjosukarto, *Pembaharuan Pendidikan dan Pengajaran Islam* (Jember : Mutiara Offset, 1985), h. 98.

¹³ Statemen ini penulis langsung dapatkan dari Kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah di Pondok Hajjah Nuriyah Shabran Universitas Muhammadiyah Surakarta yang disampaikan oleh bapak Djindar Tamimi pada tahun 1985 dan lihat juga Film Sang Pencerah.

4. Pendidik/Guru

Sepanjang penelusuran yang telah dilakukan terhadap sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pendidikan Muhammadiyah tidak ditemukan suatu pernyataan khusus mengenai definisi pendidik (guru). Namun demikian, ada satu pernyataan bahwa “pendidik Muhammadiyah adalah seorang yang mengajar pada lembaga pendidikan Muhammadiyah, baik yang diangkat langsung oleh Persyerikatan maupun yang diperbantukan pada Persyerikatan”.¹⁴

Walaupun demikian, dalam berbagai pernyataan yang dikemukakan Muhammadiyah dapat dirangkum suatu pengertian bahwa guru dalam Muhammadiyah adalah tenaga kependidikan yang diberi kepercayaan menjadi penanggungjawab kurikuler, dengan tugas pokok sebagai pembimbing, pendidik, pengajar, dan pelatih peserta didik pada lembaga pendidikan Muhammadiyah. Pengertian guru seperti itu hamper tidak berbeda dengan pengertian guru pada umumnya. Akan tetapi diperhatikan penjelasan Muhammadiyah mengenai hakikat guru sebagai pendidik, ditemukan konsep yang spesifik, terutama, ketika Muhammadiyah memformulasikan guru sebagai : 1) pengemban amanah *khilafah*, 2) pengemban amanat Islamiyah, 3) Pembina akhlak Muhammadiyah, dan 4) pembimbing dan penyuluh.¹⁵

Dari keempat konsep guru disebutkan di atas, terlihat di sini bahwa pertama sekali Muhammadiyah menempatkan guru sebagai pengemban amanat *khilafah*.¹⁶ Secara kebahasaan, kata *khilafah* berarti perwakilan, sedangkan manusia sebagai pelakunya disebut *khalifah* yang berarti wakil.¹⁷ Oleh karena itu, *khilafah* tersebut

¹⁴ *Pedoman Guru Muhammadiyah* (Jakarta : PP Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran, 1977), h. 16.

¹⁵ *Pedoman Guru Muhammadiyah ...*, h. 16 dan 21.

¹⁶ Asnil Aidah Ritonga, (Ed.), *Pendidikan Islam : Dalam Buaian Arus Sejarah*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008), h. 217.

¹⁷ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (London : Macdonald & Evans Ltd., 1980), h. 257.

dikaitkan Muhammadiyah sesuai dengan pengertian “pengemban amanat *khilafah*” tersebut didefinisikan sebagai penanggungjawab pelaksana perwakilan Allah.¹⁸

5. Lembaga Pendidikan

K.H Ahmad Dahlan (1868-1923) adalah tipe *man of action* sehingga sudah pada tempatnya apabila mewariskan cukup banyak amal usaha bukan tulisan. Oleh sebab itu untuk menelusuri bagaimana orientasi filosofis pendidikan beliau musti lebih banyak merujuk pada bagaimana beliau membangun sistem pendidikan. Namun naskah pidato terakhir beliau yang berjudul *Tali Pengikat Hidup* menarik untuk dicermati karena menunjukkan secara eksplisit konsen beliau terhadap pencerahan akal suci melalui filsafat dan logika. Sedikitnya ada tiga kalimat kunci yang menggambarkan tingginya minat beliau dalam pencerahan akal, yaitu: (1) pengetahuan tertinggi adalah pengetahuan tentang kesatuan hidup yang dapat dicapai dengan sikap kritis dan terbuka dengan mempergunakan akal sehat dan istiqomah terhadap kebenaran akali dengan di dasari hati yang suci; (2) akal adalah kebutuhan dasar hidup manusia; (3) ilmu mantiq atau logika adalah pendidikan tertinggi bagi akal manusia yang hanya akan dicapai hanya jika manusia menyerah kepada petunjuk Allah swt.

Pribadi K.H. Ahmad Dahlan adalah pencari kebenaran hakiki yang menangkap apa yang tersirat dalam tafsir Al-Manar sehingga meskipun tidak punya latar belakang pendidikan Barat tapi ia membuka lebar-lebar gerbang rasionalitas melalui ajaran Islam sendiri, menyerukan ijtihad dan menolak taqlid. Dia dapat dikatakan sebagai suatu “model” dari bangkitnya sebuah generasi yang merupakan “titik pusat” dari suatu pergerakan yang bangkit untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi golongan Islam yang berupa ketertinggalan dalam sistem pendidikan dan kejumudan paham agama Islam. Berbeda dengan tokoh-tokoh nasional pada zamannya yang lebih menaruh

¹⁸ *Pedoman Guru Muhammadiyah ...*, h. 16.

perhatian pada persoalan politik dan ekonomi, K.H. Ahmad Dahlan mengabdikan diri sepenuhnya dalam bidang pendidikan.

Titik bidik pada dunia pendidikan pada gilirannya mengantarkannya memasuki jantung persoalan umat yang sebenarnya. Seiring dengan bergulirnya politik etis atau politik asosiasi (sejak tahun 1901), ekspansi sekolah Belanda diproyeksikan sebagai pola baru penjajahan yang dalam jangka panjang diharapkan dapat menggeser lembaga pendidikan Islam semacam pondok pesantren. Pendidikan di Indonesia pada saat itu terpecah menjadi dua: pendidikan sekolah-sekolah Belanda yang sekuler, yang tak mengenal ajaran-ajaran yang berhubungan dengan agama; dan pendidikan di pesantren yang hanya mengajar ajaran-ajaran yang berhubungan dengan agama saja.¹⁹

Kondisi internal pendidikan pesantren di satu pihak, model penyelenggaraan, krakter dan produk alumni model ala Barat di pihak lain, seperti dijelaskan di atas mendorong Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Melalui Muhammadiyah Ahmad Dahlan ingin mendirikan lembaga pendidikan yang memadukan dua karakter dari dua model lembaga pendidikan yang berkembang saat itu, mengajarkan semangat Islam dan semangat modern. Dengan demikian, umat Islam tidak hanya fasih berbicara tentang Islam, seperti alumni pesantren, tetapi juga berwawasan luas tentang perkembangan modern.²⁰

Pada dasarnya ada 4 jenis lembaga pendidikan yang dikembangkan Muhammadiyah, yaitu:

- a. Sekolah umum yang berada di bawah binaan Kementerian Pendidikan Nasional, dari Taman Kanak-kanak (Bustanul Athfal), SD, SMP, SMA dan SMK. Pada Sekolah-sekolah ini diberi pelajaran agama antara 8-12 jam perminggu, selain TK.

¹⁹ Amir Hamzah Wirjosukarto, *Pembaharuan ...*, h. 95-96.

²⁰ Sudarno Shobron, (Ed.), *Studi Kemuhammadiyah...*, h. 49.

- b. Madrasah-madrasah yang bernaung di bawah Kementerian Agama, yaitu: Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM), Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah (MTsM), dan Madrasah Aliyah Muhammadiyah (MAM).
- c. Pondok Pesantren, dari tingkatan SMP/MTs dan SMA/MA seperti Muallimin dan Mu'allimat Yogyakarta, Ponpes Darul Arqam Garut Jawa Barat. Di samping itu, ada lagi Pondok Pesantren Muhammadiyah bagi Mahasiswa, seperti: Pendidikan Kader Ulama Tarjih di Yogyakarta dan Pondok Hajjah Nuriyah Shabran Universitas Muhammadiyah Surakarta di Solo.
- d. Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM). PTM yang dimiliki Muhammadiyah baik yang bernaung di bawah Kemendiknas maupun Kemenag sebanyak 145 buah.²¹ Sebagai contoh Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Hamka Jakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan lain-lain.

Lembaga pendidikan Muhammadiyah telah memberi warna pemikiran keislaman khususnya dimasukkannya mata pelajaran umum ke madrasah dan mata pelajaran agama ke dalam kurikulum sekolah umum. Diharapkan dengan cara ini seorang tamatan madrasah atau sekolah umum akan muncul pribadi-pribadi muslim yang utuh.²²

Kelahiran Muhammadiyah pada tahun 1912, tidak bisa dipisahkan dari situasi sosial saat itu; situasi keberagamaan umat, masalah kemiskinan, masalah pendidikan dan berapa masalah lainnya. Situasi pendidikan Islam yang memprihatinkan dan bertentangan dengan system pendidikan penjajah yang dikembangkan di Indonesia, melatarbelakangi gagasan Ahmad Dahlan memperkenalkan model baru sistem pendidikan Islam. Sistem yang dikembangkan itu adalah sintesis, dengan sistem pendidikan tradisional yang berbasis di pesantren, dengan sistem pendidikan sekolah yang dikembangkan pemerintah kolonial. Sistem pendidikan yang ditawarkan

²¹ Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, *Direktori ...*, h.xiii-xiv dan 125-126.

²² Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Peta Bumi Intelektual Islam di Indonesia*, (Bandung, Mizan, 1995), hlm. 116-117.

Muhammadiyah adalah mencoba memadukan aspek-aspek keagamaan dengan aspek keduniaan. Sedangkan tujuan akhir yang hendak dicapai ialah menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan agama yang memadai dan memiliki skill yang memadai.

6. Kelemahan Pendidikan Muhammadiyah

Ki Sarino Mangunpranoto mengatakan, yang diperlukan pendidikan Muhammadiyah adalah pembangunan landasan kultural-filosofis, yaitu kaidah-kaidah fundamental pemikiran Islam di Indonesia yang mempunyai kaitan sosio-historis dengan perubahan sosio-kultural nasionalisme Indonesia. Dengan landasan itu pendidikan Muhammadiyah akan menumbuhkan *character-building* dan *attitude* yang beranjak dari pertumbuhan dari dalam pribadi seseorang atas dorongan *inner potential* (potensi dari dalam diri sendiri). Sedangkan sifat budi pekerti, akhlak dan moral-rohani akan tumbuh karena dorongan adat istiadat, kebiasaan dan pergaulan hidup. Ketiganya itu manunggal dalam pondok pesantren.²³

Kuntowijoyo menilai sesungguhnya sistem pendidikan Muhammadiyah ditujukan mempertahankan iman dan menyesuaikan lembaga-lembaga keagamaan dengan perubahan sosial. Muhammadiyah menyadari bahwa untuk hidup di dalam masyarakat industri orang harus belajar melalui pendidikan formal yang mengajarkan ketrampilan-ketrampilan tertentu, maka pendidikan Muhammadiyah berusaha memenuhi pasaran kerja baru dalam birokrasi, industri, pendidikan, perdagangan dan sebagainya. Namun dalam hal ini yang hilang dengan rasionalisasi sistem Muhammadiyah, adalah sikap solidaritas sosial, karena ternyata pendidikan Muhammadiyah telah melahirkan pola individualisme. Akibatnya, tidak memiliki basis budaya yang jelas. Selanjutnya, penekanan kepada pemurnian ajaran dapat mengakibatkan kecenderungan gaya hidup praktis yang mengabaikan simbol-simbol. Dalam hal ini nilai dan bentuk simbol dalam sistem pendidikan Muhammadiyah

²³ M. Amien Rais, (Ed.), *Pendidikan Muhammadiyah dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta : PLP2M, 1984), h. 33-34.

mengalami erosi yang sangat deras; kecakapan-kecakapan berorganisasi dapat menjurus kepada hubungan formal, sehingga Muhammadiyah itu ibarat tetumbuhan yang menghasilkan buah yang bergizi tetapi tanpa bunga dan rasa.²⁴

Di samping itu, kelemahan pendidikan Muhammadiyah yang memadukan pengetahuan agama dan umum, adalah ketidak-mampuannya melahirkan ulama yang intelek, sehingga Muhammadiyah kekurangan kader ulama. Sedangkan peran ulama sangat diharapkan oleh organisasi Muhammadiyah untuk mengarahkan, membimbing dan mengevaluasi segala aktivitas warga Muhammadiyah.

C. Penutup

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Muhammadiyah yang didirikan Ahmad Dahlan telah berhasil melahirkan generasi Islam Indonesia yang memiliki wawasan keislaman yang baik. Namun, pendidikan Muhammadiyah juga belum mampu melahirkan ulama yang intelek yang menjadi harapan sang pendiri sebagai pembimbing warga Muhammadiyah (Umat Islam).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Peta Bumi Intelektual Islam di Indonesia*, (Bandung, Mizan, 1995).
- Amir Hamzah Wirjosukarto, *Pembaharuan Pendidikan dan Pengajaran Islam* (Jember : Mutiara Offset, 1985).
- Ahmad Jainuri, *Muhammadiyah Gerakan Reformasi Islam di Jawa pada Awal Abad ke 20*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1985).
- Alwi Shihab, *Membendung Arus : Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen Di Indonesia*, (Bandung : Mizan, 1998).

²⁴ M. Amien Rais, (Ed.), *Pendidikan Muhammadiyah ...*, h. 37-41.

- Asnil Aidah Ritonga, (Ed.), *Pendidikan Islam : Dalam Buaihan Arus Sejarah*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008).
- Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (London : Macdonald & Evans Ltd., 1980).
- Khozin, *Jejak-Jejak Pendidikan Islam di Indonesia : Rekonstruksi Sejarah Untuk Aksi*, (Malang : UMM, 2006).
- M. Amien Rais, (Ed.), *Pendidikan Muhammadiyah dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta : PLP2M, 1984).
- M. Rusli Karim (Ed.), *Muhammadiyah Dalam Kritik dan Komentar*, (Jakarta : Rajawali Press, 1986).
- Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, *Direktori Perguruan Tinggi Muhammadiyah 2006*.
- Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, *Panduan Pelatihan Kepemimpinan Sekolah Muhammadiyah*, 2008.
- M. Mukhsin Jamil, dkk., *Nalar Islam Nusantara : Studi Islam ala Muhammadiyah, al-Irsyad, Persis dan NU*, (Jakarta : DEPAGRI, 2007).
- MT. Arifin, *Muhammadiyah Potret Yang Berubah*, (Surakarta: Institut Gelanggang Pemikiran Filsafat Sosial Budaya dan Kependidikan, 1990).
- Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam : Pendidikan Historis, Teoritis*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002).
- Sudarno Shobron, (Ed.), *Studi Kemuhammadiyah : Kajian Historis, Ideologis dan Organisasi* (Surakarta : LPID UMS, 2006), h. 153.
- Pedoman Guru Muhammadiyah* (Jakarta : PP Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran, 1977).
- www.google.com., "Konsep Pendidikan Perspektif Ahmad Dahlan", diakses tanggal 15 Maret 2012.

BAB IV

PENDIDIKAN PESANTREN

(KEBIJAKAN DAN SISTEM PESANTREN)

Oleh: Raihanah

A. Pendahuluan

Pesantren merupakan sistem pendidikan khas Indonesia. Sejak awal pertumbuhannya, fungsi utama pondok pesantren adalah menyiapkan santri yang mendalami dan menguasai ilmu agama Islam (*tafaqquh fiddin*) diharapkan dapat mencetak kader ulama dan turut mencerdaskan kehidupan bangsa, dakwah guna menyebarkan agama Islam, dan sebagai benteng pertahanan umat dalam bidang akhlak. Sejalan dengan fungsi hal ini, materi yang diajarkan di pesantren semuanya terdiri dari materi agama yang diambil dari kitab Islam klasik yang berbahasa Arab.

Seiring dengan perkembangan zaman, fungsi pesantren pun bertambah, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keagamaan, tetapi berfungsi juga sebagai pusat perkembangan masyarakat di berbagai sektor kehidupan. Dalam perkembangan selanjutnya karena dipengaruhi perkembangan pendidikan dan tuntutan dinamika masyarakat, pesantren kemudian menyelenggarakan pendidikan jalur sekolah/formal.

Bagaimana sistem pendidikan yang diselenggarakan di lembaga pendidikan Islam yang bernama pesantren ini dan apa kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam pelaksanaan sistem pendidikan tersebut, akan dibahas secara sederhana di tulisan ini.

B. Pembahasan

A. Pengertian Pesantren dan Elemen-elemennya

Perkataan pesantren berasal dari kata santri dengan awalan *pe-* dan akhiran *-an* berarti tempat tinggal para santri. Soegarda menambahkan pengertian santri adalah orang yang belajar agama Islam, sehingga dengan demikian pesantren mempunyai arti sebagai tempat orang berkumpul untuk belajar ilmu agama Islam.

Prof. Johns, sebagaimana dikutip Zamakhsyari Dhofier, berpendapat bahwa istilah santri berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru mengaji. Sedang C.C. Bergi berpendapat bahwa istilah tersebut berasal dari istilah *shastri* yang dalam bahasa India yaitu orang yang tahu/ahli tentang buku-buku suci agama Hindu atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Ada kaitannya antara istilah santri yang digunakan setelah datangnya agama Islam dengan istilah santri yang digunakan sebelum datangnya agama Islam ke Indonesia. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia sudah menganut beraneka ragam agama dan kepercayaan termasuk di antaranya agama Hindu. Sehingga istilah santri itu telah dikenal di kalangan masyarakat Indonesia sebelum Islam masuk. Dan ada juga yang menyamakan tempat pendidikan itu dengan Budha dari segi bentuk asrama.¹

Pondok, masjid, santri, pengajaran kitab-kitab Islam klasik dan kiai merupakan lima elemen dasar dari tradisi pesantren. Ini berarti bahwa suatu lembaga pengajian yang telah berkembang hingga memiliki kelima elemen tersebut akan berubah statusnya menjadi pesantren.²

1. Pondok

Istilah pondok berasal dari bahasa Arab *funduq* yang berarti tempat bermalam, hotel. Istilah pondok juga disamakan dengan istilah asrama. Sebuah pesantren mesti memiliki asrama sebagai tempat tinggal santri dan kyai. Di tempat inilah terjadi komunikasi antara santri dan kiai. Di pondok, seorang santri patuh dan taat terhadap peraturan yang diadakan, ada kegiatan pada waktu tertentu yang mesti dilaksanakan oleh santri. Di pondok atau asrama inilah tempat

¹ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi tentang pandangan hidup kiai*, Jakarta: LP3ES, 1983, h. 18.

² Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi tentang pandangan hidup kiai*, Jakarta: LP3ES, 1983, h. 44

implementasi ilmu yang diperoleh di kelas, sehingga para santri tidak hanya bisa *having* tetapi juga bisa langsung *being* terhadap ilmu.³

Pondok inilah yang menjadi ciri khas pendidikan pesantren yang membedakannya dengan sistem pendidikan tradisional di masjid-masjid. Sistem pondok ini bukan saja merupakan elemen paling penting dalam tradisi pesantren tetapi juga penopang utama bagi pesantren untuk bisa terus berkembang.

2. Masjid

Masjid diartikan secara harfiah sebagai tempat sujud dalam shalat. Fungsi masjid tidak hanya untuk shalat tetapi juga mempunyai fungsi lain seperti pendidikan. Di zaman Rasulullah masjid berfungsi sebagai tempat ibadah dan urusan-urusan sosial kemasyarakatan serta pendidikan. Kedudukan masjid sebagai pusat pendidikan dalam tradisi pesantren merupakan manifestasi universalisme dari sistem pendidikan Islam tradisional.⁴

Suatu pesantren mutlak mesti memiliki mesjid sebab disitulah akan dilangsungkan proses pendidikan dalam bentuk komunikasi belajar mengajar antara kiai dengan santri. Kendati pun pada saat sekarang pesantren telah memiliki lokal belajar yang banyak sebagai tempat belajar mengajar, namun masjid masih difungsikan sebagai tempat belajar khususnya belajar kitab kuning dengan sistem sorogan dan bandongan.

3. Pengajian Kitab Kuning (kitab klasik).

Kitab-kitab Islam klasik yang lebih dikenal dengan istilah "kitab kuning" atau "Kitab Gundul"⁵ yaitu kitab-kitab yang ditulis pada zaman pertengahan. Kepintaran dan kemahiran seorang santri diukur

³ H.M. Amin Haedari, dkk., *Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Moderitas dan Tantangan Kompleksitas Global*, (Jakarta: IRD Press, 2004), h. 32.

⁴ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi tentang pandangan hidup kiai*, Jakarta: LP3ES, 1983, h. 49.

⁵ Kitab Kuning karena kertas yang digunakan untuk menulis kitab tersebut memang berwarna kuning atau juga bisa dipaham kalau kitab kuning itu karena sudah terlalu lama terbitnya sehingga kertas yang sebelumnya putih menjadi kuning, sedangkan Kitab Gundul adalah kitab kuning yang berbahasa Arab tanpa *harakah* (*haris*) sehingga dinamai di kalangan santri dan masyarakat sebagai kitab gundul.

dari kemampuannya membaca, menerjemahkan, serta menjelaskan (*syarah*) isi kitab tersebut. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut seorang santri dituntut mahir dalam ilmu-ilmu bantu seperti *nahwu*, *sharaf*, *balaghah*, dan sebagainya.

Kitab-kitab klasik yang diajarkan di pesantren dapat digolongkan kepada 8 kelompok yakni *nahwu/sharaf*, *fiqh*, *ushul fiqh*, *hadis*, *tafsir*, *tauhid*, *tasawuf*, dan etika, serta cabang-cabang ilmu yang lainnya seperti *tarikh* dan *balaghah*.⁶

4. Santri

Santri adalah orang yang belajar di pesantren. Santri dapat digolongkan kepada dua kelompok yakni santri mukim dan santri kalong. 1) santri mukim ialah santri yang datang dari tempat jauh dan tidak memungkinkan untuk bolak balik ke rumahnya sehingga dia mondok (tinggal) di asrama. Sebagai santri mukim mereka memiliki kewajiban-kewajiban tertentu. 2) Santri kalong yaitu santri yang berasal dari daerah sekitar yang memungkinkan mereka pulang pergi dari pesantren ke tempat kediaman masing-masing.

Pada pesantren yang masih tergolong tradisional, lamanya santri mukim di tempat itu bukan ditentukan oleh ukuran tahun atau kelas, tetapi diukur dari kitab yang dibaca dan dipahaminya.

5. Kiai

Kiai adalah tokoh sentral dalam satu pesantren, maju mundurnya pesantren ditentukan oleh wibawa dan kharisma sang kiai.⁷ Kebanyakan kiai di Jawa beranggapan bahwa suatu pesantren dapat diibaratkan sebagai suatu kerajaan kecil dimana kiai merupakan

⁶ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi tentang pandangan hidup kiai*, Jakarta: LP3ES, 1983, h. 50.

⁷ Menurut asal-usulnya, perkataan kiai dalam bahasa Jawa dipakai untuk tiga jenis gelar yang saling berbeda: 1) Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap sebagai keramat seperti "kiai garuda kencana" dipakai untuk sebutan kereta emas yang ada di keraton Yogyakarta, 2) Gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya, 3) Gelar yang diberikan oleh masyarakat pada seorang ahli agama Islam yang memiliki pesantren dan mengajarkan kitab-kitab Islam klasik kepada santrinya. Lihat Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi tentang pandangan hidup kiai*, Jakarta: LP3ES, 1983, h. 55.

sumber mutlak dari kekuasaan dan kewenangan (*power and authority*) dalam kehidupan dan lingkungan pesantren. Para santri selalu mengharap dan berpikir bahwa kiai yang dimuliakannya merupakan orang yang percaya penuh dengan dirinya sendiri baik dalam soal-soal pengetahuan Islam, maupun dalam bidang kekuasaan dan manajemen pesantren. Disisi lain, masyarakat biasanya mengharapkan seorang kiai dapat menyelesaikan persoalan-persoalan keagamaan keagamaan praktis sesuai dengan kedalaman pengetahuan yang dimilikinya. Semakin tinggi kitab yang diajarkannya maka semakin ia akan dikagumi.⁸

B. Sejarah Pesantren

Sistem pendidikan di pesantren sebenarnya diadopsi dari sistem akulturasi antara tradisi Hindu dan Budha, yang telah berkembang jauh sebelum Islam datang ke Nusantara pada awal abad ke 13 M. Ketika Islam masuk ke Nusantara, kepercayaan kepada animisme dan dinamisme sedang merajalela, sementara pendekatan-pendekatan yang ramah kepada tradisi lokal (seperti kepercayaan, kebatinan, kejawen, yang semuanya *notabene* lebih dekat dengan tradisi Hindu-Budha) ini sangat digemari oleh para Walisongo dalam menyebarkan dan mengembangkan Islam pada masyarakat Jawa saat itu.

Dalam salah satu bagian dari manuskrip Jawa kono, *Babad Tanah Jawi*, diterangkan bahwa pada abad ke 15 Sunan Ampel telah membangun lembaga pendidikan Islam, setelah itu diikuti oleh Sunan Giri yang kemudian diikuti oleh para wali yang lainnya. Upaya ini membuktikan bahwa peran walisongo sangat besar dalam mengembangkan sistem pendidikan Islam model pesantren ini.⁹

Pada sejarah awalnya, pesantren didirikan dengan misi khusus yakni: *pertama*, sebagai wahana kaderisasi ulama yang nantinya

⁸ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi tentang pandangan hidup kiai*, Jakarta: LP3ES, 1983, h. 56.

⁹ Ainurafiq, Dawam dan Ahmad Ta'arifin, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*, t.t.: Listafariska Putra, 2004, h. 5.

diharapkan mampu menyebarkan agama di tengah masyarakat; *kedua*, membentuk jiwa santri yang mempunyai kualifikasi moral dan religius; *ketiga*, menanamkan kesadaran holistik bahwa belajar merupakan kewajiban dan pengabdian kepada Tuhan, bukan hanya untuk meraih prestasi kehidupan dunia.¹⁰

Dari ini dapat dipahami bahwa meski pesantren diakui sebagai lembaga pendidikan yang *indigenous*, asli Indonesia, namun ternyata masih ada kemiripan dengan sistem *gurukulla* di India. Sejatinya *gurukulla* juga memakai sistem pemondokan (*boarding school*), ia juga merupakan tempat pembelajaran kitab-kitab suci agama Hindu seperti juga pesantren.

Banyak para sarjana berpendapat bahwa pada awal abad pertama sejarahnya, Islam lebih banyak merupakan kegiatan tarekat dengan zikir dan wirid sebagai amalannya, di mana para kiai pimpinan tarekat mewajibkan pengikutnya untuk mengadakan *suluk* selama 40 hari dalam satu tahun. Untuk itu para kiai menyiapkan ruangan-ruangan khusus untuk penginapan dan tempat memasak di sekitar mesjid. Selain amalan-amalan tarekat, pusat-pusat pesantren semacam ini juga mengajarkan kitab-kitab dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan agama Islam. Sehingga pesantren pada kala itu, menurut kesimpulan Dhofier, merupakan kombinasi antara madrasah dan pusat kegiatan tarekat.¹¹ Dan pola inilah yang pada akhirnya tumbuh pesat di Jawa sehingga gelar “kiai” lebih lazim dipakai, yakni untuk menunjukkan seorang sarjana muslim yang menguasai bidang tauhid, fiqh, sekaligus juga seorang ulama sufi.

Dalam sejarah Islam di Jawa, akhir abad ke-19 juga dikenal dengan munculnya semangat baru dalam kehidupan keagamaan (*religious revivalism*). Sebagai akibat banyaknya jumlah haji, guru-guru ngaji dan murid-murid pesantren sehingga tumbuh pula kesadaran bahwa Islam dapat memberi sumbangan bagi tumbuhnya rasa

¹⁰ Ainurrafiq Dawam dan Ahmad Ta'arifin, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*, t.t.: Listafariska Putra, 2004, h. 6.

¹¹ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi tentang pandangan hidup kiai*, Jakarta: LP3ES, 1983, h. 34.

nasionalisme. Perkembangan pesantren juga ditengarai karena dibukanya Terusan Suez pada tahun 1869 sehingga memungkinkan banyak pelajar Indonesia dapat mengikuti pendidikan di Mekkah.¹² Sepulangnya ke Indonesia, para pelajar yang mendapat gelar “haji” ini mengembangkan pendidikan agama di tanah air yang bentuk kelembagaannya kemudian disebut pesantren.

Pesantren berkembang semakin pesat dengan adanya sikap non-kooperatif ulama terhadap kebijakan “politik etis” pemerintah kolonial Belanda pada akhir abad ke 19. Politik etis tersebut dimaksudkan sebagai balas jasa kepada rakyat Indonesia dengan memberikan pendidikan modern termasuk budaya Barat. Namun pendidikan yang diberikan sangatlah terbatas sehingga masih banyak rakyat yang buta huruf.¹³

Para ulama kemudian mendirikan pesantren di daerah-daerah yang jauh dari kota untuk menghindari intervensi pemerintah kolonial Belanda serta memberi kesempatan rakyat yang belum mendapat pendidikan. Pada tahun 1860-an, jumlah pesantren mengalami lonjakan yang luar biasa terutama di daerah Jawa.

Perubahan penting terjadi dalam tahun 1910 di mana pesantren mulai membuka pondok untuk murid-murid wanita. Pada tahun 1920-an beberapa pesantren bahkan mulai mengajarkan pelajaran umum seperti Bahasa Indonesia, Bahasa Belanda, berhitung ilmu bumi dan sejarah.¹⁴

Diperkenalkannya sistem madrasah, kesempatan pendidikan untuk wanita, dan pengajaran pengetahuan umum dalam lingkungan pesantren merupakan jawaban positif para kiai terhadap perubahan-perubahan sebagai akibat politik Belanda di Indonesia.

¹² Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi tentang pandangan hidup kiai*, Jakarta: LP3ES, 1983, h. 37.

¹³ H.M. Sultan Masyhud dan Muh. Khusnurdilo, *Manajemen Pondok Pesantren*, Jakarta: Diva Pustaka, 2005, h. 2.

¹⁴ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi tentang pandangan hidup kiai*, Jakarta: LP3ES, 1983, h. 38.

Sejak diperkenalkannya sistem madrasah di lingkungan pesantren, salah satu ciri penting daripada tradisi pesantren menghilang yaitu tradisi "santri kelana". Diterapkannya sistem kelas yang bertingkat dan ketergantungan kepada ijazah formal sebagai tanda keberhasilan pendidikan seorang murid menyebabkan seorang santri harus tinggal dalam satu pesantren saja untuk waktu bertahun-tahun. Namun demikian, pesantren dapat memetik hasil positif dari sistem madrasah, yaitu keberhasilan para kiai mengkonsolidasikan kedudukan pesantren dalam menghadapi perkembangan sekolah-sekolah Belanda. Dalam tahun 1920-an dan 1930-an, jumlah pesantren besar dan santri-santrinya melonjak berlipat ganda, sementara jumlah sekolah-sekolah Belanda juga terus bertambah.

Pengaruh dominan dari pesantren mulai menurun secara drastis setelah penyerahan kedaulatan pada bulan Desember 1949. Setelah penyerahan kedaulatan itu pemerintah Indonesia menggalakkan dan mengembangkan sekolah-sekolah umum seluas-luasnya. Di samping itu, jabatan-jabatan dalam administrasi modern terbuka luas bagi rakyat Indonesia yang terdidik dalam sekolah-sekolah umum tersebut. Hal ini mengakibatkan jumlah anak muda yang tertarik dengan pendidikan pesantren semakin menurun dibandingkan dengan mereka yang mengikuti pendidikan sekolah umum.¹⁵

Pesantren pada awal abad 20-an, ada kalangan yang mengupayakan pesantren memberikan pendidikan atau pelajaran umum bagi para santrinya. Terjadi silang pendapat ada yang menyetujui, namun ada pula yang tidak menyetujui sama sekali. Sebagian pengamat menganggap pondok pesantren dengan karakter khas yang tradisional harus tetap dijaga dan dipertahankan. Namun justru yang lain tertarik untuk mendorong pesantren agar mengadopsi elemen-elemen budaya luar, antara lain masuknya pendidikan sekolah atau madrasah.¹⁶

¹⁵ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi tentang pandangan hidup kiai*, (Jakarta: LP3ES, 1983), h. 41.

¹⁶ Nurkholis Majid, *Merumuskan Kembali Tujuan Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: P3M, 1985), h. 126

Akhirnya, terjadi persentuhan antara pondok pesantren dengan madrasah atau sekolah, walaupun saat itu, kondisi pondok pesantren amat beragam, baik sisi kelebihan maupun kekurangannya. Sejarah mencatat, pondok pesantren (surau) yang pertama kali membuka madrasah formal ialah Tawalib di Padang Panjang pada tahun 1921 dibawah pimpinan Syekh Abdul Karim Amrullah, ayahnya Hamka. Sedangkan di Jawa Pondok pesantren Tebuireng, Jombang pada tahun 1919 didirikan madrasah formal, bernama Salafiyah yang diasuh oleh K. H. Ilyas. Menyusul pondok pesantren modern Gontor Ponorogo pada 1926 oleh K.H. Imam Zarkasi dan K.H.Sahal.¹⁷

C. Kebijakan dan Sistem Pendidikan Pesantren

Sistem pendidikan pesantren menurut Mastuhu dapat dikelompokkan menjadi 12 unsur, yaitu: 1) tujuan; 2) filsafat dan tata nilai; 3) struktur organisasi pesantren; 4) lingkungan pendidikan pesantren; 5) kiai dan ustaz; 6) santri; 7) pengurus; 8) interaksi pelaku; 9) kurikulum dan sumber belajar; 10) proses belajar mengajar dan evaluasi; 11) pengelolaan dan dana; 12) sarana dan alat pendidikan.¹⁸

1. Tujuan

Secara umum tujuan pesantren adalah lebih menekankan pada aspek keagamaan dalam rangka menegakkan syariat Islam dalam kehidupan di masyarakat sehari-hari terutama moral keagamaan. Menurut Mastuhu, orientasi tujuan pendidikan pesantren lebih banyak melihat ke dalam yakni pandangan yang berpendapat bahwa dengan tegak dan tersebarnya Islam di tengah kehidupan maka kehidupan bersama dengan sendirinya akan menjadi baik.¹⁹

Dalam merumuskan tujuan pendidikan pesantren, agaknya tidak banyak kiai yang mampu secara sadar merumuskan tujuan

¹⁷ Zuhairini, dkk, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hal.193

¹⁸ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren; Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Pendidikan Pesantren*,(Jakarta: INIS, 1993), h. 68-146

¹⁹ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren; Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Pendidikan Pesantren*,(Jakarta: INIS, 1993), h. 53 dan 68.

pendidikannya dan menuangkan dalam rencana kerja atau program. Tidak adanya perumusan tujuan itu disebabkan adanya kecenderungan visi dan tujuan pesantren sepenuhnya berada ditangan kiai yang bersangkutan atau bersama-sama dengan para pembantunya secara intuitif dan disesuaikan dengan suasana pesantrennya.²⁰

2. Filsafat dan tata nilai

Ajaran Islam dijadikan sumber filsafat dan tata nilai dalam pendidikan bahkan dalam kehidupan pesantren sehari-hari. Sistem pendidikan pesantren didasarkan atas dasar dialog yang terus menerus antara kepercayaan terhadap ajaran dasar agama yang diyakini memiliki nilai kebenaran relatif. Nilai agama dengan kebenaran mutlak mempunyai supermasi atas nilai agama dengan kebenaran relatif, dan kebenaran relatif ini tidak boleh bertentangan dengan kebenaran mutlak. Dalam Islam pemahaman terhadap ajaran dasar agama berpusat masalah tauhid atau ke-Esaan Tuhan.²¹

Hakekat pendidikan terletak pada "pendidikan rohaniannya", yang pada masa lalu telah berhasil melahirkan kader-kader ulama' dan pemimpin umat dalam berbagai kehidupan. Pendidikan rohani yang dimaksud adalah pembinaan iman dan amal shaleh seperti kebiasaan sholat berjamaah, etika dan sopan santun, *ukhuwah* (persaudaraan), *thalabul ilmi* (menuntut ilmu), taat dan patuh dan sebagainya.

3. Struktur organisasi pesantren.

Pada prinsipnya struktur organisasi pesantren meliputi: a) status kelembagaan, b) struktur organisasi, c) gaya kepemimpinan, d) suksesi kepemimpinan. Status kelembagaan dapat dikelompokkan menjadi dua yakni sebagai milik sendiri atau milik institusi. Bentuk struktur organisasi yang digunakan oleh pesantren biasanya disesuaikan dengan kebutuhan, kiai merupakan pimpinan spiritual dan tokoh kunci. Gaya kepemimpinan merupakan seni dalam memanfaatkan sumber daya baik dana, sarana dan tenaga dalam lingkungan pesantren dengan

²⁰ Nurcholis Majid, *Bilik-Bilik Pesantren*. h. 6

²¹ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren ; Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, 1993) h. 70.

mengarahkan dan menggerakkan unsur pelaku untuk mencapai tujuan pesantren. Gaya kepemimpinan yang paling kental di pesantren adalah gaya kharismatik. Sedangkan suksesi kepemimpinan adalah proses penyiapan dan penggantian dalam sebuah organisasi. Pada pesantren milik pribadi, suksesi kepemimpinan berdasarkan garis keturunan, sedangkan pada pesantren milik institusi tampaknya masih dipengaruhi oleh faktor keturunan pendiri tetapi faktor latar belakang pendidikan mulai menggeser faktor keturunan.²²

4. Lingkungan pendidikan pesantren.

Konsep disini meliputi lingkungan masyarakat dalam pesantren yang terdiri dari lingkungan fisik dan lingkungan non fisik. Lingkungan fisik meliputi sarana dan prasarana yang ada di pesantren sedangkan lingkungan non fisik meliputi kegiatan yang dilakukan selama 24 jam dalam relasi antar pelaku yang ada di pesantren.

5. Kiai dan ustaz

Kiai adalah tokoh inti yang memberikan pendidikan dan pengajaran. Figur kiai sangat berperan dalam pengembangan akhlak dan mental santri dan masyarakat sekitar pesantren.²³ Ustaz adalah santri kiai yang dipercaya untuk mengajar agama kepada para santri dan disupervisi oleh kiai.

6. Santri

Peserta didik pada pendidikan pesantren baik santri mukim maupun santri kalong.

7. Pengurus/Pengelola pesantren

Adalah beberapa warga pesantren yang "distatus" bukan kiai, bukan ustaz, bukan pula santri, tetapi keberadaan dan peranan mereka sangat diperlukan untuk ikut mengurus dan memajukan pesantren bersama-sama.²⁴

²² Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren ; Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, 1993), h.73-89.

²³ Amal Fathullah Zarkasyi, "Pondok Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan dan Dakwah", dalam Adi Sasono dkk., *Solusi Islam atas Problema Umat; Ekonomi, Pendidikan dan Dakwah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1988), h. 118

²⁴ H. Sahriansyah, dkk., *Profil Pondok Pesantren di Kabupaten Balangan dan Hulu Sungai Utara*, Banjarmasin, Puslit IAIN Antasari, 2005, h. 22.

8. Interaksi pelaku

Interaksi pelaku pada pesantren menggambarkan status sistem pelapisan sosial dan tingkat keeratan hubungan antara pelaku dalam pesantren. Secara umum tingkat status tersebut pada tingkat pertama adalah kiai; kedua, ustaz; ketiga, santri, keempat, pengurus. Tingkat keeratan hubungan antar pelaku atau sesama pelaku dapat menimbulkan perilaku yang sangat kuat untuk menerima ide-ide baru yang datang dari luar.²⁵

9. Kurikulum dan sumber belajar

Kurikulum yang digunakan di pesantren secara umum terdiri dari: sebagai pendidikan non formal yang khusus mempelajari kitab-kitab Islam klasik; juga melaksanakan pendidikan formal madrasah dan/atau sekolah umum Islam; serta menyelenggarakan pendidikan tinggi agama Islam. Sementara sumber belajar pendidikan formal dan pendidikan tinggi agama Islam mengikuti kurikulum dari pemerintah. Selain kitab-kitab Islam klasik banyak buku-buku pelajaran umum dan buku-buku Islam kontemporer yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia dipakai sebagai sumber belajar di pesantren.²⁶

10. Proses belajar mengajar dan evaluasi.

Berikut ini beberapa metode pembelajaran tradisional yang menjadi ciri utama proses pembelajaran di pondok pesantren salafiyah:²⁷

a. Metode Sorogan

Sorogan, berasal dari kata *sorog* (bahasa Jawa), yang berarti menyodorkan, sebab setiap santri menyodorkan kitabnya di hadapan kiai atau pembantunya (*badal*, asisten kiai). Sistem sorogan ini termasuk belajar secara individual, di mana seorang santri berhadapan langsung dengan seorang guru, dan

²⁵ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren; Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, 1993), h. 141.

²⁶ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren; Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, 1993), h. 142-143.

²⁷ Departemen Agama RI, *Profil Pondok Pesantren Mu'adalah*, 2004, h. 21-30.

terjadi interaksi saling mengenal diantara keduanya. Metode pembelajaran ini termasuk metode pembelajaran yang sangat bermakna karena santri akan merasakan hubungan yang khusus ketika berlangsung kegiatan pembacaan kitab di hadapan kiai. Mereka tidak hanya senantiasa dapat dibimbing dan diarahkan cara membacanya tetapi dapat dievaluasi perkembangan kemampuannya.

Metode sorogan adalah bagian wajib dalam pesantren. Metode ini telah menjadi bagian pembelajaran pesantren dari berabad-abad tahun yang lalu. Seiring perkembangan dalam dunia pendidikan seperti munculnya sekolah-sekolah binaan pemerintah bahkan sampai sekolah yang bertaraf nasional dan internasional, pesantren tetap konsisten dengan metode khasnya itu. Memang seakan terjadi stagnasi disini. Di mana lembaga-lembaga pendidikan modern banyak bermunculan dengan mengemborkan standar dan mutu kualitas masing-masing, justru pesantren tetap istiqomah dengan metode klasikalnya.

b. Metode Wetonan/Bandongan

Wetonan, istilah weton ini berasal dari kata *wektu* (bahasa Jawa) yang berarti waktu, sebab pengajian tersebut diberikan pada waktu-waktu tertentu, yaitu sebelum dan sesudah melakukan shalat fardu. Metode weton ini merupakan metode kuliah, para santri mengikuti pelajaran dengan duduk di sekeliling kiai yang menerangkan pelajaran secara kuliah, santri menyimak kitab masing-masing dan membuat catatan padanya. Istilah wetonan ini di Jawa Barat disebut dengan bandongan.

Dalam sistem ini sekelompok murid (antara 5 sampai 500) mendengarkan Kiai yang membaca, menerjemahkan, menerangkan dan seringkali mengulas buku-buku Islam dalam bahasa Arab. Setiap murid memperhatikan buku/ kitabnya sendiri dan membuat catatan-catatan (baik arti maupun keterangan) tentang kata-kata atau buah pikiran yang sulit. Kelompok kelas dari sistem bandongan ini disebut *halaqah* yang artinya lingkaran murid, atau sekelompok santri yang belajar di

bawah bimbingan seorang guru. Metode pengajaran *bandungan* ini adalah metode bebas, sebab tidak ada absensi santri, dan tidak ada pula sistem kenaikan kelas. Santri yang sudah menamatkan sebuah kitab boleh langsung menyambung ke kitab lain yang lebih tinggi dan lebih besar.

Untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran di atas, seorang kiai biasa melakukannya melalui dua macam tes. Pada setiap tatap muka atau pada tatap muka tertentu. Atau pada saat telah dikhatamkannya pengkajian terhadap suatu kitab tertentu.

c. Metode Musyawarah/BahtsulMasa'il

Metode musyawarah atau dalam istilah lain *Bahtsul Masa'il* merupakan metode pembelajaran yang lebih mirip dengan metode diskusi atau seminar. Beberapa orang santri dengan jumlah tertentu membentuk *halaqah* yang dipimpin langsung oleh kiai atau ustadz, atau mungkin juga santri senior, untuk membahas atau mengkaji suatu persoalan yang telah ditentukan sebelumnya.

Untuk melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode ini, kiai atau ustadz biasanya mempertimbangkan ketentuan berikut: Peserta musyawarah adalah para santri yang berada pada tingkat menengah atau tinggi; Peserta musyawarah tidak memiliki perbedaan kemampuan mencolok. Ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengurangi kegagalan musyawarah; Topik yang dimusyawarahkan biasanya ditentukan terlebih dahulu oleh kiai atau ustadz pada pertemuan sebelumnya.

d. Metode Pengajian Pasaran

Metode pengajian pasaran adalah kegiatan belajar para santri melalui pengkajian materi (kitab) tertentu pada seorang kiai/ustadz yang dilakukan oleh sekelompok santri dalam kegiatan yang terus menerus (maraton) selama tenggang waktu tertentu.

Dalam perspektif lebih luas, pengajian pasaran ini dapat dimaknai sebagai proses pembentukan jaringan-jaringan kitab-

kitab tertentu di antara pesantren yang ada. Mereka yang mengikuti pengajian pasaran di tempat tertentu akan menjadi bagian dari jaringan pengajian pesantren itu. Dalam konteks pesantren hal ini amat penting karena akan memperkuat keabsahan pengajian di pesantren-pesantren para kiai yang telah mengikuti pengajian pasaran itu.

e. Metode Hafalan (muhafadzah)

Metode hafalan adalah kegiatan belajar santri dengan cara menghafal suatu teks tertentu dibawah bimbingan dan pengawasan kiai/ustadz. Para santri diberi tugas untuk menghafal bacaan-bacaan dalam waktu tertentu. Hafalan yang dimiliki santri ini kemudian dihafalkan kepada kiai atau ustadz secara periodik atau insidental tergantung pada kiai atau ustadz yang bersangkutan.

Titik tekan metode ini adalah santri mampu mengucapkan atau melafalkan kalimat-kalimat tertentu secara lancar pada teks. Pengucapan tersebut dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok. Metode ini dapat juga digunakan dengan metode bendongan atau sorogan.

Untuk mengevaluasi kegiatan belajar dengan metode ini dilakukan dengan dua macam evaluasi. Dilakukan pada setiap kali tatap muka, atau pada waktu telah dirampungkan/diselesaikannya seluruh hafalan yang ditugaskan pada santri.

f. Metode Demonstrasi (praktek ibadah)

Metode ini adalah cara pembelajaran yang dilakukan dengan memperagakan (mendemonstrasikan) suatu keterampilan dalam hal pelaksanaan ibadah tertentu yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok dibawah bimbingan kiai/ustadz. Setelah selesai kegiatan praktek ibadah para santri diberi kesempatan mempertanyakan hal-hal yang dipandang perlu selama berlangsung kegiatan.

11. Pengelolaan dan dana

Pembagian kerja dari unit-unit kerja pada umumnya kurang jelas dan para administratornya juga belum ahli. Pengelolaan dan dana ada di tangan kiai namun secara teknis ditangani oleh unit-unit kerja. Akibatnya pengelolaannya kurang efektif, tidak efisien dan tidak akurat serta tumpang tindih. Sumber dana biasanya diperoleh dari usaha yayasan yang dibentuk pesantren; sumbangan santri; sumbangan dari masyarakat baik pribadi atau kelompok dengan status *amal jariyah*, wakaf, infaq, sedekah, zakat, atau bantuan dari pemerintah.²⁸

12. Sarana dan alat pendidikan

Sarana esensial yang sekaligus sebagai ciri khas pesantren yang dimiliki minimal mesjid, rumah kiai, rumah ustaz, asrama santri, gedung belajar, perkantoran, perpustakaan dan lain-lain sesuai dengan kemampuan pesantren.²⁹ Alat-alat pendidikan dalam arti alat untuk belajar mengajar masih sangat sederhana bagi jenis pendidikan pesantren, tetapi bagi menyanggarakan pendidikan formal memerlukan alat yang lebih lengkap yang lebih modern dalam rangka menunjang pembelajaran yang dilaksanakan.

Secara umum, pesantren adalah sistem pendidikan yang melakukan kegiatan sepanjang hari. Santri tinggal di asrama dalam satu kawasan bersama guru, kiai dan senior mereka. Oleh karena itu, yang terjalin antara santri-guru-kiai dalam proses pendidikan berjalan intensif, tidak sekedar hubungan formal ustadz-santri di dalam kelas.

Sistem pendidikan ini membawa keuntungan, antara lain: *pertama*, pengasuh mampu melakukan pemantauan secara leluasa hampir setiap saat terhadap perilaku santri baik yang terkait dengan upaya pengembangan intelektualnya maupun kepribadiannya, *kedua*, adanya proses pembelajaran dengan frekuensi yang tinggi dapat memperkokoh pengetahuan yang dimilikinya. Dalam teori pendidikan diakui bahwa belajar satu jam yang dilakukan lima kali lebih baik daripada belajar selama lima jam yang dilakukan sekali, padahal

²⁸ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren; Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, 1993) h. 145.

²⁹ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren; Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, 1993), h. 145.

rentangan waktunya sama; *ketiga*, adanya proses pembiasaan akibat interaksinya setiap saat baik sesama santri, santri dengan ustadz maupun santri dengan kiai; *keempat*, adanya integrasi antara proses pembelajaran dengan kehidupan keseharian.

Mastuhu menilai bahwa sistem pendidikan pesantren menggunakan pendekatan *holistik*.³⁰ Para pengasuh memandang kegiatan belajar mengajar merupakan kesatuan atau lebur dalam totalitas kegiatan kehidupan sehari-hari. Akibatnya muncul sikap saling menjaga komitmen dan konsistensi terutama dari pihak pengasuh baik kiai maupun ustadz.

Pada mulanya pesantren mempunyai pola pendidikan yang unik, hanya mengajarkan kitab-kitab kuning menurut taraf kemampuan santri, baik psikologis maupun kognitifnya. Metode pengajarannya menggunakan metode badongan dan wetonan. Sistem pengajar seperti ini masih berjalan, tetapi pada dekade terakhir ini sudah banyak pesantren mengadopsi sistem madrasah dan sistem persekolahan dalam berbagai tingkatan di samping tetap menggunakan program pengajaran kitab yang telah ada sebelumnya. Dengan menggunakan kurikulum madrasah dan sekolah pemerintah yang setingkat.

Masa pembelajaran di pesantren sangat tergantung pada model pembelajaran yang ada. Nama masing-masing pembelajaran dapat berbeda, misalnya kelas, *marhalah*, *fashal*, *thabaqah*, *sanah*, dan sebagainya. Rata-rata pembelajaran di pesantren tergantung kebijakan kiai. Selesai masa pelajaran adalah jika santri sudah merasa cukup dengan ilmu yang dimilikinya atau kiai yang menyatakan bahwa santri tersebut sudah cukup dengan ilmunya dan tinggal mengamalkannya saja. Pada saat itu biasanya santri akan menerima ijazah/*syahadah* yaitu lembaran yang menunjukkan atau tanda bukti telah selesainya pendidikan santri di pesantren tersebut.

Dalam sistem pendidikan ini, fungsi keteladanan menjadi sangat dominan. Apalagi ketika dikaitkan dengan doktrin agama. Nabi Muhammad saw menjadi teladan bagi umat manusia, sementara itu

³⁰ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren; Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, 1993), h. 147.

para kiai adalah pewaris para Nabi maka kronologinya adalah para kiai menjadi teladan bagi umat Islam, terlebih lagi di pesantren kiai menjadi teladan bagi santri-santrinya.

Sistem pendidikan pesantren memang menunjukkan sifat dan bentuk yang lain dari pola pendidikan nasional. Maka pesantren menghadapi dilema untuk mengintegrasikan sistem pendidikan yang dimiliki dengan sistem pendidikan nasional. Pesantren seringkali dinilai sebagai sistem pendidikan yang isolasionis terpisah dari aliran utama pendidikan nasional, dan konservatif yakni kurang peka terhadap tuntutan perubahan zaman dan masyarakat. Fungsi yang kedua ini (konservatif) terlihat pada upayanya menjaga ajaran Islam.

Sistem pendidikan pesantren juga sangat bergantung pada selera kiaiinya. Keahlian dan pengalaman kiai tentu saja turut mewarnai sistem pendidikan pesantren yang diasuhnya. Tidak sedikit spesialisasi pengkajian di pesantren disesuaikan dengan spesialisasi keilmuan yang dimiliki kiaiinya. Pilihan ini masih dalam batas kewajaran atau keniscayaan, yang menarik justru sikap independen kiai dalam menentukan corak sistem pendidikan pesantrennya.

Oleh karena itu, sistem pendidikan pesantren masih belum memiliki kesamaan dasar di luar penggunaan buku-buku wajib (*kutub al-muqarrarah*). Keragaman ini timbul karena ketidaksamaan dalam sistem pendidikannya. Ada pesantren yang menyelenggarakan pengajian tanpa madrasah/sekolah, ada pesantren yang menggunakan sistem pendidikan madrasah secara klasikal, dan ada pula pesantren yang menggabungkan sistem pengajian dan sistem madrasah secara non klasikal. Maka tidak mungkin ada penyatuan kurikulum pesantren selama masih ada perbedaan-perbedaan cukup besar dalam sistem pendidikan yang dianut.

Kuatnya independensi tersebut menyebabkan pesantren memiliki kebebasan relatif yang tidak harus mengikuti model baku yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan. Pesantren bebas mengembangkan model pendidikannya tanpa harus mengikuti standarisasi dan kurikulum yang ketat. Pesantren selalu memberikan kebebasan dalam menentukan pola kebijakan pendidikannya. Maka

pesantren menggunakan prinsip kebebasan terpimpin dalam menjalankan kebijaksanaan pendidikannya.

Kebebasan terpimpin di sini adalah kebebasan dalam memilih, memutuskan dan menjalankan kebijakan pendidikan sesuai dengan kehendak kiaiinya. Terhadap kebijakan pemerintah, sistem pendidikan pesantren menempuh sikap sebeb-asbebnya, namun di kalangan intern pesantren sendiri, yang memiliki kebebasan adalah kiaiinya. Para ustadz tidak berkenan menentukan kebijakan pendidikan pesantren, terlebih para santri.

Eksistensi pesantren ternyata sampai hari ini, ditengah-tengah deru modernisasi, pesantren tetap bisa bertahan (*survive*) dengan identitasnya sendiri. Pertumbuhan pesantren yang semula *rural based institution* menjadi juga lembaga pendidikan urban, bermunculan juga di kota-kota besar. Di samping banyak juga pendidikan umum yang mengadopsi aspek-aspek tertentu dari sistem pendidikan pesantren. Mengadopsi sistem asrama dengan menyebutnya "*boarding school*". Sistem "*boarding*" tentu saja merupakan salah satu karakteristik dasar sistem pendidikan pesantren.

Perkembangan dan perubahan yang dilakukan pondok pesantren, sebagai bentuk konstelasi dengan dunia modern serta adaptasinya, menunjukkan kehidupan pondok pesantren tidak lagi dianggap statis dan mandeg. Di antaranya, ikut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan pesantren, madrasah atau sekolah sampai perguruan tinggi yang ada di lingkungan pondok pesantren.³¹

Keberadaan pendidikan gaya pesantren dalam sistem pendidikan nasional di negeri ini, dipandang sebagai mitra pemerintah disamping sekolah umum atau madrasah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Berawal dari lahirnya UU nomor 2 tahun 1989, tentang sistem pendidikan nasional, disempurnakan menjadi UU nomor 20 tahun 2003, berarti secara resmi kita telah memiliki

³¹ Haid Aqiel Siraj, *Pesantren Masa Depan*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), h.181.

dukumen penting yang menentukan arah kebijakan pendidikan di Indonesia.

Dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 30 ayat (3) dan (4) disebutkan; pendidikan keagamaan diselenggarakan pada jalur formal, non formal dan informal pendidikan keagamaan berbentuk diniyah dan bentuk yang lain.³² Posisi integral pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional, tercermin dalam berbagai aspek. Pertama, pendidikan Nasional menjadikan pendidikan agama sebagai salah satu muatan wajib dalam semua jalur dan jenjang pendidikan. Kedua, dalam sistem pendidikan nasional ini madrasah dengan sendirinya dimasukkan kedalam kategori pendidikan jalur sekolah, sehingga kedudukan antara keduanya menjadi sama, tidak ada lagi sikap sub-ordinasi pada pendidikan madrasah.³³

Dewasa ini, pesantren membuka jalur pendidikan sekolah/madrasah dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Namun, masih banyak pula pondok pesantren yang tidak menyelenggarakan jalur pendidikan sekolah.

Dengan melihat kecendrungan perkembangan sistem pendidikan pondok pesantren, maka sebagian ahli pendidikan mengklasifikasikan pesantren kepada dua pola yakni pola berdasarkan bangunan fisik dan berdasarkan kurikulum.

Pola	Bangunan fisik	Kurikulum
I	Mesjid dan rumah Kiai: Pesantren ini masih bersifat sederhana, dimana kiai menggunakan masjid atau rumahnya sendiri untuk mengajar. Dalam pola ini santri hanya datang dari daerah pesantren itu sendiri,	Materi yang diajarkan mata pelajaran agama yang bersumber dari kitab klasik, tanpa ada materi umum. Yang dipentingkan adalah pendalaman ilmu-ilmu agama melalui kitab klasik. Metode pengajarannya <i>wetonan</i> dan <i>sorogan</i> . Belum

³² UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003, h. 14.

³³ Mukhtar Maksun, *Pesantren*, h. 159

namun mereka telah mempelajari ilmu agama secara kontinu dan sistematis.

memakai klasikal. Evaluasi berdasarkan kitab yang dibaca. Tidak ada ijazah formal sebagai alat mencari kerja.

- II Masjid, rumah kiai dan pondok: Pesantren telah memiliki pondok atau asrama yang disediakan bagi para santri yang datang dari daerah. Hampir sama dengan pola I, hanya saja proses belajar dilaksanakan dengan klasikal dan non-klasikal. Metode: sorogan, wetonan, hafalan, dan musyawarah
- III Masjid, rumah kiai, pondok dan madrasah: Pesantren ini telah memakai sistem klasikal, dimana santri yang mondok mendapat pendidikan di madrasah. Ada kalanya murid madrasah itu datang dari daerah sekitar pesantren itu sendiri. Di samping sistem klasikal juga pengajaran sistem wetonan dilakukan juga oleh kiai. Materi pembelajaran dilengkapi dengan materi umum, ditambah dengan memberikan pendidikan keterampilan. Santri dibagi berdasarkan jenjang pendidikan: ibtidaiyah, tsanawiyah, dan aliyah. Metode: sorogan, wetonan, hafalan, dan musyawarah Ada ijazah
- IV Masjid, rumah kiai, pondok, madrasah, dan tempat keterampilan misal peternakan, pertanian, kerajinan rakyat, koperasi, dan sebagainya. Dalam pola ini menitikberatkan materi keterampilan disamping materi agama. Metode beragam dan bervariasi: sorogan, wetonan, hafalan, dan musyawarah, dsb.

V Masjid, rumah kiai, pondok, madrasah, tempat keterampilan, universitas, gedung pertemuan, tempat olahraga, sekolah umum: Dalam pola ini pesantren yang sudah berkembang dan bisa digolongkan pesantren mandiri. Pesantren seperti ini telah memiliki perpustakaan, dapur umum, ruang makan, kantor administrasi, toko, rumah penginapan tamu, ruang *operation room*, dan sebagainya. Di samping itu pesantren ini mengelola SMP, SMA, dan Kejuruan bahkan perguruan tinggi.

Ada ijazah.

Jenjang dan materi yang diajarkan :

1. Pengetahuan dari kitab-kitab klasik.
2. Madrasah, materi agama + umum. Kurikulumnya dibagi 2 yakni kurikulum pondok dan kurikulum pemerintah dengan mengadakan modifikasi materi pelajaran agama.
3. Keterampilan juga diajarkan
4. Sekolah umum. Materi umum dari Dep. Pendidikan Nasional + materi agama yang disusun oleh pondok. Diluar jadwal, santri menerima pendidikan agama tambahan lewat membawa kitab-kitab klasik.
5. Perguruan tinggi dengan menitikberatkan pada materi agama.

Metode beragam dan bervariasi tanpa meninggalkan metode asli wetonan dan sorogan pada materi agama

Ada ijazah

Sumber: H. Haiday Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007).³⁴

³⁴ H. Haiday Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 66-67.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa dari segi aktivitas pendidikan yang dikembangkan, maka pondok pesantren dapat diklasifikasikan dalam beberapa tipe:

1. Pondok pesantren yang hanya menyelenggarakan pengajian kitab kuning dengan sistem sorogan, bandongan dan wetonan.
2. Pondok pesantren yang menyelenggarakan pola integrasi sistem pengajian kitab tradisional, dengan madrasah formal dan mengadopsi kurikulum pemerintah.
3. Pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan integrasi antara sistem pengajian tradisional, sistem madrasah dan sistem sekolah umum dengan mengadopsi kurikulum pemerintah (Depertemen Agama dan Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan) serta ditambah dengan kurikulum muatan lokal pesantren modern).

Sehingga dapat dikatakan bahwa tipe 1 adalah pesantren Salafiyah yaitu yang menyelenggarakan pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama Islam, serta kegiatan pendidikan dan pengajarannya sebagaimana berlangsung sejak awal pertumbuhannya, dan tipe ke 2 dan 3 adalah pesantren khalafiyah yaitu pondok pesantren yang selain menyelenggarakan kegiatan kepesantrenan, juga menyelenggarakan kegiatan pendidikan formalnya (sekolah atau madrasah bahkan sampai ke perguruan tinggi).

Penutup/Simpulan

Pesantren adalah lembaga pendidikan dengan corak khas Indonesia, dengan elemennya yaitu pondok, mesjid, kiai, santri, dan pengajian kitab kuning.

Sistem pendidikan pesantren dapat dikelompokkan menjadi 12 unsur, yaitu: tujuan; filsafat dan tata nilai; struktur organisasi pesantren; lingkungan pendidikan pesantren; kiai dan ustaz; santri; pengurus; interaksi pelaku; kurikulum dan sumber belajar; proses belajar mengajar dan evaluasi; pengelolaan dan dana; sarana dan alat pendidikan

Pesantren dalam perkembangannya banyak mengambil kebijakan dalam sistem pendidikannya yakni dengan mengikuti sistem madrasah, sekolah umum, bahkan perguruan tinggi, dengan tanpa meninggalkan kekhasannya sebagai lembaga pendidikan agama Islam yang mempelajari kitab-kitab klasik dengan metode yang juga khas.

Daftar Pustaka

- Ainurafiq, Dawam dan Ahmad Ta'arifin, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*, t.t.: Listafariska Putra, 2004.
- Amal Fathullah Zarkasyi, "Pondok Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan dan Dakwah", dalam Adi Sasono dkk., *Solusi Islam atas Problema Umat; Ekonomi, Pendidikan dan Dakwah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1988
- Departemen Agama RI, *Profil Pondok Pesantren Mu'adalah*, 2004.
- H. Haiday Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007).
- H. Sahriansyah, dkk., *Profil Pondok Pesantren di Kabupaten Balangan dan Hulu Sungai Utara*, Banjarmasin, Puslit IAIN Antasari, 2005
- H.M. Amin Haedari, dkk., *Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Moderitas dan Tantangan Kompleksitas Global*, (Jakarta: IRD Press, 2004).
- H.M. Sultan Masyhud dan Muh. Khusnurdilo, *Manajemen Pondok Pesantren*, Jakarta: Diva Pustaka, 2005.
- Mukhtar Maksum, *Pesantren, Sejarah dan Perkembangannya* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Nurcholis Majid, *Bilik-Bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta: Paramadina, 1997)

-----, *Merumuskan Kembali Tujuan Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: P3M. 1985)

Said Aqiel Siraj, *Pesantren Masa Depan*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999).

Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi tentang pandangan hidup kiai*, Jakarta: LP3ES, 1983

Zuhairini, dkk, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992)

BAB V PENDIDIKAN MADRASAH

(Kebijakan dan Sistem Madrasah di Indonesia)

Oleh: Hilmi Mizani

A. Pendahuluan.

Islam memandang bahwa pendidikan sangat penting bagi manusia, agar manusia menjadi dapat menjadi hamba Allah yang tunduk dan patuh memenuhi perintah Allah. Hal ini dapat dilihat dari ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah membaca sebagaimana yang terdapat dalam al Qur'an Surah Al'Alaq ayat 1. Karena itulah sejak di awal-awal Rasulullah menyebarkan Islam beliau sudah menggunakan institusi ini untuk menyebarkan Islam yang tentu saja melalui proses pendidikan. Tercatat dalam sejarah rumah yang dijadikan Rasulullah sebagai tempat pendidikan para sahabat yaitu di rumah al Arqam. Oleh karena itu rumah merupakan lembaga pendidikan pertama dalam Islam.¹

Setelah Nabi Muhammad Hijrah ke Madinah, maka Nabi menjadikan mesjid sebagai pusat dakwah sekaligus menjadi tempat proses pendidikan bagi para sahabat. Mesjid dimaksud adalah Masjid Nabawi di kota Madinah. Dengan bertambah luasnya daerah Islam dan bertambah banyaknya pemeluk Islam maka kegiatan pendidikan di Masjid semakin ramai dan kegiatan tersebut dapat mengganggu fungsi utama mesjid sebagai tempat ibadah. Untuk tidak mengganggu ketenteraman dalam beribadah di Mesjid, maka dibuatlah tempat khusus yang dikenal dengan nama madrasah. Sejak saat itu terjadilah proses transformasi institusi penyelenggara pendidikan dari mesjid ke madrasah.²

¹ Ali Al Jumbulati, *Perbandingan Pendidikan Islam*, Jakarta, Renika Cipta, 1994, hlm.22

² M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1991, hlm 83

Semenjak pendirian madrasah pertama tahun 1065 M dengan nama Madrasah Nizham al- Mulk oleh Wazir Nizamiyah³, maka madrasah tersebar diseluruh wilayah kekuasaan Islam. Sampai sekarang madrasah telah menjadi salah satu model pendidikan di seluruh Negara Islam, maupun Negara yang didalamnya terdapat sejumlah besar komunitas masyarakat Islam, tidak terkecuali Negara Indonesia. Untuk melihat lebih jauh bagaimana eksistensi madrasah di Indonesia, akan diuraikan pada pembahasan berikut.

B. Pengertian Madrasah

Kata *madrasah* dalam bahasa Arab adalah bentuk kata keterangan tempat (zharaf makan) dari kata *darasa*. Secara harfiah *madrasah* diartikan sebagai tempat belajar para pelajar atau tempat untuk memberikan pelajaran.⁴ Kata madrasah jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sekolah, kendati pada mulanya sekolah itu sendiri bukan berasal dari bahasa Indonesia melainkan dari bahasa asing, yaitu *school* atau *scola*.⁵

Madrasah dapat dikatakan sebagai lembaga pendidikan yang sangat menonjol dalam sejarah Islam. Madrasah merupakan kelanjutan dari pendidikan mesjid dan pendidikan di lembaga Khan, yaitu mesjid yang dilengkapi dengan asrama. Penggunaan nama madrasah untuk lembaga pendidikan Islam pada awal-awal Islam mempunyai pengertian yang berbeda dengan pengertian madrasah pada masa sekarang. Pengertian madrasah pada masa klasik Islam disebut sebagai pendidikan akademi (*college*). Pemberian nama lembaga pendidikan Islam untuk berbagai jenjang dengan nama madrasah ini dapat dipahami mengingat pemberian nama lebih cenderung pada fungsi esensialnya sebagai lembaga pendidikan Islam, yaitu untuk

³ Ninik Masrorah dan Umiarso, *Modernisasi Pendidikan Islam Ala Azyumardi Azra*, Jakarta, Ar Ruzz Media, 211, hlm 133

⁴ Mehdi Nakosteen, *Kontribusi Islam Atas Dunia Intelektual Barat; Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam*, Surabaya, Risalah Gusti, 1996, hlm.66

⁵ A. Malik Fajar, *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam*, Jakarta, LP#NI, 1998, hlm. 111

mengembangkan ilmu pengetahuan Islam dan sekaligus menyebarkan paham keagamaan.⁶

C. Kebijakan dan Sistem Madrasah di Indonesia

Eksistensi madrasah dalam tradisi pendidikan Islam di Indonesia tergolong fenomena modern yaitu dimulai sekitar awal abad 20. Buku-buku sejarah pendidikan Islam di Indonesia sejauh ini agaknya tidak pernah menginformasikan adanya lembaga pendidikan yang disebut madrasah pada masa awal-awal penyebaran dan perkembangan Islam di Nusantara. Madrasah di Indonesia bisa dianggap sebagai perkembangan lanjut atau pembaharuan dari lembaga pendidikan pesantren dan surau.

Sebagian sarjana berasumsi bahwa tradisi pendidikan Islam di Indonesia tidak sepenuhnya khas Indonesia, kecuali hanya menambahkan muatan dan corak ke-Islaman terhadap tradisi pendidikan yang sudah ada, terutama yang bermula dari agama Hindu. IP Simanjuntak berargumentasi misalnya bahwa, "masuknya ajaran Islam tidak merubah hakekat agama yang formil, yang berubah sejak pengembangan agama Islam adalah: isi agama yang dipelajari, bahasa yang menjadi wahana bagi agama yang dipelajari itu, serta latar belakang pelajar-pelajar". Ditambahkannya lagi, "dalam zaman pengembangannya, agama Islam tidak mengalami perubahan. Yang dimaksudkan dengan kalimat itu, ialah yang berkenaan dengan struktur organisasi pendidikan keagamaan itu. Mengikuti asumsi ini orang tentu akan mudah cenderung beranggapan bahwa pertumbuhan madrasah di Indonesia sepenuhnya merupakan usaha penyesuaian atas tradisi pengembangan pemerintah Hindia Belanda. Mengingat struktur dan mekanismenya yang hampir sama, sekilas dapat diduga bahwa madrasah merupakan bentuk lain dari sekolah yang hanya diberi muatan dan corak ke-Islaman⁷.

⁶ Ninik Masruroh dan Umiarso, *Modernisasi Pendidikan Islam Ala Azyumardi Azra*, Jakarta, Ar Ruz Media, 2011, hlm.129

⁷ Maksum, *Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, Cet.2, 1999, hlm.81

Asumsi seperti itu agaknya tidak sepenuhnya benar, meskipun dalam ukuran tertentu tidak bisa diabaikan bahwa pertumbuhan madrasah itu merupakan respon pendidikan Islam terhadap sistem persekolahan yang sudah menjadi kebijaksanaan pemerintahan Hindia Belanda dalam rangka politik etisnya. Latar belakang lain yang layak dipertimbangkan adalah bahwa pertumbuhan dan perkembangan madrasah pada awal abad 21 ini merupakan bagian dari gerakan pembaharu Islam di Indonesia, yang memiliki corak cukup intensif dengan gerakan pembaharuan di Timur Tengah. Sebagai agama yang universal, Islam membawa peradabannya sendiri termasuk dalam bidang pendidikan yang berakar pada tradisi yang sangat panjang. Sejak masa Rasulullah ketika bersentuhan dengan situasi yang partikular, peradaban Islam itu tetap mempertahankan esensinya, walaupun mungkin secara instrumental menampakkan bentuk-bentuk yang kondisional. Dalam kaitannya dengan pertumbuhan madrasah di Indonesia, aspek universal dari tradisi itu tidak bisa dilepaskan karena memang dalam kenyataannya eksistensi lembaga madrasah Islam sudah berkembang sejak masa Islam klasik, dan bahkan terus berkembang hingga masa modern dengan segala bentuk penyesuaian dan pembaharuannya.

Senada dengan hal di atas Muhaimin menegaskan bahwa latar belakang lahirnya madrasah di Indonesia adalah:

- a. Sebagai manifestasi dan realisasi pembaharuan sistem pendidikan Islam.
- b. Usaha penyempurnaan terhadap sistem pesantren ke arah suatu sistem pendidikan yang sama dengan sekolah umum, misalnya masalah kesamaan kesempatan kerja dan memperoleh ijazah.
- c. Adanya sikap mental pada sementara golongan umat Islam khususnya santri yang terpukau dengan barat sebagai sistem pendidikan mereka.

d. Sebagai upaya untuk menjembatani antara sistem pendidikan tradisional yang dilakukan oleh pesantren dan sistem pendidikan modern dari hasil akulturasi⁸.

Dalam tradisi pendidikan Islam di Indonesia, kemunculan dan perkembangan madrasah tidak bisa dilepaskan dari gerakan pembaharuan Islam yang diawali oleh usaha sejumlah tokoh intelektual agama Islam dan kemudian dikembangkan oleh organisasi-organisasi Islam, baik di Jawa, Sumatra maupun di Kalimantan. Bagi kalangan pembaharu, pendidikan agaknya senantiasa dipandang sebagai aspek strategis dalam membentuk pandangan ke-Islaman masyarakat. Dalam kenyataan, pendidikan yang terlalu berorientasi pada ilmi-ilmu ubudiyah. Sebagaimana ditunjukkan dalam pendidikan di mesjid, surau dan pesantren, pandangan ke-Islaman masyarakat agaknya kurang diperhatikan kepada masalah-masalah sosial, politik, ekonomi dan budaya. Karena itu, untuk melakukan pembaharuan terhadap pandangan dan tindakan masyarakat itu, langkah strategis yang harus ditempuh adalah memperbaiki sistem pendidikannya. Dalam konteks inilah agaknya pada awal abad 20 madrasah muncul dan berkembang di Indonesia.

Tercatat Madrasah Adabiyah di Padang (Sumatra Barat), yang didirikan oleh Syekh Abdullah Akhmad pada tahun 1909 sebagai Madrasah pertama di Indonesia. Pada mulanya lembaga pendidikan agama ini bercorak agama semata-mata. Namun kemudian pada tahun 1915 berubah corak menjadi HIS (Holland Inland School) Adabiyah. HIS Adabiyah merupakan sekolah yang memasukkan pelajaran umum ke dalam sistem pendidikannya di samping pelajaran utamanya pelajaran agama.⁹

Pada tahun berikutnya yaitu pada tanggal 10 Oktober 1915 Zainuddin Labai el Yunusyri mendirikan madrasah diniyah. Madrasah Diniyah Zainuddin Labai dilakukan secara perkelas dengan susunan

⁸ Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam*, Jakarta, Trigenda, 1993, hlm.305

⁹ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1985, hlm.63

pelajaran yang terpadu antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Setelah itu Madrasah Diniyah hampir berkembang di seluruh Indonesia, baik merupakan bagian dari pesantren maupun surau, atau berdiri di luarnya. Pada tahun 1916 di lingkungan Pondok Pesantren Tebuireng Jombang (Jawa Timur), telah didirikan Madrasah Salafiyah oleh KH. Hasyim Asy'ari, sebagai persiapan untuk melanjutkan pelajaran ke pesantren. Pada tahun 1929 atas usaha Kyai Ilyas, diadakan pembaharuan dengan memasukkan pengetahuan umum pada madrasah tersebut. Kemudian pada tahun 1918 di Yogyakarta berdiri Madrasah Muhammadiyah (*Kweekchool* Muhammadiyah) yang kemudian menjadi Madrasah Muallimin Muhammadiyah sebagai realisasi dari cita-cita pembaharuan Pendidikan Islam yang diperoleh oleh K. H. Ahmad Dahlan¹⁰.

Dari sekian madrasah yang lahir di abad 20 di hampir seluruh wilayah Indonesia pada awalnya masih bersifat diniyah semata-mata. Baru sekitar tahun 1930, sedikit demi sedikit, akan tetapi bertambah cepat, dilakukan pembaharuan terhadap madrasah dalam rangka memantapkan keberadaannya, khususnya dengan penambahan pengetahuan umum.¹¹ Hal ini dapat dilihat dari struktur mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Pada Rencana Pelajaran Madrasah Tsanawiyah tahun 1931 maka struktur jumlah jam mata pelajaran terdiri pelajaran agama 18 jam/minggu (62,07 %) dan mata pelajaran umum 11 jam/minggu (37,03%). Mata pelajaran agama terdiri Tafsir, Hadist/Mustalah, Tauhid, Fikh/Hikmah Tasyri, Ushul Fiqh, Sejarah Islam dan Bahasa Arab. Sedangkan mata pelajaran Umum terdiri: Ilmu Bumi/ Falak, Ilmu alam, Ilmu Tumbuh-tumbuhan, Ilmu Hewan, Ilmu Tubuh Manusia, Ilmu Berhitung, Bahasa Inggris dan Gerak Badan.¹²

¹⁰ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Per-kembangan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm.169

¹¹ B.J. Bolan, *Pergumulan Islam di Indonesia*, Jakarta, Grafiti Pers, 1985, hlm 121

¹² Hasbullah, *Sejarah...* hlm.173

madrasah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk menjadi MWB.

- b. MWB menampung murid-murid yang berumur antara 6 – 14 tahun. Tujuan MWB adalah untuk mempersiapkan mutu murid untuk dapat hidup mandiri dan mencari nafkah, terutama dalam lapangan ekonomi, industrialisasi dan transmigrasi.
- c. Lama belajar MWB 8 tahun.
- d. Pelajaran yang diberikan di MWB terdiri dari tiga kelompok studi, yaitu pelajaran agama, pengetahuan umum dan pelajaran keterampilan dan kerajinan tangan.
- e. 25 % dari jumlah jam pelajaran digunakan untuk pelajaran agama, sedangkan 75 % untuk pelajaran umum dan keterampilan atau kerajinan tangan.²¹

Walaupun demikian keberadaan madrasah belum diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Hal ini disebabkan karena kenyataan bahwa sistem pendidikan di madrasah lebih didominasi oleh muatan-muatan agama, menggunakan kurikulum yang belum standar, memiliki struktur yang tidak seragam, dan memberlakukan manajemen yang kurang dapat dikontrol oleh pemerintah.

Madrasah baru berhasil mendapatkan status disamakan dengan sekolah umum yang setingkat diawali dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yakni Menteri Agama, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 14 Maret 1979 yang menegaskan bahwa kedudukan madrasah sama dan sejajar dengan sekolah formal lainnya. Dengan demikian siswa lulusan sekolah madrasah dapat memasuki jenjang sekolah umum lain yang lebih tinggi, atau bisa pindah ke sekolah formal dan begitu juga sebaliknya. Di samping itu SKB tersebut menetapkan bahwa mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar, yang diberikan sekurang-kurangnya 30 % di samping mata pelajaran umum.

²¹ Zuhairini, dkk. *Sejarah Pendidikan Islam, Proyek Pembinaan Sarana dan Fasilitas Perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN*, Jakarta, 1983, Hlm.79

Penyelenggaraan madrasah dengan pola SKB 3 menteri menurut Marwan Saridjo membawa akibat:

1. Gengsi madrasah menjadi naik. Dengan SKB itu ijazah madrasah bukan saja di akui oleh Departemen Agama tetapi juga oleh instansi lain. Dan yang lebih penting adalah tamatan madrasah dapat melakukan mobilisasi kelembaga pendidikan umum yang lebih tinggi disamping diterima pada lingkungan pendidikan yang ada dilingkungan Departemen Agama.
2. Setelah SKB itu perkembangan madrasah cukup mengembirakan, sekalipun dari segi mutu belum memuaskan atau kadang-kadang memprihatinkan (antara lain karena kekurangan tenaga guru).
3. Kecenderungan kuat dirasakan setelah SKB tersebut ialah adanya keinginan anak-anak untuk mobilitas ke sekolah umum. Hal ini dapat dilihat dari peserta anak-anak madrasah yang mengikuti EBTANAS yang diselenggarakan oleh Depdikbud, disamping mereka mengikuti Ebtan yang diselenggarakan oleh Departemen Agama.
4. Melihat kecenderungan ini maka tidak mengherankan kalau dikesankan bahwa madrasah sudah seperti " sekolah umum" yang berarti identitas madrasah semakin berkurang bahkan hilang.²²

SKB tiga menteri tidak diterima oleh semua masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat masih banyak madrasah yang bertahan dengan system lamanya, terutama madrasah yang berbasis di Pondok Pesantren. Mereka dikenal dengan nama Madrasah Diniyah Awaliyah (tingkat dasar) , Madrasah Diniyah Wustho (tingkat menengah pertama) dan Madrasah Diniyah Aliyah (tingkat menengah atas).

²² Marwan Saridjo, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*, Jakarta, Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997/1998, hlm.120

Madrasah diniyah dari semua tingkatan tersebut semuanya mempelajari mata pelajaran agama.²³

Perubahan struktur mata pelajaran dari semuanya atau sebagian besar mempelajari mata pelajaran agama kepada struktur menurut SKB (70 % umum dan 30% Agama) maka berakibat penguasaan lulusan terhadap ilmu agama semakin berkurang sehingga dikhawatirkan membawa dampak bagi usaha mencetak kader-kader ulama. Oleh karena itu Menteri Agama yang pada waktu itu di jabat oleh H. Munawir Syadzali mencetuskan penyelenggaraan Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) pada tahun 1987 dengan struktur kurikulum 75% atau 80 % Agama dan 20 atau 25 % mata pelajaran umum.²⁴ Untuk itu dipilih 5 Madrasah Aliyah sebagai pilot proyek yang merupakan studi kelayakan program dimaksud. Adapun kelima Madrasah Aliyah yang dituntut untuk studi kelayakan adalah: MAN Darussalam Ciamis, MAN Ujung Pandang, MAN 1 Yogyakarta, MAN Kotobaru Padang Panjang Sumatera Barat dan MAN Jember. Setelah berjalan beberapa tahun, maka pada tahun 1993 MAPK diganti menjadi Madrasah Aliyah Keagamaan.

Puncak pengakuan madrasah oleh pemerintahan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dengan dikeluarkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 2 tahun 1989 dimana madrasah diakui secara penuh menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Hal tersebut jelas terlihat pada Undang-Undang tersebut terdapat aturan tentang madrasah secara defenitif dimana madrasah dimasukkan dalam kategori pendidikan sekolah tanpa menghilangkan karakter keagamaannya. Melalui upaya ini dapat dikatakan bahwa madrasah berkembang secara terpadu dalam sistem pendidikan

²³ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Lintasan Sejarah, Pertumbuhan dan Perkembangan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1995. hlm.183-184

²⁴ Marwan Saridjo, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*, Jakarta, Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997/1998, hlm.125

nasional.²⁵ Berdasarkan pasal 4 ayat 3 PP nomor 28 tahun 1990 disebutkan bahwa MI dan MTs dinyatakan sebagai Pendidikan Dasar yaitu SD dan SLTP yang berciri khas agama Islam. Sedangkan Madrasah Aliyah disebut sebagai SMU yang berciri khas agama Islam.²⁶

Sebagai konsekuensi dari statusnya yang di samakan sekolah umum yang diasuh oleh Kementerian Pendidikan Nasional, maka kurikulum yang dipakai pada madrasah menggunakan kurikulum keluaran Kemeteri Pendidikan Nasional, kemudian ditambah dengan kurikulum agama yang disusun oleh Departemen Agama. Untuk itu maka Kementerian Agama mengembangkan kurikulum MI, MTs dan MA yang mengacu pada kurikulum Kemeteri Pendidikan Nasional. Pada tahun 1993 Menteri Agama menetapkan dengan Surat Keputusan nomor 371 yang mengatur Kurikulum MI, SK nomor 372 untuk Kurikulum MTs dan SK nomor 373 untuk kurikulum MA. Adapun struktur mata pelajaran MI terdiri 12-16 % mata pelajaran agama dan 84-88 % mata pelajaran umum. Sedangkan untuk MTs terdiri dari 20% mata pelajaran agama dan 80 % mata pelajaran umum. Sementara MA terdiri dari 11-13 % mata pelajaran agama dan 87-89 % mata pelajaran umum.²⁷

Eksistensi madrasah benar-benar mendapat pengakuan yang eksplisit dari pemerintah RI setelah madrasah disebut dalam Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 17 ayat 2 dan pasal 18 ayat 3.²⁸ Dengan demikian bila dibandingkan dengan UUSPN tahun

²⁵ Maksum, *Madrasah...* hlm. 132-133

²⁶ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Lintasan Sejarah, Pertumbuhan dan Perkembangan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1995.hlm.189

²⁷ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Lintasan Sejarah, Pertumbuhan dan Perkembangan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1995.hlm.191-196.

²⁸ Pasal 17 ayat 2 berbunyi: Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Pasal 18 ayat 3 berbunyi: Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA),

1989, maka UUSPN tahun 2003 lebih maju, walaupun kedua Undang-Undang tersebut masih memelihara system pendidikan dualistik dalam system pendidikan di Indonesia.²⁹

Dengan UUSPN tahun 2003, maka madrasah memiliki peluang untuk memenuhi harapan masyarakat yang menginginkan agar porsi pendidikan agama lebih besar. Karena berdasarkan pasal 36 ayat 2 disebutkan bahwa : Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Atas dasar tuntutan UU tersebut maka pemerintah mengganti kurikulum 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi) menjadi kurikulum Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). KTSP merupakan paradigma baru pengembangan kurikulum, yang otonomi luas pada setiap satuan pendidikan. Dalam KTSP, maka sekolah dapat memasukkan tambahan mata pelajaran keagamaan untuk dimasukkan dalam mata pelajaran muatan lokal. Beberapa ketentuan muatan lokal sebagai berikut:

1. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler yang bertujuan untuk mengem-bangkan kompetensi sesuai dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah.
2. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan.
3. Substansi yang akan dikembangkan,materinya tidak sesuai menjadi bagian dari mapel lain, atau terlalu luas substansinya sehingga harus dikembangkan menjadi Mapel tersendiri;

Madrasah Aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.

²⁹ Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke 20, Pergumulan Antara Modernisasi dan Identitas*, Jakarta, Fajar Interpratama Opset, 2012, hlm.229.

4. Merupakan mata pelajaran wajib yang tercantum dalam Struktur kurikulum;³⁰

Disamping itu madrasah juga masih dapat menambah jam belajar mata pelajaran agama yang ada selama 4 jam pelajaran perminggu³¹. Dengan demikian porsi waktu untuk mata pelajaran agama bertambah banyak, sehingga harapan untuk menciptakan lulusan yang memiliki pengetahuan agama yang memadai dapat tercapai.

D. KESIMPULAN

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia bisa dianggap sebagai perkembangan lanjut atau pembaharuan dari lembaga pendidikan pesantren dan surau. Berdirinya madrasah di Indonesia pada awal abad 20 dilatar belakangi oleh faktor usaha menyempurnakan system pesantren dan surau dengan menjembatani system pendidikan tradisional dengan system pendidikan modern dan adanya gerakan pembaharuan Islam di Indonesia.

Madrasah sebagai lembaga pendidikan milik masyarakat, maka ia memiliki karakteristik sendiri yang berbeda antara satu dengan yang lain. Sejak Indonesia merdeka pemerintah sudah mengambil kebijakan untuk melakukan pembinaan madrasah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Agama no. 1 Tahun 1946, tanggal 19 Desember 1946 yang menetapkan bahwa madrasah wajib mengajarkan mata pelajaran umum disamping mata pelajaran agama.

Berbagai kebijakan pemerintah berikutnya mulai dari mengatur madrasah seperti termuat dalam Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran Nomer 4 tahun 1950, melaksanakan Madrasah Wajib Belajar tahun 1957/1958, membuat SKB Tiga Menteri tahun 1979, kesemuanya adalah dimaksudkan membina madrasah agar pendidikan di Madrasah setara dengan pendidikan di Sekolah Umum. Walaupun

³⁰ <http://www.slideshare.net/NASuprawoto/penyusunan-ktsp-3012909>

³¹ <http://www.slideshare.net/NASuprawoto/penyusunan-ktsp-3012909>

demikian eksistensi madrasah secara tegas (tetapi tidak disebut secara eksplisit) diakui menjadi bagian dari system pendidikan Nasional setelah dikeluarkannya UUSPN no 2 tahun 1989. Pengakuan pemerintah RI terhadap madrasah sebagai bagian dari system pendidikan nasional baru benar-benar dinyatakan secara eksplisit adalah pada UUSP no. 20 tahun 2003.

Akibat dari usaha menyetarakan pendidikan madrasah dengan pendidikan umum berakibat pada mengecilnya porsi waktu untuk mengajarkan mata pelajaran agama di Madrasah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Malik Fajar, *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam*, Jakarta, LPNI, 1998.
- Abdurrahman Shaleh, *Penyelenggaraan Madrasah, Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta, 1984
- Ali Al Jumbulati, *Perbandingan Pendidikan Islam*, Jakarta, Renika Cipta, 1994
- Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke 20, Pergumulan Antara Modernisasi dan Identitas*, Jakarta, Fajar Interpratama Opset, 2012
- B. Holan, *Pergumulan Islam di Indonesia*, Jakarta, Grafiti Pers, 1985
- Hanun Asrorah, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta, Logos, 1999
- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Lintasan Sejarah, Pertumbuhan dan Perkembangannya*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Huani Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, PT. Logos Wacana Ilmu, 2001.
- M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1991
- Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1985.
- Maksum, *Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, Cet.2, 1999

- Marwan Saridjo, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*, Jakarta, Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997/1998
- Mehdi Nakosteen, *Kontribusi Islam Atas Dunia Intelektual Barat; Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam*, Surabaya, Risalah Gusti, 1996.
- Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam*, Jakarta, Trigenda, 1993.
- Ninik Masrorah dan Umiarso, *Modernisasi Pendidikan Islam Ala Azyumardi Azra*, Jakarta, Ar Ruzz Media, 2011
- Zuhairini,dkk. *Sejarah Pendidikan Islam, Proyek Pembinaan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN*, Jakarta, 1983

BAB VI

PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA PENJAJAHAN (Penjajahan Belanda dan Jepang)

Oleh: H. Hamdan

A. Pendahuluan

Berbicara pendidikan Islam di Indonesia pada masa penjajahan, maka kita tidak akan lepas dari membicarakan tentang sejarah penjajahan itu sendiri dan kebijakan penjajah terhadap system pendidikan yang dianut dan terhadap lembaga pendidikan Islam itu sendiri.

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda selama kurang lebih 350 tahun, walaupun ini masih bisa diperdebatkan, kemudian penjajahan dilanjutkan oleh bangsa Jepang selama tiga setengah tahun. Dalam hal ini VOC Belanda yang sangat lama menjajah Indonesia telah mendirikan banyak lembaga pendidikan mulai tingkat dasar, menengah bahkan pendidikan kelautan, namun Belanda punya kebijakan tentang pendidikan, yang membedakan pendidikan untuk anak Belanda dan Indo-Belanda, pribumi dan keturunan Cina. Selain itu, Belanda mendirikan sekolah Desa yang diperuntukan untuk warga pribumi, tentu saja kurikulum tidak sama dengan sekolah yang diperuntukan untuk anak-anak Belanda.

Kebijakan lainnya adalah Belanda lebih perhatian kepada pendidikan Zending karena mereka punya misi kristenisasi di wilayah jajahannya. Sehingga berdampak pada lembaga pendidikan Islam bahkan Belanda tidak bersedia memberikan subsidi kepada lembaga yang dikelola oleh umat Islam.

Perjalanan lembaga pendidikan sangat panjang dan beragam, pendidikan dimulai dari Surau, Langgar, pesantren dan madrasah, tentunya ini semua atas kesungguhan dan keikhlasan tokoh agama dalam mendirikan lembaga pendidikan tersebut.

Sementara itu, pada masa pendudukan Jepang berbeda dengan kebijakan Belanda, Jepang menghapuskan diskriminasi dalam

memperoleh pendidikan dan memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan Islam untuk berkembang.

Untuk lebih jelasnya permasalahan di atas, dapat kita ikuti dari pembahasan selanjutnya dari makalah yang amat dan sangat sederhana ini.

B. Pembahasan

1. Sejarah Kedatangan VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*)

Berdasarkan fakta sejarah, pada awalnya bangsa Belanda datang ke Nusantara hanya untuk berdagang, akan tetapi kekayaan alam Nusantara yang sangat melimpah seperti rampah-rampah dan karet, maka tujuan utama hanya untuk berdagang tadi berganti untuk menguasai wilayah Nusantara sekaligus dengan mengembangkan fahamnya yang terkenal dengan semboyan 3 G yaitu: *Glory* (kemenangan/ kekuasaan), *Gold* (emas/kekayaan bangsa Indonesia) dan *Gospel* (upaya sublimasi terhadap umat Islam di Indonesia).¹

Karena VOC adalah perusahaan dagang, jadi wajar kalau organisasi ini bertujuan komersial dengan mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk kepentingan kerajaan Belanda pada umumnya dan pemegang saham khususnya. Sehingga di mana-mana di Indonesia VOC berusaha memonopoli dalam setiap perdagangan rampah dan komoditi lainnya pada daerah yang kaya rampah-rampah, karet dan sumber penghasil alam lainnya.

Sehingga pada waktu VOC mula-mula datang di Inonesia, mereka langsung menuju ke daerah-daerah yang menjadi sumber kekayaan bagi pasaran dunia, yaitu kepulauan Maluku. Dua kesultanan yang berada di wilayah ini yaitu Ternate dan Tidore saling bermusuhan dan diperalat oleh orang portugis dan Spanyol. Baru pada permulaan abad ke 17 Raja Ternati menganggap VOC sebagai kawan dan memperbolehkan mendirikan benteng di pulau Ambon. Sejak

tahun 1605 VOC meluaskan daerah pengaruhnya ke arah utara dari kedudukannya di Pulau Ambon sampai ke wilayah Sulawesi Utara dan Sangir Talaud.²

Dari pulau Ambon usaha VOC meluaskan lagi pengaruhnya ke pulau-pualu lain di Nusantara, sebagian besar catatan para sejarawan menyatakan bahwa pengaruh Belanda dalam menjajah Indonesia selama 350 tahun atau tiga setengah abad, namun sebagian para sejarawan terakhir bahwa Indonesia dijajah Belanda tidak selama 350 tahun melainkan satu atau satu setengah abad saja, yang 350 tahun tersebut termasuk Belanda berdagang di Nusantara dengan organisasi VOC-nya.

Hal ini terjadi setelah ambruknya VOC tahun 1816, pemerintah Belanda menggantikan kedudukan VOC dengan statuta Hindia Belanda tahun 1801 dengan terang-terangan menyatakan "bahwa tanah jajahan harus memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya kepada perdagangan dan kepada kekayaan negeri Belanda".³

Terlepas dari perbedaan sejarah di atas, yang jelas pengaruh Belanda (VOC) sangat warnai dan system pendidikan umum di Nusantara, termasuk pada lembaga pendidikan agama.

Terbukti system dan perundangan-undangan pendidikan warisan Belanda tetap dipakai oleh pemerintah di Indonesia sampai pada tahun 1989 dengan lahirnya UU RI No. 2 Tahun 1989 tentang System Pendidikan Nasional yang mengakui lembaga pendidikan Islam seperti Madrasah dan Pondok Pesantren. Sebelumnya kedua lembaga pendidikan tersebut dianak-tirikan oleh pemerintah Indonesia, dan sampai sekarang sepertinya pengaruh tersebut masih dapat dirasakan perbedaan perlakuan antara lembaga pendidikan yang dikelola Kemendiknas dengan lembaga pendidikan yang dikelola oleh Kemenag.

² Sumarsono Mestoko dkk, Pendidikan di Indonesia dari jaman ke Jaman, Balai Pustaka Jakarta, 1986, h. 78-79.

³ M. Sukardjo & Ukim Komarudin, Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 122

¹ H.A. Mustafa dan Abdullah Aly, *Sejarah Pendidikan Islam*, Pustaka Setia Bandung, 1998, h. 44, dalam Syamsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam*, Kencana Media Group Jakarta, 2007, h. 291

2. Sejarah Pendidikan Pemerintah Belanda di Indonesia

Setelah orang-orang Portugis yang bercokol di wilayah Ambon dapat diusir oleh orang-orang Belanda dalam hal ini VOC, maka VOC berkuasa mutlak dan mulai mengatur perdagangan dan kehidupan masyarakat. Dalam bidang pendidikan VOC selain mengambil alih bekas lembaga-lembaga pendidikan Portugis juga mendirikan lembaga-lembaga baru. Pola kebijakan Portugis yang menguasai satu wilayah berusaha mengkristenkan penduduknya, maka VOC meneruskan pula "policy" tersebut. Bedanya orang Portugis menyebarkan agama Roma-Katolik, sedangkan orang Belanda agama Kristen-Protestan.⁴

Pada abad ke 17 dan 18 di negeri Belanda segala kegiatan menyangkut bidang pendidikan dan pengajaran dilaksanakan oleh lembaga-lembaga keagamaan (pen. Gereja). Pemerintah tidak ikut campur tangan langsung dalam penyelenggaraannya, sehingga gereja punya kebebasan yang besar dalam pendidikan. Berbeda dengan di negeri Belanda, di Indonesia pada waktu VOC sama sekali tidak menghendaki lembaga keagamaan mempunyai wewenang besar dalam mengatur masyarakat di daerah-daerah yang mereka kuasai.⁵ Hal ini dapat dimaklumi, kenapa pihak Belanda (VOC) melakukan kebijakan demikian, supaya kurikulum pendidikan dapat dipantau dan diarahkan untuk kepentingan VOC sendiri.

Kegiatan pendidikan yang dilakukan VOC terutama dipusatkan di bagian timur Indonesia yang agama Katolik telah berakar, sementara di Batavia (pen. Sunda Kelapa/Jakarta Sekarang) sebagai pusat administrasi kolonial Belanda. Sekolah pertama didirikan di Ambon untuk anak-anak pribumi pada tahun 1607, karena saat itu belum ada anak-anak Belanda. Tujuan utamanya adalah menggantikan agama Katolik dengan penyebaran agama Protestan, Calvinisme. Sementara itu, di Jakarta sekolah pertama didirikan pada tahun 1630

⁴ Sumarsono Mestoko dkk, Pendidikan di Indonesia dari jaman..., h.79

⁵ Sumarsono Mestoko dkk, Pendidikan di Indonesia dari jaman..., h.77

untuk mendidik anak-anak Belanda dan Jawa agar menjadi pekerja yang kompeten untuk kepentingan VOC.⁶ Berbeda dengan Sumarsono Mestoko dan kawan-kawan menyatakan bahwa: 'sekolah pertama yang didirikan di Jakarta (pen. Batavia) pada tahun 1617 menjelama menjadi sekolah "Betawi" (*Batavische school*) ..., dan pada tahun 1930 berdiri pula Sekolah warga Negara (*Burgerschool*).⁷

Dengan demikian apapun jenis dan jenjang pendidikan yang didirikan oleh Belanda, di mana tujuan pendidikan tidak terlepas dari kepentingan Belanda, baik dalam keuntungan material maupun keuntungan politik agar dapat melanggengkan kekuasaannya di Nusantara, sehingga tidak heran lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh masyarakat Indonesia selalu diawasi, bila ternyata lembaga dan kurikulum pendidikannya dapat mengancam kepentingan VOC tidak jarang pihak Belanda membubarkan dan melarang kelangsungan lembaga pendidikan tersebut.

Jenis-jenis lembaga pendidikan Belanda pada abad ke 17 dan 18, yaitu:

a. Pendidikan Dasar

Lembaga pendidikan pada tingkat dasar adalah yang dinamakan sekolah Betawi atau *Batavische School* dimana peserta didiknya adalah pria dan wanita, dan Sekolah Negara yang diistilahkan dengan sebutan *Burgerschool*. Sekolah-sekolah tersebut bersifat pendidikan dasar dengan tujuan untuk mendidik budi pekerti. Tingkat kelas pada pendidikan dasar pada saat itu hanya sampai pada kelas 3.

b. Sekolah Latin

Pada abad ke 17 bahasa Latin merupakan bahasa Ilmiah bagi orang Eropa. Oleh karena itu timbul gagasan untuk mendirikan sekolah latin di Jakarta. Sistem persekolah dimulai dengan cara numpang tinggal ("in the kost") di rumah seorang pendeta. Pembiayaan

⁶ M. Sukardjo & Ukim Komarudin, Landasan Pendidikan Konsep..., h. 199

⁷ Sumarsono Mestoko dkk, Pendidikan di Indonesia dari jaman..., h.81

pendidikan ditanggung oleh pemerintah Belanda, setelah bertahaan sekitar sembilan tahun lembaga pendidikan jenis ini akhirnya tahun 1656 ditutup, kemudian dibuka kembali pada tahun 1666 tetapi hanya mampu bertahan empat tahun dan ditutup kembali.

c. *Seminarium Theologicum*

Dilihat dari tahun berdirinya lembaga pendidikan ini merupakan kelanjutan dari dari sekolah Latin yang berganti baju dengan nama pendidikan Seminarium Theologicum yang diperluas tujuan atau mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai ulama (pendeta) dan sebagai guru. Seminarium tersebut ciptaan Gubernur Jenderal van Imhoff yang didirikan pada tahun 1745 di Jakarta.

d. *Academie der Marine* (Akademi Pelayaran)

Van Imhoff juga mendirikan akademi pelayaran dengan maksud untuk melatih dan mendidik calon perwira pelayaran, lembaga ini didirikan pada tahun 1743 dan mengalami nasib yang sama dengan seminari ciptaan van Imhoff. Sebab oleh penggantinya Gubernur Jenderal Mossel akademi tersebut ditutup pada tahun 1755 dengan alasan lulusannya sangat sedikit sementara pendanaannya menjadi mahal.

e. Sekolah Cina

Pada awalnya VOC memberi kesempatan pendidikan hanya kepada bagi pegawai dan pribumi yang beragama Kristen. Sementara pribumi yang beragama Islam tidak dihiraukan oleh pemerintah kompeni karena sudah ada lembaga pendidikan keagamaan yang dikelola masyarakat. Tinggal penduduk keturunan Cina yang belum mendapat kesempatan memperoleh pendidikan. Akhirnya pada tahun 1737 didirikan sekolah untuk anak-anak Cina yang miskin.⁸

Jenis pendidikan di atas adalah pendidikan yang disediakan oleh VOC atau pemerintah Hindia Belanda pada abad 17 dan ke 18, sedangkan jenjang pendidikan pada akhir abad ke 18 sampai memasuki pertengahan abad ke 19 pemerintah Hindi Belanda

menyelenggarakan pendidikan terutama bila dilihat dari peruntukan kesempatan memperoleh pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan bagi Warga Belanda, yaitu:

1) *Europese Lagere School* (ELS)

Sekolah Belanda atau *Europese Lagere School* (ELS) sejak semula dimaksudkan agar sama dengan sekolah yang ada di Nederland. Tujuan utamanya ialah mengembangkan dan memperkuat kesadaran nasional di kalangan keturunan Belanda, yang kebanyakan indo Belanda, termasuk anak-anak yang lahir dari hubungan yang tak legal.

2) *Hogere Burgeschool* (HBS)

Murid-murid ELS dapat menempuh dua macam ujian, yakni ujian pegawai rendah (*klein Ambternaars examen*) setelah masuk kelas 6 dan ujian masuk HBS, sekolah menengah setaraf dengan SMP dan SMA sekarang, setelah kelas 7. Biasanya anak-anak ELS sekitar 80% lulus untuk kedua macam ujian itu, Bagi anak lulusan ELS, memiliki ijazah *Klein Ambternaars* (pegawai rendah) belum menjamin pekerjaan.

HBS merupakan jalan satu-satunya saat itu untuk dapat diterima di universitas-universitas di negeri Belanda. Mereka (orang-orang Indonesia) yang tidak dapat meneruskan pendidikannya, mereka dapat mengharapkan pekerjaan yang baik apabila memiliki ijazah HBS. Di sini Belanda dengan politik penjajahannya tetap membatasi orang Indonesia yang dapat belajar HBS, sehingga orang-orang Belandalah yang memonopoli pekerjaan yang baik/tinggi.

3) *Meer Uitgebreid Lager Ordewjs* (MULO)

Tahun 1903 adalah tahun pendirian kursus MULO yang disambut baik oleh kaum Indo-Belaanda dan mereka yang tidak sanggup menyekolahkan ke HBS yang dianggap mahal, MULO juga dianggap dapat memungkinkan

⁸ Sumarsono Mestoko dkk, Pendidikan di Indonesia dari jaman..., h. 80-82

lulusannya bekerja di kantor pemereintah. Dan pada tahun 1914, kursus MULO diubah menjadi sekolah pertama yang tidak mengikuti pola pendidikan Belanda, namun tetap merupakan pendidikan yang berorientasi Barat yang tidak mencari penyesuaian dengan Indonesia. MULO merupakan lembaga pendidikan untuk semua.

b. Pendidikan bagi Warga Bumi Putera

Lembaga-lembaga pendidikan di atas, khusus ditujukan kepada anak-anak Belanda atau anak indo-Belanda, sementara anak-anak pribumi tidak banyak mendapat kesempatan bersekolah di sana, walaupun adanya statute 1818 yang menyatakan pemerintah hendaknya membuat peraturan yang diperlukan untuk sekolah-sekolah bagi anak bumi putera untuk mendapat pendidikan di sekolah Belanda". Sekolah menjadi harapan.

Lembaga-lembaga pendidikan untuk anak bumi putera

1) Sekolah Kelas Satu (SKS)

Kurikulum sekolah di kelas satu ini ditentukan sebagaimana peraturan tahun 1893 terdiri atas mata pelajaran membaca, dan menulis dalam bahasa daerah dan latin, membaca dan menulis dalam bahasa melayu; berhitung; ilmu bumi Indonesia; ilmu alam, sejarah pulau tempat tinggal; menggambar; dan mengukur tanah. Pada awalnya pemberian bahasa Belanda pada SKS ini sangat deskriminatif. Sekolah ini dianggap sebagai sekolah terminal yang tidak punya kesempatan meneruskan ke sekolah lanjutan. Lamanya pendidikan pada sekolah kelas satu selama 7 tahun.

2) Sekolah Kelas Dua (SKD)

Sekolah Kelas Dua merupakan pilah layanan pendidikan yang lain bagi masyarakat bumi puteri. SKD dimaksudkan sebagai sekolah rakyat yang memberi pendidikan yang sederhana bagi seluruh rakyat. SKD berlangsung selama 3

tahun. Bagi anak Pribumi hanya sebagian kecil yang dapat mengenyam pendidikan di lembaga SKD ini, hal ini dikarenakan kekurangan fasilitas dan ruang belajar, sehingga banyak anak yang tidak dapat terima.

3) Sekolah Desa (Volkschool-Vervolgschool)

Sekolah Desa sampai kelas 3, merupakan sekolah yang merakyat, banyak anak warga Bumi putera yang sempat mengecam pendidikan, kemudian dapat melanjutkana ke kelas 4 dan kelas 5 sekolah rakyat.

4) *Holland Inlandse School* (HIS)

Alasan prinsip bagi pendirian HIS adalah keinginan yang kiat menguat di kalangan orang Indonesia untuk memperoleh pendidikan, khususnya pendidikan Barat.

Kondisi Sekolah Kelas Satu yang tidak memberikan kesempatan meneruskan pendidikan ke sekolah lanjutan, menyebabkan orang tua menuntut beragam hal yang menyebabkan tujuannya tercapai di mana lambat laun Sekolah Kelas Satu berubah menjadi HIS pada tahun 1914. Pada tahun tersebut sesuai dengan statute 1914 No. 764 menyatakan kurikulum HIS meliputi semua mata pelajaran ELS. Bahkan lebih kayak arena adanya pelajaran menulis bahasa Melayu dan bahasa Arab. Namun kurikulum yang ada senantiasa berorientasi pada Netherland.

5) *Algemene Middelbare School* (AMS)

Pendirian MULO sebagai lanjutan segala macam sekolah rendah yang berorientasi Barat, khususnya HIS merupakan langkah yang sangat penting dalam perkembangan suatu system pendidikan yang lengkap badi anak Indonesia, yaitu dibukanya AMS.

AMS merupakan sekolah lanjutan tingkat menengah yang terbagi beberapa bagian (jurusan), bagian A yang mengutamakan Sastra dan Sejarah, dan bagian B yang mengutamakan Matematika dan Fisika. Dengan demikian

terbuka jalan bagi anak-anak bumi Putera untuk mengecap pendidikan tinggi (universitas)

c. Pendidikan bagi Warga Cina

Sekolah untuk warga keturunan Cina disediakan oleh pemerintah Belanda dengan sebutan *Hollands Chinese School* (HCS), lahirnya sekolah ini bukan inisiatif pemerintah Belanda tetapi karena desakan dari pihak warga Cina yang menginginkan pendidikan yang merata dan lebih baik.⁹

3. Sejarah Pendidikan Islam pada Masa Penjajahan Belanda

Tidak dapat dipungkiri bahwa penjajahan oleh bangsa asing di Indonesia selama beberapa abad terutama VOC Belanda dengan misi kristenisasi dan westernisasi, dengan berbagai penindasan yang dilakukan terhadap rakyat Indonesia dengan berbagai kebijakan politik yang sangat merugikan bangsa Indonesia.

Menuru Zainuddin Zuhri yang dikutip oleh Maswardi dalam buku *Sejarah Pendidikan Islam* menyatakan; "Dalam dada penjajah tersebut begitu kuat ajaran politikus curang yang licik *Machiavelli* yang berisikan:

- a. Agama sangat diperlukan bagi penjajah
- b. Agama dipakai untuk menjinakkan dan menaklukkan rakyat
- c. Setiap aliran agama yang dianggap palsu oleh pemeluk agama yang bersangkutan digunakan untuk memecah belah mereka dan mencari bantuan kepada pemerintah (dalam hal ini pemerintah Hindia Belanda)
- d. Janji dengan rakyat tidak perlu ditepati jika merugikan (Belanda)
- e. Tujuan dapat menghalalkan segala cara.¹⁰

⁹ M. Sukardjo & Ukim Komarudin, *Landasan Pendidikan Konsep...*, h. 123-139

¹⁰ Maswardi, *Pola Kebijakan Pendidikan Islam di Nusantara pada Masa Awal sampai Sebelum Kemerdekaan*, (dalam *Sejarah Pendidikan Islam*: Editor; Samsul Nizar), Jakarta: Prenada Media Group, 2007, h.306

Meskipun Belanda mendirikan lembaga pendidikan untuk warga pribumi tetapi semua itu adalah untuk kepentingan penjajah Belanda, terutama untuk mengisi tenaga kerja trampil yang murah dan pegawai rendah di kresedinan yang dibawah kekuasaan Belanda. Pendidikan agama Islam seperti pengajian kitab dan pondok pesantren dianggap tidak membawa kepada kepentingan pemerintah, bahkan ini dianggap sebagai ancaman oleh Belanda,

Karena itu pada masa colonial Belanda sekolah Zending masuk ke dalam system pendidikan umum gubernemen, secara teknis memasukkan sekolah Zending lebih mudah dari pada memasukkan pesantren kedalam system pendidikan umum.¹¹ Maka dengan mudah dapat dimaklumi bahwa pendidikan Zending tersebut lebih banyak mendapat dukungan dari pemerintah colonial dibandingkan dengan lembaga pendidikan Islam seperti halnya pesantren.

Pada umumnya pendidikan Islam (pesantren) dibiayai oleh rakyat atau swadaya masyarakat, dan dengan demikian pendidikan umum akan dapat direalisasikan dengan biaya yang relative lebih murah, akan tetapi karena alasan politis, penggabungan system tersebut tidak terlaksana, sebagai akibat konsekwensi logis kebijakan pemerintah colonial Belanda tidak mau campur tangan dalam persoalan Islam.

Pada tahun 1888 Menteri colonial Belanda menolak memberikan subsidi (dana) kepada sekolah-sekolah Islam karena campur tangan Gubernur Jenderal yang tidak mau mengorbankan keuangan Negara untuk sekolah-sekolah tersebut (Islam),...pada saat itu usul untuk menggabungkan pendidikan Islam ditolak.¹² Hal ini pada umumnya lebih bersifat karena factor politik.

Lembaga-lembaga pendidikan Islam semenjak itu mengambil jalan sendiri, lepas dari campur tangan pemerintah

¹¹ Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Jakarta: LP3ES, 1974, h. 5

¹² Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah pendidikan...*, h. 7

Belanda, dan lebih berpegang pada tradisi sendiri namun terbuka untuk perubahan dalam tradisi tersebut. Sejak itu pendidikan Islam mulai mengembangkan satu model pendidikan sendiri yang berbeda dan terlepas dari system pendidikan Belanda.

Perjalanan sejarah lembaga pendidikan Islam sebagai berikut:

a. Surau/Langgar bertingkat

Surau dapat dikatakan sebagai lembaga pendidikan Islam pertama di Indonesia di Minangkabau, yang sebelumnya pendidikan Islam dilaksanakan di rumah-rumah ulama dalam bentuk pengajian Kitab atau belajar membaca al Qur'an.

Istilah Surau di Minangkabau sudah dikenal sebelum datangnya Islam. Surau dalam system adat Minangkabau adalah kepunyaan suku atau kaum sebagai pelengkap rumah gadang yang berfungsi sebagai tempat berkumpul, rapat, dan tempat tidur bagi anak laki-laki yang telah akil balig dan orang tua yang uzur.¹³ Setelah kedatangan Islam fungsi surau menjadi tempat menimba ilmu-ilmu keagamaan selain sebagai tempat melaksanakan shalat. Sementara di Kalimantan Selatan atau pada masyarakat Banjar, surau dapat disamakan dengan langgar bertingkat, karena dari segi fungsinya ada kemiripan dengan surau di Minangkabau.

Sebagai lembaga pendidikan tradisional, surau menggunakan halaqah, materi atau kurikulum yang diajarkan pada awalnya masih di seputar belajar huruf hijaiyah, dan membaca al Qur'an, di samping ilmu keislaman lainnya, seperti: keimanan, akhlak dan ibadah. Pada umumnya pembelajaran dilaksanakan pada malam hari.¹⁴ Selain itu, surau juga digunakan sebagai lembaga pendidikan terikat, sebab masing-masing pengelolaan surau punya otoritasnya sendiri,

¹³ Abasri, *Sejarah dan Dinamika Lembaga Pendidikan Islam di Nusantara* (dalam *Sejarah Pendidikan Islam*: Editor; Samsul Nizar), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, h.280

¹⁴ Abasri, *Sejarah dan Dinamika Lembaga Pendidikan Islam...*, h. 381

baik dalam praktek tarekat maupun penekanan cabang ilmu-ilmu keislaman lainnya.

Pada mulanya surau memiliki peranan yang penting dalam transfer ilmu agama baik dalam hal belajar membaca al Qur'an maupun mempelajari ilmu-ilmu keislaman kepada para ulama atau syiekh, namun lambat laun eksistensi surau mengalami beberapa kemunduran bahkan akhirnya ditinggalkan, hal ini dikarenakan beberapa factor, antara lain:

- 1) Selama perang Padri banyak surau terbakar dan syiekh banyak yang meninggal.
- 2) Belanda memperkenalkan sekolah negeri (Sekolah Desa)
- 3) Kaum intelektual muda muslim mulai mendirikan Madrasah sebagai bentuk ketidak setujuan mereka terhadap praktek-praktek surau yang penuh dengan khurafat, bid'ah, dan takhayul.¹⁵

Sangat disayangkan surau kehilangan perannya pada masa selanjutnya, padahal dilihat dari konteks sejarah surau mempunyai peranan mampu menumbuhkan semangat nasionalisme dan dalam menentang kolonialisme dan imperialisme dari bangsa asing.

b. Meunasah

Meunasah merupakan tingkat pendidikan Islam rendah di Aceh. Meunasah dikatakan berasal dari bahasa Arab Madrasah ini ada kemungkinan lidah orang Aceh menyebut madrasah menjadi madrasah, ini sama halnya sebagian orang Banjar menyebut madrasah /dengan mandarsah. Meunasah merupakan satu bangunan seperti rumah tetapi tidak punya jendela dan bagian-bagian lain. Bangunan ini digunakan sebagai tempat belajar, berdiskusi dan membicarakan masalah-masalah yang berhubungan dengan kemasyarakatan, ia juga sebagai tempat bermalam para anak-anak muda yang tidak mempunyai isteri.¹⁶

¹⁵ Abasri, *Sejarah dan Dinamika Lembaga Pendidikan Islam...*, h. 383

¹⁶ Abasri, *Sejarah dan Dinamika Lembaga Pendidikan Islam...*, h. 384

Meunasah secara fisik, adalah bangunan rumah panggung yang dibuat pada setiap kampung, setiap kampung terdiri dari 40 rumah dan diketuai oleh kuciek. Dalam meunasah terdapat sumur, bak air, dan WC yang berjarak dengan meunasah. Biasanya meunasah terletak di pinggir jalan. Adapun fungsi meunasah adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai tempat upacara keagamaan, penerimaan zakat dan tempat penyalurannya, tempat penyelesaian perkara agama, musyawarah dan tempat menerima tamu.
- 2) Sebagai lembaga pendidikan Islam di mana diajarkan pelajaran membaca al Qur'an. Pengajian untuk orang dewasa diadakan pada malam hari tertentu dengan metode ceramah dalam satu bulan sekali. Kemudian, pada hari jum'at dipakai ibu-ibu untuk shalat berjamaah zhuhur yang diteruskan dengan pengajian yang dipimpin seorang guru perempuan.¹⁷

Meunasah dipimpin oleh teungku. Teungku bermakna pembina agama, bertugas sebagai imam shalat, dan menjadi panutan bagi masyarakat Aceh. Teungku mengajari anak-anak membaca a-Qur'an, mengajar orang dewasa shalat, menjadi imam, mengurus masalah sosial di wilayah meunasah yang dipimpinnya, seperti mengurus jenazah, perkawinan, kegiatan Ramadhan, dan hari Raya.

Belajar di Meunasah tidak dipungut bayaran alias gratis, para teungku tidak diberi gaji, karena mengajar dianggap ibadah. Namun biasanya teungku mendapat hadiah dari murid-muridnya apabila mereka telah belajar al Qur'an sampai juz ke-15 atau pada saat khatam al Qur'an. Hadiah-hadiah lain seperti pada saat upacara pernikahan, sunat rasul, pembagian harta warisan dan juga dari zakat¹⁸.

Eksistensi meunasah sebagai lembaga pendidikan agama tingkat rendah sangat mempunyai arti bagi masyarakat Aceh. Semua orang tua memasukkan anaknya ke lembaga ini. Dengan kata lain, meunasah merupakan sekolah agama wajib belajar bagi masyarakat Aceh waktu itu. Lembaga pendidikan setelah meunasah ada lagi Rangkang lembaga pendidikan setingkat SMP atau MTs dan Dayah setingkat SMA atau Aliyah.

e. Pesantren

Pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam, tempat para santri belajar agama Islam dengan menerapkan moralitas Islam (akhlak) sebagai pedoman. Pesantren untuk menanamkan pemahaman ilmu dan penghayatan serta pengamalan ajaran Islam (*tafaqquh fi ad-din*). Umumnya pesantren berbentuk asrama di bawah pimpinan kiai, yang dibantu ulama. Di pesantren tinggal pula ustazd bersama santri.¹⁹

Berdasarkan sejarah, pondok pesantren resmi dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam pada awal abad ke 19 (tahun 1800), namun dalam naskah Serat Centhini, sebuah sumber sejarah tradisional, disebut bahwa cikal bakal pesantren terdapat di Karang Banten, Pesantren Karang ini berdiri sekitar tahun 1520an²⁰

Namun meskipun demikian, belum dapat dipastikan kapan pesantren pertama di Indonesia. Tercatat sebuah pesantren tua yakni "pesantren" Tegalsari yang didirikan pada tahun 1742. Hal ini berdasarkan survey Belanda pertama (1819) mengenai pendidikan pribumi mengisyaratkan bahwa pesantren dalam arti sebenarnya belum ada di seluruh Jawa. Lembaga pendidikan yang mirip dengan pesantren dilaporkan terdapat di

¹⁷ Abuddin Nata, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Grafindo, 2001, h. 42

¹⁸ Abasri, *Sejarah dan Dinamika Lembaga Pendidikan Islam...*, h. 385

¹⁹ Ade Armando, dkk, *Ensiklopedi Islam untuk Pelajar*, Jakarta: Ichtiar baru Hoeva, jilid 5, 2002, h.17

²⁰ Ade Armando, dkk, *Ensiklopedi Islam untuk...*, h.17

Priangan, Pakalongan, Rembang, Kedu, Surabaya, Mediuin dan Ponorogo. Selanjutnya menurut survey ini juga, pesantren Tagalsari di Madiun-Ponorogo merupakan pesantren yang terbaik pada waktu.²¹

Dari hasil survey Belanda tersebut bahwa pesantren Tegalsari sudah berdiri jauh sebelum dilakukan survey tersebut, terbukti pesantren Tegalsari sudah memenuhi fasilitas sebagai lembaga pendidikan yang dinilai oleh Belandan sebagai sekolah yang terbaik pada saat itu.

Terlepas dari kapan pesantren pertama berdiri di Indonesia, yang jelas kehadiran pesantren tidak dapat dipisahkan dari tuntutan umat, karena itu, pesantren sebagai lembaga pendidikan selalu menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitarnya, sehingga keberadaannya di tengah-tengah masyarakat tidak menjadi terasing. Hal yang juga segala aktivitasnya pun mendapat dukungan dan apresiasi penuh dari masyarakat sekitarnya.

Dari Perspektif kependidikan, pesantren merupakan satu-satunya lembaga kependidikan yang tahan terhadap berbagai gelombang modernisasi. Dengan kondisi demikian itu, kata Azyumardi Azra (dalam Abasri), menyebabkan pesantren tetap *survive* sampai hari ini. Sejak dilancarkannya perubahan atau modernisasi pendidikan Islam diberbagai Dunia Islam, tidak banyak lembaga-lembaga pendidikan tradisional Islam seperti pesantren yang mampu bertahan. Kebanyakannya lenyap setelah tergusur oleh ekspansi system pendidikan umum atau sekuler. Nilai-nilai progresif dan inovatif diadopsi.²²

Materi pelajaran dan metode pelajaran

Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren pada dasarnya hanya mengajarkan agama, sedangkan kajian mata

pelajarannya ialah kitab-kitab dalam bahasa Arab (kitab kuning). Pelajaran agama yang dikaji pesantren ialah Al-Qur'an dengan tajwid dan tafsirnya, aqa'id dan ilmu kalam, fikih dan ushul fikih, hadis dengan muhthalah hadis, bahasa Arab dengan ilmunya, tarikh, mantiq, dan tasawuf.

Adapun metode yang lazim digunakan dalam pendidikan pesantren ialah;

- 1) *Wetonan*, yakni suatu metode kuliah dimana para santri mengikuti pelajaran dengan duduk disekeliling kiai yang menerangkan pelajaran. Santri menyimak kitab masing-masing dan mencatat jika perlu. Pelajaran diberikan pada waktu-waktu tertentu, yaitu sebelum atau sesudah melaksanakan shalat fardu. Di Jawa Barat, metode ini disebut dengan *bandongan*, sedangkan di Sumatera disebut dengan *halaqah*.
- 2) *Metode Sorogan*, yakni suatu metode dimana santri menghadap kiai seorang demi seorang dengan membawa kitab yang akan dipelajari. Metode Sorogan ini merupakan bagian yang paling sulit dari keseluruhan metode pendidikan Islam tradisional, sebab system ini menuntut kesabaran, kerajinan, ketaatan dan disiplin pribadi santri/kendatipun demikian, metode ini diakui paling intensif, karena dilakukan seorang demi seorang dan ada kesempatan untuk Tanya jawab langsung.
- 3) *Metode hafalan*, yakni suatu metode di mana santri menghafal teks atau kalimat tertentu dari kitab yang dipelajarinya.²³

Baik materi maupun metode pembelajaran yang digunakan di pesantren tentu sangat berbeda dengan sekolah-sekolah yang didirikan dan dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Selain itu, pondok pesantren mempunyai beberapa ciri

²¹ Ade Armando, dkk, *Ensiklopedi Islam untuk...*, h.18

²² Abasri, *Sejarah dan Dinamika Lembaga Pendidikan Islam...*, h. 386

²³ Abuddin Nata, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga...*, 105-

yang menonjol terutama dalam kondisi kehidupan pesantren, sehingga membedakan dengan system pendidikan lainnya.

Menurut Zamakhsyari Dhofeir (dalam Abasri) mengemukakan ciri-ciri tersebut, sebagai berikut:

- 1) Adanya hubungan yang akrab antara santri dengan kiayinya.
- 2) Adanya kepatuhan santri kepada kiayi
- 3) Hidup hemat dan penuh kesederhanaan
- 4) Adanya kemandirian
- 5) Mempunyai jiwa tolong-menolong dan suasana persaudaraan
- 6) Kedisiplinan
- 7) Berani menderita untuk mencapai suatu tujuan, dan
- 8) Pemberian Ijazah.²⁴

Tentunya ciri-ciri pondok pesantren yang dikemukakan Zamakhsyari Dhofier di atas merupakan gambaran sosok pesantren yang masih murni yaitu pesantren tradisional yang masih melestarikan budaya pondok yang masih asli. Karenanya tidak menutup kemungkinan pondok pesantren sekarang akan ada perubahan sesuai dengan dinamika dan kemajuan pesantren.

Pada awal abad ke 20 pendidikan di Indonesia menjadi dua golongan, yaitu: pertama adalah pendidikan yang diberikan oleh sekolah Barat yang sekuler yang tidak mengenal ajaran agama, dan yang kedua adalah pendidikan yang diberikan pondok pesantren yang hanya mengenal ilmu agama saja.

Pendidikan Kolonial Belanda sangat berbeda dengan pendidikan Islam Indonesia yang tradisional, bukan saja dari segi metode, tetapi lebih khusus dari segi isi dan tujuannya. Pendidikan yang dikelola oleh pemerintah colonial Belanda khususnya berpusat pada pengetahuan dan keterampilan duniawi sedangkan lembaga pendidikan Islam lebih mengutamakan pada pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi pengahayatan agama.²⁵

²⁴ Abasri, *Sejarah dan Dinamika Lembaga Pendidikan Islam...*, h. 389

²⁵ Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah pendidikan...*, h. 24

Dengan merebaknya sekolah-sekolah Desa yang didirikan Belanda, sementara pondok pesantren terbatas jumlah dan tidak dapat menjangkau semua wilayah dan semua anak usia sekolah khususnya warga pribumi yang mayoritas beragama Islam. Dalam hal ini muncul kesadaran dari ulama-ulama dan orang-orang berada dikalangan umat Islam pada waktu, selain itu pondok pesantren tidak mampu menyaingi sekolah-sekolah Belanda, maka dirasakan pentingnya member pendidikan yang teratur dan regular di sekolah yang dinamakan madrasah.

d. Madrasah

Salah satu bentuk pendidikan Islam adalah madrasah. Madrasah mulai dikenal pada abad ke 11, semula madrasah adalah lembaga pendidikan orang dewasa, sebagai kelanjutan dari Kutta yang setingkat dibawahnya. Madrasah dalam bentuk sekarang pertama kali didirikan oleh Nizam al-Mulk (1018-1092) ns di Baghdad pada tahun 1067 dengan nama Madrasah Nizamiyah.²⁶

Sementara itu, di Indonesia perkembangan pendidikan Islam dalam bentuk madrasah merupakan pengembangan system pendidikan tradisional yang diadakan di surau, langgar, masjid dan pesantren. Perkembangan selanjutnya mengubah system halaakah ke system klasikal dipengaruhi oleh system dan sekolah pemerintah Hindia Belanda.

Berdasarkan sejarah lembaga pendidikan Islam khususnya madrasah, madrasah yang tertua adalah Madrasah Mamba'al Ulum (1905), kemudian Madrasah Nahdatul Watan, Madrasah Hizbul Wathan, dan Madrasah Tasywirul Afkar, Sekolah Diniyah (1915) Madrasah Sumatera Thawalib (1916), dan madrasah diniyah Puteri (1923).²⁷

²⁶ Ade Armando, *Enseklopedi Islam untuk Pelajar*, Jilid 4, Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 2002, h.3

²⁷ Ade Armando, *Enseklopedi Islam untuk Pelajar*, Jilid 4, ..., h.3

Berdirinya madrasah-madrasah di Indonesia dimulai adanya kesadaran dari ulama dan intelektual Islam untuk memajukan pendidikan bagi umat Islam, karena pendidikan Belanda lebih maju, namun menurut anggapan ulama Islam bahwa pendidikan yang di berada di bawah pemerintah Hindia Belanda adalah pendidikan yang hanya berorientasi pada keduniaan dan sekuler. Sehingga mereka mendirikan lembaga pendidikan baik secara individu maupun kelompok atau organisasi yang dinamakan madrasah atau sekolah diniyah.

Madrasah-madrasah tersebut antara lain:

- 1) Madrasah (Adabiyah School), madrasah ini didirikan oleh Syikh Abdullah Ahmad pada tahun 1907 di Padang Panjang. Belum cukup satu tahun madrasah ini gagal berkembang dan dipindahkan ke Padang. Pada Tahun 1915 madrasah ini mendapat pengakuan dari Belanda dan berubah menjadi *Holland Inlandsche School* (HIS).
- 2) Sekolah Agama (Madras School) didirikan oleh Syikh M. Thaib Umar di Sengayang Batusangkar pada tahun 1910. Madrasah ini pada tahun 1913 terpaksa ditutup dengan alasan kekurangan tempat. Namun pada tahun 1918, Mahmud Yunus mendirikan Diniyah School sebagai kelanjutan dari Madras School.
- 3) Madrasah Diniyah (Diniyah school). Madrasah ini didirikan pada tanggal 10 Oktober 1915 oleh Zainuddin Labai El Yunusiy di Pandang Panjang.
- 4) Madrasah Salafiyah. Madrasah ini didirikan oleh KH Hasyim Asy'ari pada Tahun 1916 di Tebu Ireng, Jombang Jawa Timur. Madrasah ini berada di bawah naungan organisasi Nahdatul Ulama (NU)
- 5) Madrasah Muhammadiyah, madrasah ini tidak diketahui tahun berdirinya, tapi diperkirakan berdiri pada tahun 1918 oleh organisasi Muhammadiyah.
- 6) Arabiyah School. Madrasah ini didirikan pada tahun 1918 di lading Lawa oleh syekh Abbas. Kemudian dilanjutkan dengan

7) Sumatera Thawalib didirikan oleh Syekh Abdul Karim Amrullah pada tahun 1921 di Padang Panjang, Bukit tinggi, Sungayang, Batusangkar, dan Maninjau.

8) Madrasah Diniyah Puteri (1923).²⁸

Madrasah-madrasah di atas merupakan pionir dalam pendirian madrasah-madrasah lainnya di berbagai daerah di Nusantara ini. Keberadaan madrasah pada saat itu mampu memberikan yang terbaik bagi warga pribumi dalam mengecap pendidikan dasar yang seimbang antara pendidikan umum dan pendidikan agama secara klasikal.

4. Sejarah Pendidikan Islam pada Masa Penjajahan Jepang

Sistem persekolahan di jaman pendudukan Jepang banyak mengalami perubahan karena system penggolongan baik menurut golongan bangsa, maupun status social dihapus. Dengan demikian terdapat integrasi terhadap macam-macam sekolah yang sejenis. Sejak jaman Jepang bahasa dan istilah-istilah mulai dipergunakan di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan. Sekolah Dasar, waktu itu dipergunakan istilah Sekolah Rakyat (Kokumin Gakko), terbuka untuk semua penduduk. Lama pendidikannya enam tahun.²⁹

Hal ini sangat berbeda dengan kebijakan Pemerintah Belanda yang membagi sekolah ke dalam beberapa kelompok, yaitu sekolah untuk anak Belanda, priyayi, warga bumi putra, dan warga Cina.

Sebagai kelanjutannya adalah sekolah Menengah Pertama (Shoto Chu Gakko) dan selanjutnya Sekolah Menengah Tinggi (setingkat SMA) dinamakan dengan istilah Koto Chu Gakko. Lama pendidikannya adalah 3tiga tahun untuk SMP dan tiga tahun untuk SMT/SMA.

²⁸ Maswardi, *Pola Kebijakan Pendidikan Islam di Nusantara ...*, h. 292-293

²⁹ Sumarsono Mestoko dkk, *Pendidikan di Indonesia dari jaman...*, h.138

Setelah Belanda angkat kaki di wilayah Nusantara, maka dilanjutkan dengan penjajahan Jepang. Jepang menjajah Indonesia hanya kurang lebih tiga setengah tahun, pada saat itu Jepang ingin mengambil hati rakyat dengan menjanjikan akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa di Indonesia, niat baik tersebut dibuktikan dengan dibentuknya PPKI dan BPUPKI. Dalam kebijakan pemerintah Jepang terhadap lembaga pendidikan Islam tidak begitu ketat seperti halnya pada pemerintahan Belanda. Jepang memberikan toleransi yang banyak terhadap pendidikan Islam di Indonesia, kesetaraan pendidikan penduduk pribumi, sama dengan penduduk atau anak-anak penguasa. Bahkan Jepang banyak mengajarkan ilmu bela diri kepada pemuda Indonesia.

Selain itu. Pendudukan Jepang juga memberikan keleluasaan bagi warga untuk mendirikan lembaga pendidikan dan tempat ibadah, dan anak-anak dibolehkan untuk belajar agama dan mengaji.³⁰

Dari uraian di atas dapat dimaklumi, kenapa Jepang berusaha ingin mendapatkan simpatik bangsa Indonesia, karena Jepang mempunyai maksud tertentu supaya mendapat bantuan dalam perang Asia Pasifik melawan Sekutu.

C. Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan hasil paparan pada uraian terdahulu, maka pada bagian penutup dapat ditarik beberapa simpulan, sebagai berikut:

- a. Kedatangan VOC ke Nusantara pada awalnya hanya untuk berdagang, namun karena kekayaan sumber alam Indonesia niat semula hanya untuk berdagang berubah ingin menguasai/memonopoli dan akhirnya menjajah.
- b. Pola pendidikan Belanda membedakan antara pendidikan untuk anak-anak Belanda, Pegawai Tinggi, warga pribumi,

dan warga Cina. Tidak semua warga pribumi dapat mengenyam pendidikan menengah apalagi pendidikan tinggi.

- c. Pemerintah Hindia Belanda lebih konsern terhadap misi Zending/Kristenisasi dan tidak bersedia memberikan subsidi kepada lembaga pendidikan Islam.
- d. Lembaga pendidikan Islam berkembang mulai dari Surau, langgar, Masjid, Meunasah, Pesantren dan madrasah.
- e. Madrasah lahir karena tidak semua warga bumi putera dapat bersekolah pendidikan rendah. selain itu, untuk menyangi lembaga pendidikan Belanda yang hanya berorientasi pada keduniaan dan sekuler.
- f. Pada masa pendudukan Jepang, dihapusnya diskriminatif dalam memperoleh pendidikan, dan diberikan keleluasaan bagi umat islam untuk mendirikan lembaga pendidikan dan tempat Ibadah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abasri, *Sejarah dan Dinamika Lembaga Pendidikan Islam di Nusantara*, (dalam Sejarah Pendidikan Islam: Editor; Samsul Nizar), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- Abuddin Nata, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Grafindo, 2001
- Ade Armando, dkk, *Ensiklopedi Islam untuk Pelajar*, Jilid 4, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2002
- Ade Armando, dkk, *Ensiklopedi Islam untuk Pelajar*, jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2002

³⁰ Maswardi, *Pola Kebijakan Pendidikan Islam di Nusantara ...*, h.314

- H.A. Mustafa dan Abdullah Aly, *Sejarah Pendidikan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1998, dalam Syamsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam*, Kencana Media Group Jakarta, 2007.
- Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Jakarta: LP3ES, 1974.
- Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- M. Sukardjo & Ukim Komarudin, *Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Mahmud Arief, *Pendidikan Islam Transformatif*, Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2008.
- Maswardi, *Pola Kebijakan Pendidikan Islam di Nusantara pada Masa Awal sampai Sebelum Kemerdekaan*, (dalam *Sejarah Pendidikan Islam*: Editor; Samsul Nizar), Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Sumarsono Mestoko dkk, *Pendidikan di Indonesia dari jaman ke Jaman*, Balai Pustaka Jakarta, 1986.

BAB VII
PENDIDIKAN ISLAM MASA ORDE LAMA
(Sebuah Refleksi Historis tentang
Dinamika, Kebijakan, dan Tokoh)
 Oleh: Syaiful Bahri Djamarah

A. PENDAHULUAN

Alur sejarah sebuah dinamika adalah suatu keniscayaan. Di dalam sejarah pasti ada dinamika dalam siklus waktu dan sejarah peradaban yang sangat panjang. Di dalam dinamika sejarah itulah pena sejarah telah mencatat bahwa ada pendidikan Islam di pentas kehidupan, yang merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya dalam ikut serta mengangkat harkat dan martabat manusia dari keterpurukan intelektual.

Yang tidak terbantahkan adalah bahwa sejarah pendidikan Islam di Indonesia berbanding lurus dengan pertumbuhan dan perkembangan umat Islam di bumi pertiwi ini. Abad ke-7 telah diyakini adalah awal masuknya Islam masuk ke Indonesia. Ketika Islam berkembang dengan pesat pada abad VIII M yang ditandai dengan munculnya sejumlah kerajaan Islam, pendidikan Islam pun berkembang mengikuti irama dan dinamika perkembangan Islam. Pendek kata, di mana pun ada komunitas kaum muslimin, di sana ada aktifitas pendidikan Islam yang dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah tempat mereka berada.

Eksistensi pendidikan Islam di Indonesia adalah fakta sejarah yang telah ada sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda dan penduduk Jepang, pendidikan diselenggarakan oleh masyarakat sendiri dengan mendirikan pesantren, sekolah dan tempat latihan-latihan lain. Setelah merdeka, pendidikan Islam dengan ciri khasnya madrasah dan pesantren mulai mendapatkan perhatian dan pembinaan dari pemerintah Republik di Indonesia.

Pemerintahan pada masa orde lama yang berkuasa dalam rentang waktu 1945 sampai dengan 1966, telah diberi tugas oleh UUD

1945 untuk mengusahakan agar terbentuknya suatu sistem pendidikan dan pengajaran yang bersifat nasional. Oleh karena itu, pastilah sejarah mencatat bagaimana pemerintah orde lama memberikan sumbangsih yang signifikan terhadap perkembangan pendidikan Islam. Pemerintahan memandang bahwa agama mempunyai kedudukan dan peranan sangat penting dan strategis. Peran utama agama sebagai landasan spiritual, moral dan etika dalam pembangunan nasional, agama juga berpengaruh untuk membersihkan jiwa manusia dan kemakmuran rakyat, Agama sebagai sistem nilai seharusnya dipahami dan diamalkan oleh setiap individu, warga dan masyarakat hingga akhirnya dapat menjiwai kehidupan bangsa dan negara.

Secara khusus pendidikan Islam dan bertanggung jawab atas kelangsungan tradisi ke Islaman dalam arti yang seharusnya. Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan tentang pendidikan dapat dilihat bahwa posisi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional meliputi: pendidikan Islam seperti mata pelajaran, pendidikan Islam sebagai lembaga, pendidikan Islam sebagai nilai. Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran adalah diberikan mata pelajaran agama Islam di sekolah-sekolah mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Kedudukan mata pelajaran ini semakin kuat dari satu fase ke fase yang lain.¹

Sejalan dengan dinamika dan pasang surut sejarah umat Islam di Indonesia, sejarah pendidikan pun mengalami dinamika dan pasang surut pula. Bagaimana sesungguhnya perjalanan sejarah pendidikan Islam tersebut pada masa Orde Lama adalah persoalan yang cukup menarik untuk dibahas dan diketahui. Agar pembahasan ini mempunyai arah yang jelas, maka pembahasan dalam makalah ini mencoba merefleksikan secara historis tentang dinamika perkembangan, kebijakan yang dikeluarkan, dan tokoh-tokoh pendidikan yang peduli dan konsisten memeperjuangkan pendidikan Islam pada masa Orde Lama. Pembahasan dimulai dengan memotret pandangan sang penguasa Orde Lama.

¹ <http://www.armhando.com/2012/02/kebijakan-pemerintah-dalam-pendidikan.html>

B. PENDIDIKAN ISLAM DI MATA SOEKARNO

Ketika pembahasan pendidikan Islam ini ditujukan kepada bagaimana sesungguhnya pendidikan Islam dalam pandangan Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia di masa Orde Lama, penulis teringat dengan Syamsul Kurniawan, penulis buku *Pendidikan di Mata Soekarno* yang berisi tentang modernisasi pendidikan Islam dalam pemikiran Soekarno. Antara Soekarno dan Islam memang tidak bisa dipisahkan pada masa pemerintahannya. Oleh karena itu, sangat wajar Soekarno sangat memperhatikan pendidikan Islam yang notabene memang diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ketika itu. Apalagi mengingat keberhasilan merebut kemerdekaan dari tangan penjajah sebagian besar hasil dari jerih payah, perjuangan, dan pengorbanan tokoh-tokoh umat Islam yang belakangan banyak yang diberi gelar pahlawan. Oleh karena itu, baik ketika mengawali tulisan ini maupun ketika mengakhiri bagaimana pendidikan Islam dalam pandangan Soekarno, semuanya dikutip secara random dari buku tersebut.²

Menurut soekarno pendidikan Islam mempunyai kepentingan dan tanggung jawab mengendalikan realitas sosial karena ia dapat dipakai sebagai sarana transformasi bagi masyarakat Muslim. Bagi Soekarno, pendidikan Islam, sebagaimana pendidikan pada umumnya, merupakan arena untuk mengasah akal, mempertajam akal, dan mengembangkan intelektualitas. Sehingga tidak berlebihan jika Soekarno menyebut bahwa motor hakiki dari semua *rethinking of Islam* adalah kembalinya penghargaan atas akal.

Pendidikan, menurut Soekarno, menjadi prioritas utama untuk dilaksanakan. Karena pada kenyataannya, pendidikan merupakan faktor penentu bagi perkembangan umat Islam yang diyakini sebagai agama paling sempurna dengan mewajibkan umatnya menempatkan pendidikan sebagai aspek sangat penting. Tidak ada jalan lain untuk

² Lihat Syamsul Kurniawan. *Pendidikan di Mata Soekarno*. Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, cet. I, 2009. Baca Bab IV tentang Modernisasi Pendidikan Islam dalam Pemikiran Soekarno dari hlm. 119 – 134.

memperbaiki keterpurukan umat Islam selain menyusun sistem pendidikan yang berakar pada nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan tujuan-tujuan Islam.

Menurut Soekarno, meskipun agama berasal dari Tuhan dan bersifat *absolute*, namun ia harus dipahami melalui medium penafsiran manusia yang berlaku dalam *setting* lingkungan sosial yang kompleks. Sebagai seorang rasionalis yang selalu mengedepankan akal pikiran sebagai pertimbangan utama dalam setiap argumen-argumen yang dilontarkan, secara prinsipil, Soekarno yakin bahwa untuk memahami Islam seseorang perlu membekali diri pada cakupan pengetahuan yang luas.

Peradaban Islam pernah mengalami kejayaan ketika akal masih menjadi pertimbangan utama dalam setiap aktivitas intelektual dan sistem pendidikannya. Namun, menurut Soekarno, setelah itu, seribu tahun lamanya akal dikungkung. Sejak zamannya kaum Mu'tazilah, sejak zamannya pahlawan-pahlawan akal seperti Al Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibu Baja, Ibnu Tufail, Ibnu Rushd, dan lain-lain ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Setelah itu, akal tidak mendapat tempat yang wajar. Akal yang saat itu begitu dominan justru akhirnya dikutuk dan dipinggirkan fungsinya. Setuju atau tidak, Abu Hasan al-Asy'ari sebagai pelopor kehidupan rohaniah, dituduh oleh Soekarno sebagai yang paling bertanggung jawab atas matinya kekuatan akal. Asy'arisme juga dianggap oleh Soekarno sebagai pokok pangkal munculnya tradisi *taqlidisme* di dalam Islam dan pokok pangkal kependekataan dalam Islam. Islam bukan lagi satu agama yang dapat dipikirkan secara merdeka, melainkan menjadi monopoli kaum fikih dan kaum tarekat. Akibat dominasi kaum Asy'ari, maka dunia Islam menurut Soekarno dilanda kebekuan, sebagaimana air membeku karena hawa dingin di musim *winter*.

C. REFLEKSI KEBIJAKAN PEMERINTAH ORDE LAMA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM

Dengan susah payah akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia berhasil meraih kemerdekaannya sendiri, tanpa meminta belas kasihan pemerintah Jepang atau bangsa lain. Kemerdekaan Indonesia melahirkan kehidupan baru di segala bidang, termasuk pendidikan. Setelah Indonesia merdeka, bangsa Indonesia sendiri secepatnya mengubah sistem pendidikan dan menyesuaikannya dengan keadaan baru sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Maka, diperlukan sistem pendidikan nasional yang berdasarkan eksistensi masa lampau, masa kini, dan kewaspadaan terhadap perkembangan ke depan.³

Meskipun bangsa Indonesia telah meraih kemerdekaan pada tanggal 17-8-1945 Indonesia merdeka. Tetapi musuh-musuh Indonesia tidak diam saja, bahkan berusaha untuk menjajah kembali. Oleh karena itu, pada bulan oktober 1945 para ulama di Jawa memproklamasikan perang *Jihad fi sabilillah* terhadap Belanda/sekutu. Hal ini berarti memberikan fatwa kepastian hukum terhadap perjuangan umat Islam. Pahlawan perang berarti pahlawan jihad yang berkategori sebagai *syuhada* perang. Isi fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kemerdekaan Indonesia wajib dipertahankan.
2. Pemerintah RI adalah satu-satunya yang sah yang wajib dibela dan diselamatkan.
3. Musuh-musuh RI (Belanda/sekutu), pasti akan menjajah kembali bangsa Indonesia. Karena itu kita wajib mengangkat senjata menghadapi mereka.
4. Kewajiban-kewajiban tersebut diatas adalah *fi sabilillah*.

Ditinjau dari segi pendidikan rakyat, maka fatwa ulama tersebut besar sekali artinya. Fatwa tersebut memberikan faedah sebagai berikut:

³ Hanun Asrohah. *Sejarah Pendidikan Islam*. Logos, Jakarta, cet. I, 1999, hlm. 177.

1. Para ulama santri-santri dapat mempraktikkan ajaran *fi sabilillah* yang sudah dikaji bertahun-tahun dalam pengajian kitab suci fikih di pondok atau madrasah.
2. Pertanggungjawaban mempertahankan kemerdekaan tanah air itu menjadi sempurna terhadap sesama manusia dan terhadap Tuhan yang Maha Esa.⁴

Sebagai modal dan pedoman pertama bagi rakyat dan pemerintah di lapangan pendidikan, dipergunakanlah Rencana Usaha Pendidikan/Pengajaran yang telah dipersiapkan pada hari-hari terakhir penjajahan Jepang. Sebagai langkah awal dikeluarkan "instruksi umum" oleh Menteri PP dan K, yaitu Ki Hajar Dewantara. Sebagai landasan konstitusional, bangsa Indonesia menggunakan UUD 1945 sebagai pedoman dan dasar penyelenggaraan pendidikan nasional.⁵ UUD 1945 Pasal 31 disebutkan, bahwa: (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran; (2) Pemerintah mengusahakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

Dalam kerangka sistem pendidikan nasional, pemerintah memberi penghargaan tinggi bagi pendidikan agama Islam, termasuk lembaga-lembaga pendidikan Islam yang sudah ada. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya berbagai kebijakan pemerintah terhadap eksistensi pendidikan Islam. Pada tanggal 22 Desember 1945 BPKNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) mengumumkan, bahwa: "*Dalam memajukan pendidikan dan pengajaran di langgar-langgar dan madrasah berjalan terus dan dipercepat.*" Tidak hanya itu, BPKNIP juga menyarankan agar pendidikan agama di sekolah mendapat tempat yang teratur, seksama, dan mendapat perhatian dan bantuan material dari pemerintah, karena madrasah dan pesantren pada hakikatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berakar dalam masyarakat Indonesia. Saran tersebut diajukan oleh BPKNIP pada tanggal 27 Desember 1945.

⁴ <http://www.armhando.com/2012/02/kebijakan-pemerintah-dalam-pendidikan.html>

⁵ Hanun Asrohah. *Sejarah Pendidikan Islam*. Logos, Jakarta, cet. I, 1999, hlm. 177.

Perhatian pemerintah terhadap pendidikan Islam tidak hanya sampai pada peraturan formal, tetapi juga sudah ke aksi. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya Departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946. Lembaga ini dipercaya untuk mengurus penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah umum dan mengurus sekolah-sekolah agama seperti madrasah dan pondok pesantren. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari kesadaran pemerintah akan pentingnya agama sebagai fondasi dalam pembangunan bangsa dan Negara.⁶

Pada waktu Mr. R. Suwandi menjadi Menteri PP dan K (2 Oktober 1946 s.d. 27 Juni 1947), dia membentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara. Panitia ini, pada tanggal 2 Juni 1946, merekomendasikan mengenai sekolah-sekolah agama. Bunyi rekomendasi itu adalah, bahwa: "*pengajaran yang bersifat pondok pesantren dan madrasah perlu untuk dipertinggi dan dimodernisasi serta diberikan bantuan biaya dan lain-lain.*"

Pada bulan Desember 1946 dikeluarkan peraturan bersama dua menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Pengajaran yang menetapkan bahwa pendidikan agama diberikan mulai kelas IV SR (Sekolah Rakyat = Sekolah Dasar) sampai kelas VI. Pada masa itu keadaan keamanan di Indonesia masih belum mantap sehingga SKB Dua Menteri belum dapat berjalan dengan semestinya. Daerah-daerah di luar Jawa masih banyak yang memberikan pendidikan agama mulai kelas I SR. Pemerintah membentuk Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam pada tahun 1947 yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dari Departemen P dan K, serta Prof. Drs. Abdullah Sigit dari Departemen Agama. Tugasnya ikut mengatur pelaksanaan dan menteri pengajaran agama yang diberikan di sekolah umum.

Tahap demi tahap, sesuai dengan dinamika dan tuntutan pembangunan bangsa, pendidikan Islam semakin terintegrasikan secara total dalam sistem pendidikan nasional. Lahirnya Undang-Undang Pokok Pendidikan dan pengajaran No. 4 tahun 1950 yang menyatakan bahwa: "*belajar di sekolah-sekolah agama yang telah*

⁶ Hanun Asrohah, hlm. 178.

mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar,” sebagai bukti bahwa pendidikan agama (Islam) diakui sebagai komponen dari sistem pendidikan nasional.⁷

Pada tahun 1950 di mana kedaulatan Indonesia telah berlaku untuk seluruh Indonesia, maka rencana pendidikan agama untuk seluruh wilayah Indonesia makin disempurnakan dengan dibentuknya panitia bersama yang dipimpin Prof. Mahmud Yunus dari Departemen Agama, Mr. Hadi dari Departemen P dan K. Hasil dari panitia itu adalah SKB yang dikeluarkan pada bulan Januari. Isinya ialah:

1. Pendidikan agama yang diberikan mulai kelas IV Sekolah Rakyat.
2. Di daerah-daerah yang masyarakat agamanya kuat, maka pendidikan agama diberikan mulai kelas I SR dengan catatan bahwa pengetahuan umumnya tidak boleh berkurang dibandingkan dengan sekolah lain yang pendidikan agamanya diberikan mulai kelas IV.
3. Di sekolah Lanjutan Pertama dan Tingkat Atas (umum dan kejuruan) diberikan pendidikan agama sebanyak 2 jam seminggu.
4. Pendidikan agama diberikan kepada murid-murid sedikitnya 10 orang dalam satu kelas dan mendapat izin dari orang tua / walinya.
5. Pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama, dan materi pendidikan agama ditanggung oleh Departemen Agama.

Dalam sidang pleno MPRS, pada bulan Desember 1960 diputuskan sebagai berikut: “Melaksanakan Manipol Usdek di bidang mental/agama/kebudayaan dengan syarat spiritual dan material agar setiap warga Negara dapat mengembangkan kepribadiannya dan kebangsaan Indonesia serta menolak pengaruh-pengaruh buruk kebudayaan asing (Bab II Pasal 2 ayat 1)”. Dalam ayat 3 dari pasal tersebut dinyatakan bahwa: “Pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah umum, mulai sekolah rendah (dasar) sampai Universitas,” dengan pengertian bahwa murid berhak ikut serta dalam pendidikan agama jika wali/murid dewasa menyatakan keberatannya.

⁷ Hanun Asrohah, hlm. 178 - 179.

Pada tahun 1966 MPRS bersidang lagi. Dalam keputusannya, bidang pendidikan agama telah mengalami kemajuannya, pendidikan agama menjadi hak wajib dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi Umum Negeri di seluruh Indonesia.

Langkah demi langkah pada akhirnya pendidikan Islam semakin terintegrasikan secara total dalam pendidikan nasional. Pentingnya pendidikan agama yang telah terintegralkan dengan pendidikan nasional akhirnya mendapat kekuatan hukum dalam Rumusan Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional yang berbunyi: bahwa pendidikan nasional ialah usaha dasar untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan mengusahakan perkembangan kehidupan beragama, kehidupan yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, nilai budaya, pengetahuan, ketrampilan, daya estetik, dan jasmaninya sehingga ia dapat mengembangkan dirinya bersama-sama dengan sesama manusia membangun masyarakatnya, serta membudayakan alam sekitar. Rumusan pendidikan nasional ini akhirnya dikukuhkan dalam GBHN berdasarkan TAP MPR No. II/1983.⁸

D. TOKOH-TOKOH PENDIDIKAN MASA ORDE LAMA YANG PEDULI DAN MEMPERJUANGKAN PENDIDIKAN ISLAM

1. Ki Hajar Dewantara⁹

Ki Hajar Dewantara dilahirkan pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta dan wafat pada tanggal 26 April 1959 dan dimakamkan di Yogyakarta.¹⁰ Nama aslinya, Raden Mas Soewandi Soerjaningrat,

⁸ Hanun Asrohah. *Sejarah Pendidikan Islam*. Logos, Jakarta, cet. I, 1999, hlm. 178.

⁹ MIF. Baihaqi. *Ensiklopedi Tokoh Pendidikan dari Abendanon hingga K.H. Imam Zarkasyi*. Nuansa, Bandung, cet. I, 2007, hlm. 44.

¹⁰ Marlon Peranginangin, dkk. *Buku Pintar Pahlawan Nasional*. Scientific Press, Batam Centre, 2007, hlm. 111.

putra bangsawan Pakualaman. Sebelumnya ia belajar di *School tot Opleiding van Inlandsche Artsen* (STOVIA) di Jakarta selama 5 tahun, namun tidak menamatkannya dan memutuskan untuk menjadi wartawan. Ia adalah teman baik Dr. Douwes Dekker (Dr. Setiabudhi) dan Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo. Mereka bertiga inilah yang mendirikan *Indische Partij*. Karena tulisannya *Als ik eens Nederlander was* (seandainya aku seorang Belanda) di tahun 1913, Ki Hajar Dewantara ditangkap dan dibuang ke Negeri Belanda. Di sini ia belajar untuk menjadi guru disamping memperdalam bidang kewartawanan.

Tidak lama setelah kembali ke Indonesia, Ki Hajar Dewantara menyisihkan waktunya untuk menggeluti dunia pendidikan. Sebagai bukti nyata dari pengabdianya pada tanggal 3 Juli 1922 ia mendirikan sebuah Taman Kanak-Kanak yang dinamai "Taman Indrya," permulaan dari Taman Siswa yang disebutnya *National Onderwijs-Instituut Taman Siswa*.

Ki Hajar Dewantara adalah Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pertama pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perjuangannya dalam membuat landasan bagi pendidikan di Indonesia membuat pemerintah RI menjadikan tanggal kelahirannya, 2 Mei, sebagai Hari Pendidikan Nasional.¹¹

Konsep pendidikan yang digagas Ki Hajar Dewantara adalah mengakui hak si anak atas kemerdekaannya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat serta pembawaannya. Karena itu, konsepnya adalah "TUT WURI HANDAYANI" yang berarti mengikuti si anak dari belakang sambil membimbingnya. Si anak aktif dan pendidik berfungsi sebagai orang yang mengarahkan dan melayani. Dasar pendidikannya adalah kebudayaan dan kebangsaan Indonesia.

Kepedulian dan perhatian Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan Islam sangat jelas. Departemen Agama yang dibentuk pada tanggal 3 Januari 1946 adalah berkat kebijakannya ketika ia menjabat

¹¹ Marlon Peranginangin, dkk. *Buku Pintar Pahlawan Nasional*. Scientific Press, Batam Centre, 2007, hlm. 111.

sebagai Menteri PP dan K pertama Republik Indonesia. Ketika Mr. R. Soewandi menjadi Menteri PP dan K (2 Oktober 1946 s.d. 27 Juni 1947), Ki Hajar Dewantara dipercaya untuk memangku jabatan sebagai ketua Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia. Kepanitiaan yang dipimpinnya ini merekomendasikan mengenai sekolah-sekolah agama yang dilaporkannya pada tanggal 2 Juni 1946. Bunyi laporan itu adalah: "Bahwa pengajaran yang bersifat pondok pesantren dan madrasah perlu untuk dipertinggi dan dimodernisasi serta diberikan bantuan biaya dan lain-lain."¹²

2. Mr. R. Soewandi Soerjaningrat

Mr. R. Soewandi adalah tokoh pendidikan dan penggagas EYD (Ejaan Yang Disempurnakan) dalam Bahasa Indonesia. Pada masa kolonial, Soewandi pernah menjadi Sekretaris *Department van Onderwijs en Eeredienst*. Sesudah Perang Dunia II, ia menjabat Menteri Kehakiman dari November sampai Oktober 1946, kemudian Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP&K) dari 2 Oktober 1946 sampai 27 Juli 1947.¹³

Kepedulian dan perhatian Soewandi terhadap pendidikan Islam adalah terlihat ketika ia dipercayakan duduk sebagai Menteri PP dan K dari tanggal 2 oktober 1946 s.d. 27 Juli 1947. Ia membentuk "Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia" yang diketuai Ki Hajar Dewantara, sebagaimana telah diuraikan di atas.

3. Mr. Raden Ali Sastroamodjojo¹⁴

Mr. Raden Ali Sastroamodjojo adalah tokoh nasional dan pendidik. Ia dilahirkan pada 21 Mei 1903. Ia pernah belajar di Leiden, Belanda. Ia pernah menjabat Menteri Pendidikan, Pengajaran dan

¹² Hanun Asrohah. *Sejarah Pendidikan Islam*. Logos, Jakarta, cet. I, 1999, hlm. 178.

¹³ MIF. Baihaqi. *Ensiklopedi Tokoh Pendidikan dari Abendanon hingga K.H. Imam Zarkasyi*. Nuansa, Bandung, cet. I, 2007, hlm. 129.

¹⁴ MIF. Baihaqi. *Ensiklopedi Tokoh Pendidikan dari Abendanon hingga K.H. Imam Zarkasyi*. Nuansa, Bandung, cet. I, 2007, hlm. 44.

Kebudayaan dari tanggal 3 Juli s.d. 11 November 1947, kemudian dari tanggal 11 November s.d. 4 Juni 1949. Pada tahun 1947 ia berkantor di Yogyakarta, sedang kantor kementerian ada di Surakarta. Sesudah Juni 1949, Kementerian PP dan K pindah ke Yogyakarta. Pada waktu itu, Ali sastroamodjojo memperhatikan para pelajar yang berjuang di garis depan dan membentuk suatu tim pengajar untuk memelihara hubungan dengan para pelajar tersebut.

Dalam bulan Juli 1947, meskipun Ali dan Presiden Soekarno menyingkir ke daerah Madiun karena serbuan Belanda yang mengarah ke ibukota RI, Ali tidak pernah lupa terhadap dunia pendidikan yang berada di bawah wewenangnya. Ia menginstruksikan lewat pemancar radio yang sengaja dipasang kepada para pendidik, baik yang ada di pesantren, di madrasah maupun di sekolah-sekolah umum. Inti instruksinya adalah: "Bagaimana pun keadaannya, pendidikan dan pengajaran harus berjalan terus."

4. K.H. A. Wahid Hasyim¹⁵

Abdul Wahid Hasyim adalah tokoh pendidikan Islam sejati, karena semasa hidupnya tidak pernah lelah memperjuangkan pendidikan Islam. Ia lahir di Jombang pada tahun 1914. Wafat pada tanggal 19 April 1953 di Bandung dalam kecelakaan mobil di Cimahi, Bandung, di makamkan di Tebu Ireng Jombang. Ia dibesarkan di lingkungan pesantren. Ayahnya, K.H. Hasyim Asy'ari, mempunyai sebuah pesantren di Tebu Ireng, Jombang. Di pesantren itu Wahid belajar agama, kemudian di pesantren-pesantren lain. Sesudah itu, ia mengajar di pesantren Tebu Ireng membantu ayahnya. Membaca huruf Latin dan menulis dipelajarinya sendiri. Karena itu, ia dapat membaca buku-buku ilmu pengetahuan, sehingga pengetahuannya bertambah luas.

Di Pesantren Tebu Ireng tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan agama, tetapi juga para santri diharuskan belajar huruf Latin dan membaca buku-buku umum lainnya. Kebijakan Wahid itu

menimbulkan reaksi dari masyarakat. Tidak hanya dari para orangtua santri yang mengancam akan menarik anak-anak mereka keluar dari pesantren, pemerintah Belanda pun tidak setuju dengan cara-cara yang dilakukan oleh Wahid. Karena menurut mereka, pesantren hanya diizinkan memberikan pelajaran agama. Tetapi, Wahid Hasyim tidak mundur walaupun mendapatkan makian.

Karena kepedulian dan perhatiannya yang besar dengan dunia pendidikan, terutama pendidikan Islam, pada tahun 1925 Wahid Hasyim yang adalah orangtua Gusti Abdurrahman Wahid, mantan Presiden ketiga RI di era Reformasi ini, mendirikan madrasah modern yang diberi nama "Nidhomiah." Di situ anak didik diajari cara berpidato dan berorganisasi. Mereka diharuskan membaca buku, surat kabar, dan majalah yang memuat pengetahuan umum. Untuk melatih mereka berorganisasi, didirikannya IPPI (Ikatan Pelajar-Peajaran Islam).

Pada masa awal pemerintahan RI, Wahid Hasyim diangkat sebagai Mentresri Negara dalam Kabinet Presidensial. Sesudah berhenti, ia banyak mencurahkan perhatian untuk membangun kembali NU. Sesudah pengakuan kedaulatan, tiga kali ia diangkat menjadi Menteri Agama, yakni dalam Kabinet RIS (1949-1950), Kabinet Natsir (1950-1951), dan Kabinet Sukiman (1951-1952).

Semenjak Wahid Hasyim menjabat sebagai Menteri Agama pendirian madrasah di pesantren-pesantren semakin menemukan momentumnya. Ia melakukan pembaruan pendidikan agama Islam melalui peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1950, yang menginstruksikan pemberian pelajaran umum di madrasah dan memberi pelajaran agama di sekolah umum negeri dan swasta. Persaingan dengan madrasah modern dan sekolah-sekolah umum, mendorong pesantren-pesantren mengadopsi madrasah ke dalam pesantren.¹⁶

¹⁵ ¹⁶ Hanun Asroah. *Sejarah Pendidikan Islam*. Logos, Jakarta, cet. I, 1999, hlm. 189.

¹⁵ Marlon Peranginangin, dkk. *Buku Pintar Pahlawan Nasional*. Scientific Press, Batam Centre, 2007, hlm. 155.

5. K.H. Imam Zarkasyi¹⁷

K.H. Imam Zarkasyi adalah perintis dan pimpinan Pesantren Modern Gontor. Ia lahir pada 21 Maret 1910 di Gontor, Mlarak, 12 km. tenggara Ponorogo. Ia anak terakhir dari tujuh bersaudara dan memiliki hubungan langsung dengan Sultan Kesepuhan Cirebon. Bapaknya, Raden Santoso Anom Baseri, adalah keturunan keenam Kesepuhan Cirebon. Sementara ibunya, Rr. Sudarmi, adalah keturunan Surodiningrat, Bupati Madiun.

Pasangan R. Santoso dan Rr. Sudarmi dikaruniai 7 anak dan tiga di antaranya dikenal sebagai TRIMURTI yang merintis Pesantren Gontor, yaitu Kj. R.H. Ahmad Sahal, Kj. R.H. Zainuddin Fannanie, dan Kj. R.H. Zarkasyi. Dari silsilahnya dapat dikatakan bahwa Imam Zarkasyi berasal dari keturunan ningrat atau priyayi.

Imam Zarkasyi menempuh pendidikan *Hollandsch Inlandsche School* (HIS) Ongko Loro (setingkat SD) di Jetis Ponorogo (1923-1927) sambil santri di Pondok Josari dan Pondok Darul Hikam, Jaresan, Ponorogo. Zarkasyi pernah nyantri di Pondok Jamsaren, Solo. Ketika di Solo juga ia belajar di Madrasah Manba'ul Ulum yang terdiri dari sebelas jenjang kelas I hingga XI, bersistem klasikal. Ia pernah studi di Normal Islam Padang, sebuah sekolah yang dipimpin oleh Mahmud Yunus ketika itu. Di sini ia belajar metode dan filsafat pendidikan.

Tahun 1947 Imam Zarkasyi aktif di P.P. Hizbullah dan pada tahun itu juga duduk di bagian Pendidikan dan Kementerian Agama di Yogyakarta. Tetapi, ia tidak betah karena Kementerian Agama terlalu mementingkan pengetahuan umum daripada pengetahuan agama.

Tahun 1956 ia duduk di Dewan Perancang Nasional (Deppenas) sebagai wakil umat Islam yang menangani Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun 1974 turut membidani lahirnya Surat Keterangan Bersama tentang "Pendidikan umum di madrasah sesuai dengan standar pengetahuan umum di sekolah umum setingkat."

¹⁷ MIF. Baihaqi. *Ensiklopedi Tokoh Pendidikan dari Abendanon hingga K.H. Imam Zarkasyi*. Nuansa, Bandung, cet. I, 2007, hlm. 147.

Imam Zarkasyi sangat konsisten memperjuangkan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang merupakan kombinasi dari sistem pendidikan Barat dan pendidikan Timur Tengah. Beliau bersama dua saudaranya, menghidupkan kembali pondok pesantren ayahnya –Kiai R. Santoso Anombesazri – yang sudah lama vakum.

Dalam perjalanannya, Gontor kemudian dikenal oleh masyarakat sebagai pondok pesantren modern dan kini berkibar terus sampai memiliki delapan cabang di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Dra. Zuhairini, dkk.. *Sejarah Pendidikan Islam*. 1997. cet. 4. Jakarta: Bumi Aksara.

<http://immtarbiyahpwt.blogspot.com/2011/09/sejarah-pendidikan-islam-masa-orde-lama.html>

<http://makalah-ibnu.blogspot.com/2009/12/sistem-pendidikan-islam-pada-masa-orde.html>

Mustafa dan Abdullah. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. 1997. Bandung :CV. Pustaka Setia.

Nizar, H. Samsul. *Sejarah Pendidikan Islam* . 2007. Jakarta: Kencana.

Nizar , Prof. Dr. H. Samsul, M. Ag, *Sejarah Pendidikan Islam*. 2008 . Jakarta: Kencana.

BAB VIII
PENDIDIKAN ISLAM MASA ORDE BARU
(1966-1998)

Oleh: Tarwilah

A. Pendahuluan

Sejarah pendidikan Islam di Indonesia dapat dikatakan sama tuanya dengan pertumbuhan dan perkembangan umat Islam di Indonesia itu sendiri. Pendidikan Islam muncul dan berkembang di Nusantara sejak Islam masuk ke kepulauan ini dibawa oleh para sufi pengembara atau pedagang dari Timur Tengah¹ yang kemudian hidup membaur dengan penduduk lokal. Ketika membaur itulah berlangsung transmisi Islam yang diterima penduduk lokal melalui proses penyesuaian dengan tata cara hidup dan tradisi yang mereka jalankan sebelumnya.

Meskipun perkembangan Islam di Nusantara ditandai lahirnya kerajaan-kerajaan Islam, mulai dari Samudra Pasai di Aceh, Demak, Kediri dan Mataram di Jawa, berbagai kerajaan Islam di luar Jawa seperti Kalimantan sampai ke Ternate, penguatan Islam yang menjadi pandangan hidup dan bagian dari jati diri masyarakat Indonesia berlangsung melalui pendidikan Islam. Pendidikan Islam kemudian menjadi upaya terstruktur yang dijalankan umat dalam rangka mewujudkan misi keislaman melalui transmisi ilmu pengetahuan keislaman di lembaga-lembaga pendidikan.

Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia diawali dari bentuk yang paling sederhana. Melalui kegiatan mengaji Alquran dan

¹ Ada beberapa teori tentang kedatangan Islam ke Nusantara yang dikembangkan oleh sejarawan. Di antaranya pendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh para pedagang Gujarat dan Malabar. Adapula pendapat bahwa Islam dibawa langsung dari Arab dan kaum sufilah yang berperan menjalankan dakwah Islam di Nusantara yang kemudian menarik minat penguasa lokal. Karena itu, mendapatkan respons dari masyarakat luas dengan menerima ajaran ini. Lihat Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad ke-17 dan 18*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 25

tata cara beribadah di surau-surau dan langgar², yang kemudian sepanjang sejarah mengalami berbagai perubahan. Mulai dari perubahan kelembagaan, kurikulum dan materi, metode, guru dan anak didik. Perubahan tersebut tidak lain merupakan hasil interaksi antara faktor eksternal dan respons internal dari *stakeholders* pendidikan Islam. Salah satu faktor eksternal yang turut mendorong terjadinya perubahan keberlangsungan pendidikan Islam di Indonesia adalah kebijakan negara yang menjadi landasan pengaturan sistem pendidikan nasional, termasuk di dalamnya pendidikan Islam sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional.

Pada masa Orde Baru, pendidikan Islam di Indonesia mengalami pasang surut. Sejak masa akhir kekuasaan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto arah kebijakan politik semakin memberikan posisi dan peluang bagi kekuatan politik yang berpandangan memberikan tempat bagi agama dan pendidikan Islam. Hal ini turut memberi pengaruh signifikan terhadap corak kebijakan yang terkait dengan pendidikan Islam.

B. Pendidikan Islam Masa Orde Baru

1. Pengertian Orde Baru

Orde baru adalah masa pemerintah di Indonesia sejak 11 Maret 1966 (terjadinya Supersemar) hingga terjadinya peralihan kepresidenan dari Presiden Soeharto ke Presiden Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Masa Orde Baru disebut juga sebagai Orde Konstitusional atau Orde Pembangunan.

Peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru membawa konsekuensi perubahan strategi politik dan kebijakan pendidikan nasional. Pada dasarnya Orde Baru adalah suatu koreksi total terhadap Orde Lama yang didominasi oleh PKI yang dianggap telah menyelewengkan Pancasila.

Perubahan yang terlihat pada masa Orde Baru adalah:

² Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1957), h.34

- a) Sikap mental yang positif untuk menghentikan dan mengoreksi segala bentuk penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945
- b) Memperjuangkan adanya masyarakat yang adil dan makmur, baik material dan spiritual melalui pembangunan nasional.
- c) Sikap mental mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Perubahan Orde Lama ke Orde Baru berlangsung melalui kerja sama yang erat antara pasukan Angkatan Darat (RPKAD) dan gerakan-gerakan pemuda yang disebut angkatan 66. Para pemuda itu tergabung dalam KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) dan KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia). Dalam KAMI yang memegang peranan penting khususnya adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang amat kuat serta mempunyai hubungan dengan organisasi Islam lainnya. Pada tahun 1966, mahasiswa memulai melakukan aksi demonstrasi dengan menuntut: (1) turunkan harga, (2) bubarkan PKI, dan (3) anti penyelewengan.³

Orde Baru memberikan corak baru bagi kebijakan pendidikan agama Islam, karena beralihnya pengaruh komunisme ke arah pemurnian Pancasila melalui rencana pembangunan nasional berkelanjutan yang dikenal dengan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun).

2. Pendidikan Islam Masa Orde Baru

a. Memperkuat Status Pendidikan Agama sebagai Mata Pelajaran wajib

Setelah meletusnya G.30 S.PKI pada tahun 1965, pada tahun 1966 diadakan Sidang Umum MPRS yang menetapkan status pendidikan agama di sekolah-sekolah berubah dan bertambah kuat.

³ Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), h.76

Ketetapan MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 Bab I pasal 1 berbunyi: "Menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Universitas-universitas Negeri". Dalam penjelasan ketetapan MPRS tersebut disebutkan bahwa "semua agama yang diakui pemerintah diberi kesempatan yang sama, dan untuk toleransi dan atas dasar hak-hak asasi manusia setiap siswa bebas memilih pelajaran agama menurut keyakinannya".⁴

Dengan adanya ketetapan ini maka tambahan kata-kata "... dengan pengertian bahwa murid-murid berhak tidak ikut serta apabila wali murid/ murid dewasa menyatakan keberatan", yang merupakan hasil perjuangan PKI, dihapuskan bersamaan dengan dilarangnya Partai Komunis di Indonesia.

Kemudian dalam pasal 4 Tap MPRS No. XXVII/MPRS/1966 memuat tentang kebijakan dan isi pendidikan. Untuk mencapai dasar dan tujuan pendidikan, maka isi pendidikan adalah:

- 1) Mempertinggi mental, moral, budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama,
- 2) Mempertinggi kecerdasan dan keterampilan,
- 3) Membina dan mengembangkan fisik yang kuat dan sehat.⁵

Sejak ditetapkannya Tap MPRS XXVII/MPRS/1966 pendidikan agama dijadikan sebagai mata pelajaran pokok di sekolah-sekolah mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi, dengan pengertian bahwa mata pelajaran Pendidikan Agama ikut menentukan naik/ tidaknya seorang murid.

Dalam Tap MPR No.IV/MPR/1973 jo. Tap MPR No.IV/MPR/1978 dan Tap MPR No.II/MPR/1983 tentang *Garis-garis Besar Haluan Negara*, mengindikasikan bahwa pendidikan agama semakin dikokohkan kedudukannya dengan dimasukkannya dalam

⁴ Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pascakemerdekaan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h.187

⁵ Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam ...* h.189

GBHN sebagai berikut: "Diusahakan supaya terus bertambah sarana-sarana yang diperlukan bagi pengembangan kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa termasuk pendidikan agama yang dimasukkan dalam kurikulum di sekolah-sekolah mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan universitas-universitas negeri".⁶

b. Pengertian Madrasah Swasta

Pada tahun 1967 terbuka kesempatan untuk mendirikan madrasah swasta untuk semua tingkatan. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Islam Negeri (MTsN) dan Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN). Namun ketentuan itu hanya berlangsung selama 3 tahun, dengan alasan pembiayaan dan fasilitas yang sangat terbatas. Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 213 tahun 1970, tidak ada lagi penegerian bagi madrasah swasta. Namun kebijakan tersebut tidak berlangsung lama. Memasuki tahun 2000 kebijakan penegerian itu dimunculkan kembali.

c. Kesejajaran Madrasah dengan Sekolah Umum

Bersamaan dengan berkembangnya pendidikan agama di sekolah umum, perhatian pemerintah terhadap madrasah atau pendidikan Islam terjadi sejak Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) mengeluarkan maklumatnya tertanggal 22 Desember 1945. Isinya menganjurkan bahwa dalam memajukan pendidikan dan pengajaran, agar pengajaran di langgar, surau, mesjid, dan madrasah berjalan terus dan ditingkatkan.⁷

Pada tanggal 27 Desember 1945, sebagai tindak lanjut dari maklumat tersebut, BPKNIP menyarankan agar madrasah dan pondok pesantren mendapatkan perhatian dan bantuan material dari pemerintah, karena madrasah dan pondok pesantren pada hakekatnya adalah salah satu alat dan sumber pendidikan dalam mencerdaskan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya.

⁶ Departemen Agama RI, *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional Paradigma Baru*, (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2005), h.39

⁷ Departemen Agama RI, *Pendidikan Islam...*, h.62

Namun perhatian pemerintah yang begitu besar di awal kemerdekaan ini nampaknya tidak berlanjut. Hal ini tampak ketika Undang-Undang Pendidikan Nasional pertama (UU No. 4 tahun 1950 jo. UU No.12 tahun 1954) diundangkan, masalah madrasah dan pesantren tidak dimasukkan sama sekali, yang ada hanya masalah pendidikan agama di sekolah umum. Dampaknya, madrasah dan pesantren dianggap berada diluar sistem. Oleh karena itu, mulai muncul sikap diskriminatif pemerintah terhadap madrasah dan pesantren. Pada tahap ini madrasah belum dipandang sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, tetapi merupakan lembaga pendidikan di bawah Menteri Agama.

Reaksi terhadap sikap pemerintah yang diskriminatif ini menjadi lebih keras dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No.34 tahun 1972 yang kemudian diperkuat dengan Intruksi Presiden No.15 tahun 1974. Kepres dan Inpres ini isinya dianggap melemahkan dan mengasingkan madrasah dari pendidikan nasional. Bahkan sebagian umat Islam memandang Kepres dan Inpres itu sebagai manuver untuk mengabaikan peran dan manfaat madrasah yang sejak zaman penjajahan telah diselenggarakan oleh umat Islam.⁸

Pada periode H.A. Mukti Ali (mantan Menteri Agama RI.), ia menawarkan konsep alternatif mengembangkan madrasah melalui kebijakan SKB Tiga Menteri, yang berusaha mensejajarkan kualitas madrasah dengan non madrasah, dengan porsi kurikulum 70% umum dan 30% agama. Dilihat dari isu sentralnya, H.A. Mukti Ali ingin mendobrak persepsi masyarakat yang bernada sumbang terhadap eksistensi madrasah, di mana selalu didudukkan dalam posisi marginal, karena hanya berkutat pada kajian masalah keagamaan Islam dan miskin pengetahuan umum, sehingga output-nya pun kurang diperhitungkan oleh masyarakat. Persepsi tersebut tidak terlepas dari pengaruh kolonialisme yang menganaktirikan dan bersikap diskriminatif terhadap pendidikan Islam (madrasah).

⁸ Departemen Agama RI, *Pendidikan Islam ...*h.63

Pada tanggal 24 Maret 1975 dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB Tiga Menteri), yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah. SKB Tiga Menteri ini merupakan model solusi yang di satu sisi memberikan pengakuan eksistensi madrasah dan di sisi lain memberikan kepastian akan berlanjutnya usaha yang mengarah pada pembentukan sistem pendidikan nasional yang integratif. Dengan munculnya SKB Tiga Menteri, rupanya masyarakat mulai memahami eksistensi madrasah tersebut dalam konteks pendidikan nasional.

Sejumlah diktum yang memperkuat posisi madrasah lebih ditegaskan lagi dengan merinci bagian-bagian yang menunjukkan kesetaraan madrasah dengan sekolah. Dalam Bab I pasal 1 ayat (2) dinyatakan: madrasah itu meliputi tiga tingkatan: (1)Madrasah Ibtidaiyah, setingkat dengan Sekolah Dasar, (2)Madrasah Tsanawiyah setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama, (3)Madrasah Aliyah setingkat dengan Sekolah Menengah Atas.

Selanjutnya di dalam bab II pasal 2 dinyatakan, bahwa: (1) Ijazah Madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat; (2) Lulusan Madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas; dan (3) Siswa Madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.⁹

Dengan SKB Tiga Menteri, Departemen agama melakukan usaha pemantapan struktur madrasah secara lebih menyeluruh. Sejumlah Keputusan dikeluarkan untuk mengatur organisasi dan tata kerja madrasah pada semua tingkatan. Departemen Agama juga mengeluarkan peraturan tentang persamaan ijazah madrasah swasta dengan madrasah negeri.¹⁰ Dalam hal kurikulum dilakukan penyusunan ulang dengan menyempurnakan komposisi mata pelajaran-mata pelajaran umum. Sejalan dengan SKB Tiga Menteri itu,

⁹ Maksud, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h.150-151

¹⁰ Ditjen Bimas Islam Departemen Agama, *Buku Pedoman Guru Madrasah*, (Jakarta 1978/1979), h.1

kurikulum madrasah memuat mata pelajaran umum dalam jumlah yang sama dengan kurikulum sekolah pada tiap-tiap jenjangnya. Dengan demikian, madrasah dapat dikatakan sebagai sekolah plus pendidikan agama.

Penyempurnaan kurikulum madrasah merupakan langkah yang dianggap paling esensial dalam merealisasikan SKB Tiga Menteri. Persamaan status madrasah dengan sekolah tidak hanya tampak dalam struktur kelembagaan, tetapi juga dalam struktur mata pelajaran yang mengakomodasikan secara penuh kurikulum sekolah.

Pengakuan terhadap status madrasah, yang diikuti dengan penyesuaian-penyesuaian dengan sistem sekolah telah membuahkan tanggapan yang menggembirakan. Di antaranya, diperoleh Inpres untuk 1.000 madrasah pada tahun 1978 dan beberapa tahun kemudian datang permintaan dari rektor IPB, Prof. Dr. Andi Hakim Nasution untuk mengirimkan beberapa lulusan terbaik Madrasah Aliyah sebagai mahasiswa PMDK di IPB.¹¹

Pada tahap awal setelah SKB, Departemen Agama menyusun kurikulum 1976, yang diberlakukan secara intensif mulai tahun 1978. Kemudian, kurikulum 1976 ini disempurnakan lagi melalui kurikulum 1984 sebagaimana dinyatakan dalam SK Menteri Agama No.45 tahun 1987. Penyempurnaan ini sejalan dengan perubahan kurikulum sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pada tingkat Ibtidaiyah, komposisi kurikulum 1984 terdiri dari 15 bidang studi. Bidang studi agama hanya mencakup sekitar 30% dengan lima mata pelajaran. Dua di antaranya baru diberikan mulai kelas tiga, yakni Sejarah Islam dan Bahasa Arab. Selebihnya, sekitar 70% dengan 10 bidang studi, merupakan bidang studi umum yang diberikan sejak kelas satu hingga kelas enam.

Pada tingkat Tsanawiyah, komposisi kurikulum dibagi ke dalam tiga jenis pendidikan: (1) Pendidikan Dasar Umum, (2) Pendidikan Dasar Akademik, dan (3) Pendidikan Dasar Keterampilan. Dari 16 mata pelajaran yang dimuat dalam kurikulum itu, hanya

¹¹ Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya...* h.153

terdapat lima mata pelajaran agama, yaitu: Qur'an Hadis, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah dan Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab. Tiga mata pelajaran yang pertama merupakan bagian dari tujuh mata pelajaran dalam jenis Pendidikan Dasar Umum. Sedang dua sisanya merupakan bagian dari delapan mata pelajaran dalam jenis Pendidikan Dasar Akademik.

Pada tingkat Aliyah, struktur kurikulum berbeda antara satu jurusan dengan jurusan yang lainnya. Sesuai dengan kurikulum nasional 1984, pendidikan pada tingkat Aliyah atau Menengah Atas, Umum terdiri dari lima pilihan jurusan: A1 (Ilmu-ilmu Agama), A2 (Ilmu-ilmu Fisika), A3 (Ilmu-ilmu Biologi), A4 (Ilmu-ilmu Sosial), dan A5 (Pengetahuan Budaya).¹²

Komponen kurikulum 1984 di tingkat Aliyah pada umumnya terbagi ke dalam dua program pilihan, yaitu Program Inti dan Program Pilihan. Termasuk ke dalam Program Inti adalah Pendidikan Agama yang mencakup lima mata pelajaran dan Pendidikan Dasar Umum yang terdiri dari 19 mata pelajaran. Program inti merupakan program pendidikan yang wajib diikuti oleh semua siswa dengan mengacu pada kepentingan pencapaian tujuan pendidikan nasional, kepentingan agama, tujuan masyarakat, serta penguasaan pengetahuan bagi semua siswa. Sedangkan dalam Program Pilihan hanya memuat pendidikan pengembangan yang kandungan atau mata pelajaran-mata pelajarannya berbeda antara satu jurusan dengan jurusan lainnya.¹³

SKB Tiga Menteri ini mempunyai manfaat bagi umat Islam, di antaranya adalah, *pertama*, terjadinya mobilitas sosial dan vertikal siswa-siswa madrasah yang selama ini terbatas di lembaga-lembaga pendidikan tradisional (madrasah dan pesantren). *Kedua*, membuka peluang kemungkinan anak-anak santri memasuki wilayah pekerjaan pada sektor modern. Meski demikian, bukan berarti SKB Tiga Menteri ini tanpa masalah. Melalui SKB Tiga Menteri ini memang, status

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kurikulum Sekolah Umum Tingkat Atas (SMA), Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kurikulum*, (Jakarta: 1990), h.4

¹³ Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.103

madrasah disamakan dengan sekolah berikut jenjangnya. Dengan SKB ini pula alumni MA dapat melanjutkan ke universitas umum dan sebaliknya alumni SMA dapat melanjutkan studinya ke IAIN. Karena madrasah diakui sejajar dengan sekolah umum, di mana komposisi kurikulum madrasah 70% mata pelajaran umum dan 30% mata pelajaran agama. Efek penyamaan kurikulum ini adalah bertambahnya beban yang harus dipikul oleh madrasah. Di satu pihak ia harus memperbaiki mutu pendidikan umumnya setaraf dengan standar yang berlaku di sekolah, di sisi lain, bagaimanapun juga madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam harus menjaga agar mutu pendidikan agamanya tetap baik.

Kalangan masyarakat yang berbasis budaya santri (muslim yang taat) banyak memanfaatkan kesempatan pendidikan yang tersedia mulai dari tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Termasuk ke dalam bagian mereka adalah kalangan keluarga pimpinan dan aktivis politik Islam, khususnya dari kelompok modernis.

Sebagaimana terlihat pada tabel berikut, diperkirakan satu juta penduduk Indonesia telah mengenyam pendidikan tinggi, dan bagian terbesar dari mereka dipastikan umat Islam.

**Perkembangan Tingkat Pendidikan Penduduk Indonesia
1971-1995¹⁴**

Pendidikan	1971	1980	1985	1990	1995
SD	75.061.921	93.042.443	100.627.003	105.425.036	131.598.137
SMP	3.528.603	6.236.461	10.674.461	14.481.097	19.401.422
SMA	1.645.164	4.537.175	8.140.790	13.087.443	19.589.050
PT	271.388	508.173	938.574	2.046.005	3.723.668
Total	80.507.076	104.324.252	120.380.485	135.039.581	174.303.277

Pembentukan lapisan intelektual santri didukung oleh organisasi-organisasi kemahasiswaan Islam, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Meskipun bergerak di luar kampus perguruan tinggi, organisasi seperti ini memberikan kontribusi yang

¹⁴ Biro Pusat Statistik, sebagaimana dikutip Logsdon dan Nakamura, dalam *Maksum, Madrasah Sejarah dan ...* h,136

cukup kuat pada dekade 1970-1980-an dalam membentuk kepribadian muslim di kalangan mahasiswa.

Kebijakan Orde Baru dalam bidang pendidikan juga memberikan dampak cukup berarti pada perkembangan pendidikan agama di Indonesia. Hal ini dengan sendirinya turut mendorong lahirnya intelektual dari kalangan santri. Dalam konteks ini, kaum muslimin yang masih berkonsentrasi pada keilmuan Islam dapat memanfaatkan madrasah-madrasah dan perguruan-perturuan tinggi yang diselenggarakan lebih modern. Melalui lembaga-lembaga ini, kaum muslimin dibekali tidak saja wawasan keagamaan tetapi juga sejumlah keterampilan administrasi dan manajemen sehingga membuka peluang bagi mereka untuk terlibat dalam pengelolaan negara, khususnya dalam lingkup Departemen Agama. Perkembangan pada tahun 1980 menunjukkan bahwa sedikitnya terdapat 28.000 sarjana muslim lulusan IAIN dan diperkirakan sebagian besar dari mereka telah bekerja sebagai pegawai-pegawai pemerintah, baik sebagai tenaga-tenaga administrasi maupun sebagai tenaga-tenaga pendidik.¹⁵

Perkembangan intelektual santri pada gilirannya turut mengubah formasi sosio-kultural kaum muslimin Indonesia, yang tidak lagi terpecah secara diametral antara kelompok modernis dan tradisional. Selama bertahun-tahun, wacana keislaman di Indonesia diwarnai oleh dikotomi itu, yang secara konkrit biasanya menghadapkan Muhammadiyah mewakili kelompok modernis, dan Nahdlatul Ulama mewakili kelompok tradisional. Melalui media pendidikan, interaksi intensif antar kedua kelompok itu berlangsung sehingga terjadi hubungan yang integratif dan kohesif. Sampai masa-masa akhir dekade 1960-an, pendidikan kalangan modernis tertumpu pada sekolah-sekolah sementara kalangan tradisional berpusat pada

¹⁵Data terakhir yang diambil dari Departemen Agama menyebutkan bahwa jumlah mahasiswa Perguruan Tinggi Agama tahun 1995/1996 adalah 216 ribu atau 9,8% dari seluruh mahasiswa Indonesia yang berjumlah 2,2 juta. Dari jumlah itu 43% tersebar di 14 IAIN. Lihat Dedi Supriadi, *Isu dan Agenda Pendidikan Tinggi di Indonesia*, (Bandung: Rosdakarya, 1997), h.36-37

madrasah dan pesantren.¹⁶ Hal ini tidak lagi terjadi pada masa-masa berikutnya karena mobilisasi kaum muslimin di bidang pendidikan terarah pada sistem pendidikan yang tidak lagi dikotomis.

d. Membentuk Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK)

Kelahiran Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) yang didasari dengan keputusan Menteri Agama no. 73 tahun 1987, oleh kebutuhan akan tenaga ahli di bidang agama Islam sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional, sehingga dengan itu perlu dilakukan usaha peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Aliyah.

Madrasah yang melaksanakan kurikulum SKB Tiga Menteri tahun 1975 kemudian diteruskan dengan SKB Tiga Menteri tahun 1984, secara formal sebenarnya sudah menjadi sekolah umum yang menjadikan pendidikan agama sebagai ciri kelembagaannya. Ada semacam dilema bagi madrasah sejak itu, di mana disatu pihak materi pengetahuan umum bagi madrasah secara kuantitas mengalami peningkatan, tapi di lain pihak penguasaan siswa terhadap ilmu pengetahuan agama seperti bahasa Arab, menjadi serba tanggung, karenanya kalau mengharapkan lahirnya figur-figur kiai atau ulama dari madrasah tersebut, tentu saja adalah hal yang terlalu riskan. Sementara itu pesantren sendiri tanpanya hanya bergelut dengan ilmu-ilmu agama, sedikit sekali memberikan dalam usaha pengembangan wawasan.

Menyadari hal itu, pemerintah dalam hal ini Menteri Agama yang ketika itu dijabat oleh Munawir Sadzali, berusaha mengadakan terobosan-terobosan dan usaha tersebut terealisasi dengan mendirikan Madrasah Aliyah yang bersifat khusus, yang kemudian dikenal dengan nama Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK). Pada MAPK ini dititikberatkan pada pengembangan dan pendalaman ilmu-ilmu

¹⁶ M. Dawam Rahardjo, *Intelektual, Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa* (Bandung: Mizan, 1993), h.23-41

keagamaan dengan tidak mengenyampingkan ilmu umum sebagai usaha pengembangan wawasan.

MAPK dimaksudkan sebagai respons terhadap kondisi Madrasah Aliyah pada saat itu dipandang merosot dari segi kualitas pengetahuan keagamaannya. Pada waktu itu, porsi 70% untuk pengetahuan umum dan 30% untuk pengetahuan agama dianggap menghasilkan lulusan yang "serba tanggung". Pengetahuan agama kurang, pengetahuan umum pun lemah. MAPK mempunyai komposisi kurikulum 70% pengetahuan agama dan 30% pengetahuan umum. Munawir berharap lulusan MAPK akan menjadi bibit-bibit unggul bagi IAIN. Dengan demikian, MAPK tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas lulusan madrasah, tetapi juga kualitas lulusan IAIN. ✓

Untuk itu, maka dilakukan studi kelayakan untuk menentukan madrasah mana yang dianggap paling memungkinkan untuk ditunjuk sebagai pelaksana program ini. Dari hasil studi kelayakan tersebut, ditetapkan untuk tahap pertama 5 Madrasah Aliyah Negeri sebagai penyelenggara, yaitu: MAN Darussalam Ciamis Jawa Barat, MAN Ujung Pandang, MAN I Yogyakarta, MAN Kotabaru Padang Panjang Sumatera Barat dan MAN Jember Jawa Timur. Selanjutnya MAPK ditambah di lima kota lagi, yaitu di Banda Aceh, Lampung, Solo, Banjarmasin dan Mataram. Dalam rangka peraturan penyelenggaraannya mengacu kepada keputusan Dirjen Bimbaga dalam Nomor 47/E1987 tanggal 23 Juli 1987.¹⁷

Dalam perkembangannya, jumlah MAPK sudah membengkak menjadi 110 buah. Salah satu keberhasilan proyek ini adalah berhasilnya 48 orang alumni MAPK pada tahun 1991 mengikuti proses belajar mengajar di Universitas al-Azhar. Alumni MAPK yang melanjutkan ke IAIN juga menunjukkan kemampuan penguasaan ilmu agama dan bahasa Arab di atas rata-rata. Tak kalah pentingnya, program khusus ini juga diminati oleh masyarakat banyak. Melihat

¹⁷ M. Wahyuni Nafis (Ed.), *Kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 Tahun Prof. Dr. Munawir Sjadzali, MA*, (Jakarta: Paramadina, 1995) h.83

keberhasilan proyek MAPK ini, Presiden Soeharto memberikan saran agar proyek serupa juga diterapkan untuk Madrasah Tsanawiyah.¹⁸

Ketika MAPK pertama kali dioperasikan, MA terdiri dari jurusan A-1 (agama), A-2 (sosial), A-3 (IPA), dan A-4 (bahasa). Meskipun diantara jurusan-jurusan itu terdapat jurusan agama, porsi antara mata pelajaran agama dan umum dianggap tidak memadai. Selanjutnya, ketika UU Nomor 2 tahun 1989 disahkan dan Kurikulum 1994 diberlakukan, maka jurusan-jurusan tersebut dihapus. Yang tersisa hanya jurusan IPA, IPS, dan bahasa sementara jurusan agama ditiadakan. Melihat kondisi demikian, MAPK dinaikkan statusnya tidak lagi hanya program khusus yang penyelenggaraannya terbatas di beberapa tempat, melainkan menjadi MAK (Madrasah Aliyah Keagamaan).

Karena dirancang sebagai program khusus, MAPK tidak bisa berlangsung terus. apalagi dengan ditetapkannya UU RI Nomor 2 tahun 1989, walaupun dilanjutkan harus mengalami sejumlah penyesuaian. Dalam konteks penyesuaian itulah kemudian diambil kebijakan untuk mengubah MAPK menjadi MAK.

Adapun perbedaan MAPK dan MAK, di antaranya adalah:

- 1) Dari segi struktur pengajaran, MAPK menggunakan kurikulum 1987 yang ditetapkan berdasarkan SK Menag No. 73 Tahun 1987. Sedangkan MAK menggunakan kurikulum 1994 yang ditetapkan berdasarkan SK Menag No. 374 tahun 1993.
- 2) Dari segi penyelenggara program pengajaran, kurikulum MAPK dalam satu tahun dibagi menjadi 2 semester (menggunakan sistem semester), sementara kurikulum MAK dalam satu tahun dibagi menjadi 3 cawu.
- 3) Jumlah mata pelajaran di MAPK untuk kelas satu terdiri dari 13 mata pelajaran dengan jumlah jam pelajaran per minggu 44 jam. Kelas II terdiri dari 13 mata pelajaran dengan jumlah jam pelajaran per minggu 52 jam. Kelas III terdiri dari 15 mata pelajaran dengan jumlah jam pelajaran per minggu 52 jam.

¹⁸ Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam...*, h.98

Sedangkan MAK untuk kelas I dan kelas II terdiri dari 14 mata pelajaran dengan jumlah jam pelajaran per minggu 45 jam. Kelas III terdiri dari 9 mata pelajaran dengan jumlah jam pelajaran per minggu 45 jam.

- 4) Di dalam kurikulum MAPK terdapat mata pelajaran Tarikh Tasyri', ilmu kalam, Administrasi Urusan dan Peradilan Agama. Sedangkan dalam kurikulum MAK tidak terdapat mata pelajaran tersebut, tetapi terdapat mata pelajaran Sosiologi-Antropologi.
- 5) Persyaratan MAPK ditetapkan dengan keputusan Menteri Agama, sedangkan MAK cukup dengan SK Kepala Kanwil Depag setempat.¹⁹

Dari sejumlah perbedaan tersebut tampak bahwa MAPK "lebih berat" dibandingkan dengan MAK, terutama dari segi jumlah mata pelajaran. Selebihnya secara substansial antara keduanya tidak terdapat perbedaan yang mendasar. Dari segi tujuan penyelenggaraan dan sebagainya keduanya tidak mengalami perubahan. Namun, yang tak kalah pentingnya, MAK lebih permanen dibanding MAPK sehingga memungkinkan munculnya inisiatif dari bawah dalam penyelenggaraannya.

e. Mengintegrasikan Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional

Lahirnya Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diundangkan dan berlaku sejak tanggal 27 Maret 1989, memberikan perbedaan yang sangat mendasar bagi pendidikan agama. Pendidikan agama tidak lagi diberlakukan berbeda untuk negeri dan swasta. Sebagai konsekuensinya diberlakukan Peraturan Pemerintah sebagai bentuk operasional Undang-Undang tersebut, yaitu PP Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah, PP Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, PP Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan

¹⁹ Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam*, h.201

Menengah, PP Nomor 30 tahun 1990 tentang *Pendidikan Tinggi*.²⁰ Semua Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan pendidikan agama di lembaga pendidikan umum.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut telah memberi dampak positif bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam. Sejak diberlakukan UU RI Nomor 2 tahun 1989, lembaga-lembaga pendidikan Islam menjadi bagian integral (subsistem) dari sistem pendidikan nasional. Sehingga dengan demikian, kebijakan dasar pendidikan agama pada lembaga-lembaga pendidikan Islam adalah sebangun dengan kebijakan dasar pendidikan agama pada lembaga-lembaga pendidikan nasional secara keseluruhan.

UU RI Nomor 2 tahun 1989 ini juga memuat ketentuan tentang hak setiap siswa untuk memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Namun, SD, SLTP, SMU, SMK dan SLB yang berciri khas berdasarkan agama tertentu tidak diwajibkan menyelenggarakan pendidikan agama lain dari agama yang menjadi ciri khasnya. Inilah poin pendidikan yang kelak menimbulkan polemik dan kritik dari sejumlah kalangan, dimana para siswa dikhawatirkan akan pindah agama (berdasarkan agama Yayasan/Sekolah), karena mengalami pendidikan agama yang tidak sesuai dengan agama yang dianutnya. Kritik itu semakin kencang, dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1990, yang secara eksplisit menyatakan bahwa sekolah-sekolah menengah dengan warna agama tertentu tidak diharuskan memberikan pelajaran agama yang berbeda dengan agama yang dianutnya.

UU No. 2 tahun 1989 itu dan Peraturan Pemerintah tersebut dinilai oleh sebagian kalangan sebagai Undang-Undang yang tidak memberikan ruang dialog keagamaan di kalangan siswa, Undang-Undang ini juga memberikan peran tidak langsung kepada sekolah untuk mengkotak-kotakkan siswa berdasarkan agama.

²⁰ Haidar Putra Daulay, *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.46

f. Peningkatan Kualitas Dosen IAIN

Bersamaan dengan pelaksanaan proyek MAPK, Munawir Sadzali yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Agama, juga berusaha meningkatkan kualitas dosen IAIN. Hal ini dilakukan dengan menghidupkan kembali tradisi mengirim dosen IAIN untuk studi ke negara-negara Barat, khususnya ke Universitas McGill (Montreal, Kanada) dan Universitas Leiden (Belanda), yang dulu pernah dirintis Mukti Ali. Menurutnya, ilmuwan Muslim Indonesia yang mampu berkomunikasi dengan dunia modern adalah mereka yang di samping mendapat pendidikan S1 di Timur, juga mengenyam pendidikan S2 dan S3 di Barat. Munawir menunjuk nama-nama seperti Prof. Dr. HM. Rasjidi, Prof. Dr. Mukti Ali, dan Prof. Dr. Harun Nasution sebagai prototype ilmuwan muslim Indonesia.²¹

Program pengiriman dosen ke luar negeri relevan dengan usaha menjaring alumni IAIN yang berkualitas, sehingga pada tahun 1988 dibuka Program Pembibitan Calon Dosen IAIN. Selain pesertanya sangat terbatas, hanya diikuti oleh tak lebih dari 30 peserta, program ini juga hanya menerima mereka yang indeks prestasi kumulatifnya di atas tiga. Di samping itu, para peserta juga harus memiliki dasar-dasar penguasaan bahasa yang memadai, baik Inggris maupun Arab. Hal ini untuk memenuhi persyaratan yang diminta lembaga-lembaga pemberi beasiswa dan universitas-universitas Barat.

Pada periode 1988-1991, program pengiriman dosen ini mengalami sukses. Tak kurang dari 75% pesertanya diterima untuk program S2 dan S3 di universitas-universitas Barat, seperti McGill di Kanada, UCLA di Columbia, Chicago, dan Harvard di USA, London, Leiden, dan Hamburg di Eropa Barat, serta ANU, Monash, dan Flinders di Australia. Kesuksesan ini mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kelangsungan pengiriman mahasiswa tahap berikutnya. Menurut catatan Munawir, selama ia menjadi Menteri Agama, Departemen Agama telah mengirim sebanyak 225 mahasiswa ke Barat. Sampai tahun 1993, dari mereka itu telah kembali ke

²¹ M. Wahyuni Nafis (Ed.), *Kontekstualisasi ...* h.102

Indonesia sebanyak 12 orang dengan menyandang gelar Ph.D dan sebanyak 67 orang dengan gelar MA.²²

Pengiriman dosen IAIN ke universitas-universitas Barat dapat dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan konsep Munawir Sjadzali tentang hubungan antara Islam dan negara. Munawir menginginkan agar para dosen IAIN mampu berkomunikasi dengan para teknokrat dan birokrat yang rata-rata tamatan universitas-universitas Barat. Kelompok pertama merepresentasikan kalangan agama, sedangkan yang kedua mewakili unsur-unsur modernitas.

g. Lahirnya Sekolah Islam - Sekolah Islam Unggulan

Bentuk terkini pendidikan Islam yang mulai berkembang sejak awal 1990-an adalah model sekolah Islam unggulan. Sekolah Islam unggulan adalah salah satu bentuk lembaga pendidikan Islam hasil modifikasi antara model pendidikan Islam di lembaga pendidikan tradisional pesantren dan sistem pendidikan klasikal yang diadopsi dari model sekolah Barat. Dimulai dengan dikembangkannya pendidikan di lingkungan Al-Azhar oleh Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar pada sekitar tahun 1980-an, model pendidikan Al-Azhar ini kemudian banyak diadopsi oleh berbagai lembaga pendidikan Islam lainnya yang terdapat hampir pada semua daerah yang didukung oleh basis komunitas muslim. Sekolah Al-Azhar mengandalkan pendidikan Islam bagi pembentukan pribadi muslim didukung oleh *environment* keislaman dengan keberadaan mesjid Al-Azhar yang menjalankan berbagai program dan aktivitas keislaman yang menjadi pendukung utama pendidikan keislaman tersebut. Sekolah Islam Al-Azhar dapat dikatakan merupakan sekolah Islam unggulan pertama yang dijadikan model oleh sekolah-sekolah Islam lainnya yang berkunculan kemudian seperti Al-Izhar di Pondok Labu Jakarta Selatan.

Sekolah Al-Azhar yang berpusat di kompleks mesjid Al-Azhar, Jalan Sisingamangaradja Jakarta Selatan ini telah mewujudkan diri sebagai sebuah jaringan pendidikan Islam yang tersebar di berbagai

²² M. Wahyuni Nafis (Ed.), *Kontekstualisasi ...* h.103

daerah di Indonesia, terutama di Jawa. Jumlah sekolah Islam Al-Azhar dewasa ini mencapai 23 buah TK, 23 buah SD, 7 buah SLTP dan 5 buah SMA yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Barat.²³

Namun, model sekolah unggulan Islam mutakhir mulai menerapkan pola pendidikan diasramakan (*boarding school*) seperti dalam tradisi pesantren yang dilengkapi berbagai infrastruktur pendidikan dengan adanya mesjid, laboratorium dan lainnya.

Di satu sisi, pola pendidikan di sekolah Islam unggulan mengutamakan penguasaan sains dan keterampilan teknologi pada siswanya dengan menyediakan infrastruktur pendidikan yang mendukung tercapainya arah dan tujuan penguasaan kedua bidang tersebut. Di sisi lain, dengan mengadopsi pola pendidikan di asrama seperti yang diterapkan di pesantren dimaksudkan untuk menyediakan *environment* pendidikan keislaman bagi terbentuknya pribadi-pribadi muslim yang takwa dan taat menjalankan ajaran agamanya. Model pendidikan komprehensif seperti inilah yang diterapkan di Sekolah Insan Cendekia yang dirintis oleh B.J. Habibie²⁴ dan sekolah Madania di Parung, Bogor yang dikelola oleh Yayasan Madania.²⁵ Sekolah Islam unggulan seperti ini berkembang pesat dan belakangan banyak sekali didirikan, seperti Nurul Fikri yang semula hanya mengelola

²³ Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam...*, h.156

²⁴ Sekolah Menengah Umum/MAN Insan Cendekia didirikan pada tahun 1996 oleh B.J. Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi (BPPT) atas dukungan pembiayaan dari BPPT bekerja sama dengan *Islamic Development Bank* (IDB).

²⁵ Sekolah Menengah Umum (SMU) Madania Boarding School didirikan pada tahun 1996 di bawah Yayasan Madania yang diprakarsai oleh Dr. Nurcholish Madjid. Sebagai nilai tambah dan keunggulan SMU Madania diterapkan kurikulum plus yang mengandung tiga dimensi kualitas, yaitu: (1) spiritualitas Islam yang termasuk di dalamnya hikmah dan filosofi ibadah-ibadah formal, (2) akhlak dan kepribadian, dan (3) kepemimpinan. Ketiga orientasi kualitas ini sebagian besar menjadi bagian dari program pengasuhan dan keagamaan di asrama dan beberapa termasuk ke dalam mata pelajaran reguler.

bimbingan belajar bagi siswa akhirnya mengembangkan sekolah Islam unggulan²⁶.

Kekuatan model sekolah unggulan Islam dapat dilihat dari berbagai aspek, mulai penerapan kurikulum dan metode pendidikan dengan alokasi waktu yang menyeimbangkan antara pendidikan agama bagi pembentukan watak dan pribadi siswa dengan kurikulum umum.

Perkembangan sekolah Islam unggulan terutama berkaitan dengan makin meningkatnya *ghirah* (semangat) keagamaan masyarakat muslim Indonesia pada dekade akhir abad ke-20. Makin meningkatnya jumlah generasi terdidik yang berasal dari keluarga muslim, terutama mereka yang menyelesaikan pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi umum, telah turut mendorong meningkatnya kebutuhan mereka untuk mendapatkan pendidikan bagi anak-anaknya yang selain dapat memberikan bekal penguasaan pengetahuan umum juga mampu memberikan pendidikan agama sebagai bekal bagi pembentukan pribadi muslim. Hal inilah yang menjadi faktor pendorong meluasnya pembentukan sekolah-sekolah Islam unggulan bagi anak-anak keluarga muslim terdidik.

Meningkatnya jumlah generasi terdidik yang berasal dari keluarga muslim merupakan basis pendukung bagi kelahiran dan perkembangan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) pada tahun 1990 dan bersamaan dengan akhir pemerintahan Presiden Soeharto. Meskipun kelahiran ICMI tidak dapat dilepaskan dari konstelasi politik seputar kekuasaan Presiden Soeharto, lembaga ini sempat berperan sebagai pendorong bagi munculnya gagasan kreatif yang melahirkan banyak program sosial yang bermanfaat bagi kepentingan muslim, mulai dari yang berbentuk program ekonomi yang diarahkan untuk mengangkat nasib kaum dhuafa seperti program dompet dhuafa, gagasan tentang bank muamalah dan bank syariah BMT, sampai kepada sekolah Islam unggulan yang sebagian mengadopsi model pendidikan pesantren.

²⁶Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam.....*, h.198

C. Kesimpulan

Secara umum diakui bahwa kebijakan pemerintahan Orde Baru mengenai pendidikan agama, termasuk madrasah, bersifat positif dan konstruktif, khususnya dalam dua dekade terakhir 1980 – 1990 an. Pemerintah Orde Baru memandang bahwa madrasah harus dikembangkan dalam rangka pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan. Kebijakan seperti ini secara lebih kuat tercermin dalam komitmen Orde Baru untuk menyelenggarakan pendidikan agama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Pendidikan Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad ke-17 dan 18*, Mizan, Bandung, 1994
- Dedi Supriadi, *Isu dan Agenda Pendidikan Tinggi di Indonesia*, Rosdakarya, Bandung, 1997
- Departemen Agama RI, *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional (Paradigma Baru)*, Dirjen Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2005
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kurikulum Sekolah Umum Tingkat Atas (SMA). Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kurikulum*, Jakarta, 1990
- Dirjen Bimas Islam Departemen Agama, *Buku Pedoman Guru Madrasah*, Jakarta, 1978/1979
- Haider Putra Daulay, *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Haider Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009

- M. Dawam Rahardjo, *Intelektual, Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa*, Mizan, Bandung, 1993
- M. Wahyuni Nafis (Ed.), *Kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 Tahun Prof. Dr. Munawir Sjadzali, MA*, Paramadina, Jakarta, 1995
- Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1957
- Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999
- Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010
- Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pascakemerdekaan*, Rajawali Press, Jakarta, 2009

BAB IX PENDIDIKAN PADA MASA REFORMASI

Oleh: Siti Aisyah

Tema besar reformasi pendidikan di Indonesia telah membawa suatu konsep penerapan pengelolaan pendidikan yang berfokus pada otonomi dan independensi dalam penentuan keputusan dan kebijakan lokal sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikannya, yang pada akhirnya akan mewujudkan suatu sekolah yang efektif dan produktif. Penerapan konsep tersebut tentunya diharapkan dapat menjawab realitas saat ini dalam penyelenggaraan pendidikan yang menekankan pada upaya peningkatan mutu, efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pendidikannya. Dalam penerapan manajemen berbasis sekolah, madrasah memerlukan pedoman untuk menjamin terlaksananya manajemen yang mengakomodasi kepentingan otonomi madrasah, kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, dan partisipasi masyarakat.

Era reformasi bukan hanya membutuhkan reformasi struktural dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa, tetapi juga memerlukan pendekatan kultural untuk mengisi pembaruan struktural tersebut. Peran pendidikan dalam mengembangkan sikap-sikap demokratis tersebut mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan masyarakat luas yang seluruhnya diliputi oleh pendidikan formal, nonformal dan informal secara keseluruhan dapat membangun masyarakat demokratis yang diimpikan.

Pada pembahasan makalah ini penulis mengungkapkan beberapa kajian permasalahan di antaranya: Kurikulum Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi, Landasan Yuridis Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi, Peran Dan Aspek Profesionalisme Guru Pada Masa Reformasi, Institusi Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi dan Kultur Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi.

A. Kurikulum Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi

Kurikulum merupakan aspek pendidikan yang prinsipil, sebagai tuntutan dari tujuan, cita-cita, atau orientasi pendidikan Nasional. Akan tetapi, seringkali kebijakan tentang kurikulum pendidikan Nasional dianggap belum konsisten dalam menerjemahkan tujuan ideal pendidikan. Setiap adanya pergantian Menteri Pendidikan, kebijakan berkaitan dengan kurikulum akan mengalami pergantian.¹

Dalam perjalanannya dunia pendidikan di Indonesia telah menerapkan enam kurikulum, yaitu Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, Kurikulum 2004, dan terakhir Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang dikeluarkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 tentang Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Permendiknas nomor 23 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Permendiknas nomor 24 tentang pelaksanaan kedua Permendiknas tersebut.²

Bersamaan dengan lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menggantikan UU Nomor 2 Tahun 1989, pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional menggagas kurikulum baru yang diberi nama Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

¹ Musthofa Rembangy, *Pendidikan Transformatif, Pergulatan Kritik Merumuskan Pendidikan Di Tengah Pusaran Arus Globalisasi*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 24

² Kunandar, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Dan Peningkatan Mutu Pendidikan Di Indonesia*, (Jakarta: Buletin LPMP DKI Jakarta, Nomor 3 Mei 2003) Volume 2, hlm. 107

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

KBK lahir di tengah-tengah adanya tuntutan mutu pendidikan di Indonesia. Banyak kalangan yang berpendapat bahwa mutu pendidikan di Indonesia semakin hari semakin terpuruk. Pendidikan di Indonesia di anggap hanya melahirkan lulusan yang akan menjadi beban negara dan masyarakat, karena kurang ditunjang dengan kompetensi yang memadai ketika terjun dalam masyarakat. Dalam KBK, peserta didik diarahkan untuk menguasai sejumlah kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditentukan.³

KBK di gagas ketika Menteri Pendidikan Nasional di jabat oleh Prof. Dr. Abdul Malik Fadjar M.sc. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam KBK adalah (1) bersifat: *Competency Based Curriculum*; (2) penyebutan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) menjadi SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) menjadi SMA (Sekolah Menengah Atas); (3) program pengajaran Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) disusun dalam 8 mata pelajaran; (4) program pengajaran SMP/Madrasah Tsanawiyah (MTs) disusun dalam 12 mata pelajaran; (5) program pengajaran SMA/Madrasah Aliyah disusun dalam 17 mata pelajaran.⁴

KBK meskipun sudah diujicobakan di beberapa sekolah melalui *pilot project*, tetapi ironisnya pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional belum mengesahkan kurikulum ini secara formal. Sepertinya pemerintah masih ragu-ragu dengan kurikulum ini. Hal ini dimaklumi, karena uji coba kurikulum ini menuai kritik dari berbagai kalangan, baik para ahli pendidikan maupun praktisi pendidikan. Beberapa kritik terhadap kurikulum ini adalah : (1) masih sarat dengan materi sehingga ketakutan guru akan dikejar-kejar materi seperti yang terjadi pada Kurikulum 1994 akan terulang terhadap kewenangan sekolah dan guru untuk mengembangkan kewenangan tersebut; (2) masih belum jelasnya

³Kunandar, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Dan...*, hlm. 9

⁴Kunandar, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Dan...*, hlm. 111

pengertian kompetensi sehingga ketika diterapkan pada standar kompetensi kelulusan belum terlalu aplikatif ; (3) adanya sistem penilaian yang belum begitu jelas dan terukur.

Melalui kebijakan pemerintah, KBK mengalami revisi, dengan dikeluarkannya Permendiknas Nomor 22 tentang Standar Isi, Permendiknas Nomor 23 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan Permendiknas Nomor 24 tentang pelaksanaan kedua Permen di atas. Ketiga Permendiknas tersebut dikeluarkan pada tahun 2006. Dengan dikeluarkannya ketiga Permendiknas tersebut seakan menjawab ketidakjelasan nasib KBK yang selama ini sudah diterapkan di beberapa sekolah, baik melalui *pilot project* atau swadaya dari sekolah tersebut. Keterandalan dan keunggulan kurikulum inipun masih perlu diuji di lapangan dan waktu yang akan menjawabnya.⁵

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan revisi dan pengembangan dari KBK. KTSP lahir karena dianggap KBK masih sarat dengan beban belajar dan pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) masih dipandang terlalu intervensi dalam pengembangan kurikulum. Oleh karena itu, dalam KTSP beban belajar siswa sedikit berkurang dan tingkat satuan pendidikan (sekolah, guru, dan komite sekolah) diberikan kewenangan untuk mengembangkan kurikulum, seperti membuat indikator, silabus dan beberapa komponen kurikulum lainnya.

Hasil penelitian Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BNSP) bahwa beban belajar di Indonesia mencapai 1.000-2.000 jam per tahun. Bahkan sekolah-sekolah tertentu menerapkan jam belajar lebih tinggi sehingga memberatkan siswa. Beban jumlah jam pelajaran seperti itu terlalu berat, apalagi selain tatap muka di kelas siswa masih harus mengikuti ekstrakurikuler dan mengerjakan pekerjaan rumah. Beban belajar siswa di Indonesia kelebihan 20% jika dibandingkan

dengan beban belajar siswa di luar negeri yang beban belajar siswa berkisar 800-900 jam pertahun.

Untuk merespons kondisi di atas, BNSP merekomendasikan kepada Depdiknas untuk mengurangi beban belajar sekitar 10%. Untuk SD/MI kelas I-III satu jam pelajaran 35 menit, dengan jumlah jam pelajaran 577-709 per tahun. Sementara itu, untuk kelas IV-VI SD/MI setahun berkisar 675-754 jam. Untuk SMP/MTs kelas VII-IX satu jam pelajaran 40 menit, dengan jumlah jam pelajaran pertahun 771-861. Sementara itu, SMA/MA kelas X-XII satu jam pelajaran 45 menit dengan jumlah jam pelajaran 969-1.083. Perampangan jumlah pelajaran yang tadinya berkisar 1.000-2.000 jam per tahun ini guna menyerap usulan berbagai kalangan, termasuk keluhan orang tua murid yang merasa hak kebebasan anaknya untuk bermain terampas oleh sekolah. Belum lagi ditambah dengan pekerjaan rumah yang terasa melelahkan mental anak didik.⁶

Untuk melihat keunggulan tingkat satuan pendidikan perlu dicari bahan perbandingan, Oleh karena itu perlu dilihat perbedaan antara KTSP dengan kurikulum 1994:

NO	KTSP	KURUKULUM 1994
1	Menggunakan pendekatan kompetensi yang menekankan pada pemahaman, kemampuan atau kompetensi tertentu di sekolah, yang berkaitan dengan pekerjaan yang ada dalam masyarakat.	Menggunakan pendekatan penguasaan ilmu pengetahuan, yang menekankan pada isi atau materi, berupa pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi yang diambil dari bidang-bidang ilmu pengetahuan.
2	Standar kompetensi yang memperhatikan perbedaan individu, baik kemampuan,	Standar akademis yang diterapkan secara seragam bagi setiap peserta didik.

⁵Kunandar, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Dan...*, hlm. 112

⁶Kunandar, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Dan...*, hlm. 114

	kecepatan belajar, maupun kondisi sosial budaya.	
3.	Berbasis kompetensi, sehingga peserta didik berada dalam proses perkembangan yang berkelanjutan dari seluruh aspek kepribadian, sebagai pemekaran terhadap potensi bawaan sesuai dengan kesempatan belajar yang ada dan diberikan oleh lingkungan.	Berbasis konten, sehingga peserta didik dipandang sebagai kertas putih yang perlu ditulisi dengan sejumlah ilmu pengetahuan.
4.	Pengembangan kurikulum dilakukan secara desentralisasi, sehingga pemerintah dan masyarakat bersama-sama menentukan standar pendidikan yang dituangkan dalam kurikulum.	Pengembangan kurikulum dilakukan secara sentralisasi, sehingga Depdiknas memonopoli pengembangan ide dan konsep Kurikulum.
5.	Sekolah diberi keleluasaan untuk menyusun dan mengembangkan silabus mata pelajaran sehingga dapat mengakomodasi potensi sekolah, kebutuhan dan kemampuan peserta didik, serta kebutuhan masyarakat sekitar.	Materi yang dikembangkan dan diajarkan di sekolah seringkali tidak sesuai dengan potensi sekolah, kebutuhan dan kemampuan peserta didik, serta kebutuhan masyarakat sekitar sekolah
6.	Guru sebagai fasilitator yang bertugas mengkondisikan lingkungan untuk memberikan kemudahan belajar peserta didik.	Guru merupakan kurikulum yang menentukan segala sesuatu yang terjadi di dalam kelas, sehingga cenderung dominan.
7.	Pengetahuan, keterampilan dan sikap dikembangkan akan	Pengetahuan, keterampilan dan sikap dikembangkan melalui

	berdasarkan pemahaman yang akan membentuk kompetensi individual.	latihan, seperti latihan mengerjakan soal.
8.	Pembelajaran yang dilakukan mendorong terjalannya kerjasama antar sekolah, masyarakat dan dunia kerja dalam membentuk kompetensi peserta didik	Pembelajaran cenderung hanya dilakukan di dalam kelas, atau dibatasi oleh empat dinding kelas.
9.	Evaluasi berbasis kelas, yang menekankan pada proses dan hasil belajar.	Evaluasi nasional yang tidak dapat menyentuh aspek-aspek kepribadian peserta didik.
10.	Berpusat pada siswa.	Berpusat pada guru
11.	Guru hanya salah satu sumber belajar	Guru satu-satunya sumber belajar
12.	Kegiatan belajar mengajar dinamis dan menyenangkan	Kegiatan belajar mengajar cenderung monoton dan menjenuhkan

Dari tabel diatas nampak jelas bahwa KTSP menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara kurikulum tingkat satuan pendidikan individual maupun klasikal. Peserta didik dibentuk untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap dan minat yang pada akhirnya akan membentuk pribadi yang terampil dan mandiri. KTSP juga berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sementara itu sumber belajar bukan hanya guru, tetapi sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif dan penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi.

Kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BNSP.

Berikut ini akan ditampilkan dalam sebuah tabel tentang perubahan paradigma kurikulum:

Aspek	Kurikulum Lama	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Siswa	Pasif	Aktif-Kreatif-
Kurikulum	<i>Subject Based</i>	Produktif
Guru	Instruktif	<i>Competency Based</i>
Sarana Prasarana	<i>Weaknessess</i>	Fasilitatif
Pembelajaran	<i>Pasif Learning</i>	<i>Adequate</i>
Evaluasi	<i>Subject Oriented</i>	<i>Aktif Learning</i>
Manajemen	Sentralistik	<i>Competency</i>
Supervisi dan Pengawasan	Model Tagihan	Desentralistik (MBS)
	Cenderung Pasif	Model Bimbingan dan PEMBERDAYAAN
Lingkungan dan Masyarakat		Kondusif (Peduli)

Dari tabel di atas nampak jelas bahwa paradigma pelaksanaan kurikulum lebih didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Dalam hal ini peserta didik harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis, dan menyenangkan.

B. Landasan Yuridis Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi

Satuan pendidikan Dasar Dan Menengah mengembangkan dan menetapkan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah sesuai kebutuhan satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan pada:

a.) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 sampai dengan pasal 38.

b.) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 5 sampai dengan Pasal 18, dan Pasal 25 sampai dengan Pasal 27.

c.) Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.

d.) Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah (Pasal 1 ayat 1 Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006).

Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah dapat mengembangkan kurikulum dengan standar yang lebih tinggi dari Standar Isi sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah serta Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah (Pasal 1 ayat 2 Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006).

Pengembangan dan penetapan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah memperhatikan panduan penyusunan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah yang disusun BNSP Pasal 1 ayat 3 Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006. Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah dapat mengadopsi atau mengadaptasi model KTSP Pendidikan Dasar Dan Menengah yang disusun oleh BNSP (Pasal 1 ayat 4 Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006). Kurikulum Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah setelah memperhatikan pertimbangan dari Komite Sekolah atau Komite Madrasah (Pasal 1 ayat 5 Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006).⁷

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dapat menerapkan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk

⁷Kunandar, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Dan...*, hlm. 126

Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah mulai tahun ajaran 2006/2007 (Pasal 2 ayat 1 Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006). Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah harus sudah mulai menerapkan Permen diknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standari Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah serta Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah paling lambat tahun ajaran 2009/2010 (Pasal 2 ayat 2 Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006). Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah pada jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah yang telah melaksanakan ujicoba kurikulum 2004 secara menyeluruh dapat menerapkan secara menyeluruh Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah untuk semua tingkatan kelasnya mulai tahun ajaran 2006/2007.

Gubernur dapat mengatur jadwal Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah Dan Permendiknas Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, untuk Satuan Pendidikan Menengah Dan Satuan Pendidikan Khusus, disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan satuan pendidikan di propinsi masing-masing (Pasal 1 ayat 1 Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006).

Bupati/Walikota dapat mengatur jadwal pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah dan Permendiknas Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, untuk Satuan Pendidikan Dasar, disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan satuan pendidikan di kabupaten /kota masing-masing (Pasal 3 ayat 2 Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006).

Menteri Agama dapat mengatur jadwal Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah dan Permendiknas Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, untuk Satuan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan satuan pendidikan yang bersangkutan (Pasal 3 ayat 3 Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006).⁸

BNSP melakukan pemantauan perkembangan dan evaluasi pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah dan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, pada tingkat satuan pendidikan secara nasional (pasal 4 Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006).

BNSP dapat mengajukan usul revisi Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah dan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah sesuai dengan keperluan berdasarkan pemantauan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 4 ayat 2 Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006.⁹

Dalam perkembangannya, pengembangan pendidikan Sekolah/Madrasah dewasa ini tidak dapat ditangani secara parsial atau setengah-setengah. Penanganannya memerlukan pemikiran pengembangan yang utuh, terutama ketika dihadapkan pada kebijakan pembangunan Nasional bidang pendidikan yang mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan

⁸Kunandar, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Dan...*, hlm. 128

⁹Kunandar, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Dan...*, hlm. 112

berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Untuk menjawab hal tersebut maka pendidikan agama menjadi sesuatu yang teramat penting untuk terus ditingkatkan mekanisme dan aspek-aspek pembelajarannya. Pendidikan agama tersebut secara bertahap terus mengalami dinamika dan terakhir dicantumkan dengan tegas dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.¹⁰

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 12 Ayat a tersebut dinyatakan bahwa pendidikan agama adalah hak peserta didik. "Setiap peserta didik dalam satuan pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama".¹¹

Implementasi KBK menuntut perubahan terhadap berbagai aspek pendidikan, termasuk reformasi sekolah (*school reform*). Reformasi sekolah atau *school reform* merupakan suatu konsep perubahan kearah peningkatan mutu pendidikan.

Dalam pengembangan KBK yang mulai diterapkan sejak tahun ajaran 2004/2005 di sekolah-sekolah, masalah keimanan telah dijadikan salah satu prinsip pertama dan utama dalam pengembangan kurikulum, dalam arti keimanan, budi pekerti luhur, dan nilai-nilai budaya perlu digali, dipahami, dan diamalkan oleh peserta didik. Pendidikan agama di Perguruan Tinggi Umum (PTU), menurut keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI Nomor: 38/DIKTI/Kep/2002 Tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, merupakan salah satu mata kuliah Kelompok Pengembangan

Kepribadian (MPK). Visi mata kuliah ini menjadi sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan peserta didik mengembangkan kepribadiannya. Sedangkan misinya adalah membantu peserta didik agar mampu mewujudkan nilai dasar agama dalam menerapkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang dikuasainya dengan rasa tanggung jawab kemanusiaan.

Dilihat dari prinsip pengembangan kurikulum disekolah serta visi dan misi pendidikan agama di PTU tersebut, maka secara konseptual-teoritik masalah keimanan kepada Tuhan YME seharusnya dijadikan sebagai sumber nilai dan pedoman bagi peserta didik untuk mencapai kebahagiaan hidup didunia dan akherat, serta bagi penyelenggara program studi di PTU, dan membantu peserta didik agar mampu mewujudkan nilai dasar dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni¹²

Sementara itu prinsip pengembangan pembelajaran ilmu-ilmu agama Islam di lingkungan Perguruan Tinggi Islam adalah berusaha mendudukan Islam sebagai objek studi yang perlu dikaji dan dianalisis secara kritis-rasional, objektif, historis-empiris dan sosiologis. Pengkajian dan analisis harus disertai pendekatan keagamaan yang berusaha membangun sikap dan perilaku yang memiliki komitmen (pemihakan) dan dedikasi terhadap Islam, sebagai agama yang diyakini kebenarannya yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, atas dasar wawasan keilmuan keIslaman yang dimilikinya.¹³

Atas dasar itu maka pembelajaran Ilmu-ilmu agama Islam di Perguruan Tinggi Islam era multikultural diharapkan mampu

¹⁰ Haidar Putra Daulay, *Dinamika Pendidikan Islam Di Asia Tenggara* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 19

¹¹ Pemerintah Republik Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS* (Bandung: Citra Umbara, 2006), hlm. 79

¹² Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2007), hlm. 58

¹³ Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam, Dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum Hingga Strategi Pembelajaran*, (Jakarta: RadjaGrafindo, 2009), hlm. 284

menciptakan *ukhuwah Islamiyah* dalam suasana multikultural, yaitu persaudaraan yang bersifat Islami, bukan sekadar persaudaraan antarumat Islam, tetapi juga mampu membangun persaudaraan antarsesama, serta mampu membentuk kesalehan pribadi sekaligus kesalehan sosial.¹⁴

C. Peran Dan Aspek Profesionalisme Guru Pada Masa Reformasi

Untuk menghadapi era globalisasi yang penuh dengan persaingan dan ketidakpastian, dibutuhkan guru yang visioner dan mampu mengelola proses belajar mengajar secara efektif dan inovatif. Diperlukan perubahan strategi dan model pembelajaran yang sedemikian rupa memberikan nuansa yang menyenangkan bagi guru dan peserta didik. Apa yang dikenal dengan sebutan "*Quantum Learning* dan '*Quantum Teaching*" pada hakekatnya adalah mengembangkan suatu model dan strategi pembelajaran yang seefektif mungkin dalam suasana yang menyenangkan dan penuh gairah serta bermakna.¹⁵

Diperlukan sosok guru yang mempunyai kualifikasi, kompetensi, dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas profesionalnya. Seorang pendidik selayaknya harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu kompetensi sebagai agen pembelajaran meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan

¹⁴ Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam, Dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum...*, hlm. 288

¹⁵ Kunandar, *Guru Profesional, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan sukses Dalam Sertifikasi Guru*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 41

kompetensi sosial.¹⁶ Apalagi dalam perubahan kurikulum yang menekankan kompetensi, guru memegang peranan penting terhadap implementasi KTSP.

Dewasa ini, seiring dengan tuntutan kualifikasi, kompetensi dan dedikasi yang tinggi dari para guru, tuntutan akan kesejahteraan guru perlahan tetapi pasti ternyata direspons oleh pemerintah. Tampaknya pemerintah menempatkan peningkatan kesejahteraan guru dalam konteks kompetensi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator;

Pertama; penancangan guru sebagai profesi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 2 Desember 2004. Kebijakan ini adalah suatu langkah maju menuju perbaikan kesejahteraan guru, guna menjawab tantangan dunia global yang semakin kompleks dan kompetitif. Dalam kondisi seperti ini dibutuhkan sumber daya manusia yang andal dan ini bisa dihasilkan dari dunia pendidikan yang dikelola oleh guru yang profesional.

Kedua; diterapkannya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Melalui UU tersebut diatur hak dan kewajiban guru yang muaranya adalah kesejahteraan dan kompetensi guru.

Ketiga; Lahirnya PP nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah ini juga mensyaratkan adanya kompetensi, sertifikasi dan kesejahteraan guru.

Keempat; UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang telah disahkan tanggal 6 Desember 2005. UU ini juga menekankan tiga aspek penting dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia dilihat dari tenaga pendidik dan kependidikan, yakni kualifikasi, sertifikasi, dan kesejahteraan.¹⁷

¹⁶ Pemerintah Republik Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang...*, hlm. 56

¹⁷ Kunandar, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Dan...*, hlm. 36

Guru sebagai profesi dikembangkan melalui; (1) Sistem pendidikan; (2) Sistem penjaminan mutu; (3) sistem manajemen; (4) sistem *remunerasi*; dan (5) sistem pendukung profesi guru.

Dengan pengembangan guru sebagai profesi diharapkan mampu;

1. membentuk, membangun dan mengelola guru yang memiliki harkat dan martabat yang tinggi di tengah masyarakat.
2. Meningkatkan kehidupan guru yang sejahtera, dan
3. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mampu mendukung terwujudnya lulusan yang kompeten dan terstandar dalam kerangka pencapaian visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional pada masa mendatang.

Sebagai jabatan profesional memerlukan pendidikan lanjutan dan latihan khusus (*advanced education and special training*), maka guru sebagai jabatan profesional seperti dokter, dan pengacara, memerlukan pendidikan pascasarjana. Namun, pascasarjana bagi jabatan profesional bukanlah program akademik, tetapi program profesional yang mengutamakan praktek. Seperti halnya dokter setelah menjadi sarjana kedokteran, calon dokter belajar praktik menjadi dokter selama dua tahun.¹⁸

Seiring dengan tuntutan mutu pendidikan, maka pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi Guru dan Dosen .

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Sertifikasi guru merupakan keniscayaan masa depan untuk meningkatkan kualitas dan martabat guru, menjawab arus globalisasi

¹⁸Kunandar, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Dan...*, hlm. 49

dan mensiasati sistem desentralisasi. Dan hal tersebut sudah diakomodasi dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.¹⁹

Sertifikasi profesi guru adalah proses untuk memberikan sertifikat kepada guru yang telah memenuhi standar kualifikasi dan standar kompetensi. Sertifikasi dilakukan oleh perguruan tinggi penyelenggara pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah.²⁰

Program sertifikasi guru dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen dan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Sertifikasi guru merupakan kegiatan bersama antara Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK)/Dinas Pendidikan Propinsi/ Kabupaten/Kota sebagai pengelola guru dan Ditjen Dikti/Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara sertifikasi. Sebagai pengelola guru, Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) sebagai jajaran Ditjen PMPTK bertugas menyiapkan guru agar siap mengikuti sertifikasi, termasuk mengatur urutan, jika pesertanya melebihi kapasitas yang ditetapkan. Bagi guru yang lulus dalam sertifikasi akan diberikan sertifikasi pendidik dan berhak mendapatkan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji, sedangkan bagi mereka yang tidak lulus disarankan mengikuti pelatihan atau pembinaan melalui LPMP, MGMP/ KKG atau lembaga lainnya agar lebih siap untuk mengikuti tes ulang berikutnya.

Dalam rangka mendorong dan mempercepat proses kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru, pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional mengeluarkan Permendiknas Nomor

¹⁹Kunandar, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Dan...*, hlm. 81

²⁰Kunandar, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Dan...*, hlm. 79

D. Institusi Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi

Ada beberapa Pasal dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 yang menyinggung tentang Pendidikan Islam. Dalam aturan tersebut setidaknya ada tiga hal yang terkait dengan pendidikan Islam. *Pertama*, kelembagaan formal, nonformal, dan informal, didudukkannya lembaga madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan formal yang diakui keberadaannya setara dengan lembaga pendidikan sekolah. Dan dipertegas pula tentang kedudukannya sebagai sekolah yang berciri khas agama Islam, selanjutnya diakui majelis taklim sebagai lembaga pendidikan nonformal serta dipertegas pula tentang pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan. *Kedua*, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran. Dikokohkannya mata pelajaran agama sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan kepada peserta didik di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan. *Ketiga*, pendidikan Islam sebagai nilai, terdapat seperangkat nilai-nilai Islami dalam sistem pendidikan Nasional.

a. Pendidikan Formal

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan (jalur sekolah) yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.²²

Jenjang pendidikan formal di tinjau dari sudut tingkatan di lembaga pendidikan Islam terdiri dari:

1. Pendidikan Dasar terdiri dari;
 - a. Madrasah Ibtidaiyah (MI)
 - b. Madrasah Tsanawiyah (MTs)

²¹Kunandar, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Dan...*, hlm. 83

²²Pemerintah Republik Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang...*, hlm. 73

2. Pendidikan Menengah terdiri dari;
 - a. Madrasah Aliyah (MA)
 - b. Madrasah Aliyah Khusus (MAK)

Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) merupakan pendidikan umum yang mempunyai ciri khas agama, yaitu agama Islam. Meskipun ketiganya telah menjadi pendidikan umum berciri khas Islam, lembaga pendidikan ini tetap memberikan porsi yang lebih banyak pada materi pendidikan keagamaan dibandingkan dengan pendidikan umum non keagamaan.²³

3. Pendidikan Tinggi, terdiri dari;

- a. Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
- b. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (IAIN)
- c. Universitas Islam Negeri (UIN)
- d. Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta (STAI)
- e. Universitas Islam Swasta (pengeloalaannya dibawah yayasan)

Selain jenjang pendidikan tersebut, ada juga diselenggarakan pendidikan anak usia dini, yaitu suatu penyelenggaraan pendidikan yang diperuntukan bagi anak sebelum memasuki Pendidikan Dasar.²⁴ Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), *Raudatul Athfal* (RA), atau bentuk lain yang sederajat.²⁵

²³ Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2009), hlm. 184

²⁴Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu...*, hlm. 53

²⁵ Pemerintah Republik Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang...*, hlm. 88

Ditinjau dari sifatnya

Pertama; sekolah umum. Sekolah umum adalah lembaga pendidikan yang belum mempersiapkan anak dalam spesialisasi pada bidang pekerjaan tertentu. Sekolah ini penekanannya adalah sebagai persiapan mengikuti pendidikan yang lebih tinggi tingkatannya. Termasuk dalam hal ini adalah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA.

Kedua; sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan adalah lembaga pendidikan sekolah yang mempersiapkan anak untuk menguasai keahlian-keahlian tertentu, seperti; SMEA, MAPK (MAK), SMKK, STM, dan sebagainya.

Ditinjau dari segi yang mengusahakan:

Pertama; Sekolah Negeri, yaitu sekolah yang diusahakan oleh pemerintah, baik dari segi pengadaan fasilitas, keuangan maupun pengadaan tenaga pengajar. Penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah ini ditetapkan di dalam Pasal 31 UUD 1945, yang pengaturan penyelenggaraannya diatur menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Instansi penyelenggara pada umumnya adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) untuk sekolah-sekolah umum, dan Departemen Agama untuk sekolah yang berciri khas Agama Islam.²⁶

Kedua; Sekolah swasta, yaitu sekolah yang diusahakan oleh selain pemerintah, yaitu badan-badan swasta.

Sedangkan untuk lembaga Pendidikan Tinggi sekarang baik PTN maupun PTS menggunakan sistem akreditasi. Dengan sistem akreditasi ini memungkinkan perguruan tinggi swasta lebih leluasa

²⁶Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu...*, hlm. 52

mengembangkan lembaganya dengan standar-standar yang sudah diatur dalam ketentuan yang berlaku²⁷

b. Pendidikan nonformal

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal (jalur luar sekolah) yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.²⁸

Pendidikan agama sebagai institusi yang selama ini dikenal dengan nama madrasah Diniyah serta pondok pesantren telah berakar, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Satuan pendidikan tersebut telah ada sejak permulaan agama Islam masuk ke Indonesia, atau paling lambat sudah dimulai pada abad ke-11.²⁹

Dalam sistem pendidikan Nasional, pesantren dan madrasah Diniyah mempunyai akar kuat dalam masyarakat Islam Indonesia dan merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah (nonformal). Dipesantren secara intensif agama dipelajari, dialami, dan dikaji. Meskipun sekarang ini pendidikan pesantren telah sangat beragam (tradisional, modern, sampai dengan yang mengarah pengembangan iptek) pada dasarnya mereka tetap mempunyai kesamaan, yaitu agama merupakan bidang kajian utama dan paling utama dalam keseluruhan proses pendidikan pesantren. Pesantren juga mempunyai metode-metode yang khas dalam proses pendidikannya, seperti sorogan, dan *halaqah*, kendati sudah memakai sistem klasikal, disamping juga gaya hidup santri yang dilatih kemandirian.

²⁷Pemerintah Republik Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang...*, hlm. 73

²⁹Berdasarkan hasil pendataan yang dilaksanakan oleh Departemen Agama pada tahun 1984 /1985 diperoleh keterangan bahwa pesantren tertua didirikan pada tahun 1602 M, di Pamekasan Madura. Lihat Departemen Agama RI. *Nama Dan Data Potensi Pondok Pesantren Seluruh Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985), hlm. .668

Sistem pembelajaran yang lebih terstruktur dari apa yang terjadi di pesantren adalah madrasah Diniyah (keagamaan). Sistem pengajaran yang digunakan adalah sistem klasikal. Materi yang dipelajari di madrasah diniyah adalah keagamaan, namun berbeda dengan di pondok pesantren umumnya, di madrasah Diniyah materi telah lebih terstruktur dan berjenjang.³⁰

Bentuk pendidikan Islam nonformal lainnya adalah majelis Ta'lim. Majelis Ta'lim memiliki kurikulum tersendiri yang diselenggarakan secara berkala dan teratur dan diikuti oleh jamaah yang relatif banyak dan bertujuan untuk membina dan mengembangkan pengetahuan dan pemahaman keagamaan. Untuk memberikan pendidikan agama kepada masyarakat yang sangat heterogen, perlu disampaikan materi pendidikan agama (bahan ajar) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu dan tidak menyimpang dari aqidah agama serta disesuaikan dengan adat istiadat dan budaya setempat. Pelajaran disampaikan melalui lembaga keagamaan yang ada pada masyarakat itu sendiri, dengan cara (metode) ceramah dan tanya jawab (diskusi), dan metode lain yang sesuai dengan kebutuhan pendengar yang hadir.³¹

C. Pendidikan Informal

Yang termasuk lembaga pendidikan jalur luar sekolah adalah pendidikan informal yang merupakan jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.³²

Satu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kondisi seperti sekarang ini, di berbagai sektor kehidupan telah terjadi pergeseran atau perubahan, termasuk dalam hal ini keluarga dalam

³⁰Hasbullah *Dasar-Dasar Ilmu...*, hlm. 184

³¹Nuryanis Dan Romli, *Pendidikan Luar Sekolah, Kontribusi Ditpenamas Dalam Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003) hlm. 40

³²Pemerintah Republik Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang...*, hlm. 87

segala peranannya. Pada waktu yang silam, keluarga berfungsi sebagai sentral sumber pendidikan. Pada situasi sekarang sedikit demi sedikit telah berubah, yaitu berkurangnya peranan keluarga dalam mendidik anak-anaknya.

Asas pendidikan keluarga merumuskan suatu asas bahwa proses pendidikan merupakan suatu proses *kontinu*, yang bermula sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia. Proses pendidikan ini mencakup bentuk belajar yang berlangsung dalam keluarga.³³

Sebagai sebuah lembaga pendidikan luar sekolah, keluarga merupakan tempat pendidikan yang pertama dan utama bagi seseorang, dengan orang tua sebagai kuncinya. Pendidikan dalam keluarga terutama berperan dalam mengembangkan watak, kepribadian, nilai-nilai budaya, nilai-nilai keagamaan dan moral, serta keterampilan sederhana.

Sementara itu, pendidikan sekolah pada dasarnya merupakan perluasan dari pendidikan dalam keluarga. Pendidikan dalam konteks ini mempunyai arti sebagai proses sosialisasi secara berkelanjutan dengan tujuan untuk mengantarkan anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt.

Meskipun lembaga pendidikan dalam bentuk persekolahan sudah sedemikian melembaga dan semakin kuat, tidak berarti mengabaikan pendidikan keluarga dalam keluarga. Justru di tengah semakin masifnya perubahan sosial pada era globalisasi dan informasi ini, peranan pendidikan dalam keluarga sebagai wahana pembinaan keyakinan agama, watak, dan kepribadian haruslah semakin diperkuat.³⁴

³³Hasbullah *Dasar-Dasar Ilmu...*, hlm. 64

³⁴Hasbullah *Dasar-Dasar Ilmu...*, hlm. 186

E. Kultur Pendidikan Islam pada Masa Reformasi

Dilihat dari sejarahnya setidaknya-tidaknya ada dua faktor penting yang melatarbelakangi kemunculan madrasah, yaitu: *pertama*, adanya pandangan yang mengatakan bahwa sistem pendidikan tradisional dirasakan kurang bisa memenuhi kebutuhan pragmatis masyarakat; *kedua*, adanya kekhawatiran atas cepatnya perkembangan persekolahan Belanda yang akan menimbulkan pemikiran sekular di masyarakat. Untuk menyeimbangkan perkembangan sekularisme, maka masyarakat Muslim-terutama para *reformist*-berusaha melakukan reformasi melalui upaya pengembangan pendidikan dan pemberdayaan madrasah.³⁵

Dalam realitas sejarahnya, madrasah tumbuh dan berkembang dari, oleh dan untuk masyarakat Islam itu sendiri, sehingga sebenarnya sudah jauh lebih dahulu menerapkan konsep pendidikan berbasis masyarakat (*community based education*). Masyarakat, baik secara individu maupun organisasi, membangun madrasah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Tidak heran jika madrasah yang dibangun oleh mereka bisa seadanya saja atau memakai tempat apa adanya. Mereka didorong oleh semangat keagamaan atau dakwah. Hingga saat ini pun kurang lebih 90% jumlah madrasah yang ada di Indonesia adalah milik swasta, sedangkan sisanya adalah berstatus negeri.³⁶

Faktor yang secara umum dihadapi oleh madrasah adalah masyarakat agaknya kurang memiliki kebebasan untuk mengelola dengan caranya sendiri, karena hampir semua hal yang berkaitan dengan pendidikan sudah ditentukan oleh pemegang otoritas pendidikan. Dengan kata lain, penyelenggaraan pendidikan Nasional dilakukan secara *birokratik-sentralistik*, yang menempatkan madrasah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan

³⁵Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam...*, hlm. 183.

³⁶Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam...*, hlm. 184

birokrasi yang mempunyai jalur yang sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi madrasah setempat. Dengan demikian, madrasah kehilangan kemandirian, motivasi dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya, termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan Nasional.

Sebagai dampak selanjutnya adalah setidaknya-tidaknya ada empat masalah utama yang sedang dihadapi oleh madrasah pada umumnya, yaitu (1) masalah identitas diri madrasah, sehingga program pengembangannya menciptakan satu sistem pendidikan yang masih memiliki titik tekan keagamaan (IMTAQ), tetapi IPTEKS (ilmu pengetahuan, teknologi dan seni) tetap diberi porsi yang seimbang sebagai basis mengantisipasi perkembangan masyarakat yang semakin global. Dalam arti, bagaimana membangun keseimbangan dalam porsi yang sama dan tidak saling menindih antara satu dengan lainnya; (2) semakin langkanya generasi Muslim yang mampu menguasai ajaran Islam, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, apalagi sampai menguasai totalitas ilmu agama (akidah, syariah dan akhlak). Ini menunjukkan kemunduran kualitas ajaran Islam, yang berimplikasi pada kedangkalan pemahaman Islam dan munculnya persepsi eksklusif dan sebagainya; dan (3) masalah sumber daya internal yang ada dan pemanfaatannya bagi pengembangan madrasah itu sendiri di masa depan.³⁷

Keempat masalah tersebut intinya terkait dengan aspek manajerial, yakni manajemen pengembangan madrasah yang belum banyak bertolak dari visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang jelas, sehingga pengelolaannya sering kurang terarah dan bahkan meninggalkan identitas madrasah sendiri. Madrasah pada dasarnya merupakan;

³⁷Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam...*, hlm. 186

(1) Lembaga Pendidikan yang berbasis masyarakat, yakni menyelenggarakan pendidikan berdasarkan kekhasan agama Islam serta sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat Islam, sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat Islam;

(2) Pendidikan Umum, yakni merupakan Pendidikan Dasar (MI dan MTs) dan Menengah (MA) yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan/atau untuk hidup di masyarakat;

(3) Pendidikan Keagamaan, yakni merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan dan pengamalan nilai-nilai dan ajaran agama Islam.

Munculnya kebijakan tentang desentralisasi pendidikan, sebagai implikasi pemberlakuan UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, sebenarnya merupakan angin segar bagi kehidupan madrasah, karena kebijakan tersebut berarti mengembalikan madrasah kepada habitatnya. Pergeseran pola sentralistik³⁸ ke desentralistik³⁹ dalam pengelolaan pendidikan ini merupakan upaya pemberdayaan madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan, terarah, dan menyeluruh. Karena itu Departemen Agama membuat

³⁸Sentralistik; kerja pendidikan diatur secara memusat, dari pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah yang sangat terpencil; kurikulum, metode ajar, materi ajar, tenaga kependidikan, penilaian, ijazah, otoritas penyelenggaraannya, dana, sarana, dan sebagainya. Lihat Musthofa Rembangy, *Pendidikan Transformatif, Pergulatan Kritik...*, hlm. 175

³⁹Desentralistik: Bentuk pengalihan tanggung jawab pemerintah pusat dalam hal perencanaan, manajemen, penggalan dana, dan alokasi sumber daya ke pemerintah daerah. Lihat juga Musthofa Rembangy, *Pendidikan Transformatif, Pergulatan Kritik...*, hlm. 180

kebijakan yang jelas mengenai status madrasah dalam konteks otonomi daerah.⁴⁰

Berbarengan dengan kebijakan otonomi atau desentralisasi tersebut, madrasah juga telah memperoleh bantuan dari *Asian Development Bank (ADB)*, yang berupa *Basic Education Project (BEP)* MI dan MTs, dan *Development Madrasah Aliyah Project (DMAP)*, yang berusaha meningkatkan kualitas madrasah. Walaupun proyek tersebut masih banyak diarahkan pada pengembangan madrasah negeri, tetapi agaknya mulai dapat mencerahkan kehidupan madrasah itu sendiri. Hasilnya cukup menggembirakan terutama dalam memenuhi tiga tuntutan minimal dalam peningkatan kualitas madrasah, yaitu; (1) bagaimana menjadikan madrasah sebagai wahana untuk membina ruh atau praktik hidup keIslaman; (2) bagaimana memperkokoh keberadaan madrasah sehingga sederajat dengan sistem sekolah; (3) bagaimana madrasah mampu merespon tuntutan masa depan guna mengantisipasi perkembangan iptek dan era globalisasi.⁴¹

Bangsa Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam telah bersepakat dan bertekad untuk membentuk satu negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bukan berdasarkan Islam. Namun, Pancasila dan UUD 1945 menjamin kemerdekaan bagi umat Islam untuk melaksanakan dan mengembangkan pendidikan Islam.

Dalam hal ini Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran Nasional yang diatur dengan Undang-Undang. Menurut para penyusunnya, yang dimaksud dengan "satu sistem pengajaran Nasional" adalah suatu sistem pendidikan dan pengajaran yang bisa memelihara pendidikan

⁴⁰Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam...*, hlm. 187

⁴¹Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam...*, hlm. 188

kecerdasan akal budi secara merata kepada seluruh rakyat, yang bersendi agama dan kebudayaan bangsa, untuk mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan masyarakat bangsa Indonesia seluruhnya. Pendidikan memiliki nilai yang strategis dan *urgan* dalam pembentukan suatu bangsa. Pendidikan juga berupaya untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa tersebut. Sebab lewat pendidikanlah akan diwariskan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Karena itu pendidikan tidak hanya berfungsi untuk *how to know* dan *how to do*, tetapi yang sangat penting adalah *how to be*. Agar supaya *how to be* terwujud, maka diperlukan transfer budaya dan kultur.⁴²

Sebagai realisasi dari program dari pemerintah tersebut, lahirlah UU Nomor 20 Tahun 2003 yang merupakan Undang-Undang yang mengatur penyelenggaraan satu sistem pendidikan Nasional sebagaimana dikehendaki UUD 1945. Melalui proses yang melelahkan, sejak Indonesia merdeka hingga tahun 1989 dengan kelahiran UU Nomor 2 Tahun 1989, dan kemudian disempurnakan menjadi UU Nomor 20 Tahun 2003, merupakan puncak dari usaha mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan Nasional⁴³

Tahun 2003 lahir Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional menggantikan UU Nomor 2 Tahun 1989. UU Nomor 20 Tahun 2003 mengamanahkan bahwa sistem pendidikan dilaksanakan secara semesta, menyeluruh dan terpadu: semesta dalam arti terbuka bagi seluruh rakyat dan berlaku di seluruh wilayah negara: menyeluruh dalam arti mencakup semua jalur, jenjang, jenis pendidikan dan terpadu.

Dengan demikian berarti UU Nomor 20 Tahun 2003 merupakan wadah formal terintegrasinya pendidikan Islam dalam sistem pendidikan Nasional, dan dengan adanya wadah tersebut,

⁴²Haidar Putra Daulay, *Dinamika Pendidikan Islam...*, hlm. 47

⁴³Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu...*, hlm. 173

pendidikan Islam mendapatkan peluang serta kesempatan untuk terus dikembangkan.⁴⁴

Pendidikan Nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tentang perubahan zaman. Dalam Undang-Undang ini juga disebutkan bahwa pendidikan agama adalah hak peserta didik. Dalam kegiatan penjelasan diterangkan pula bahwa pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.

Inti dari hakikat nilai-nilai Islam dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 itu adalah nilai yang membawa kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk (sesuai konsep *rahmatan lil 'alamin*), demokratis, egalitarian dan humanis.

Di antara nilai-nilai tersebut adalah:

- a) Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan Nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
- b) Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

⁴⁴Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu...*, hlm. 17

- c) Pendidikan Nasional bersifat demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif
- d) Memberikan perhatian kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional mental sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- e) Menekankan pentingnya pendidikan keluarga yang merupakan salah satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan seumur hidup.
- f) Pendidikan merupakan kewajiban bersama antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah⁴⁵

Menerjemahkan fungsi pendidikan sebagaimana tercantum dalam UU Nomor Tahun 2003, maka langkah awal yang dilakukan pemerintah adalah menetapkan standar nasional pencapaian pendidikan. Dengan standar tersebut akan diketahui hal-hal yang harus dicapai oleh layanan pendidikan.

Untuk mendukung tercapainya Standar Nasional Pendidikan dibentuk sebuah badan yang disebut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), yaitu sebuah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, mengatur pelaksanaan, dan mengevaluasi Standar Nasional Pendidikan. Oleh karena itu badan ini bersifat mandiri dan profesional.

Dalam menjalankan tugasnya, BSNP mempunyai kewenangan untuk: (1) mengembangkan Standar Nasional Pendidikan; (2) menyelenggarakan ujian nasional; (3) memberikan rekomendasi kepada pemerintah Propinsi dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan; dan (4) merumuskan kriteria lulusan dari satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

⁴⁵Haidar Putra Daulay, *Dinamika Pendidikan Islam...*, hlm. 52

Evaluasi Standar Nasional Pendidikan yang dikerjakan oleh BNSP meliputi kinerja pendidikan yang dilakukan oleh semua satuan pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) penyelenggaraan pendidikan, kinerja pendidikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dan evaluasi oleh lembaga evaluasi mandiri yang dibentuk oleh masyarakat atau organisasi profesi untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan.⁴⁶

Evaluasi kinerja pendidikan dilakukan oleh satuan pendidikan, meliputi sekurang-kurangnya: tingkat kehadiran peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kegiatan ekstra kurikuler, hasil belajar peserta didik dan realisasi anggaran.

Evaluasi kinerja pendidikan oleh pemerintah dilakukan oleh Menteri terhadap pengelolaan, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Evaluasi kinerja pendidikan oleh pemerintah daerah dilakukan terhadap pengelolaan satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, pada pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal termasuk pendidikan anak usia dini secara berkala.

Berdasarkan ragam dan sarannya, pencapaian mutu pendidikan dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

1. Akreditasi

Akreditasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan berdasarkan kriteria yang bersifat terbuka. Kriteria tersebut dapat berbentuk standar yang menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana,

⁴⁶Sukardjo Dan Ukim Komaruddin, *Landasan Pendidikan, Konsep Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 85

standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.⁴⁷

Dalam operasionalnya, akreditasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh suatu badan yang disebut Badan Akreditasi Nasional (BAN) Untuk mengakreditasi atau menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan. Akreditasi dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara objektif, adil, transparan dan komprehensif oleh satuan pendidikan kepada publik.

Untuk melakukan akreditasi agar penyelenggaraan pendidikan pada semua lingkup mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, pemerintah membentuk BAN yang namanya dibedakan menurut satuan, jalur, dan jenjang pendidikan. Program atau satuan pendidikan pada jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SD/MI) yang pada tingkat propinsi dibentuk oleh gubernur. Sementara program atau satuan pendidikan jalur nonformal diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN PNF), sedangkan pada program dan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Khusus akreditasi di Perguruan Tinggi tidak membedakan negeri dan swasta. Pengertian akreditasi dalam dunia Pendidikan Tinggi adalah pengakuan atas suatu lembaga pendidikan yang menjamin standar minimal, sehingga lulusannya memenuhi kualifikasi untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau memasuki pendidikan spesialisasi, atau untuk dapat menjalankan praktik profesinya.

Akreditasi Perguruan Tinggi yang diterapkan dalam sistem pendidikan Nasional dimaksudkan untuk menilai penyelenggaraan pendidikan tinggi. Penilaian ini diarahkan pada tujuan ganda, yaitu;

a. Menginformasikan kinerja perguruan tinggi kepada masyarakat; dan

b. Mengemukakan langkah pembinaan yang perlu ditempuh terutama oleh perguruan tinggi dan pemerintah, serta partisipasi masyarakat.⁴⁸

Peringkat pengakuan yang diberikan oleh pemerintah pada perguruan tinggi didasarkan atas hasil akreditasi perguruan tinggi yang dilakukan BAN-PT, dengan melakukan akreditasi yang meliputi akreditasi lembaga dan akreditasi program studi.⁴⁹

2. Sertifikat

Sertifikat adalah merupakan suatu pernyataan tentang kualifikasi seseorang atau barang. Dalam kaitan ini, sertifikat pendidik adalah suatu pernyataan yang menunjukkan seseorang benar-benar memiliki kualifikasi seorang pendidik, atau kualifikasi guru profesional.

a. Kualifikasi akademik guru melalui pendidikan formal

Kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur formal mencakup kualifikasi akademik guru pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal (PAUD/TK/RA), guru Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), guru Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (MTs), guru Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), guru Sekolah Dasar Luar Biasa/Sekolah Menengah Luar Biasa/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SDLB/SMPLB/SMALB), dan Guru Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK), sebagai berikut:

1). Kualifikasi Akademik Guru PAUD/TK/RA

Guru pada PAUD/TK/RA harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D IV) sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

⁴⁷Sukardjo Dan Ukim Komaruddin, *Landasan Pendidikan...*, hlm. 86

⁴⁸Sukardjo Dan Ukim Komaruddin, *Landasan Pendidikan...*, hlm. 87

⁴⁹Sukardjo Dan Ukim Komaruddin, *Landasan Pendidikan...*, hlm. 88

2).Kualifikasi Akademik Guru SD/MI

Guru pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (SI) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.⁵⁰

3).Kualifikasi Akademik Guru SMP/MTs

Guru pada SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) Program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

4).Kualifikasi Guru SMA/MA

Guru pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

5).Kualifikasi Akademik Guru SDLB/SMPLB/SMALB

Guru pada SDLB/SMPLB/SMALB, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) dan sarjana (SI) program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

6).Kualifikasi Akademik Guru SMK/MAK

Guru pada SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimal diploma empat (D-IV) sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

⁵⁰Sukardjo Dan Ukim Komaruddin, *Landasan Pendidikan...*, hlm. 90

b.Kualifikasi akademik guru melalui uji kelayakan dan kesetaraan

Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi dapat diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi seseorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya.⁵¹

Apabila akreditasi diarahkan sebagai upaya menilai atau mengukur mutu suatu lembaga, maka sertifikasi merupakan upaya mengukur atau menilai kualitas pendidik. Hal ini dilakukan mengingat standar kualifikasi akademik sendiri dapat dimaknai tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Penjaminan Mutu Pendidikan

Tidak ada pola baku yang harus diikuti dalam upaya penjaminan mutu pendidikan. Tetapi bukan berarti upaya peningkatan mutu menjadi tidak memiliki bentuknya. Hal inilah yang menjadi perhatian utama bagi setiap pimpinan institusi pendidikan dalam peningkatan kualitas manajemen dan lulusannya.

Salah satu upaya untuk itu adalah dengan mengembangkan Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) di institusi pendidikan itu sendiri. Dengan Penjaminan Mutu ini, diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari: bagaimana menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi pelaksanaan standar, dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*).

Sistem Manajemen Mutu adalah suatu kerangka kerja yang dapat diandalkan untuk implementasi program mutu, mengukur/mengaudit kinerja organisasi dan untuk perbaikan mutu

⁵¹Sukardjo Dan Ukim Komaruddin, *Landasan Pendidikan...*, hlm. 91

tanpa akhir. Juga memadukan semua unsur yang dibutuhkan organisasi untuk memperbaiki kepuasan pelanggan melalui produk, jasa, dan proses yang lebih baik.

Strategi Penjamin Mutu yang harus diambil oleh setiap Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi menggalang komitmen menjalankan penjaminan mutu Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi memilih dan menetapkan sendiri standar mutunya, Perguruan Tinggi menetapkan dan menjalankan organisasi dan mekanisme kerja penjamin mutu Pendidikan Tinggi, dan Perguruan Tinggi melakukan *benchmarking* mutu pendidikan secara berkelanjutan, baik di dalam maupun ke luar.⁵²

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 dan PP Nomor 25 Tahun 2000, yang berlaku sejak tahun 2001, merupakan realitas implementasi berlakunya otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah, termasuk kewenangan di bidang pendidikan dan kebudayaan antara pemerintah pusat propinsi dan kabupaten. Di bidang pendidikan UU tersebut tentunya memberikan angin segar kepada pemerintah di tingkat kabupaten/kota, untuk menjadikan kabupatennya makmur. Di bidang pendidikan tentunya ini merupakan tuntutan mutu bagi pendidikan di daerah masing-masing, dimana pemerintah pusat bertanggung jawab dalam pengembangan kebijakan dan rencana strategis, pengawasan kualitas, dan koordinasi perencanaan program pendidikan tingkat Nasional, sedangkan pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk mengembangkan, melaksanakan dan mengendalikan program/kegiatan pendidikan dalam kerangka kebijakan Nasional⁵³

Tuntutan otonomi daerah dan otonomi pendidikan, intinya adalah bagaimana pemerintah kabupaten/kota mampu mengelola daerahnya demi kemakmuran rakyatnya dan mampu meningkatkan

⁵²Sukardjo Dan Ukim Komaruddin, *Landasan Pendidikan...*, hlm. 93

⁵³Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 76

mutu pendidikan yang selama ini sebagian besar *stagnan* dan mengalami kejenuhan, akibat pengelolaan yang sentralistik. Dibidang pendidikan peran yang dominan adalah bagaimana kepala sekolah mampu menggerakkan unsur-unsur yang ada dalam lembaganya, menciptakan kreativitas, ide-ide pembaharuan atau inovasi, baik sistem organisasinya, kurikulum, keuangan, kesiswaan, dan hubungan dengan masyarakat. Dengan demikian masing-masing lembaga pendidikan harus mampu mengadakan inovasi, yang biasanya dengan *top down*⁵⁴ (dipaket dari pusat) menjadi cara *bottom up*⁵⁵ (kreativitas dari bawah).

Strategi inovasi dari pusat *top down* sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah inovasi itu sendiri, yang cenderung memaksakan kehendak. Inovasi seperti ini misalnya sebagaimana yang diterapkan oleh Depdiknas selama beberapa dekade terakhir seperti CBSA, Guru Pamong, Sekolah Persiapan, Sistem Pengajaran Modul, Sistem Belajar Jarak Jauh, banyak tidak berhasil dan tidak bertahan lama sehingga hilang dengan sendirinya. Model inovasi demikian hanya bertahan dan berjalan dengan baik saat proyek berjalan.

Strategi inovasi *top down* ini kurang berhasil disebabkan penguasa memegang peranan yang sangat kuat dalam menerapkan ide-

⁵⁴Inovasi *top down* sengaja diciptakan oleh atasan sebagai usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan. Mutu pendidikan atau pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, ataupun sebagai usaha untuk meningkatkan efisiensi dan sebagainya. Strategi ini biasanya diterapkan kepada bawahan dengan cara mengajak, menganjurkan dan bahkan memaksakan apa yang menurut pencipta itu baik untuk kepentingan bawahannya. Dan bawahan tidak punya otoritas untuk menolak pelaksanaannya. Lihat Nur Zazin, *Kepemimpinan Manajemen & Konflik*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2010), hlm. 3

⁵⁵Model inovasi *bottom up* disebut juga dengan *empiric rational*, artinya memandang bahwa manusia mampu menggunakan pikiran logisnya atau akalinya sehingga mereka bertindak secara rasional. Dalam kaitan ini inovator bertugas mendemonstrasikan inovasinya dengan menggunakan metode yang terbaik, valid untuk memberikan manfaat bagi penggunaannya dengan pandangan yang optimistik. Lihat Subagio Atmowiro, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Ardadizya Jaya, 2000), hlm. 161

ide baru serta perubahan sesuai kehendak dan pikiran-pikiran dari pencipta inovasi. Biasanya pihak pelaksana tidak dilibatkan dalam proses perencanaan ataupun pelaksanaannya, biasanya pelaksana kurang diperhatikan dan kurang dilibatkan secara aktif.

Strategi inovasi *bottom up* kebalikan dari *top down*, merupakan inovasi yang diciptakan berdasar ide, pikiran, kreasi dan inisiatif dari sekolah, guru atau masyarakat pada umumnya yang dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan.⁵⁶

Tuntutan otonomi daerah yang salah satunya adalah peningkatan mutu pendidikan, secara otomatis menurut pengelola pendidikan, khususnya kepala sekolah /madrasah untuk berkreasi, menuangkan ide, inisiatif, agar bersama-sama mengadakan inovasi menuju peningkatan mutu. Karenanya sekarang para pemimpin khususnya pemimpin lembaga pendidikan dituntut mampu menangkap perubahan *top down* menjadi *bottom up* sehingga mampu memberikan warna perubahan (inovasi) pada lembaganya dan memberdayakannya guna meningkatkan mutu pendidikan Nasional dengan tidak menghilangkan tujuan madrasah/ sekolah itu sendiri.

Pemimpin-pemimpin pendidikan yang mampu melahirkan berbagai konsep pendidikan yang mampu mewartakan, mengadaptasikan perubahan sosial, ekonomi, teknologi sehingga mereka siap menghadapi kemungkinan akibat terjadinya perubahan-perubahan dalam era globalisasi.⁵⁷

Sisi lain kepemimpinan disekolah yang berfungsi sebagai seorang manajer pendidikan, dalam mengemban tugasnya dituntut mampu merespon keinginan *stake holder*, dalam menentukan dan mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Suksesnya seorang

⁵⁶Nur Zazin *Kepemimpinan Manajemen...*, hlm. 3

⁵⁷Subagio Atmowiro, *Manajemen Pendidikan...*, hlm. 161

pemimpin sangat dipengaruhi oleh keberhasilannya dalam mensinergikan seluruh potensi orang yang dipimpinnya.⁵⁸

Sejak tahun 1999, manajemen dituntut dimasukkan dalam dunia pendidikan yang sekarang dikenal dengan istilah Manajemen Berbasis Sekolah (*school Based Management*). Secara konseptual MBS dipahami sebagai salah satu alternatif pilihan formal untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan yang terdesentralisasi dengan menempatkan sekolah sebagai unit utama peningkatan. Konsep ini menempatkan redistribusi kewenangan para pembuat kebijakan sebagai elemen mendasar untuk meningkatkan kualitas hasil pendidikan.⁵⁹

Peningkatan mutu pendidikan melalui MBS diharapkan lembaga pendidikan mampu menggerakkan berbagai sumber daya yang ada meliputi ketenagaan, dana, sarana-prasarana termasuk informasi.⁶⁰

Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan dibidang pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara *kaffah* (menyeluruh). Pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional telah mencanangkan "Gerakan Peningkatan Mutu Pendidikan" pada tanggal 2 Mei 2002: dan lebih terfokus lagi, setelah diamanatkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

⁵⁸ Wibowo BS dkk, *Trustco Shoot, Kiat Praktis Manajemen Pengembangan SDM Untuk Pribadi* (Bandung: TIM Dan lembaga Dalam Meraih Sukses Dunia Dan Akhirat PT Syamil Cipta Media, 2000), hlm. 161

⁵⁹ Ibtisam Abu Dohuo, *School Based Management*, Alih Bahasa Nor Yamin, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002) hlm. 9

⁶⁰Nur Zazin *Kepemimpinan Manajemen...*, hlm. 29

Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi tanggung jawab pendidikan, terutama dalam mempersiapkan peserta didik menjadi subjek yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki karakter Islami yang tercermin lewat perilaku yang berakhlak mulia, tangguh, kreatif, mandiri, demokratis, dan profesional pada bidangnya masing-masing.⁶¹

Upaya-upaya tersebut telah lama dilakukan berbagai kalangan utamanya para pemikir dan praktisi pendidikan dengan berupaya memadukan antara pendidikan sistem pesantren dan sistem sekolah, yang kemudian memunculkan lembaga pendidikan dengan karakter terpadu. Lembaga sekolah terpadu sejak kemunculannya berupaya bersinkronisasi dengan kebijakan pendidikan Nasional, sehingga terbiasa dengan perubahan-perubahan dan inovasi. Masuknya pola-pola pesantren kedalam sistem sekolah terpadu berarti memelihara dan meneruskan tradisi yang berlaku di pesantren, tetapi juga mengembangkan pola-pola budaya baru agar mampu membantu peserta didik dan masyarakat untuk mengakomodasi perubahan yang sedang dan yang sudah terjadi.⁶²

Sejalan dengan hal tersebut, di Indonesia akhir-akhir ini menjadi isu yang sangat hangat sejak pendidikan karakter dicanangkan oleh pemerintah Susilo Bambang Yudoyono dalam peringatan hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei 2010. Tekad pemerintah untuk menjadikan pengembangan karakter dan budaya bangsa sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan Nasional.⁶³ Hal tersebut seperti yang tercermin dalam Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003:

⁶¹Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah*, (Jakarta: Proyek Pemberdayaan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pada Madrasah Dan PAI Pada Sekolah Umum Tingkat Dasar, 2003), hlm. 11

⁶² Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam, Dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum...*, hlm. 104

⁶³Nur Zazin *Kepemimpinan Manajemen...*, hlm. 8

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”⁶⁴.

Pasal tersebut membuktikan kesungguhan Pemerintah dalam upaya penyelenggaraan *good governance* dibidang pendidikan. Hal ini perlu lebih ditekankan, mengingat madrasah merupakan salah satu bentuk pendidikan di Indonesia yang memiliki peranan sangat penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia yang berakarakter Islami, tangguh, kreatif, beriman, dan bertaqwa, serta bertanggung jawab.

Dalam konteks tersebut, pendidikan di madrasah manajemen berbasis sekolah berarti “Manajemen Berbasis Madrasah”(MBM),⁶⁵ merupakan salah satu paradigma umum yang populer dalam perhatian, kebijakan serta pelaksanaan pemerintah yang baik (*good governance*) sebagai upaya desentralisasi, kolektivitas, dan partisipatif. Dengan diterbitkannya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.⁶⁶

Pada tataran rasionalitas, pemerintah telah melakukan upaya penyempurnaan sistem pendidikan. Jika sebelumnya manajemen

⁶⁴ Pemerintah Republik Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang...*, hlm. 5

⁶⁵Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, *Pedoman Manajemen Berbasis...*, hlm. 10

⁶⁶Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, *Pedoman Manajemen Berbasis...*, hlm. Iii

pendidikan merupakan wewenang pusat dengan paradigma *top down* atau sentralistik, maka dengan berlakunya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, maka kewenangan bergeser pada pemerintah daerah kota dan kabupaten dengan paradigma *bottom-up* atau desentralistik, dalam wujud pemberdayaan sekolah/madrasah.⁶⁷

Pada tataran konsep, MBM adalah suatu ide tentang pengambilan keputusan pendidikan yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yakni madrasah. Pemberdayaan madrasah dengan memberikan otonomi yang lebih besar, di samping menunjukkan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntutan masyarakat, juga merupakan sarana peningkatan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan.⁶⁸

Madrasah secara organisasional merupakan organisasi yang mengelola diri (*self organized*) untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan karakteristik. Pengelolaan madrasah dijalankan oleh para pemimpin madrasah dalam konteks ini kepala madrasah melalui sebuah manajemen operatif. Dan karena madrasah merupakan suatu sub sistem dalam makro sistem pendidikan Nasional, sehingga tanggungjawab pengeloalaannya dilimpahkan pada mikro sistem yaitu Kementerian Agama, maka pengelolaan diri madrasah secara individu tidak cukup untuk memberikan dampak perubahan yang signifikan dan luas bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Muslim Indonesia.

Untuk memberikan hasil yang signifikan dan luas bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Muslim, maka Kementerian Agama menerapkan manajemen dari dua pendekatan yaitu manajemen strategis dan manajemen operatif.

Manajemen strategis diarahkan pada pejabat-pejabat strategis yang menangani madrasah di Kementerian Agama. Oleh karenanya

⁶⁷Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, *Pedoman Manajemen Berbasis...*, hlm. 11

⁶⁸Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, *Pedoman Manajemen Berbasis...*, hlm. 13

manajemen ini hanya berurusan dengan persoalan strategis bukan teknis penyelenggaraan madrasah. Manajemen strategis diarahkan untuk mengembangkan lembaga pendidikan madrasah agar benar-benar berdaya guna menjadi sebuah agen perubahan kehidupan masyarakat muslim, terutama melalui peningkatan kualitas administratif penyelenggaraan pendidikan di madrasah, kualitas personalia atau ketenagaan, kualitas manajemen operatif madrasah serta kualitas pembelajaran dan lulusan madrasah.

Untuk mewujudkan itu semua maka Kementerian Agama memberikan kebijakan sebagai berikut:

-Pemerataan pendidikan wajib belajar 9 tahun.

-Peningkatan mutu pendidikan madrasah

-*Link and match* yaitu pendidikan di madrasah harus dipersepsi sebagai proses yang melibatkan banyak pihak dan karenanya harus dapat memenuhi banyak pihak seperti siswa, orang tua, masyarakat biasa, masyarakat industri dan masyarakat secara luas.

-Efektivitas dan efisiensi yaitu tercapainya tujuan-tujuan yang diharapkan dengan *cost* yang seminimal mungkin⁶⁹

⁶⁹Departemen Agama Republik Indonesia. *Manajemen Madrasah*, (Jakarta: Proyek EMIS Direktorat Jenderal Bimbingan Kelembagaan Agama Islam,2001), hlm. 1

PENUTUP

KESIMPULAN

Bersamaan dengan lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menggantikan UU Nomor 2 Tahun 1989, pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional mengagas kurikulum baru yang diberi nama *Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)* dan *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*.

Dari sisi landasan yuridis Satuan pendidikan Dasar Dan Menengah mengembangkan dan menetapkan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah sesuai kebutuhan satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan pada: (a.) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 sampai dengan pasal 38, (b.) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 5 sampai dengan Pasal 18, dan Pasal 25 sampai dengan Pasal 27, (c.) Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, (d.) Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah (Pasal 1 ayat 1 Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006).

Seiring dengan tuntutan mutu pendidikan, maka pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi Guru dan Dosen. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial.

Khusus tentang pendidikan Islam, Ada beberapa Pasal dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 yang menyinggung tentang hal tersebut.

Dalam aturan tersebut setidaknya ada tiga hal yang terkait dengan pendidikan Islam. *Pertama*, kelembagaan formal, nonformal, dan informal, didudukkannya lembaga madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan formal yang diakui keberadaannya setara dengan lembaga pendidikan sekolah. Dan dipertegas pula tentang kedudukannya sebagai sekolah yang berciri khas agama Islam, selanjutnya diakui majelis taklim sebagai lembaga pendidikan nonformal, serta dipertegas pula tentang pesantren sebagai lembaga pendidikan nonformal keagamaan. *Kedua*, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran. Dikokohkannya mata pelajaran agama sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan kepada peserta didik di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan. *Ketiga*, pendidikan Islam sebagai nilai, terdapat seperangkat nilai-nilai Islami dalam sistem pendidikan Nasional.

Dilihat dari sejarahnya setidaknya ada dua faktor penting yang melatarbelakangi kemunculan madrasah, yaitu: *pertama*, adanya pandangan yang mengatakan bahwa sistem pendidikan tradisional dirasakan kurang bisa memenuhi kebutuhan pragmatis masyarakat; *kedua*, adanya kekhawatiran atas cepatnya perkembangan persekolahan Belanda yang akan menimbulkan pemikiran sekular di masyarakat. Untuk menyeimbangkan perkembangan sekularisme, maka masyarakat Muslim-terutama para *reformist*-berusaha melakukan reformasi melalui upaya pengembangan pendidikan dan pemberdayaan madrasah.

DAFTAR PUSTAKA

- Atnowiro, Subagio. *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Ardadizya Jaya, 2000.
- Abu Dohuo, Ibtisam. *School Based Management*, Alih Bahasa Nor Yamin, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Manajemen Madrasah*, Jakarta: Proyek EMIS Direktorat Jenderal Bimbingan Kelembagaan Agama Islam, 2001.

Departemen Agama RI. *Nama Dan Data Potensi Pondok Pesantren Seluruh Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985.

Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah*, Jakarta: Proyek Pemberdayaan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pada Madrasah Dan PAI Pada Sekolah Umum Tingkat Dasar, 2003.

Hasbullah. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2009.

Kunandar. *Kurikulum Berbasis Kompetensi Dan Peningkatan Mutu Pendidikan Di Indonesia*, Jakarta: Buletin LPMP DKI Jakarta, Nomor 3 Mei 2005, Volume 2.

----- *Guru Profesional , Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2000.

Pemerintah Republik Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS*, Bandung: Citra Umbara, 2006.

Muhaimin. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*, Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2007.

----- *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

----- *Rekonstruksi Pendidikan Islam, Dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum Hingga Strategi Pembelajaran*, Jakarta: RadjaGrafindo, 2009.

Nuryanis Dan Romli, *Pendidikan Luar Sekolah, Kontribusi Ditpenamas Dalam Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional*, Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003.

Sukardjo Dan Ukim Komaruddin. *Landasan Pendidikan, Konsep Dan Aplikasinya*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Rembangy, Musthofa. *Pendidikan Transformatif, Pergulatan Kritik Merumuskan Pendidikan Di Tengah Pusaran Arus Globalisasi*, Yogyakarta: Teras, 2008.

Wibowo BS dkk. *Trustco Shoot, Kiat Praktis Manajemen Pengembangan SDM Untuk Pribadi Bandung: TIM Dan lembaga Dalam Meraih Sukses Dunia Dan Akherat* PT Syamil Cipta Media, 2000.

Zazin, Nur. *Kepemimpinan Manajemen & Konflik*, Yogyakarta: Absolute Media, 2010.

BAB X
PENDIDIKAN DI BAWAH ORGANISASI AL-WASLIYAH
DAN JAMI'ATUL KHAIR

Oleh : Hasni Noor

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu perhatian sentral masyarakat Islam baik dalam negara mayoritas maupun minoritas. Dalam ajaran agama Islam pendidikan mendapat posisi yang sangat penting dan tinggi, karenanya umat Islam selalu mempunyai perhatian yang tinggi terhadap pelaksanaan pendidikan untuk kepentingan masa depan umat Islam.¹

Mulai tahun 1931, lembaga pendidikan Islam Indonesia memasuki warna baru dengan dimulainya modernisasi pendidikan Islam di Indonesia. Lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan sebelumnya baru berinteraksi dengan orang-orang Timur-Tengah baik yang datang ke Indonesia untuk menyebarkan Islam maupun orang-orang Indonesia yang menuntut ilmu ke Makkah.²

Kesadaran bangsa Indonesia tentang pentingnya pendidikan ditandai dengan upaya-upaya mereka dalam bidang pendidikan baik melalui organisasi maupun perorangan.³ Dengan berakhirnya perang Dunia I pada tahun 1918, tidak sedikit membawa perubahan ke seluruh dunia, termasuk dunia Islam yang sebagian besarnya berada dalam keadaan dijajah oleh Eropa. Indonesia sebagai daerah jajahan Belanda, yang sebagian besar rakyatnya beragama Islam, semakin gencar mengobarkan gejolak dan menuntut kemerdekaan bangsa dan tanah airnya, sehingga tidak mengherankan kalau pada saat itu bermunculan gerakan-

¹Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 142

²Abud din Nata, *Sejarah Pendidikan Islam pada Periode Klasik dan Pertengahan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 197.

³Mansur dan Mahfud Junaedi, *Rekonstruksi Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), h.65

gerakan kemerdekaan yang pertama kali dipelopori oleh umat Islam seperti Jami'atul Khair (1905), Sarekat Dagang Islam (1905) yang kemudian berubah nama menjadi Serikat Islam (1906), Budi Utomo (1908), Muhammadiyah (1912), Nahdhatul Ulama (1926), Al-Jam'iyatul Washliyah (1930), dan lain-lain.

Dalam makalah ini, penulis hanya akan menampilkan dua organisasi Islam yang turut berpartisipasi dalam proses pembaharuan pendidikan di Indonesia, yakni Jami'atul Khair dan Al-Washliyah.

B. Sejarah Organisasi Jami'atul Khair dan Al-Washliyah

Lahirnya beberapa organisasi Islam di Indonesia lebih banyak karena didorong oleh mulai tumbuhnya sikap patriotisme dan rasa nasionalisme serta sebagai respons terhadap kepincangan-kepincangan yang ada di kalangan masyarakat Indonesia pada akhir abad ke 19 yang mengalami kemunduran total sebagai akibat eksploitasi politik pemerintah kolonial Belanda. Langkah pertama diwujudkan dalam bentuk kesadaran berorganisasi. Walaupun banyak cara yang dilakukan oleh Belanda dengan tujuan untuk membendung pergolakan rakyat Indonesia, terutama melalui media pendidikan Islam⁴, namun mereka tidak membawa hasil yang memuaskan, malahan berakibat sebaliknya makin menumbuhkan kesadaran tokoh-tokoh organisasi Islam bagaimana untuk melawan penjajah Belanda itu sendiri, dengan cara menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan rasa nasionalisme di kalangan rakyat melalui pendidikan. Dengan sendirinya kesadaran berorganisasi yang dijiwai oleh perasaan nasionalisme yang tinggi, menimbulkan perkembangan

⁴Pendidikan Islam pada awalnya mengacu kepada konsep *tafaqquh fiddin*, seperti anjuran QS Al-Taubah (9): 123, "agar ada dari tiap golongan di antara orang mukmin untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya" Berdasarkan perintah *tafaqquh fiddin* ini, maka pada awal perkembangannya pendidikan Islam memfokuskan kurikulum ilmu-ilmu keislaman, seperti ilmu tafsir, ilmu hadits, kalam, tasawuf, fikih dan ilmu tata bahasa Arab.

dan era baru di lapangan pendidikan dan pengajaran. Dengan demikian lahirlah Perguruan-perguruan Nasional, yang ditopang oleh usaha-usaha swasta (partikelir).

Al-Jami'at al-Khairiyah, yang lebih dikenal dengan nama Jami'at Khair didirikan pada tanggal 17 Juli 1905. Anggotanya terdiri dari mayoritas orang-orang Arab.⁵ Dua program utamanya adalah pendirian dan pembinaan sekolah tingkat dasar, dan pengiriman anak-anak muda ke Turki untuk melanjutkan pelajaran. Bidang kedua ini terhambat karena kekurangan dana dan kemunduran khilafah.

Jami'at Khair mendirikan sekolah dasar pada tahun 1905. Sekolah dasar ini bukanlah merupakan sekolah yang bersifat agama, namun bersifat umum. Di dalamnya diajarkan mata pelajaran berhitung, sejarah dan ilmu bumi. Sedangkan bahasa pengantarnya adalah bahasa Melayu, ditambah dengan bahasa Inggris sebagai bahan pelajaran wajib, menggantikan bahasa Belanda (yang pada saat itu merupakan pelajaran wajib di sekolah-sekolah Belanda). Kurikulumnya disusun sedemikian rupa. Pelajaran diberikan dalam kelas yang telah terorganisir (sistem klasikal).⁶ Meskipun mayoritas anak-anaknya adalah keturunan Arab, anak-anak Indonesia non-Arab juga terdaftar disana.

Tampilnya Jami'atul Khair dalam gerakan pembaharuan pendidikan Islam terasa penting karena organisasi ini termasuk modern dalam anggaran dasar daftar anggota yang tercatat serta urusan rapat-rapat. Organisasi ini merupakan organisasi yang didirikan oleh orang yang bukan dari Belanda, akan tetapi seluruh kegiatannya diselenggarakan berdasarkan sistem Barat.⁷

⁵Hanun Asroah, *Sejarah Pendidikan Islam*, ... h. 160

⁶Sudarno Shobron, *Studi Kemuhmadiyah, Kajian Historis, Ideologi dan Organisasi*, (Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-ilmu Dasar (LPID), Unmuh Surakarta, 2006). H. 24

⁷Mansur dan Mahfud Junaedi, *Rekonstruksi Sejarah Pendidikan Islam ... h.*

Salah seorang guru yang paling terkenal adalah Syekh Ahmad Soerkatti dari Sudan. Dia tampil sebagai tokoh pemikiran-pemikiran baru dalam masyarakat Islam Indonesia. Salah satu pemikirannya adalah tidak adanya perbedaan di antara sesama muslim. Kedudukan muslim adalah sama. Keturunan, harta ataupun pangkat tidak menjadi penyebab adanya diskriminasi dalam Islam.

Pemikiran ini muncul setelah terjadi pertikaian di kalangan masyarakat Arab yang berkaitan dengan hak istimewa bagi kalangan sayyid⁸. Di antara yang diperdebatkan adalah larangan kawin bagi wanita sayyid dengan orang yang bukan keturunan sayyid. Bila bertemu dengan seorang sayyid, maka orang yang tidak dari keturunan sayyid, baik Arab atau orang Indonesia, harus mencium tangannya. Apabila tidak melakukannya, bisa menimbulkan pertikaian sehingga terjadi perpecahan di kalangan Jami'at Khair.⁹

Tampilnya Jami'at Khair dalam gerakan pembaruan pendidikan Islam terasa penting karena organisasi ini termasuk organisasi modern dalam masyarakat Islam waktu itu. Kemodernan organisasi ini terlihat dalam anggaran dasar, daftar anggota yang tercatat dan rapat-rapat.

Adapun Al-Washliyah merupakan organisasi Islam yang lahir pada 30 November 1930, bertepatan 9 Rajab 1349 H di kota Medan, Sumatera Utara. Al Jam'iyatul Washliyah yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Washliyah lahir ketika bangsa Indonesia masih dalam penjajahan Hindia Belanda (Nederlandsch Indie), sehingga para pendiri Al Washliyah ketika itu turut berperang melawan penjajah Belanda. Tidak sedikit para tokoh Al Washliyah yang ditangkap Belanda dan dijebloskan ke penjara hingga menjadi shahid demi mempertahankan agama dan negara.

⁸Gelar yang disandang bagi mereka yang mempunyai garis keturunan dengan Nabi Muhammad SAW.

⁹Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*, ... h. 161

Tujuan utama berdirinya organisasi Al Washliyah ketika itu sebagai sarana pemersatu umat yang berpecah belah dan berbeda pandangan. Perselisihan tersebut merupakan bagian dari strategi Belanda untuk terus berkuasa di bumi Indonesia, kemudian Organisasi Al Washliyah menggalang persatuan ummat untuk melawan penjajahan Belanda di muka bumi Indonesia hingga diraihnya kemerdekaan.

Penjajah Belanda yang menguasai bumi Indonesia terus berupaya agar bangsa Indonesia tidak bersatu, sehingga mereka terus mengadu domba rakyat. Segala cara dilakukan penjajah agar rakyat berpecah belah, karena bila rakyat Indonesia bersatu maka dikhawatirkan bisa melawan pejajah Belanda.

Upaya memecah belah rakyat terus merasuk hingga ke sendi-sendi agama Islam. Umat Islam kala itu dapat dipecah belah karena disibukkan dengan perbedaan pandangan dalam hal ibadah dan cabang dari agama (furu'iyah). Kondisi ini terus meruncing, hingga umat Islam terbagi menjadi dua kelompok yang disebut dengan kaum tua dan kaum muda. Perbedaan paham di bidang agama ini semakin hari semakin tajam hingga pada tingkat meresahkan.¹⁰

Perselisihan di kalangan umat Islam di Sumatera Utara khususnya kota Medan pada masa itu mendorong para pelajar yang menimba ilmu di Maktab Islamiyah Tapanuli Medan berupaya untuk mempersatukan kembali umat yang terpecah belah. Upaya mempersatukan umat Islam terus dilakukan dan akhirnya terbentuklah organisasi Al Jam'iyatul Washliyah sebagai sarana pemersatu sesuai dengan namanya "Perkumpulan yang menghubungkan". Maksudnya adalah menghubungkan manusia dengan Allah Swt. dan menghubungkan manusia dengan manusia (sesama umat Islam).

¹⁰Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam, Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah sampai Indonesia* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009), h. 321

Di samping sebagai gerakan kemerdekaan, Organisasi-organisasi tersebut juga bergerak di bidang sosial keagamaan dan pendidikan Islam. Salah satunya adalah mengantisipasi kebijakan politik pendidikan Hindia Belanda, yaitu upaya untuk menutup peluang pengembangan institusi dan sistem pendidikan Islam di Nusantara karena lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren dianggap sebagai "sarang pemberontak". Oleh karena itu, sejumlah organisasi sosial keagamaan, termasuk Al-Washliyah mulai "mengadopsi" sistem pendidikan Barat dalam bentuk nyata yaitu dengan mendirikan madrasah. Lembaga madrasah dipandang menganut sistem pendidikan modern yang mengajarkan materi pelajaran umum di samping materi pelajaran agama.¹¹ Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi pembaruan pendidikan Islam agar tidak tertinggal dan ditinggalkan oleh kemajuan peradaban dunia yang sangat pesat.

Meskipun muslim Indonesia berada dalam kondisi terjajah, mereka tetap memelihara hubungan baik dengan dunia Islam lainnya. Azyumardi Azra telah melakukan penelitian yang sangat sungguh-sungguh guna menjelaskan hubungan antara Timur Tengah dan Nusantara pada abad-abad ke-17 dan ke-18 dan berhasil mendemonstrasikan secara meyakinkan bahwa pembaruan keagamaan Islam di Indonesia berakar dari satu jaringan intelektual yang sangat rumit antara Nusantara dan Timur Tengah.¹²

Dalam era modern, Islam sudah sedemikian mengakar dalam masyarakat dan budaya Indonesia. Saling pengaruhi antara budaya dan kebiasaan lokal dengan ajaran Islam serta kebiasaan dari daerah-daerah Islam lainnya membentuk satu wajah muslim yang khas. Belakangan berbagai gerakan pembaruan di bidang

sosial keagamaan dan pendidikan Islam muncul di Indonesia, salah satunya adalah Al-Washliyah.

Al-Washliyah yang didirikan di Medan pada tahun 1930, belum mendapat perhatian yang semestinya dalam kajian-kajian sejarah Islam modern di Indonesia dibanding organisasi sosial keagamaan lain, semacam Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, atau Syarikat Islam. Secara sederhana hal tersebut bisa dilihat dari keterbatasan publikasi tentang organisasi ini, khususnya jika dibandingkan dengan publikasi mengenai organisasi lainnya. Padahal sedikitnya dari segi kuantitas, Al-Washliyah cukup signifikan, sehingga oleh Karel A. Steenbrink ditempatkan pada posisi ketiga setelah Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama.¹³

Berbicara sejarah berdirinya Al-Washliyah, tentunya didahului dengan catatan kecil tentang konfigurasi sosial, politik, dan demografis Sumatera Timur. Hal ini tidak lain karena eksistensi Al-Washliyah sendiri dan kegiatan-kegiatannya sering kali dirumuskan dalam konteks merespons keadaan yang berkaitan dengan fakta-fakta sosial, politik dan demografis tersebut.

Pembukaan perkebunan besar-besaran oleh Belanda di Sumatera Timur adalah awal bagi perubahan serius wajah daerah ini, khususnya dalam hal pertumbuhan dan diversifikasi penduduk. Kebutuhan akan pekerja mengharuskan pemerintah Kolonial mendatangkannya dari luar daerah, dengan pilihan utama pada etnis Cina dan Jawa. Keberadaan perkebunan ini mendorong tumbuhnya perekonomian yang pada gilirannya memancing perpindahan penduduk yang lebih banyak lagi. Di samping buruh perkebunan yang secara terencana didatangkan oleh Kolonial Belanda Pendatang ke tanah Deli ini terutama berasal dari daerah-daerah yang bertetangga, seperti Minangkabau, Mandailing, Karo, dan Aceh. Sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 1930-tahun berdirinya Al-Washliyah-menunjukkan bahwa 65,5% dari

¹¹ Jalaluddin, *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. xii.

¹² Azyumardi Azru, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 17.

¹³ Karel A. Steenbrink, "Kata Pengantar," dalam Chadijah Hasanuddin, *Al-Washliyah: Api Dalam Sekam*, (Bandung: Pustaka, 1988), h. vii.

penduduk Sumatera. Timur adalah pendatang, dengan etnis Jawa (35%) dan Cina (11,4%) menempati persentase tertinggi.¹⁴

Dari keterangan di atas dapatlah dipahami bahwa pada awal abad ke 20 di Sumatera Timur telah terbentuk satu masyarakat yang heterogen dengan belasan bangsa dan suku bangsa Belanda, Cina, Arab, India, Melayu, Jawa, Batak Toba, Karo, Mandailing, Pak Pak, Aceh, Minang, Sunda, dan lain-lain menggunakan berbagai bahasa, dan memeluk beragam agama.

Berdirinya Al-Washliyah juga dilatarbelakangi oleh kesadaran beberapa pelajar dan guru yang tergabung dalam perguruan Maktab Islamiah Tapanuli (MIT) untuk bersatu dalam menyalurkan ide dan pendapat.¹⁵ Pada tahun 1918, masyarakat Mandailing yang menetap di Medan berinisiatif mendirikan sebuah institusi pendidikan agama Islam, bernama Maktab Islamiyah Tapanuli (MIT). Mereka ini adalah pendatang dari daerah Tapanuli Selatan yang berbatasan langsung dengan tanah Minangkabau. Di samping dikenal sebagai komunitas yang kuat beragama Islam, suku Mandailing juga relatif berpendidikan lebih baik dari kelompok suku lainnya. Maktab tersebut signifikan dalam dua hal; pertama, ia adalah lembaga pendidikan Islam formal pertama di Medan; dan kedua, berdirinya Al-Washliyah adalah merupakan gagasan dari para alumni Maktab tersebut.¹⁶

Proses pendidikan di MIT ini mencoba menggabungkan, sistem tradisional dan modern. Dari satu sisi, materi yang diajarkan di MIT tidak jauh berbeda dari pesantren-pesantren tradisional, namun pengajaran sudah dilakukan secara klasikal dengan menggunakan media modern seperti bangku, papan tulis, dan sebagainya. Pendidikan di maktab ini sudah dibagi ke dalam tiga tingkatan: persiapan (tadjhizi), awal (ibtida'i), dan menengah

(tsanawi). Masih ada tingkatan tertinggi yang relatif lepas dari struktur tiga tingkatan di atas, karena kekhususan dan sedikitnya jumlah siswa yang mencapai tingkatan tersebut. Kelas ini diberi nama Kelas Azhar, di mana diterapkan sistem halaqah dengan duduk di lantai. Lembaga pendidikan Islam ini berkembang cukup baik pada tahun 1930-an, MIT telah mempunyai sekitar 1.000 orang siswa dari berbagai daerah sekitar Medan.¹⁷

Sepuluh tahun setelah berdirinya (1928), para alumni dan murid senior MIT mendirikan "Debating Dub" sebagai wadah untuk mendiskusikan pelajaran maupun persoalan-persoalan sosial keagamaan yang sedang berkembang di tengah masyarakat. Pendirian "Debating Dub" ini berkaitan dengan meluasnya diskusi-diskusi mengenai nasionalisme dan berbagai paham keagamaan yang terutama didorong oleh kaum pembaru.¹⁸ Heterogenitas penduduk daerah ini, maupun Medan sendiri sebagai kota terbesar, jelas merupakan lahan subur bagi tumbuhnya diskusi-diskusi, bahkan konflik, antar berbagai segmen masyarakat yang merespons perkembangan sesuai dengan kecenderungannya masing-masing.

Debating Dub tampaknya cukup berhasil dalam program-programnya dan dipandang sangat bermanfaat, sehingga ada keinginan di kalangan eksponennya untuk mencari kemungkinan peran yang lebih signifikan dalam perkembangan dan perubahan yang terus terjadi. Untuk tujuan ini, para anggota Debating Dub merasakan perlunya wadah organisasi yang lebih besar dari sekadar kelompok diskusi. Lalu upaya ke arah ini mulai dirintis, sehingga sebuah organisasi terwujud dan secara resmi berdiri pada 30 November 1930 bertepatan dengan 9 Rajab 1349 H yang

¹⁴Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam, Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah sampai Indonesia, ...* h. 322

¹⁵Chadjiah Hasan, *Kajian Perbandingan Pendidikan*, (Surabaya: Al-Ikhsan, 1995), h. 217.

¹⁶Hasan Asari, *Modernisasi Islam: Tokoh gagasan dan Gerakan*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2002). h. 234.

¹⁷Hasanuddin, Al-Washliyah, h. 17-19.

¹⁸Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, (Jakarta: LP3ES, 1986), h. 78-779. Muhammadiyah cabang Medan berdiri tahun 1927. Pada awalnya, Muhammadiyah menghadapi kondisi yang sangat sulit untuk berkembang di daerah ini, terutama karena demikian mengakarnya pemahaman tradisional yang didukung oleh Kesultanan Deli.

diberi nama Al Washliyah¹⁹ yang bermakna organisasi yang ingin memperhubungkan dan mempertalikan. Hal ini berkaitan dengan keinginan memelihara hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan sesama manusia, antar suku, antar bangsa, dan lain-lain. ²⁰ Nama organisasi ini diambil dari Al-Qur'an. ²¹ Demikianlah nama dari Al-Washliyah yang memancarkan cita-cita yang tinggi yang diharapkan menjadi roh bagi para simpatisannya.

Setelah resmi didirikan, maka ditetapkanlah pengurus Al-Washliyah yang berkedudukan di Medan, dengan susunan sebagai berikut: Isma'il Banda (Ketua I), A. Rahman Sjihab (Ketua II), M. Arsjad Thalib Lubis (Penulis I), Adnan Nur (Penulis II), H. M. Ya'kub (Bendahara), dan H. Syamsuddin, H. Jusuf Ahmad Lubis, H. A. Malik, A. Aziz Effendy (Pembantu-pembantu), serta Sjech H. Muhammad Junus (Penasihat).

Berdasarkan Keputusan Kongres (Muktamar) Al-Washliyah Ke X Tanggal 10 Maret s/d 14 Maret 1956 di Jakarta, disepakati bahwa kedudukan Pengurus Besar Al-Washliyah dipindahkan ke Pusat Pemerintahan (dalam hal ini Jakarta).²² Hal ini dimaksudkan agar lebih dekat dengan kekuasaan pemerintah dan memudahkan koordinasi dengan pengurus di tingkat wilayah seluruh Indonesia.

Menarik untuk dicatat bahwa berdirinya Al-Washliyah tidak tergantung pada seorang tokoh sentral karismatik sebagaimana halnya Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyah,

Hasyim Asy'ari dengan NU, atau Ahmad Soorkati dengan Al-Irsyad. Pendirian dan Pertumbuhan awal Al-Washliyah lebih merupakan hasil upaya bersama beberapa orang dengan peran dan keistimewaannya masing-masing. Syekh Muhammad Yunus adalah tokoh yang biasanya dianggap sebagai pendiri Al-Washliyah. Abdurrahman Syihab adalah tokoh lain yang mempunyai kemampuan tinggi dalam rekrutmen anggota; Arsyad Talib Lubis adalah ulama Al-Washliyah dengan ilmu dan pengetahuan agama Islam yang sangat mendalam; sementara Udin Syamsuddin adalah administrator dan ahli manajemennya. ²³ Kesemuanya dipersepsi sebagai orang-orang yang berperan penting dalam pendirian dan pengembangan organisasi ini. Di kalangan pendukungnya tidak dijumpai kecenderungan untuk menganggap salah satu pimpinannya sebagai tokoh sentral atas yang lainnya sehingga menumbuhkan karisma tertentu. Konsekuensinya, kepemimpinan Al-Washliyah mengalami pergantian secara regular. Dan ini, menurut Szeenbrink, menyebabkan ketidakjelasan posisi Al-Washliyah dalam dikotomi tradisional-modernis, ²⁴ sebab meskipun sebagai individu masing-masing mungkin memiliki kecenderungan pemahaman keagamaan tertentu, namun tidak sampai memberi warna terhadap Al-Washliyah sebagai organisasi. Meskipun demikian, secara organisatoris, Al-Washliyah merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang berakidah Islam dan bermazhab Syafi'i serta beriktikad ahli sunah waljama'ah.²⁵

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sesungguhnya Al-Washliyah merupakan organisasi sosial keagamaan yang bercorak tradisional, sama seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI). Dan kepemimpinan yang

¹⁹ Nama organisasi tersebut merupakan sumbangan Syekh Muhammad Yunus, guru kepala dan syekh senior MIT, yang secara khusus diminta menemukan nama yang cocok. Muhammad Yunus adalah seorang piru yang di kalangan MIT sendiri terkenal sangat tradisional. Riwayat hidupnya sangat singkat dapat dilihat dalam Hasanuddin, Al-Washliyah, h. 20-21.

²⁰ Steenbrink, Pesantren, h. 78

²¹ Lihat surat al-Raad Ayat 21: Artinva; "*Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.*"

²² Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996), h. 195.

²³ Untuk riwayat hidup singkat tokoh-tokoh ini, lihat Hasanuddin, Al-Washliyah, h. 20-22; 42-59.

²⁴ Steenbrink-, Pesantren ..., h. 80.

²⁵ H.M. Riwan Ibrahim Lubis, *Kepribadian Anggota dan Pengurus AL-WASHLIYAH*, (Jakarta : Pusat Pengembangan Sumber Daya & Dana Al-Washliyah, 1995). H. 6. Lihat juga Mahmud Yunus, *Sejarah*, 195.

bersifat kolektif tersebut menyebabkan Al-Washliyah tidak dapat berkembang secara pesat sebagaimana Muhammadiyah dan NU. Di samping itu, Al-Washliyah dipandang sebagai organisasi lokal yang berkedudukan di luar Jawa (baru pindah ke Jakarta setelah 28 tahun berdiri, yaitu pada tahun 1958).

Adapun fase perkembangan Al-Washliyah dapat dikelompokkan sebagai berikut: Pertama, fase berdirinya sampai menjelang kemerdekaan (1930-1942). Dalam fase ini kegiatan terpusat kepada pembinaan kader ulama dan pendidik. Kader-kader fase inilah yang melanjutkan usaha Al-Washliyah sekarang ini. Kedua fase fakum yaitu sewaktu masuknya penjajahan Jepang sampai kemerdekaan RI (1942-1947). Dalam fase ini kegiatan terarah kepada melawan/menumpas penjajahan. Kegiatan pendidikan berhenti dan beralih kepada kegiatan pembentukan Lasykar Allah yang tergabung dalam Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Hizbullah, Sabilillah, Tentara Pelajar, dan Dapur Umum. Kegiatan pena ulamannya menulis "Tuntunan Perang Sabit" oleh alm. H.M. Arsyad Thalib Lubis, dan "Dola ke Medan Perang" disusun oleh Pemuda Al-Washliyah. Ketiga, fase perjuangan politik (1947-1955), yaitu di mana Indonesia sedang menyusun negaranya dengan undang-undang dan kabinetnya. Kegiatan tertuju kepada menyukseskan pemilu I dan turut menyiapkan konsep bernegara di Lembaga Konstituante. Keempat, kembali fase pembinaan (1955-1965). Pembinaan organisasi dan pendidikan meluas ke seluruh tanah air Indonesia, pulau Jawa dan Kalimantan. Kelima, fase perluasan Missi Zending dan Penyiaran Islam (1965-1972). Pada fase ini, pelajar dan mahasiswa serta putra/putri dan pemuda Al-Washliyah, giat mengislamkan suku terasing di pegunungan Tanah Karo, Kabupaten Dairi Kepulauan Mentawai, dan Irian Jaya. Keenam, fase agak suram (1972-1983). Di mana keterlibatan anggota Al-Washliyah dalam partai politik memengaruhi akan kesegaran jalannya organisasi dan pendidikan Al-Washliyah. Program kerja Al-Washliyah yang disusun pada masa awal berdirinya mencakup: tabligh; tarbiyah;

Pustaka/penerbitan; fatwa; penyiaran; urusan anggota; dan tolong-menolong.²⁶

Tabligh Al-Washliyah ditujukan untuk memperbaiki pemahaman keagamaan umat Islam. Dari segi keluasan sasarannya, Al-Washliyah melaksanakan tabligh internal (bagi anggota saja) dan tabligh eksternal dengan audiens masyarakat secara umum. Lalu dikenal pula tabligh khusus bagi para wanita (sayap keputrian organisasi ini berdiri pada tahun 1935). Tabligh dilaksanakan dalam frekuensi yang berbeda-beda: harian, mingguan, bulanan, berdasarkan hari-hari besar Islam, atau insidental sama sekali. Tabligh pada saat-saat peringatan hari besar Islam biasanya memiliki kesan lebih meriah dibanding pada saat-saat lainnya. Para muballigh Al-Washliyah terkenal gigih berkeliling daerah melakukan dakwah menyampaikan ajaran Islam.

Di samping majelis-majelis tersebut, Al-Washliyah didukung oleh Badan Otonom Organisasi yang meliputi: muslimat Al-Washliyah (Organisasi Wanita), Gerakan Pemuda Al-Washliyah (Organisasi Pemuda), Angkatan Putri Al-Washliyah (Organisasi Putri), Ikatan Putra-Putri Al-Washliyah (Organisasi Remaja), dan Himpunan Mahasiswa Al-Washliyah (Organisasi Mahasiswa).

C. Peran dan Kiprah Jami'at Khair dan Al-Washliyah dalam Bidang Pendidikan

Jamiat Khair adalah sebuah organisasi sosial yang ditekankan bergerak di bidang pendidikan. Jamiat Khair pada awalnya bergerak di sekolah dasar. Sekolah dasar Jamiat Khair bukan semata-mata mempelajari pengetahuan agama tetapi juga mempelajari pengetahuan umum lainnya seperti lazimnya suatu sekolah dasar biasa, misalnya berhitung, sejarah kebudayaan Islam, ilmu bumi, bahasa Inggris dan sebagainya. Kurikulum sekolah dan jenjang kelas-kelas telah disusun dan terorganisir dan bahasa pengantar yang dipergunakan untuk

²⁶ Hasanuddin, Al-Washliyah, h. 36.

mengajar dan setiap harinya yaitu bahasa Indonesia dan bahasa melayu.

Untuk memenuhi tenaga guru yang berkualitas Jam'iat Khair mendatangkan guru-guru dari daerah sendiri ataupun daerah luar negeri, salah satunya yaitu Haji Muhammad Mansyur (1907) seorang guru dari Padang diminta untuk mengajar di sekolah Jam'iat Khair karena beliau berpengetahuan yang luas baik dalam bidang agama maupun bahasa terutama bahasa melayu.

Al-Hasyimi didatangkan dari Tunisia sekitar tahun 1911 yang di samping mengajar juga memperkenalkan gerakan kepanduan dan olah raga di lingkungan sekolah Jam'iat Khair. Pada bulan Desember 1923, didirikan gedung Jam'iat Khair di Tanah Abang yang mempunyai 8 lokal. Kemudian ditambah 2 lokal, sehingga menjadi 10 lokal. Jami'at Khair terdiri beberapa tingkat yaitu: a. Tingkat Tahdiriah Lamanya 1 tahun, Tingkat Ibtidaiyah Lamanya 6 tahun dan Tingkat Tsanawiyah Lamanya 3 tahun.

Mereka yang telah di anggap lulus dari Tsanawiyah dapat menyambung pelajarannya ke Mesir atau ke Mekah. Organisasi ini juga melakukan korespondensi dengan tokoh-tokoh pergerakan dan surat kabar luar negeri. Dengan demikian kabar-kabar mengenai kekejaman penjajah Belanda di Indonesia dapat sampai ke dunia luar, antara lain karena melalui Jamiatul Khair.

Snouck Hurgronje, seorang orientalis yang berperan besar dalam penaklukan Aceh, dengan terang-terangan bahkan menuding Jamiatul Khair membahayakan pemerintah Belanda. Melalui siswa-siswanya, Jamiatul Khair ikut berkontribusi dalam perjuangan membebaskan tanah air dari cengkeraman para penjajah serta melakukan syiar Islam ke seluruh nusantara.

Salah seorang guru yang terkenal adalah Syaikh Ahmad Sorkati dari Sudan. Dia tampil sebagai tokoh pemikiran-pemikiran baru dalam masyarakat Islam Indonesia. Salah satu pemikirannya adalah bahwa tidak adanya perbedaan di antara sesama muslim. Kedudukan muslim

adalah sama, baik keturunan, harta, ataupun pangkat beliau tidak menjadi penyebab adanya diskriminasi dalam Islam.²⁷

Organisasi Pembaharuan Islam ini berkantor di daerah Pekojan di Tanjung Priok (Jakarta). Oleh karena perkembangannya dari waktu ke waktu semakin pesat, maka pusat organisasi ini dipindahkan dari Pekojan ke Jl. Karet, Tanah Abang. Organisasi ini dikenal banyak melahirkan tokoh-tokoh Islam, terdiri dari tokoh-tokoh gerakan pembaharuan agama Islam antara lain, Kyai Haji Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah), HOS Tjokroaminoto (pendiri Syarikat Islam), H. Samanhudi (tokoh Sarekat Dagang Islam), dan H. Agus Salim. Bahkan beberapa tokoh perintis kemerdekaan juga merupakan anggota atau setidaknya mempunyai hubungan dekat dengan Jamiat Khair.

Jamiat Khair awalnya memusatkan usahanya pada pendidikan, namun kemudian memperluasnya dengan dakwah dan penerbitan surat kabar harian Utusan Hindia di bawah pimpinan Haji Umar Said Cokroaminoto. Kegiatan organisasi juga meluas dengan mendirikan Panti Asuhan Piatu Daarul Aitam. Di Tanah Abang, Habib Abu Bakar bersama sejumlah Alawiyyin juga mendirikan sekolah untuk putra (aulad) di Jl. Karet dan putri (banat) di Jl. Kebon Melati serta cabang Jamiatul Khair di Tanah Tinggi Senen.

Pemimpin-pemimpin Jamiatul Khair mempunyai hubungan yang luas dengan luar negeri, terutama negeri-negeri Islam seperti Mesir dan Turki. Mereka mendatangkan majalah-majalah dan surat-surat kabar yang dapat membangkitkan nasionalisme Indonesia, seperti Al-Mu'ayat, Al-Liwa, Al-ittihad, dan lainnya. Tahun 1903 Jamiatul Khair mengajukan permohonan untuk diakui sebagai sebuah organisasi atau perkumpulan dan tahun 1905 permohonan itu dikabulkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan catatan tidak boleh membuka cabang-cabangnya di luar di Batavia.²⁸

²⁷Sudarno Shobron, *Studi Kemuhammadiyah, Kajian Historis, Ideologi dan Organisasi*, ... h. 24

²⁸Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), h. 48

Sementara itu, dalam catatan sejarah Pembaruan Islam Di Indonesia, Al-Washliyah tidak hanya berhasil berkiprah di bidang sosial keagamaan dan dakwah, tetapi juga di bidang pendirian dan pengembangan pendidikan Islam dan penerbitan sebagai upaya ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya umat Islam.

Lembaga pendidikan pertama sebagai basis kerja Majelis Tarbiyah baru berdiri pada tahun 1932, di daerah Petisah, Medan. Maktab Djamkotoel Washliah, demikian nama lembaga ini, sudah ditata dengan sistem klasikal; dan dari kurikulumnya terlihat adanya orientasi kepada pendidikan modern. Penyebarluasan informasi tentang pembukaan sekolah ini juga sudah menggunakan cara modern yakni dengan membuat selebaran yang berisi tujuan, tingkatan, seleksi masuk, dan materi pengajaran secara garis besar.

Pengelolaan sekolah yang dilakukan oleh Al-Washliyah tampaknya sangat berhasil, dan mengundang kekaguman para pengelola sekolah yang lain di Medan. Pada tahun 1932 dan 1933, tujuh sekolah yang semula dikelola secara perorangan atau masyarakat bergabung dan menyerahkan pengelolaannya kepada Al-Washliyah. Terbukti di bawah organisasi ini, sekolah, paling tidak dari sudut jumlah sekolah tersebut mengalami kemajuan pesat, mengenai siswa dan kerapian manajemen pengelolaannya. Hal lain pendidikan Al-Washliyah adalah sifatnya yang sentralistis. Sentralisme yang sering dikritik secara berlebihan ini memiliki plus-minus. Di satu sisi, kebijakan ini memungkinkan keseragaman dan kontrol yang teratur; persoalan di satu tempat dengan segera bisa direspons. Namun di sisi lain, penerapan sistem sentralisme yang keliru sangat bisa masalah menghambat inisiatif perkembangan. Hal ini kemudian sering menjadi keluhan dari cabang-cabang organisasi yang merasakan ide-ide pengembangan yang timbul dari bawah kurang terakomodasi atau terlambat sama sekali, karena bahkan dalam persoalan kecil pun harus melibatkan pusat organisasi. Dalam jangka panjang, ini bisa menjadi penyebab tumpulnya inisiatif yang kemudian menjadi penghambat perkembangannya sendiri.

Dalam upayanya memajukan pendidikan, Al-Washliyah kelihatannya bersikap terbuka dan mengambil dari mana saja yang dianggap lebih berpengalaman dan berhasil dalam pengelolaan pendidikan. Pada tahun 1934, Al-Washliyah mengirim tiga orang pengurusnya. M. Arsyad Thalib Lubis, Udin Syamsuddin, dan Nukman Sulaeman untuk mengadakan studi banding ke Sekolah Adabiyah, Noormal School dan Diniyah di Sumatera Barat dalam rangka reformasi pengelolaan pendidikan Al-Washliyah sendiri. Meskipun mendapat reaksi negatif dari sebagian anggota, 29 kunjungan tersebut dianggap sangat penting dan hasil-hasilnya kemudian menjadi bahan diskusi dalam konferensi guru-guru Madrasah Al-Washliyah, masih pada tahun yang sama. Di antara langkah yang diambil setelah konferensi tersebut adalah: pendirian sekolah-sekolah umum berbasiskan agama, pengajaran bahasa Belanda, penataan kalender pengajaran, pembentukan lembaga Inspektur dan Penilik pendidikan. Melihat kemajuan penerbitan buku-buku agama Islam di Sumatera Barat, seorang utusan dikirim ke Bukit tinggi khusus untuk membeli buku-buku keperluan sekolah Al-Washliyah.³⁰

Dengan prinsip keterbukaannya, Al-Washliyah membuat kemajuan di bidang pendidikan. Pada tahun 1938, Al-Washliyah sudah mengelola madrasah tingkat Aliyah (Qismul Ali) dan juga madrasah pendidikan guru.

Di sektor pendidikan umum, dibuka pula HIS berbahasa Belanda di Porsea dan Medan dengan menambahkan pelajaran agama Islam pada kurikulumnya. Pada kongres III tahun 1941, Al-Washliyah dilaporkan mengelola 242 sekolah dengan jumlah siswa lebih dari 12.000 orang. Sekolah-sekolah ini terdiri atas berbagai jenis: Tahjiziyah, Ibtidaiyah,

²⁹ Reaksi ini muncul terutama karena daerah Minangkabau dipersepsi sebagai daerah basis kelompok modernis. Sebagian anggota Al-Washliyah merasa keberatan untuk mencontoh sekolah-sekolah modernis Minangkabau. Pada umumnya respons negatif ini datang dari kalangan awam. Secara organisasi, Al-Washliyah mengambil kebijakan terbuka untuk belajar dari mana saja.

³⁰ Hasanuddin, Al-Washliyah, h. 77-78.

Tsanawiyah, Qismul Ali (Aliyah), Muallimin, Muallimat, Volkschool, Vervolgschol H.I.S., dan Schakel school.

Berdasarkan Pedoman Umum Pelaksanaan Pendidikan majelis Pendidikan dan Kebudayaan Pengurus Besar Al-Washliyah Pasal 9 dijelaskan bahwa jenis madrasah/peguruan Al-Washliyah meliputi: (1) Madrasah Ibtidaiyah/Tsanawiyah, i dan yang sederajat; (2) Pesantren Ibtidaiyah/Tsanawiyah, Al-Qismul Ali dan yang sederajat; (3) Sekolah TK, SD, SMTP, SMTA; dan (4) SMTP, SMTA yang diasramakan. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pendidikan yang dianut oleh Al-Washliyah bersifat variatif dan tidak hanya lembaga pendidikan yang bersifat keagamaan saja seperti madrasah, tetapi juga sekolah yang identik dengan lembaga pendidikan umum.

Adapun tingkatan madrasah-madrasah Al-Washliyah, lama belajar dan Persentase kurikulumnya adalah sebagai berikut:

1. Tingkatan Tjhezayah dengan lama belajar 2 tahun, diperuntukkan bagi anak-anak yang belum pandai membaca dan menulis Al-Qur'an. Materi pelajarannya adalah membaca menulis Al-Qur'an (tulisan Arab yang berbaris), serta ibadah sembahyang dan praktik ibadah lainnya.
2. Tingkatan Ibtidaiyyah yang merupakan lanjutan dari Tjhezayah dengan lama belajar 4 tahun bagian pagi dan 6 tahun bagian sore. Materi pelajarannya berkisar 70% ilmu agama dan 30% ilmu umum. Di antara kitab-kitab yang digunakan antara lain *Durusul Lughah al-Arabiyah* (Mahmud Yunus), *Al-jurumiyah*, *Matan Bina*, *Hidayatul Mustafid*, dan lain-lain.
3. Tingkatan Tsanawiyah yang merupakan lanjutan dan Ibtidaiyyah dengan lama belajar 3 tahun. Materi pelajarannya berkisar 70% ilmu agama dan 30% ilmu umum. Di antara kitab-kitab yang digunakan antara lain *Tafsir Jalalain Al-Luma*, *Jawahirul Balaghah*, *Ilmu Mantiq*, dan lain-lain.
4. Tingkatan *Qismul'Ali* yang merupakan lanjutan dari Tsanawiyah dengan lama belajar 3 tahun. Materi pelajarannya berkisar 70% ilmu agama dan 30% ilmu umum. Di antara kitab-kitab yang

digunakan antara lain *Tafsir Baidhawi Al-Mahalli*, *Jamul Jawami*, *Asybah wan Nazair*, dan lain-lain.

5. Tingkatan *Takhassus* yang merupakan lanjutan dari *Qismul Ali* dengan lama belajar 2 tahun. Materi pelajarannya adalah khusus memperdalam ilmu acrama dan keahlian tertentu.
6. Di beberapa tempat didirikan Sekolah Guru Islam (SGI) untuk mempersiapkan guru-guru yang cakap mengajar pada tingkatan Ibtidaiyah dan sekolah-sekolah S.R. umum. Yang diterima menjadi murid adalah tamatan Ibtidaiyyah. Materi pelajarannya berkisar 50% ilmu agama dan 50% ilmu umum.³¹

Selain mendirikan madrasah, Al-Washliyah juga mendirikan sekolah umum, antara lain:

1. Sekolah Rakyat (SR) Al-Washliyah dengan lama belajar 6 tahun. Materi pelajarannya 70% ilmu umum dan 30% ilmu agama. Pelajaran umumnya setingkat dengan S.R. Negeri.
2. SMP Al-Washliyah dengan lama belajar 3 tahun. Materi pelajarannya 70% ilmu umum dan 30% ilmu agama. Pelajaran umumnya setingkat dengan SMP Negeri.
3. SMA Al-Washliyah dengan lama belajar 3 tahun. Materi pelajarannya 70% ilmu umum dan 30% ilmu agama. Pelajaran umumnya setingkat dengan S.M.A. Negeri.

Kemudian pada tahun 1958, Al-Washliyah telah mendirikan Perguruan Tinggi Agama Islam di Medan dan di Jakarta. Dari keterangan di atas, dapatlah dipahami bahwa dalam bidang pendidikan Islam, Al-Washliyah bercorak modernis karena di antara sekian banyak lembaga pendidikan yang didirikan, tidak terdapat pesantren yang merupakan lembaga pendidikan Islam yang bercorak tradisional. Hal ini tentu saja menjadi keunikan tersendiri bagi Al-Washliyah, meskipun secara paham keagamaan dikenal bercorak tradisional.

Upaya Majelis *Studies Fonds* mengumpulkan dana beasiswa, kelihatannya, tidak terlalu sukses. Tetapi setidaknya pada tahun 1936, Al-Washliyah mengirim Ismail Banda dan Baharuddin Ali untuk studi

³¹ Mahmud Yunus, *Sejarah*, h. 196-197.

di Universitas Al-Azhar, Kairo, dengan beasiswa. Baharuddin Ali berhasil mencapai diploma Ahliyah sementara Ismail Banda berhasil menyelesaikan diploma Ahliyah, 'Alimiyah dan juga memperoleh diploma dari Fakultas Ushuluddin Al-Azhar. Ismail Banda diklaim sebagai orang Indonesia pertama yang memperoleh ijazah dari Fakultas tersebut.³²

Sementara itu, Majelis Penerbitan mulai menerbitkan majalah Medan Islam sejak tahun 1933 dengan tiras mencapai 12.500 eksemplar dan menjadi 14.980 eksemplar di tahun 1940. Majalah lain terbitan organisasi ini adalah Dewan Islam dan *Raudhatul Mu'allimin*. Secara kumulatif, hingga kongresnya yang ke-3 (1941) telah diterbitkan sejumlah 142.000 eksemplar majalah sebagai media propaganda organisasi ini. Dari beberapa sample yang berhasil penulis baca, terbitan-terbitan tersebut sangat berwarna propogandis, meskipun juga menunjukkan kesediaan berpolemik yang cukup tinggi. Keadaan ini tampaknya harus dikembalikan kepada posisinya sebagai corong organisasi dan iklim heterogen dan persaingan antargolongan yang memang cukup hangat pada zaman itu. Majelis ini juga aktif menerbitkan buku-buku pelajaran agama yang sengaja ditulis dalam bahasa daerah Batak Toba dan Batak Karo untuk kemudian didistribusikan secara cuma-cuma kepada ribuan orang yang berhasil diislamkan. Kongres ke-3 mencatat bahwa jumlah buku yang sudah didistribusikan mencapai 6.000 eksemplar.

Determinasi organisasi ini tentang perlunya penerbitan terlihat misalnya ketika pada Kongres II Al-Washliyah, Oktober 1938, penerbitan Dewan Islam terpaksa digabungkan kepada edisi November 1938, maka pengelolanya secara khusus menurunkan permintaan maaf kepada pembacanya dengan menekankan bahwa penggabungan tersebut berdasarkan alasan yang baik, dan bahwa keterlambatan penerbitan seperti ini baru pertama kali terjadi setelah jurnal tersebut berjalan selama lima tahun.³³

³² Sjamsoedin, Pengoeroes, ... h. 78.

³³ Lihat Dewan Islam, edisi November 1938.

Demikianlah selintas gambaran tentang peranan dan kiprah Jamiat Khair dan Al-Washliyah dalam bidang pendidikan dan penerbitan yang mengalami pasang surut dalam perkembangannya.

D. Kesimpulan

Dari uraian tentang Jamiat Khair dan Al-Washliyah di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Al-Jami'at al-Khairiyah didirikan pada tanggal 17 Juli 1905. Anggotanya terdiri dari mayoritas orang-orang Arab dengan dua program utamanya adalah pendirian dan pembinaan sekolah tingkat dasar, dan pengiriman anak-anak muda ke Turki untuk melanjutkan pelajaran.

Jami'at Khair mendirikan sekolah dasar pada tahun 1905. Sekolah dasar ini bukanlah merupakan sekolah yang bersifat agama, namun bersifat umum. Di dalamnya diajarkan mata pelajaran berhitung, sejarah dan ilmu bumi. Sedangkan bahasa pengantarnya adalah bahasa Melayu, ditambah dengan bahasa Inggris sebagai bahan pelajaran wajib, menggantikan bahasa Belanda. Pelajaran diberikan dalam kelas yang telah terorganisir (sistem klasikal). Tampilnya Jami'atul Khair dalam gerakan pembaharuan pendidikan Islam terasa penting karena organisasi ini termasuk modern dan organisasi ini merupakan organisasi yang didirikan oleh orang yang bukan dari Belanda, akan tetapi seluruh kegiatannya diselenggarakan berdasarkan sistem Barat.

Sementara itu, tentang Al-Washliyah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama, bahwa heterogenitas penduduk Sumatera Timur memberi warna tersendiri bagi Al-Washliyah sebagai organisasi sosial keagamaan dan pendidikan. Dalam skala yang lebih luas, iklim tempat lahirnya secara alamiah memberi organisasi ini pelajaran berharga tentang berinteraksi dengan bermacam bangsa dan suku bangsa serta agama, khususnya Kristen.

Kedua. Al-Washliyah yang lahir pada saat bangsa Indonesia bersama negeri-negeri muslim lainnya berusaha memperjuangkan kemerdekaannya dipandang sebagai organisasi sosial pendidikan Islam pembaru yang bercorak moderat, artinya senantiasa berpegang kepada

prinsip mempertahankan nilai-nilai tradisional yang masih relevan dan mengambil pembaruan yang bernilai baik (*al-muhafadhah 'ala al-qadimi al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashwah*).

Ketiga, peranan dan kiprahnya di bidang pendidikan Islam terlihat pada berdirinya madrasah atau sekolah dengan sistem pendidikan tradisional modern, yaitu dengan memadukan antara pendidikan agama dan pendidikan umum secara komprehensif agar kelak anak didik mampu mengikuti perkembangan zaman. Di samping itu, keikutsertaannya dalam dunia pers dan penerbitan menunjukkan bahwa organisasi ini tidak ingin ketinggalan dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam pada Periode Klasik dan Pertengahan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004).
- Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1994).
- Chadijah Hasan, *Kajian Perbandingan Pendidikan*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995).
- Hasan Asari, *Modernisasi Islam: Tokoh gagasan dan Gerakan*, (Bandung Citapustaka Media, 2002).
- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996).
- Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).
- Hasan Asari, *Modernisasi Islam: Tokoh gagasan dan Gerakan*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2002).

- Jalaluddin, *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Karel A. Steenbrink, "Kata Pengantar," dalam Chadijah Hasanuddin, *Al-Washliyah: Api Dalam Sekam*, (Bandung: Pustaka, 1988),
- Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996).
- Mansur dan Mahfud Junaedi, *Rekonstruksi Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005).
- Muhammad Riwan Ibrahim Lubis, *Kepribadian Anggota dan Pengurus AL-WASHLIYAH*, (Jakarta : Pusat Pengembangan Sumber Daya & Dana Al-Washliyah, 1995).
- Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam, Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah sampai Indonesia* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009).
- Sudarno Shobron, *Studi Kemuhammadiyah, Kajian Historis, Ideologi dan Organisasi*, (Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-ilmu Dasar (LPID), Unmuh Surakarta, 2006).

BAB XI
Pendidikan Sekolah
(Kebijakan dan Sistim Persekolahan)

Oleh: Asikin Nor

A. Pendahuluan

Dengan nada pesimistik-negativistik Benni Setiawan menengarai bahwa proses pendidikan yang selama ini terjadi cenderung monoton, *indoktrinatif, teaching-centered, top-down*, sentralistik, mekanis, *verbalis*, kognitif, dan misi pendidikan yang mengalami *misleading*. Tidak mengherankan jika pendidikan sekarang merupakan “momok” yang amat menakutkan bagi peserta didik dan menjadikan lulusannya sebagai orang-orang yang siap melestarikan kebudayaan jelek dalam bangsa ini. Oleh karena itu, rekonstruksi dunia pendidikan harus segera dilakukan baik secara makro maupun mikro. Secara makro diwujudkan dengan memperbaiki sistim pendidikan nasional, sebagaimana disebut dengan pendidikan berbasis kompetensi. Karena itu, pendidikan diharapkan dapat memperoleh rumusan baru guna memperbaiki sistim yang tidak mendidik dan melenceng jauh dari makna pendidikan itu sendiri.¹ Secara mikro, rekonstruksi dapat dilakukan dengan mengubah sikap mental guru. Selama ini, sikap mental guru memang sudah jauh “melenceng” dari sikap mental yang mengacu pada sikap mental guru. Oleh karena itu, sikap mental guru sekarang ini harus segera dikembalikan kepada sikap mental yang sesuai dengan kompetensi guru. Sikap mental guru, yang diwujudkan dalam perilakunya, harus tetap mengacu pada tujuan pendidikan yang pada hakikatnya mengembangkan martabat kemanusiaan peserta didik. Tujuan pendidikan seperti ini hanya dapat dicapai oleh guru yang memiliki sikap mental tersebut.²

¹ Lihat Benni Setiawan. 2006. *Manifesto Pendidikan Di Indonesia*. Jogjakarta: Ar-Ruzz. Hlm. 65-66

² Benni Setiawan. 2006. *Manifesto Pendidikan Di Indonesia*. Jogjakarta: Ar-Ruzz. Hlm. 65-66

Selain rekonstruksi dunia pendidikan secara makro dan mikro, Mochtar Buchori juga menawarkan agar pendidikan nasional prospektif dalam menghadapi era global. Tawaran ini menurutnya didasari kenyataan bahwa sistem pendidikan nasional kurang mampu untuk mengantarkan generasi muda kepada kehidupan dalam zaman global. Maka membangun sistem pendidikan nasional menjadi lebih *antisipatoris*, lebih mampu untuk bekerja berdasarkan kebutuhan-kebutuhan masa depan.³

Tawaran rekonstruksi dunia pendidikan nasional baik makro maupun mikro dan gagasan tentang pendidikan nasional menjadi lebih *antisipatoris* menjadi solusi dari problem pendidikan nasional. Upaya menyambut tawaran secara realistik dan lebih masuk akal jika didasari oleh kebijakan Negara.

B. Kebijakan

Pendidikan yang berlangsung di negara manapun pasti mengacu kepada undang-undang dan kebijakan di mana negara itu berada. Tidak terkecuali Negara Republik Indonesia (RI). Pendidikan di RI ini merujuk kepada UUD 1945. Karena UUD 1945 ini mengalami perubahan karena amandemen, maka kebijakan pendidikannya mengarah kepada UUD 1945 dan perubahannya.

Menurut UUD 1945 Bab XIII Pendidikan dan kebudayaan Pasal 31 (1) Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (5) Pemerintah memajukan

³ Mochtar Buchori. 1995. *Transformasi Pendidikan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hlm. 198-199

ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.⁴

Pemerintah Orde Baru menetapkan kebijakan publik di bidang pendidikan berupa UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Kebijakan ini ditetapkan pada saat kebijakan publik tentang penyelenggaraan pembangunan menganut pola yang cenderung sentralistik, yaitu UU No. 5/1974.⁵ Seiring dengan pergantian kekuasaan dan pola penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan, pada tahun 2003 ditetapkan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai pengganti UU No 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas. Sebelum UU No 20/2003 ada kebijakan yang bersifat umum pasal 7 UU No. 22/1999 yang menyatakan bahwa pendidikan bukan kewenangan yang dipusatkan.

UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas, UU No. 20/2003 pasal 50, 51, dan 52 secara khusus mengatur tentang pengelolaan pendidikan di tingkat pusat dan daerah, yang menyatakan sifat desentralistik dari penyelenggaraan pembangunan pendidikan, UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XIV tentang Pengelolaan Pendidikan memberikan panduan perihal mekanisme desentralisasi penyelenggaraan pendidikan nasional yang pada pasal 50 dikemukakan sebagai berikut:

1. Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggungjawab menteri.

⁴ Redaksi Pers Media. 2011. *UUD '45 dan Perubahannya*. Disunting oleh Retno. Jakarta: Pers Media. Hlm. 75-76. Lihat juga *UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah RI No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar*. 2012. Jogjakarta: Laksana. Lihat juga *UU Guru & Dosen*. 2012. Bandung: Fokusindo Mandiri.

⁵ Riant Nugroho. 2008. *Kebijakan Pendidikan Yang Unggul*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 5

2. Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.
3. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.
4. Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.
5. Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.
6. Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.⁶

Kebijakan pendidikan pasca reformasi. *Pertama*, UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas pasal 49 (1) menetapkan alokasi dana pendidikan sekurang-kurangnya 20%, baik pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan pendidikan ini merupakan turunan dari kebijakan publik yang paling dasar, yaitu UUD 1945 amandemen keempat, pasal 31 (4). *Kedua*, UU No 20/2003 tentang Sisdiknas pasal 11 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara, dan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terlenggaranya pendidikan bagi setiap warga

⁶ Riant Nugroho. 2008. *Kebijakan Pendidikan Yang Unggul*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 7-8

Negara, khususnya yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun – yang dikenal sebagai Wajib Belajar 9 Tahun.⁷

C. Sistim Persekolahan

Sistim Ganda

Secara historis, ketika RI baru saja diproklamasikan sebagai sebuah Negara berdaulat penuh-merdeka maka tantangan terberatnya adalah menyelesaikan konflik sekuler-agama sebagai ciri sis¹⁰ pendidikan nasional. Kesulitan untuk sebagian dan sementara waktu terselesaikan dengan penerapan sistim ganda. Ini berarti bahwa model pendidikan sekuler yang dituntut oleh para pemimpin nasional sekuler didampingi oleh model pendidikan agamawi yang dituntut oleh para pemimpin Muslim. Kelak, model pertama ini dikenal sebagai pendidikan “umum”, yang dikelola oleh Departemen (sekarang Kementerian) Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan yang kedua dikenal sebagai pendidikan “agamawi” dikelola oleh Departemen Keagamaan (Depag).⁸

Perubahan yang paling signifikan dalam hal ini dibuat pada tahun 70-an, ketika Mendikbud, Menag, dan Mendagri mengeluarkan Keputusan Bersama yang dikenal sebagai Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Keputusan ini memberikan hak yang sama bagi lulusan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk memperoleh pendidikan universitas tetapi hanya dengan syarat bahwa kurikulum MAN disesuaikan dengan kurikulum SMA. Kurikulum MAN yang aslinya berisi 70% mata pelajaran agama dan 30% mata pelajaran umum, diganti dengan kurikulum yang terdiri atas 70% pelajaran umum dan 30% pelajaran

⁷ Lihat Riant Nugroho. Hlm 8-9

⁸ Muhammad Sirozi. 2004. *Politik Kebijakan Pendidikan Di Indonesia: Peran Tokoh-Tokoh Islam dalam Penyusunan UU No. 2/1989*. Diterjemahkan oleh Li D. Tedjasudhana dari *Politics of Educational Policy Production in Indonesia: A Case Study of The Roles of Muslim Leaders in the Establishment of the National Act of 1989*. Jakarta: INIS. Hlm. 40-41

agama. Perubahan kurikulum MAN lain yang signifikan terjadi pada 1994, ketika Depdikbud memperkenalkan kurikulum 1994, yang menjadikan lebih dari 80% kurikulum MAN sama dengan Kurikulum SMA, Jurusan Agama di MAN ditutup dan diganti dengan jurusan yang sama seperti SMA, yaitu jurusan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, dan jurusan Bahasa. Sejak kurikulum 1994, perbedaan antara MAN dan SMA hanyalah bahwa MAN diizinkan memberikan tujuh jam seminggu pelajaran agama sebagai kegiatan ekstra kurikuler, yang mencakup bahasa Arab, Alqur'an dan Hadis, dan Sejarah Peradaban Islam.⁹

*Kelembagaan, Program, dan Pengelolaan Pendidikan*¹⁰

Sistem pendidikan nasional diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta di bawah tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan menteri lainnya, seperti pendidikan agama oleh menteri agama, Akabri oleh menteri pertahanan dan keamanan. Juga departemen lainnya menyelenggarakan pendidikan yang disebut diklat.

Pembahasan selanjutnya mengenai penyelenggaraan pendidikan baik yang berada di bawah tanggung jawab menteri pendidikan dan kebudayaan maupun menteri yang lainnya sesuai kekhasannya.

Kelembagaan Pendidikan

Pendidikan nasional dilaksanakan melalui lembaga-lembaga pendidikan baik dalam bentuk sekolah maupun dalam bentuk kelompok belajar.

Berdasarkan UU RI No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program serta pengelolaan pendidikan.

Jalur Pendidikan

Penyelenggaraan Sisdiknas dilaksanakan melalui dua jalur yaitu, jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah yang sering disingkat dengan PLS.

Jalur Pendidikan Sekolah

Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan (pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sifatnya formal, diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan pemerintah, dan mempunyai keseragaman pola yang bersifat nasional.

Jalur Pendidikan Luar Sekolah

Jalur pendidikan luar sekolah (PLS) merupakan pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan, seperti kepramukaan, berbagai kursus, dan lain-lain. PLS memberikan kemungkinan perkembangan social, kultral seperti bahasa dan kesenian, keagamaan, dan keterampilan yang dapat dimanfaatkan oleh anggota masyarakat untuk mengembangkan dirinya dan membangun masyarakatnya.

Pendidikan luar sekolah sifatnya tidak formal dalam arti tidak ada keseragaman pola yang bersifat nasional. Modelnya sangat beragam. Dalam hubungan ini pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga yang fungsi utamanya menanamkan keyakinan agama, nilai budaya dan moral, serta keterampilan praktis.

⁹ Muhammad Sirozi. 2004. *Politik Kebijakan Pendidikan Di Indonesia: Peran Tokoh-Tokoh Islam dalam Penyusunan UU No. 2/1989*. Diterjemahkan oleh Lillian D. Tedjasudhana dari *Politics of Educational Policy Production in Indonesia: A Case Study of The Roles of Muslim Leaders in the Establishment of the Number 2 Act of 1989*. Jakarta: INIS. Hlm. 42-43

¹⁰ Lihat Umar Tirtarahardja & S. L. La Sulo. *Pengantar Pendidikan*. Edisi Revisi. Cet. II. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 263-278

Jenjang pendidikan

Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran (UU RI No. 2 Tahun 1989 Bab I, Pasal 1 Ayat 5).

Jalur pendidikan sekolah dilaksanakan secara berjenjang yang terdiri atas jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sebagai persiapan untuk memasuki pendidikan dasar diselenggarakan kelompok belajar yang disebut pendidikan prasekolah (UU RI No. Tahun 1989 Bab V, Pasal 2). Pendidikan prasekolah belum termasuk jenjang pendidikan formal, tetapi baru merupakan kelompok sepermainan yang menjembatani anak antara kehidupannya dalam keluarga dengan sekolah.

Jenjang Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar. Di samping itu juga berfungsi mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah. Oleh karena itu pendidikan dasar menyediakan kesempatan bagi seluruh warga Negara untuk memperoleh pendidikan yang bersifat dasar, dan tiap-tiap warga Negara diwajibkan menempuh pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. UU RI No. 2 Tahun 1989 menyatakan dasar dan wajib belajar pada pasal 14 ayat 1 bahwa, "warga Negara yang berumur 6 tahun berhak mengikuti pendidikan dasar", dan ayat 2 menyatakan bahwa, "warga Negara yang berumur 7 tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara sampai tamat." Dalam pengertian setara ini termasuk juga pendidikan luar biasa (PLB), pendidikan keagamaan dan/atau pendidikan luar sekolah.

Jenjang Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah yang lamanya tiga tahun sesudah pendidikan dasar, diselenggarakan di SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) atau satuan pendidikan yang sederajat. Pendidikan menengah dalam hubungan ke bawah berfungsi sebagai lanjutan dan perluasan pendidikan dasar, dan dalam hubungan ke atas mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan tinggi ataupun memasuki lapangan kerja.

Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum, pendidikan menengah kejuruan, dan pendidikan menengah luar biasa, pendidikan menengah kedinasan dan pendidikan menengah keagamaan.

Jenjang Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah, yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut lembaga pendidikan tinggi melaksanakan misi "Tridharma" pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam ruang lingkup tanah Indonesia sebagai kesatuan wilayah pendidikan nasional.

Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut perguruan tinggi yang dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institute, dan universitas.

Akademik merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan teknologi dan kesenian tertentu.

Politeknik merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.

Sekolah tinggi ialah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau professional dalam satu disiplin ilmu atau bidang tertentu.

Institut ialah perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau professional dalam sekelompok disiplin ilmu yang sejenis.

Universitas ialah perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau professional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu.

Satu perguruan tinggi dapat menyelenggarakan satu strata atau lebih. Strata dimaksud terdiri dari S0 (non strata) atau program diploma, lama belajarnya dua tahun (D2) atau tiga tahun (D3), juga disebut program nongelar. S1 (program strata satu) lama belajarnya empat tahun dengan gelar sarjana, S2 (program strata dua) atau program pasca sarjana lama belajarnya dua tahun setelah S1 dengan gelar magister, S3 (program strata tiga) atau program doktor lama belajarnya tiga tahun sesudah S2 dengan gelar doktor.

Di samping program diploma dan program sarjana, pendidikan tinggi (dalam hal ini LPTK atau Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) dapat juga menyelenggarakan program Akta mengajar yaitu Akta III setara dengan D3, Akta IV setara dengan D4, dan Akta V setara dengan sarjana plus sejumlah pengalaman.

Program dan Pengelolaan Pendidikan

Jenis Program Pendidikan

Seperti diketahui misi pendidikan lembaga sekolah ada tiga, yaitu (a) pendidikan kepribadian, (b) pendidikan kewarganegaraan, dan (c) pendidikan intelektual. Dalam hal pendidikan kepribadian,

sekolah membantu dan bekerja sama dengan keluarga dan lembaga agama. Dalam hal pendidikan kewarganegaraan, sekolah bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat. Dalam hal pendidikan intelektual, sekolah melakukan sendiri walaupun memperoleh bantuan dari lembaga lain sebab misi pendidikan intelektual adalah kekhususan sekolah, misi pendidikan intelektual tersebut dilakukan secara berangkaik sejak pembelajar memasuki Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi.¹¹

Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kekhususan tujuannya (UU RI No. 2 Tahun 1989 Bab I Pasal 1 Ayat 4 No. 2 Tahun 1989), terdiri atas:

- 1) Pendidikan umum, yang termasuk kelompok ini SD, SMP, SMA, dan Universitas
- 2) Pendidikan Kejuruan, yang termasuk kelompok ini STM, SMTK, SMIP, SMIK, dan SMEA.
- 3) Pendidikan Luar Biasa, yang termasuk pendidikan luar biasa adalah SDLB untuk jenjang pendidikan menengah masing-masing memiliki program khusus yaitu program untuk anak tuna netra, tuna rungu, dan tuna daksa serta tuna grahita. Untuk pengadaan gurunya disediakan SGPLB (Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa) setara dengan Diploma III.
- 4) Pendidikan Kedinasan, yang termasuk tingkat pendidikan menengah seperti SPK (Sekolah Perawat Kesehatan), dan pendidikan tinggi seperti APDN (Akademi Pemerintah Dalam Negeri).
- 5) Pendidikan Keagamaan. Pendidikan keagamaan dapat terdiri dari tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Yang termasuk di sini MI, MTs, MA dan yang tingkat pendidikan

¹¹ H. Hamzah B. Uno. 2011. *Profesi Kependidikan*. Cet. VIII. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm. 32

tinggi seperti theologia, IAIN, dan IHD (Institut Hindu Darma).

Kurikulum Program Pendidikan

Deskripsi pengertian kurikulum dari sejumlah sumber yaitu seperangkat mata pelajaran dan materi pelajaran yang terorganisir atau rencana kegiatan untuk menentukan pengajaran atau rencana untuk membelajarkan peserta didik atau pengalaman belajar.

Kaitan pembangunan nasional dengan kurikulum mengandung dua aspek:

- 1) Aspek kesatuan nasional, yaitu memuat unsur-unsur penyatuan bangsa.
- 2) Aspek lokal, yaitu memuat sifat-sifat kekhasan daerah, baik berupa unsur budaya, sosial maupun lingkungan alam, yang menghidupkan sifat kebhinekaan dan merupakan kekayaan nasional.

Kurikulum memberikan bekal pengetahuan, sikap, dan keterampilan kepada peserta didik.

Kurikulum Nasional

Tujuan pendidikan nasional dinyatakan di dalam UU RI No. 2 Tahun 1989 Pasal 3, yaitu:

- 1) Terwujudnya bangsa yang cerdas
- 2) Manusia yang utuh, beriman, dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Berbudi pekerti yang luhur.
- 4) Terampil dan berpengetahuan.
- 5) Sehat jasmani dan rohani.

6) Berkepribadian yang mantap dan mandiri.

7) Bertanggung jawab pada kemasyarakatan dan kebangsaan

Tujuan pendidikan nasional di atas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kurikulum masing-masing satuan pendidikan. Alur kaitan antara tujuan pendidikan nasional dengan tujuan satuan pendidikan adalah Filsafat/Dasar Negara → Tujuan Pendidikan Nasional → Tujuan Institusional → Tujuan Kurikuler → Tujuan Instuksional.

Dikatakan kurikulum nasional, jika memuat cirri-ciri:

- 1) Diberlakukan sama pada setiap macam satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
- 2) Ditetapkan oleh pemerintah (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau menteri lain atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen berdasarkan pelimpahan wewenang dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Tujuannya untuk menggalang kesatuan nasional dan pengendalian mutu pendidikan secara nasional.

Kurikulum Muatan Lokal

Kesungguhan pemerintah dalam merealisasikan pemikiran mengenai muatan lokal, yang dimulai pada sekolah dasar, diwujudkan dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0412/U/1987 Tanggal 11 Juli 1987 tentang Penerapan Muatan Lokal Sekolah Dasar. Kemudian disusul dengan penjabaran pelaksanaannya dalam keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 173/C/Kep/M/87 Tanggal 7 Oktober 1987.

Dalam lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dijelaskan bahwa muatan lokal adalah program pendidikan yang isi

dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah.

Tujuan muatan lokal dalam kurikulum SD dikaitkan dengan kepentingan nasional, maka muatan lokal dapat:

- 1) Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan yang khas daerah.
- 2) Mengubah nilai dan sikap masyarakat terhadap lingkungan ke arah yang positif

Ditinjau dari sudut peserta didik, muatan lokal dapat:

- 1) Meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap lingkungannya (lingkungan alam, sosial, dan budaya)
- 2) Mengakrabkan peserta didik dengan lingkungannya sehingga mereka tidak asing dengan lingkungannya.
- 3) Menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari untuk memecahkan masalah yang ditemukan di lingkungan sekitarnya.
- 4) Memanfaatkan sumber belajar yang kaya yang terdapat di lingkungannya.
- 5) Mempermudah peserta didik menyerap materi pelajaran.

D. Pendidikan berbasis masyarakat

Fenomena pendidikan di Indonesia unik. Keunikannya nampak dari bervariasinya lembaga pendidikan yang ada di Negara ini. Lembaga pendidikan yang ada, ada yang bersifat formal dan ada yang bersifat nonformal.

Khusus untuk pendidikan yang berbasis masyarakat yang berorientasi keagamaan, di tanah air ini mempunyai lembaga pendidikan yang diakui oleh pemerintah bahkan lembaga-lembaga

tersebut menjadi lembaga pendidikan yang dapat diandalkan dan dibanggakan. Di Jakarta lembaga pendidikan Islam yang terkenal adalah AL-AZHAR. Di Banjarmasin lembaga pendidikan Islam yang terkenal adalah lembaga pendidikan SABILAL MUHTADIN di lingkungan masjid Sabilal Muhtadin, UKHUWAH yang berada di perumahan komplek Bumi Handayani.

Untuk organisasi keagamaan NU, Muhammadiyah, Alwashliyah, mereka juga mempunyai lembaga pendidikan Islam. Ada TK NU, MI NU, SMP NU, SMK NU, SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, STAI Alwashliyah, dan lain-lain. Contoh-contoh lembaga pendidikan di atas merupakan gambaran betapa majemuknya dunia pendidikan Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia yang berkaitan dengan pendidikan Indonesia mengakomodasi lembaga-lembaga pendidikan berbasis masyarakat. Ada payung hukumnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tepatnya UU RI No. No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN¹²

Pasal 54:

- 1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- 2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Pasal 55:

¹² Lihat UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jogjakarta: Laksana. Hlm. 41-43

- 1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan social, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- 2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- 3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- 5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56:

- 1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
- 2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis.

- 3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- 4) Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- 5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Hemat penulis, pasal 54 (ayat 1 dan 2), pasal 55 (ayat 1-5) , pasal 56 (ayat 1-4) dari UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional merupakan payung hukum yang kuat dalam menaungi lembaga-lembaga pendidikan berbasis masyarakat.

E. Kesimpulan

Meskipun secara realitas dunia pendidikan di Indonesia mendapat sorotan kadang tajam akan tetapi pembenahan baik secara makro dan mikro tetap dilakukan oleh pemerintah. Mulai dari kebijakan-kebijakan yang tertuang melalui UUD 1945 yang diamandemen, UU RI, UU Guru & Dosen, serta Peraturan Pemerintah sampai kepada pembenahan sarana dan prasarana sekolah.

Berbicara sistim Pendidikan Nasional maka tidak terlepas dari beberapa hal di antaranya:

1. Adanya sistim ganda. Ini terkait adanya sekolah “umum” dan sekolah “agama”.

2. Kelembagaan pendidikan yang berbicara tentang jalur pendidikan (sekolah dan luar sekolah), jenjang sekolah (jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi).
3. Program pendidikan di dalamnya terdiri dari pendidikan umum, kejuruan, luar biasa, kedinasan dan keagamaan
4. Sementara kurikulum memuat kurikulum nasional dan muatan lokal.
5. UU RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan landasan legalitas pendidikan berbasis masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Benni Setiawan. 2006. *Manifesto Pendidikan Di Indonesia*. Jogjakarta: Ar-Ruzz.
- H. Hamzah B. Uno. 2011. *Profesi Kependidikan*. Cet. VIII. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mochtar Buchori. 1995. *Transformasi Pendidikan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Muhammad Sirozi. 2004. *Politik Kebijakan Pendidikan Di Indonesia: Peran Tokoh-Tokoh Islam dalam Penyusunan UU No. 2/1989*. Diterjemahkan oleh Lillian D. Tedjasudhana dari *Politics of Educational Policy Production in Indonesia: A Case Study of The Roles of Muslim Leaders in the Establishment of the Number 2 Act of 1989*. Jakarta: INIS.
- Redaksi Pers Media. 2011. *UUD '45 dan Perubahannya*. Disunting oleh Retno. Jakarta: Pers Media.
- Riant Nugroho. 2008. *Kebijakan Pendidikan Yang Unggul*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.